

SUARA DI BALIK PRAHARA

Berbagi Narasi
tentang Tragedi '65

“Kami selalu dipindahkan dan dipindahkan bagai kotoran yang berbau busuk, menjijikkan. Kami ditendang lalu dibuang. Agar hati kami tak lagi tenang. Demikian kira-kira jalan pemikiran penguasa saat itu terhadap kami para korban Tragedi '65.”

Al Capone (nama samaran), Korban

“Pokoknya situasi pada saat itu amat mengerikan. Sungguh. Saya sering merenung-renungkan dan bertanya, apakah begini ini perjalanan bangsa Indonesia?”

Dr. Sofyan Djaenuri (nama samaran), Saksi

Baskara T. Wardaya, SJ, *et. al.*

SUARA DI BALIK PRAHARA

Berbagi Narasi
tentang Tragedi 65



Suara di Balik Prahara; Berbagi Narasi tentang Tragedi '65

Penulis: Baskara T. Wardaya, SJ

Komisi Sejarah PUSdEP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta: Kiswondo, Tri Chandra Aprianto, Chandra Halim, Choirotun Chisaan, Y. Tri Subagya, G. Budi Subanar, Mohammad Subkhi Ridho, Monica Laksono, Dedy Kristanto, Darwin Awat, MM Ambarastuti

Penyunting: Antonius Sigit Suryanto

Perancang Sampul: Teguh Prastowo

Perancang Isi: Amir Hendarsah

Ilustrasi: diambil dari buku *Dari Kalong Sampai Pulau Buru* karya A. Gumelar Demokrasno

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan I, 2011

PENERBIT GALANGPRESS (Anggota IKAPI)

Jln. Mawar Tengah 72, Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 554985, 554986. Fax: (0274) 556086

Email: galangpress@galangpress.com

www.galangpress.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wardaya, Baskara T

Suara di Balik Prahara; Berbagi Narasi tentang Tragedi '65

Yogyakarta; Galangpress

Cet. I, 2011; 150 x 230 mm; 398 halaman

ISBN: 978-602-8174-63-3

I. Sejarah

II. Judul

III. Suryanto, Antonius Sigit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN GALANGPRESS

Jln. Mawar Tengah 72, Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 554985, 554986. Fax: (0274) 556086

Email: produksi.galang@galangpress.com

www.galangpress.com

Distributor Tunggal:

PT BUKU KITA

Jln. Kelapa Hijau No. 22 RT 006/03

Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta 12620

Telp. (021)7888 1850. Fax: (021)7888 1860

Email: marketingbukukita@gmail.com

www.distributorbukukita.com

*Untuk Para Saksi dan Survivor Tragedi '65
dan untuk Anda, pecinta Sejarah Indonesia*

Memulihkan Sejarah, Memulihkan Kehormatan Bangsa

Sebuah Pengantar

Ronnie Hatley¹

Banyak narasi sejarah membawa kita makin dekat kepada suatu kebenaran historis. Terutama jika narasi-narasi itu bicara mengenai masa lalu yang gelap, atau mengenai ingatan yang dipandang memalukan hingga harus dibungkam, diabaikan, bahkan dilupakan, termasuk dengan cara membohongi diri sendiri. Narasi-narasi semacam itu sangat diperlukan untuk menyoroti periode sejarah yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Buku kumpulan narasi yang diberi judul menarik yakni *Suara di Balik Prahara* ini penting, karena narasi-narasi yang ada di dalamnya bisa memperkaya pembaca dengan dimensi-dimensi pribadi dari malapetaka kekerasan massal yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia setelah tanggal 1 Oktober 1965 yang selama ini cenderung tersembunyi.

Sinar Terang

Narasi-narasi yang ada di dalam buku ini memperkuat cerita-cerita seputar Tragedi '65 yang selama ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Misalnya tentang pola-pola penderitaan yang dialami oleh para

1 Ronnie Hatley adalah sesepuh dan konsultan akademik PUSdEP. Setiap tahunnya ia bolak-balik antara Yogyakarta dan Idaho, Amerika Serikat.

korban; tentang prosedur penyiksaan yang dilakukan di kantor-kantor penahanan resmi; tentang penelanjangan para tahanan perempuan dengan dalih mencari cap palu arit di dekat alat vital mereka; tentang kerja paksa di tempat pembuangan; tentang pemiskinan dan penghinaan tanpa henti; atau tentang perlakuan terhadap para tahanan tanpa disertai sedikit pun rasa kemanusiaan.

Pada saat yang sama, narasi-narasi dalam buku ini juga menyuguhkan sejumlah keterangan baru. Misalnya saja berbagai keterangan yang disampaikan oleh orang-orang yang waktu itu merupakan saksi namun tidak menjadi korban, dan yang notabene selama lima dasawarsa nyaris bungkam seribu bahasa berkaitan dengan apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya. Misalnya juga tentang dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh para korban maupun masyarakat di tingkat bawah; tentang sebuah gudang yang penuh dengan tahanan yang di kala malam satu per satu penghuninya dijemput dan dihilangkan; tentang jenazah-jenazah yang mengapung di sungai; tentang sekolah-sekolah yang terpaksa tutup karena gurunya tidak ada; tentang sawah-sawah yang tak terurus karena para penggarapnya lenyap, dan sebagainya. Di tengah kisah seperti itu muncul pula keterangan-keterangan yang terasa mengharukan. Misalnya keterangan tentang kerelaan untuk melindungi para pelarian; tentang kesediaan untuk mengangkat anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu; atau tentang keberanian untuk menyembunyikan orang-orang yang sedang diburu. Selanjutnya ada pula keterangan mengenai mereka yang kemudian sadar bahwa yang menjadi korban dari Tragedi '65 itu sebenarnya bukan hanya mereka yang secara langsung menderita, melainkan juga hampir setiap warga masyarakat dan bangsa Indonesia, yang semuanya secara langsung maupun tak langsung telah terkena dampak dari peristiwa besar tersebut.

Dengan begitu, buku ini memberikan perspektif baru atas sejarah Indonesia dengan cara mengajak pembaca untuk melihat tidak hanya Tragedi '65 itu sendiri melainkan juga apa yang terjadi sebelum dan setelah terjadinya tragedi tersebut, tidak hanya dari kacamata para korban, melainkan juga dari kacamata saksi mata dengan latar belakang masing-masing. Bolehlah dikatakan, buku ini telah memberi semacam “sinar terang” pada bagian-bagian sejarah Indonesia yang selama ini terkesan gelap atau memang sengaja digelapkan.

Mendamaikan Kembali

Sinar terang yang diberikan melalui narasi-narasi yang ada dalam buku ini memperlihatkan pentingnya upaya penggalian sejarah melalui wawancara dengan para pengamat yang bukan merupakan korban langsung. Dari mereka, kita memperoleh keterangan-keterangan yang berguna untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berasal dari mereka yang telah menjadi korban langsung. Dengan cara demikian, kita lantas bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi saat itu.

Namun demikian, ada hal yang lebih penting lagi yang ada dalam buku ini selain soal kebenaran sejarah: adanya *pengakuan* bahwa pada tahun 1965 benar-benar telah terjadi suatu tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan, serta kerusuhan sosial yang skalanya massif. Pengakuan macam itu penting, karena ia merupakan langkah awal yang diperlukan untuk meninggalkan hasrat pengingkaran menuju penyembuhan luka-luka masa lalu demi terwujudnya rekonsiliasi sosial.

Sebagaimana kita ketahui, entah benar atau salah, suatu pemahaman sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan suatu masyarakat atau bangsa. Melalui narasi sejarah

yang benar, kita akan dapat belajar untuk terus memperbaiki diri dan meminimalisasi kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, suatu narasi sejarah yang dipalsukan akan melestarikan konflik dan melanggengkan pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu beserta dampaknya. Itulah sebabnya setiap kali kebenaran menyangkut Tragedi '65 tersibak, kita memperoleh kesempatan untuk secara baru merancang ulang masa depan kita.

Dalam kaitan dengan itu, semua kebenaran dan pengakuan yang terungkap melalui buku ini dapat mendorong kita untuk memikirkan kembali seberapa jauh lagi sebenarnya kita masih harus melangkah dalam upaya memulihkan sejarah maupun masa depan bersama. Salah satu cara untuk bisa mengetahui apakah kebenaran sejarah yang telah kita miliki ini sudah memadai atau belum adalah dengan cara membaca buku-buku seperti ini sambil menakar seberapa banyak pencerahan yang terkandung di dalamnya, lalu menghadapkannya dengan kesadaran akan apa yang masih perlu kita lakukan guna mendamaikan kembali perbedaan-perbedaan sosial yang muncul akibat terjadinya suatu peristiwa kekerasan di masa lalu.

Masa Depan Bersama

Setelah mengamati hasil kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dari puluhan negara, Audrey Chapman merangkum apa yang dia pandang merupakan langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan rekonsiliasi nasional pada masyarakat yang terpecah-pecah akibat dari terjadinya konflik dan kekerasan di masa lampau.² Menurut Chapman

2 Lihat Audrey Chapman, 'Conceptions of National or Political Reconciliation' dalam Raymond G. Helmick, SJ and Rodney L Petersen, *Forgiveness and Reconciliation: Religion, Public Policy and Conflict Transformation*, 2001: 265-68. Perlu dicatat bahwa di semua negara yang dia bahas pelaku utama kekerasan adalah negara. Hal serupa juga terjadi di Indonesia pada kasus 1965.

salah satu langkah pokok yang diperlukan adalah adanya pemahaman bersama bahwa sebagai sesama warga bangsa kita ini berbagi masa depan. Diperlukan kesadaran bersama bahwa kita ini saling berperan dalam menentukan masa depan satu sama lain.

Ia menyebut enam persyaratan yang diperlukan bagi terwujudnya suatu rekonsiliasi nasional:

Pertama, kebenaran. Perlu pemahaman yang jelas mengenai dimensi, penyebab dan pelaku atas konflik, kekerasan dan pelanggaran masa lalu yang mau dituntaskan. Supaya bisa melibatkan lebih banyak pihak, menurutnya, upaya ini perlu difasilitasi oleh suatu badan resmi.

Kedua, pengakuan. Yang dimaksud di sini terutama adalah pengakuan bersama secara terbuka atas segala penderitaan dan apa yang telah hilang (baik nyawa maupun harta) berkaitan dengan peristiwa masa lampau yang sedang dibahas. Kata Chapman, “*Mengetahui* dan *mengakui* itu merupakan dua hal yang berbeda. Pengakuan melalui suatu forum untuk saling mendengarkan kisah satu sama lain akan memberi kesempatan bagi munculnya berbagai ungkapan pengalaman dan perasaan, dan hal ini merupakan langkah awal menuju pemulihan martabat seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.”

Ketiga, kerelaan untuk melepaskan masa lalu dan menghilangkan hasrat untuk melakukan balas dendam. Yang dimaksud di sini adalah pentingnya para korban kekerasan melepaskan dendam (jika masih ada) untuk kemudian memberikan maaf kepada para pelaku. Sebagaimana para pelaku kekerasan dan penyebab kerugian perlu mengakui tanggung jawab moralnya dan menyatakan penyesalan supaya dapat memperoleh kembali martabat mereka sebagai manusia, para *survivors* dari pelanggaran dan kekerasan masa lalu juga

perlu melepaskan kekecewaan atas masa lalu dan melepaskan rasa dendam yang mungkin masih ada. Mereka perlu menunjukkan martabat kemanusiaannya kepada para pelaku ketidakadilan, sambil menyampaikan pengampunan kepada mereka.

Keempat, keadilan. Keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses rekonsiliasi. Ada berbagai macam pengertian tentang keadilan, tetapi yang dimaksud di sini adalah keadilan yang bersifat memulihkan atau *restorative justice*. Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan yang bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap apa yang telah direnggut di masa lalu dengan maksud untuk memperbaiki relasi-relasi yang ada sekarang dan di masa depan.

Kelima, komitmen untuk memulihkan relasi satu sama lain. Langkah ini bisa diawali dengan kesediaan para korban untuk memaafkan orang-orang yang di masa lalu telah melakukan kekerasan terhadap mereka. Hal ini misalnya ditempuh melalui upaya penyembuhan sosial serta kesediaan untuk hidup berdampingan antara para mantan korban dan mantan pelaku.

Keenam, upaya untuk membangun masa depan bersama. Seluruh warga masyarakat perlu untuk secara eksplisit menyampaikan syarat-syarat yang diperlukan dan disepakati bagi dibangunnya suatu masa depan bersama yang baru. Bila perlu disusun suatu perjanjian tertulis atau perundang-undangan yang menjamin diupayakan masa depan bersama yang lebih adil bagi semua pihak.

Kebenaran akan Muncul

Dengan bertolak dari sejumlah persyaratan yang diajukan oleh Chapman di atas tampak bahwa buku ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan pemahaman bersama mengenai dimensi, penyebab dan pelaku atas konflik, kekerasan dan pelanggaran hak-

hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, dalam hal ini atas Tragedi '65. Secara tidak langsung buku ini juga merupakan upaya untuk memberi kesempatan untuk melakukan “pengakuan” dan mengolah pengalaman bagi mereka yang waktu itu menjadi saksi, tetapi yang selama ini memilih untuk bersikap diam. Berkaitan dengan masalah martabat para korban, martabat para pelaku, maupun martabat para saksi, buku ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan martabat semua pihak yang terlibat. Buku ini berusaha untuk *nguwongke*³ mereka.

Narasi-narasi dari para korban yang diceritakan dalam buku ini menegaskan bahwa hampir semua korban sudah melepaskan masa lalu mereka, dalam arti tidak ingin lagi mempertahankan kekecewaan yang telah mereka alami di masa lalu. Banyak dari mereka bahkan tak lagi menyimpan rasa dendam. Menariknya, dari sekian banyak cerita pengalaman para *survivors*, kita jarang membaca ungkapan pengampunan secara eksplisit. Dalam kaitan dengan hal ini, kita perlu ingat bahwa suatu pengampunan mensyaratkan adanya pengakuan atas kesalahan yang terjadi sebelumnya. Dan tampaknya dalam kaitan dengan Tragedi '65 pengakuan resmi macam itu (kecuali yang pernah dilakukan oleh almarhum Presiden Gus Dur) belum ada.⁴ Yang ada justru keengganan umum untuk mengakui bahwa dalam Tragedi '65 telah terjadi pelanggaran HAM dan untuk menyatakan tanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut. Faktor inilah yang kiranya menjadi latar belakang tiadanya ungkapan pengampunan secara eksplisit itu.

3 *Nguwongke* (Jawa): memandang atau memperlakukan sebagai manusia atau secara manusiawi.

4 Kecualian lain adalah apa yang diusahakan oleh banyak orang muda NU (Nahdlatul Ulama) yang bergabung dalam LSM “Syarikat Indonesia” dalam mengusahakan rekonsiliasi pada tingkat akar rumput, khususnya di kalangan warga NU.

Salah satu persyaratan dasar bagi terwujudnya kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi dalam kaitan dengan Tragedi '65 adalah bahwa negara harus mengakui dalam tragedi itu telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi warga negara dan negara menyatakan diri bertanggung jawab atas hal itu. Sudah jamak diketahui bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965 itu hanya bisa terjadi karena ada koordinasi yang dilakukan oleh alat-alat negara. Dengan sangat jelas, misalnya, laporan penelitian berjudul *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengar Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965* yang disusun oleh KOMNAS PEREMPUAN (Jakarta: 2007) menunjukkan hal ini.⁵ Oleh karena itu di Indonesia, rekonsiliasi dan pemulihan hanya bisa terjadi kalau negara mau melibatkan diri di dalamnya.

Dalam buku ini kita bisa mendengarkan kesaksian para *survivor* bahwa di tingkat bawah upaya-upaya untuk melakukan rekonsiliasi telah lama dilakukan. Di berbagai tempat banyak *survivor* merasa telah diterima kembali dengan baik di antara tetangga dan di tengah keluarga. Namun demikian, kita juga bisa melihat bahwa masih ada banyak kasus di mana yang terjadi sama sekali bukanlah rekonsiliasi.

5 Laporan itu antara lain mendesak pemerintah RI supaya melakukan program reparasi nasional bagi korban Peristiwa 1965 dengan bertitik tolak pada Keputusan Majelis Umum PBB bulan Desember 2005 tentang penyelesaian dan reparasi untuk para korban pelanggaran HAM berat. Dikatakan dalam laporan itu antara lain bahwa “konsep reparasi termasuk hak atas *restitusi*, yaitu pengembalian kondisi korban pada situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, identitas, kehidupan berkeluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda; *kompensasi* untuk kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami; [mencegah] *berulangnya pelanggaran* lewat reformasi institusi; dan *hak atas kepuasan* (*right to satisfaction*) yang termasuk dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang—termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi, atau putusan judisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen” (Hlm. 176).

Masih ada banyak contoh yang menunjukkan belum terjadinya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh antara mantan korban dan mantan pelaku. Sementara itu perpecahan di tingkat keluarga yang terjadi akibat Tragedi '65 juga masih terus berlangsung. Banyak relasi personal maupun sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan Tragedi '65 sesungguhnya masih tetap didasarkan pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para korban tragedi kemanusiaan tersebut.

Buku ini juga mengingatkan bahwa kita membutuhkan lebih banyak lagi narasi-narasi seperti ini. Perlu diketahui, narasi-narasi para *survivor* Tragedi '65 tidak hanya perlu ditulis, melainkan juga perlu ditulis *secepatnya*. Mengapa? Karena sebagian besar para *survivor* itu sekarang sudah berusia lanjut, dan jumlah mereka makin lama makin sedikit. Sebagaimana ditunjukkan oleh buku ini pula, selain membutuhkan narasi dari para *survivor*, kita juga membutuhkan narasi orang-orang yang pada tahun 1965 menjadi saksi yang secara sadar mengikuti apa yang terjadi waktu itu namun yang selama ini memilih untuk tidak bersuara. Entah saksi itu memiliki empati atau tidak terhadap para korban, suaranya tetap perlu kita dengarkan.

Bagi mereka yang bergiat dalam menangani kasus-kasus Tragedi '65 ini perlu sadar bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan panjang. Orang-orang Amerika, misalnya, sampai sekarang masih bertentangan satu sama lain jika bicara tentang Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1860-an. Sementara itu di India, konflik seputar masalah kasta masih ada sekarang ini, meskipun hal itu sudah berlangsung ribuan tahun. Perlu disadari pula, suatu saat nanti tak akan ada lagi mantan korban Tragedi 65 yang masih hidup, dan oleh karena itu proses rekonsiliasi harus dilanjutkan oleh anak-cucu mereka. Untuk itu narasi-narasi tentang mereka juga perlu didengarkan dan dikumpulkan. Masa depan akan ditentukan oleh generasi baru ini.

Akhirnya perlu ditegaskan di sini bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peneliti muda dan para pejuang HAM yang terlibat dalam Komisi Sejarah PUSdEP bisa dijadikan model untuk mempercepat proses rekonsiliasi atas Tragedi '65. Berkat pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, para *survivor* maupun para saksi telah berani menyampaikan kepada kita banyak hal yang selama ini tersembunyi berkaitan dengan kekerasan tahun 1965.

Sementara rasa hormat yang tinggi perlu kita sampaikan kepada para korban yang selama bertahun-tahun telah dibungkam namun kini telah berani membuka suara, kita juga perlu memberi hormat kepada para saksi yang selama ini telah memilih untuk diam namun kini juga telah berani untuk bicara. Tak lupa, kita harus berterima kasih kepada para peneliti muda yang telah terlibat dalam penelitian untuk buku ini. Keberanian mereka perlu menjadi contoh bagi kita semua.

Berkat adanya buku ini, kebenaran historis tidak hanya bisa makin jelas bagi kita, melainkan juga ada kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi sosial makin terbuka. Semoga setiap upaya untuk memulihkan sejarah menjadi bagian dari upaya untuk memulihkan kehormatan bangsa ini. Ingat, betapa pun besar upaya untuk menutup-nutupinya, yang namanya kebenaran akan tetap muncul ke permukaan. *Truth will out!*[]

Menyimak Suara Terbungkam

Sebuah Pendahuluan

PADA umumnya suatu narasi sejarah tidak dibuat demi dirinya sendiri. Narasi sejarah dibuat demi tujuan-tujuan tertentu, termasuk tujuan-tujuan sosial, politis, atau yang lain. Itulah sebabnya hampir setiap kelompok masyarakat merasa perlu untuk menyampaikan sejarahnya dari satu generasi ke generasi lain. Sebagaimana dikatakan oleh Paul Thompson dalam buku *The Voice of the Past*, melalui sejarah masyarakat berusaha memahami apa yang bergerak dan berkembang di lingkungannya, baik secara sosial, politik, kultural maupun ekonomi. Suatu narasi sejarah, misalnya, diharapkan dapat membantu masyarakat semakin menyadari bahwa ternyata peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu tidak serta merta berhenti di masa lalu, melainkan tetap “hidup” dan mempengaruhi gerak dan cara berpikir masyarakat sekarang ini. Pengaruh itu mungkin akan terus berlanjut bahkan hingga ke waktu-waktu yang akan datang.⁶

Dalam menyampaikan narasi sejarah biasanya masyarakat menggunakan cara tertulis atau cara lisan, meskipun mungkin juga kombinasi antara keduanya. Sementara cara pertama menggunakan

6 Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History* (Oxford University Press, 2000), hlm. 1-2. Dalam istilah P. Swantoro, “masa lalu selalu aktual”. Lihat P. Swantoro, *Masa Lalu Selalu Aktual* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).

medium atau sarana tulis yang hasilnya bisa dibaca berulang-ulang, cara kedua mengandalkan penyampaian melalui tuturan langsung tanpa tulisan. Cara pertama biasanya banyak digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang sudah lama mengenal dan terbiasa dengan budaya tulis-menulis. Sementara itu cara kedua (lisan) bisa dengan mudah ditemukan dalam masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya tulis. Bisa juga di antara warga masyarakat yang untuk jangka waktu yang lama tersisihkan atau terbatas aksesnya terhadap sarana-sarana pendidikan modern.

Pada gilirannya baik medium tertulis maupun lisan akan berguna bagi sejarawan dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Dalam penelitian atau penulisannya, seorang sejarawan dapat menggunakan sumber-sumber tertulis maupun lisan yang datang dari masyarakat. Bagi para sejarawan, baik sumber-sumber tertulis maupun lisan penting dalam rangka studi dan penelitian sejarah-sebagai-ilmu maupun dalam rangka memahami dan menerangkan sejarah-sebagai-peristiwa. Dengan demikian, jika dikerjakan dengan baik, penulisan sejarah yang dasarnya adalah sumber-sumber lisan (sering disebut “sejarah lisan” begitu saja), dapat memperkaya tidak hanya penulisan sejarah itu sendiri, melainkan juga pemahaman akan masa lalu masyarakat atau bangsa dengan segala dinamikanya.

Makin Kuat

Salah satu keuntungan dari sejarah lisan adalah bahwa melaluinya, kita dapat memberi “ruang” yang lebih luas kepada orang-orang yang selama ini tidak mendapat cukup kesempatan untuk menarasikan sejarahnya, khususnya mereka yang berasal dari kelas bawah, mereka yang memiliki keterbatasan akses ke publik, maupun mereka yang

terlanjur dianggap “kalah” oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat.⁷ Sekaligus sejarah lisan memberi kesempatan kepada para sejarawan untuk menyampaikan pesan sosial sejarah dengan cara mendengarkan dan menarasikan ungkapan hati dan pikiran mereka. Lebih dari itu, sejarah lisan dapat menjadi semacam *alternatif* bagi narasi besar dan resmi yang diproduksi dan direproduksi oleh para penguasa dan yang untuk jangka waktu yang lama beredar luas serta dianut oleh sebagian besar warga masyarakat.⁸

Dengan mengangkat suara-suara dan dari masyarakat di lapisan bawah yang selama ini kurang terdengar atau bahkan terbungkam, cakupan penulisan sejarah menjadi lebih luas. Narasi sejarah tak lagi didominasi oleh suara elite, apalagi elite pemegang kekuasaan, melainkan terbuka terhadap berbagai pandangan dan dimensi yang berasal dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam kata-kata Paul Thompson disebutkan:

By introducing new evidence from the underside, by shifting the focus and opening new areas of inquiry, by challenging some of the assumptions and accepted judgements of historians, by bringing recognition to substantial groups of people who had been ignored, a cumulative process of transformation is set in motion... History becomes, to put it simply, more democratic.⁹

Sebagaimana sering terjadi, suatu kekuasaan yang bersifat totaliter cenderung merepresi ingatan-ingatan yang tidak sejalan dengan kepentingannya, termasuk ingatan-ingatan yang sifatnya personal, lokal, dan berasal dari para korban kekuasaan totaliter tersebut. Apa yang diinginkan oleh suatu rezim totaliter seperti itu adalah bahwa

7 Dominick LaCapra bahkan berani menyebut bahwa dalam hal ini suatu penulisan sejarah bisa berarti penulisan trauma yang dialami para subjek berikut posisi trauma dalam penulisan sejarah sosial. Lihat Dominick LaCapra, *Writing History, Writing Trauma* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001).

8 Thompson, hlm. 7.

9 Thompson, hlm. 1.

masyarakat hanya boleh mengingat narasi-narasi yang diizinkan oleh rezim untuk diingat.¹⁰

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa narasi sejarah resmi yang berasal dari kekuasaan totaliter seperti itu harus disingkirkan begitu saja. Ada unsur-unsur tertentu dalam narasi sejarah versi penguasa yang tetap perlu untuk dicermati karena unsur-unsur itu merupakan cerminan dari suatu realitas atau kepentingan tertentu. Sebagaimana sekarang makin disadari, setiap “teks” lahir dari “konteks” tertentu.¹¹ Demikian halnya teks-teks sejarah yang lahir dari para penguasa otoriter.

Itulah sebabnya suatu studi sejarah akan menjadi lebih menarik jika di dalamnya terkandung narasi-narasi baik yang disampaikan oleh para penguasa dengan segala kepentingannya, maupun oleh mereka yang berada di luar kepentingan kekuasaan itu, serta mereka yang telah menjadi *korban* dari kepentingan kekuasaan tersebut. Dengan memadukan bahan-bahan yang diperoleh secara lisan dari para korban serta mereka yang berada di luar lingkaran kepentingan kekuasaan dengan bahan-bahan yang berasal dari mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan diharapkan bahwa seorang sejarawan dapat melakukan rekonstruksi masa lalu secara lebih realistis dan lebih mendalam. Hal itu penting, mengingat bahwa yang namanya realitas itu bersifat multidimensional. Melalui sejarah lisan, seorang sejarawan dapat membantu menunjukkan multidimensionalitas dari realitas itu.¹²

10 Thompson, hlm. 4.

11 Untuk wacana tentang teks dan konteks dalam *Cultural Studies*, lihat Graeme Turner, *British Cultural Studies: An Introduction* (London and New York: Routledge), hlm. 81-121.

12 Thompson, hlm. 6.

Dalam kaitan dengan penulisan sejarah lisan yang berasal dari orang-orang di luar kepentingan kekuasaan, para pemikir besar seperti E.P. Thompson dan James Hinton sebenarnya merupakan perintis penulisan sejarah yang tidak bersumber pada elite kekuasaan. Namun demikian, keduanya masih mendasarkan karya-karya mereka pada dokumen-dokumen yang ditulis oleh para petugas yang digaji oleh pemerintah. Bahan-bahan yang mereka dapatkan belum benar-benar berasal dari hasil perjumpaan dan wawancara langsung dengan rakyat di lapisan bawah. Sekarang ini makin kuat desakan untuk menulis sejarah yang melibatkan sumber-sumber yang datang langsung dari warga masyarakat di lapisan akar rumput, khususnya yang diperoleh dengan secara langsung menemui dan mewawancarai mereka.

Ingatan

Perlu disadari, suatu proses penulisan sejarah lisan tidak hanya menguntungkan masyarakat atau pembaca pada umumnya. Proses penulisan sejarah lisan juga menguntungkan para sejarawan itu sendiri. Dengan mewawancarai narasumber, misalnya, seorang sejarawan didorong (baca: diberi kesempatan) untuk menjumpai dan bekerja sama secara langsung dengan orang lain, sehingga ia tidak hanya “asyik” bekerja sendirian di ruang tertutup ber-AC yang penuh dengan dokumen dan buku-buku rujukan. Melalui sejarah lisan, seorang sejarawan mendapat kesempatan untuk memperkaya pengalaman dalam hal relasi antar manusia (*human relationship*). Sekaligus dengan begitu, seorang sejarawan mendapat ruang untuk mendengarkan serta berbagi pengalaman dan pandangan dengan para narasumber sebagai sesama manusia (*sharing experience on a human level*). Artinya, seorang sejarawan dapat berelasi dengan orang lain bukan dalam konteks relasi antara seorang peneliti di satu sisi dan seorang terteliti di sisi lain, atau

relasi antara orang yang merasa diri lebih tahu dengan orang lain yang dianggap kurang tahu, melainkan dalam relasi antar sesama manusia yang posisinya sejajar, meskipun mungkin memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda.

Lebih dari itu, wawancara dalam rangka sejarah lisan dapat mempertemukan orang dari berbagai latar belakang sehingga mereka bisa berbincang satu sama lain secara langsung. Suatu kesempatan yang sulit terbangun jikalau tidak dalam rangka kepentingan penulisan sejarah lisan. Jadi, peneliti mungkin akan sulit untuk bertemu dan berbincang dengan banyak narasumber jika tanpa proses wawancara. Melalui wawancara dalam rangka penulisan sejarah lisan, seorang sejarawan dimungkinkan untuk berjumpa dengan orang-orang lain yang memiliki nilai-nilai atau pandangan yang berbeda dengan pandangan yang selama ini telah ia miliki, sehingga ia dapat terbantu untuk membuka atau memperbaharui cakrawala pandangnya sendiri.¹³

Itulah sebabnya seorang sejarawan perlu mengusahakan agar hubungan yang berlangsung antara dirinya sebagai seorang peneliti sejarah dan para narasumbernya, serta hubungan antara sejarah dan masyarakat, tidak merupakan suatu hubungan yang sifatnya linear atau searah, melainkan hubungan yang bersifat timbal-balik, dinamis, dialektik dan saling memperkaya. Dengan kata lain, karena menulis dengan semangat demikian dan menyusun studinya di seputar manusia-manusia konkret di lapangan, diharapkan bahwa seorang sejarawan akan dapat membantu manusia-manusia lain agar semakin menjadi manusia.¹⁴

13 Lihat Thompson, hlm. 12.

14 Thompson, hlm. 23-24.

Catatan demikian itu penting, mengingat bahwa seharusnya sejarah mampu mendorong seorang sejarawan (atau siapa pun juga) untuk secara kritis dan terus-menerus berpikir ulang atas pemahaman-pemahaman lamanya akan realitas, sekaligus mendorongnya untuk secara rutin melakukan perubahan, baik itu perubahan di tingkat individual, atau itu di tingkat sosial. Ditarik lebih jauh, dengan menulis sejarah yang melibatkan sumber-sumber yang diperoleh dari kalangan elite maupun yang didapat secara lisan dari kalangan bawah, seorang sejarawan mendorong orang lain maupun dirinya sendiri untuk tidak hanya melakukan renungan tentang dunia, melainkan untuk “mengubah” dunia.¹⁵

Salah satu unsur pokok dalam sejarah lisan tentu saja adalah apa yang disebut dengan “ingatan” atau *memory*, khususnya ingatan yang dimiliki oleh para narasumber yang merupakan subjek penelitian sejarah lisan. Ingatan yang dimiliki oleh para narasumber itu merupakan bahan utama yang diolah oleh sejarawan agar selanjutnya menghasilkan suatu narasi sejarah lisan. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa masalah ingatan dalam kaitannya dengan penelitian dan penulisan sejarah lisan bukanlah masalah yang ringan. Apalagi jika subjek penelitian dan penulisan itu adalah korban pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) yang ingatannya penuh dengan ingatan akan praktik-praktik kekerasan yang menyimpannya di masa lalu. Dalam banyak kasus, oleh para korban sejumlah unsur dari ingatan itu telah direpresi atau bahkan coba “dihapus” dari benak mereka. Alasannya bisa karena adanya desakan dari luar, bisa juga karena adanya desakan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Desakan dari diri sendiri itu muncul misalnya karena adanya rasa takut atau karena faktor-faktor yang lain.

15 Thompson, hlm. 22.

Ruang Relasi

Bertolak dari gagasan-gagasan di atas, jelaslah bahwa narasi-narasi sejarah yang ada dalam buku ini tidak dimaksudkan demi dirinya sendiri, melainkan demi tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah membantu masyarakat dalam memahami apa yang bergerak dan berkembang di sekitarnya, sekaligus menyadari bahwa banyak peristiwa yang terjadi di masa lalu itu tidak serta merta berhenti pada masa lalu itu, melainkan tetap “hidup” dan terus memiliki pengaruhnya hingga sekarang bahkan mungkin hingga ke masa-masa yang akan datang. Ada banyak narasi disuguhkan dalam buku ini, dan kebanyakan sumbernya adalah tuturan lisan dari para narasumbernya. Sebagian narasi berasal dari mereka yang telah menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu, yakni mereka yang menjadi *korban* Tragedi '65. Sebagian lagi berasal dari para *saksi*, yakni orang-orang yang bukan merupakan korban dari tragedi tersebut, meskipun mereka juga tidak termasuk dalam kalangan para pelaku. Dengan memadukan bahan-bahan yang diperoleh secara lisan dari kedua kelompok tersebut diharapkan buku ini dapat membantu Anda dan para pembaca lainnya agar mampu merekonstruksi masa lalu secara lebih realistik dan lebih lengkap. Sekali lagi, realitas itu multidimensional dan narasi sejarah yang berasal dari pihak-pihak yang berbeda diharapkan dapat membantu menangkap multidimensionalitas realitas itu.

Berkaitan dengan ingatan para narasumber sebagaimana telah kita singgung di atas, kita perlu bersyukur, mengingat bahwa sedikit banyak para narasumber yang ada dalam buku ini telah mampu mengatasi rasa takut seperti itu. Seperti dikatakan oleh Ronnie Hatley, di sini mereka berani untuk menghadirkan kembali ingatan mereka mengenai bermacam ketidakadilan dan kekerasan yang mereka alami di masa lampau. Mereka berani mengalahkannya rasa takut itu untuk

kemudian semampu mungkin menyampaikan apa yang dulu pernah mereka alami. Itulah sebabnya dalam arti tertentu, melalui buku ini, Anda diajak untuk “merayakan kemenangan ingatan”. Anda dan para pembaca lain diajak untuk bersama-sama mensyukuri fakta bahwa ingatan telah mengalahkan berbagai macam praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang bentuknya bisa berupa siksaan, hinaan, tuduhan, penahanan, dan pemenjaraan tanpa alasan yang jelas, ketidakpastian nasib, ingatan-ingatan palsu yang coba dipaksakan oleh penguasa, atau bermacam tindak lain yang bersifat represif. Di sini kita diajak untuk menyaksikan bahwa pada akhirnya ingatan itu menang. Bahkan lebih dari itu, karena dinarasikan dan ditulis untuk kalangan lebih luas, Anda diajak untuk terus berharap bahwa ingatan yang menang itu nantinya akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru, untuk selanjutnya melahirkan bibit-bibit kehidupan baru.

Sudah sejak semula, bagi para narasumber yang ada dalam buku ini (khususnya para mantan korban) yang namanya “ingatan” itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Di tengah penderitaan yang mereka alami waktu itu, mereka tetap mampu bertahan hidup atau *survive* karena mereka telah “diselamatkan” oleh ingatan mereka: ingatan akan orang-orang yang dekat di hati mereka, yang terpaksa mereka tinggalkan saat mereka ditangkap dan ditahan. Orang-orang itu bisa orangtua, anak, suami, istri, teman, tetangga, atau yang lain. Di balik ingatan akan orang-orang itu terkandung sebersit harapan bahwa jika mereka nanti bisa bebas kembali, mereka akan bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang telah mereka tinggalkan, tetapi yang tetap “hidup” dalam ingatan mereka itu.¹⁶

16 Luisa Passerini, “Introduction” dalam Luisa Paserini (ed.) *Memory and Totalitarianism* (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 2.

Sebagaimana sering kita sadari, bagi kita pun sebenarnya ingatan itu juga sangat penting artinya. Ingatan merupakan “alat” yang kita perlukan untuk memaknai berbagai peristiwa yang kita alami atau yang berlangsung di sekitar kita. Sekaligus ingatan juga penting bagi kita untuk memaknai orang-orang yang pernah, sedang dan akan kita jumpai dalam berbagai peristiwa hidup kita. Dengan kata lain, yang namanya ingatan pada prinsipnya bersifat relasional. Artinya, ingatan itu selalu terkait dengan orang lain—atau setidaknya dengan peristiwa yang kita alami bersama orang lain. Kaitan itu bisa dalam arti kaitan antar personal, antar kelompok, atau bahkan antar generasi. Mengutip Passerini:

After all, memory is the tool we have in order to give meaning to our lives, if we understand it in the sense of an inter-subjective (or inter-human) work that connects different generations, times, and places.¹⁷

Itulah sebabnya kita berharap bahwa ingatan yang mendasari narasi-narasi dalam buku ini akan bisa membantu menciptakan “ruang relasi” yang tidak hanya menyangkut relasi antara pembaca dengan para narasumber, melainkan juga relasi antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu generasi dengan generasi lain. Misalnya antara generasi mereka yang hidup pada tahun 1960-an dengan generasi-generasi yang lahir jauh setelahnya.

Berpikir Kritis

Dalam kaitan dengan sejarah Indonesia, pentingya mengolah ingatan akan masa lalu itu terasa mendesak, mengingat bahwa sejak pertengahan 1960-an hingga beberapa dekade berikutnya masyarakat berada di bawah sistem pemerintahan yang totaliter, yang ingin mengontrol hampir semua aspek kehidupan rakyatnya. Itulah yang terjadi selama pemerintah Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Oleh

17 Passerini, hlm. 3.

pemerintah tersebut tidak hanya kebebasan politik dan ekonomi rakyat yang mau dikontrolnya, melainkan juga ingatan masyarakat akan masa lalu atau sejarahnya. Pemerintah rajin mengeluarkan buku-buku sejarah, tetapi pada saat yang sama dengan keras melarang dan mengawasi buku-buku sejarah yang bertolak dari sudut pandang yang berbeda, khususnya yang bertolak dari sudut pandang masyarakat. Persis seperti yang dikatakan oleh Luisia Passerini dalam buku *Memory and Totalitarianism*, totalitarianisme ternyata tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang-bidang lain, termasuk mentalitas, bahasa, ekspresi kultural dan ingatan masa silam. Totalitarianisme menekankan keseragaman, membatasi kebebasan berekspresi dan mendesakkan pentingnya kegiatan mengulangi dan meniru.¹⁸

Menariknya, bahkan setelah Orde Baru yang totaliter itu tumbang pada tahun 1998, upaya kontrol dan dominasi terhadap ingatan masyarakat akan masa lalu tidak dengan sendirinya berhenti. Meskipun untuk sementara waktu sempat ada kelonggaran, pelan-pelan upaya-upaya totalitarian itu muncul lagi. Buku-buku sejarah yang mendukung narasi resmi yang menguntungkan kepentingan kekuasaan boleh beredar secara leluasa, namun buku-buku teks yang berusaha menolak distorsi-distorsi historis yang ada, dilarang atau bahkan dibakar.

Berhadapan dengan situasi demikian makin perlulah dilakukan berbagai penelitian dan penulisan sejarah yang tujuannya lebih luas daripada sekadar melanggengkan suatu kepentingan kekuasaan dengan cara mengontrol pikiran masyarakat. Makin mendesak untuk dilakukan penelitian dan penulisan sejarah yang justru dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berpikir secara lebih kritis; untuk

18 Passerini, hlm. 8.

mampu memahami masa lalu secara lebih menyeluruh; dan untuk semakin terbuka terhadap suara-suara dari mereka yang selama ini terbungkam atau tidak terdengar suaranya. Dengan begitu narasi sejarah tidak akan lagi didominasi oleh narasi sejarah resmi yang diproduksi dan direproduksi oleh elite kekuasaan, melainkan terbuka terhadap partisipasi masyarakat seluas mungkin. Di sinilah antara lain terletak pentingnya penelitian dan penulisan sejarah lisan.

Selanjutnya, bertolak dari gagasan seperti itu pulalah narasi-narasi yang disuguhkan dalam buku ini menjadi penting. Melalui buku ini, Anda disuguhi narasi-narasi tentang apa yang terjadi di pertengahan tahun 1960-an, tetapi yang tidak berasal dari elite kekuasaan, melainkan dari kalangan di luar elite kekuasaan, termasuk mereka yang telah menjadi korban dari elite kekuasaan tersebut.

Tentu saja narasi-narasi itu tidak harus sepenuhnya diterima. Tidak perlu semuanya diterima mentah-mentah. Mengingat bahwa narasi-narasi yang disampaikan dalam buku ini dasarnya adalah ingatan personal, sangat mungkin ada hal-hal tertentu yang ditekankan, dan ada hal-hal lain yang kurang mendapat tekanan; ada peristiwa-peristiwa tertentu yang diingat, tetapi ada juga yang mungkin terlupakan; demikian seterusnya. Sangat mungkin pula bahwa ketika harus memaknai pengalaman masa lalu itu para narasumber memberikan pesan-pesan moral tertentu (*moralizing the narrative*) yang dasarnya adalah pandangan atau penilaian pribadi yang sangat subjektif.

Semua itu tentu wajar, mengingat bahwa yang diinginkan dari paparan atas narasi-narasi yang ada dalam buku ini bukanlah munculnya sikap hitam-putih untuk menerima atau menolak, untuk mendukung atau melawan. Yang diharapkan adalah kesadaran bahwa entah kita menerima atau menolaknya, hendaknya narasi-narasi yang ada di sini akan bisa merangsang kita untuk berpikir kritis dan

selanjutnya mendorong kita untuk menyampaikan narasi-narasi kita sendiri.

Ternyata Tidak Sesuai

Dengan bertumpu pada pengertian di atas, diharapkan kita akan bisa melihat secara lebih utuh sejarah seputar Tragedi Kemanusiaan 1965, serta bagaimana selama ini sejarah tentang tragedi itu dinarasikan dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini penting mengingat bahwa, sebagaimana telah kita singgung, untuk jangka waktu yang lama—tepatnya selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru—narasi yang secara dominan beredar di masyarakat adalah narasi yang diproduksi pemerintah tersebut guna menunjang kepentingan-kepentingannya sendiri. Sementara itu narasi yang berasal dari masyarakat—khususnya mereka yang dianggap “kalah” dan karena itu dianggap “bersalah”—jarang kita dengar.

Seperti banyak diketahui, menurut narasi resmi Orde Baru apa yang terjadi adalah sebuah proses linear sebab-akibat yang terkesan kronologis, masuk akal, dan sepertinya bisa diterima begitu saja. Dikatakan misalnya, pada tanggal 1 Oktober 1965 tujuh orang Jenderal diculik dan dibunuh oleh Gerakan Tiga Puluh September yang dimotori oleh sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah penculikan dan pembunuhan itu mayat para Jenderal dibawa ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Di sana, masih menurut narasi tersebut, mayat para korban disayat-sayat oleh sejumlah perempuan anggota sebuah organisasi perempuan bernama “Gerakan Wanita Indonesia” yang sangat keji dan berada di luar batas-batas kemanusiaan. Para perempuan itu “menyilet-nyilet” mayat para korban sambil menari-nari secara erotis dalam sebuah tarian ritual yang katanya disebut “tari harum bunga”. Setelah itu mayat para

korban dimasukkan ke dalam sebuah lobang sumur, yakni di “lubang buaya”.¹⁹

Narasi resmi yang coba dibangun saat itu dicari dukungannya lewat media massa. Melalui koran *Angkatan Bersendjata* (yang dekat dengan para penguasa militer saat itu) edisi 11 Oktober 1965, misalnya, dikatakan bahwa mata para korban penculikan itu “dicongkel” dengan alat tertentu, sementara kemaluan mereka dipotong-potong. Disampaikan melalui harian tersebut: “... sukarelawan-sukarelawan Gerwani telah bermain-main dengan para Jenderal, dengan menggosok-gosokkan kemaluan mereka ke kemaluan sendiri...” Pada hari berikutnya 12 Oktober 1965, melalui koran *Duta Masyarakat*, yang dimiliki oleh lembaga keagamaan tertentu, dikatakan: “... menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari-nari telanjang di depan korban-korban mereka.”²⁰ Tidak diterangkan siapa dan bagaimana identitas “sumber yang dapat dipercaya” itu.

Masih menurut narasi para (calon) penguasa saat itu, karena kekejaman-kekejaman seperti itu, akhirnya rakyat marah dan melakukan balas dendam kepada para anggota PKI di seluruh Indonesia. Ada ribuan orang tewas dalam tindak balas dendam yang berwujud pembunuhan massal ini, tetapi menurut narasi tersebut hal itu merupakan tindakan yang sudah sewajarnya, sebab prinsip yang berlaku waktu itu adalah “membunuh atau dibunuh”. Artinya, kalau seseorang tidak membunuh anggota PKI, merekalah yang akan dibunuh oleh PKI. Setelah pembunuhan selesai, rezim penguasa negeri

19 Kadang orang mengira bahwa “lubang buaya” adalah nama sumur, padahal sebenarnya itu adalah nama sebuah wilayah geografis.

20 Komnas Perempuan, *Kejahatan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007), hlm. 9. Tentang Tragedi '65 dalam kaitannya dengan penghancuran gerakan perempuan di Indonesia lihat Saskia E. Weiringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galangpress, 2010).

yang baru, yakni pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan kepada orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI yang masih hidup. Mereka ini ditahan di penjara-penjara lokal maupun nasional. Banyak perempuan anggota Gerwani juga ditahan dan dipenjarakan.

Selanjutnya, mengingat bahwa orang-orang yang ditahan itu menurut narasi para penguasa waktu itu merupakan anggota PKI, sedang PKI merupakan “pengkhianat” negara, maka setelah keluar dari penjara pun mereka harus tetap diawasi, dicurigai, dilabeli dengan cap-camp negatif tertentu, dan kalau perlu terus dipersulit dan dikucilkan. Kartu Tanda Pengenal (KTP) mereka pun perlu diberi kode khusus “ET”, singkatan dari “Eks Tapol”. Kode itu dibutuhkan oleh rezim Orde Baru untuk menunjukkan bahwa pemegangnya merupakan mantan Tahanan Politik, dan oleh karena itu harus diawasi secara khusus. Selama pemerintahannya, para penguasa Orde Baru di satu pihak mengklaim diri bahwa mereka telah “sukses” menghancurkan PKI sampai ke akar-akarnya (caranya antara lain adalah dengan tindak pembunuhan dan pemencaraan massal itu tadi), namun di lain pihak menyatakan kepada rakyat untuk selalu waspada karena menurut mereka bahaya PKI “tetap ada” dan merupakan “bahaya laten” bagi bangsa Indonesia. Kontradiktif, memang.

Tanpa harus mengatakan paparan macam itu benar atau salah, terhadap narasi seperti itu ada sejumlah hal yang kiranya bisa (dan patut) dikaji lebih lanjut, mungkin bahkan dipertanyakan kembali. Misalnya, berkaitan dengan masih belum jelasnya siapa sebenarnya orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap Gerakan Tiga Puluh September. Bagaimana dengan kenyataan bahwa ketiga pemimpin Gerakan Tiga Puluh September—yakni Letnan Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latief, dan Brigadir Jenderal Soepardjo—



Dalam Tragedi '65 banyak perempuan ditahan dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan yang semestinya (Ist.)

adalah personil militer dan tidak pernah secara resmi menjadi anggota partai politik mana pun? Bagaimana dengan kesaksian Letnan Kolonel Abdul Latief sebagai salah seorang pemimpin Gerakan Tiga Puluh September bahwa ia telah memberi laporan kepada Jenderal Soeharto tentang rencana-rencana Gerakan Tiga Puluh September yang turut ia pimpin sebelum penculikan para Jenderal terjadi?²¹

Mengapa pula meskipun tahu bahwa di ibukota Jakarta akan terjadi peristiwa besar, Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad tidak melapor kepada pimpinannya, yakni Jendral A. Yani atau kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI yakni Presiden Sukarno? Bagaimana dengan kemungkinan bahwa konteks

21 A. Latief, *Pledoi A. Latief: Soeharto Terlibat G30S* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000), hlm. 31-33.

internasional, khususnya dinamika Perang Dingin, turut menjadi latar belakang terjadinya Tragedi '65? Bagaimana pula dengan laporan tentang “penyayat-nyayatan” dengan silet atas jenazah para korban yang ternyata tidak sesuai dengan hasil *visum et repertum* yang dicatat dan dilaporkan oleh tim dokter resmi dari Universitas Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan otopsi? Padahal pemberitaan dan narasi resmi tentang penyayat-nyayatan jenazah para korban itu telah terlanjur menjadi penyulut bagi terjadinya histeria pembunuhan dan pemenjaraan massal 1965.²²

Ruang Belajar yang Terbuka

Sebagaimana kita tahu, tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 sebenarnya ada dua peristiwa yang tak terpisahkan namun dapat dibedakan. Peristiwa *pertama* adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari di Jakarta. Peristiwa *kedua* adalah peristiwa pembantaian massal yang mulai terjadi di Jawa Tengah pada pekan ketiga bulan Oktober 1965, yang berlanjut pada bulan November 1965 di Jawa Timur dan pada bulan Desember 1965 di Bali. Dalam peristiwa *pertama* korbannya adalah tujuh perwira tinggi militer yang semuanya tinggal di Jakarta. Dalam peristiwa *kedua* korbannya adalah ratusan ribu warga sipil yang tinggalnya tersebar di berbagai tempat di tanah air.²³ Ada sekitar

22 Mengenai Gerakan Tiga Puluh September sebagai dalih dari pembunuhan dan pemenjaraan massal pada tahun 1965 dan sesudahnya, lihat John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008).

23 Pembahasan tentang pembunuhan di Jawa dan Bali berkaitan dengan Tragedi 65 dari berbagai sudut pandang (militer, jurnalistik, peneliti asing, dsb) dapat dilihat di Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa, cetakan kelima September 2004).

tiga minggu jarak antara terjadinya *peristiwa pertama* dan terjadinya *peristiwa kedua*.

Jika narasi resmi para penguasa pada waktu itu banyak memberi keterangan mengenai peristiwa 1 Oktober 1965 (yakni *peristiwa pertama*), bagaimana dengan narasi atau keterangan tentang apa yang terjadi sejak pekan ketiga bulan Oktober 1965 (yakni *peristiwa kedua*)? Padahal peristiwa kedua ini korbannya tidak sedikit, yakni setengah juta nyawa rakyat Indonesia. Belum jelas diterangkan misalnya, jika pembunuhan massal itu merupakan tindakan “balas dendam spontan” masyarakat atas apa yang terjadi di Jakarta serta (konon) atas “penyayatnyayatan” tubuh para korban di kompleks Bandar Udara Halim Perdanakusuma, mengapa pembunuhan massal tersebut terjadinya *secara bergelombang*? Pada bulan Oktober 1965 pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, pada bulan November di Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Bali. Mengapa pula di Jawa Barat justru tidak terjadi pembantaian massal? Padahal geografis Jawa Barat jauh lebih dekat dengan ibukota Jakarta daripada daerah-daerah lain.

Perlu dijawab pula pertanyaan mengenai bagaimana dengan para korban di berbagai tempat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara, tetapi tanpa terlebih dahulu dibuktikan salah atau benarnya di pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum. Jika yang bersalah adalah Partai Komunis Indonesia, mengapa banyak pendukung Presiden Sukarno ikut ditangkap dan ditahan? Lihat, misalnya para menteri yang ditangkapi pada tanggal 18 Maret 1966 atas perintah Jenderal Soeharto. Mereka ini adalah para menteri negara dan *bukan* anggota Partai Komunis Indonesia, apalagi terlibat dengan penculikan para Jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965. Bagaimana menjustifikasi penangkapan dan pemenjaraan atas seseorang hanya karena namanya sama dengan

orang yang dicari, tetapi tidak ditemukan, sebagaimana yang dialami oleh salah seorang narasumber dalam buku ini? Bagaimana dengan orang-orang yang dituduh sebagai “pentolan” atau “gembong” partai komunis padahal saat ditangkap saat usia mereka baru belasan tahun? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa yang patut diajukan.

Dengan kata lain, berkaitan dengan Tragedi '65—entah itu Peristiwa 1 Oktober yang telah menewaskan tujuh orang perwira militer yang sangat kita hormati, maupun peristiwa pembunuhan massal atas rakyat kecil yang terjadi mulai pekan ketiga Oktober 1965—ada banyak pertanyaan tersisa yang belum terjawab. Apalagi jika kita hanya mengandalkan narasi resmi dari penguasa Orde Baru dengan segala kepentingannya. Sekali lagi tanpa mengatakan apakah narasi Orde Baru itu benar atau salah, narasi seperti itu perlu dicermati secara kritis dan perlu disandingkan dengan narasi-narasi lain tentang hal yang sama. Narasi-narasi lain itu bisa berasal dari para peneliti



Peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 telah mendorong Jend. Soeharto untuk mengambil sejumlah tindakan militer tertentu (Ist.)

profesional yang independen (misalnya para sejarawan), namun juga bisa berasal dari masyarakat di luar lingkaran kekuasaan, dari para saksi sejarah, atau bahkan dari para korban tragedi kemanusiaan 1965 itu sendiri.

Dengan begitu diharapkan bahwa peristiwa kemanusiaan yang sangat dahsyat yang terjadi pada pertengahan dekade 1960-an itu bisa tampak lebih menyeluruh dan dapat menjadi “ruang belajar” yang terbuka bagi siapa pun dalam rangka menimba pengalaman dari perjalanan kolektif bangsa yang kita cintai bersama ini.

Mengingat dan Mengolah

Gagasan-gagasan di atas mendorong diadakannya buku yang kini berada di tangan Anda ini. Sadar akan masih banyaknya pertanyaan yang belum terjawab tentang Tragedi '65 jika narasi yang ada hanyalah narasi resmi, buku ini ingin mengajak Anda untuk membuka diri terhadap narasi-narasi lain tentang peristiwa besar tersebut. Tentu saja semuanya harus dilihat dengan pikiran kritis dan kehendak untuk belajar bersama secara maksimal. Ada banyak buku lain yang nadanya sama dan mengajak untuk melakukan hal serupa.²⁴

Yang kiranya agak khusus dari buku ini adalah upaya untuk menyampaikan narasi-narasi alternatif tentang Tragedi '65 yang berasal

24 Lihat misalnya HD. Haryo Sasongko (Penyusun) dan Melani Budianta (Penyunting), *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Jakarta: Amanah-Lontar, 2003); John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (ed.), *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban '65, Esai-esai Sejarah Lisan* (Jakarta: Elsam, 2004); Hersri Setiawan, *Kidung Untuk Korban: Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala* (Surakarta: Pakorba Sala, 2006); dan Ita F. Nadia, *Suara Perempuan Korban Tragedi '65* (Yogyakarta: Galangpress, 2009). Dalam kaitan korban Tragedi '65 dari sudut pandang jender, bisa dilihat misalnya Komnas Perempuan, *Kejahatan Berbasis Jender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

dari dua kelompok yang berbeda. Yang satu adalah kelompok *korban*, dan yang lain adalah kelompok *saksi*. Yang dimaksud dengan korban di sini adalah mereka yang ketika Tragedi '65 terjadi secara pribadi dan langsung mereka mengalami dampaknya. Mereka ditangkap, dipenjara, dan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Ada yang waktu itu posisinya sebagai aktivis pembela petani, ada yang mahasiswa biasa, ada yang anak desa belasan tahun yang sedang mengasuh adiknya. Ada pula seorang siswi Sekolah Dasar yang pada tahun 1965 tidak tahu-menahu tentang politik dan memang tidak pernah ditangkap, tetapi kemudian harus banyak menderita hanya karena ayah dan suaminya adalah mantan Tahanan Politik.

Yang dimaksud dengan kelompok saksi di sini adalah mereka yang dalam Tragedi '65 melihat secara sadar apa yang berlangsung di sekitarnya, tetapi tidak terlibat dalam aksi kekerasan apa pun. Mereka bukan pelaku, tetapi ketika peristiwa itu terjadi mereka juga tidak sedang sibuk mempertaruhkan diri untuk membela para korban. Mereka ini ikut menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri apa yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah Tragedi '65, tetapi mereka tidak terlibat dalam histeria pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi saat itu. Posisi mereka bisa dikatakan "netral", mirip dengan posisi seorang "pengamat" dalam sebuah peristiwa.

Apa yang disampaikan oleh para saksi dalam buku ini menarik, karena selain kesaksian atas apa yang mereka lihat atau dengar, di sini mereka juga menyampaikan bagaimana secara pribadi masing-masing menanggapi, menganalisis, dan memaknai apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Selain itu, mereka juga menyampaikan refleksi mereka tentang apa yang pada waktu, sekaligus tentang apa yang mereka lihat sekarang, ketika Tragedi '65 telah menjadi peristiwa masa silam, tetapi yang tetap saja menjadi bahan wacana publik.

Dengan sengaja buku ini terlebih dahulu mengajak Anda “menjumpai” para saksi melalui narasi-narasi mereka. Maksudnya adalah agar Anda bisa mendengarkan dan memiliki gambaran yang lebih luas tentang apa yang terjadi waktu itu, setidaknya dari sudut pandang mereka. Untuk itu dengan sengaja pula para narasumber diambil dari kalangan-kalangan yang berbeda. Ada narasumber yang berasal dari kalangan Militer, ada dari kalangan Muslim, ada dari kalangan Katolik, dari kalangan Tionghoa, dan ada pula yang berasal dari kalangan pemeluk Kejawan. Sama sekali tidak dimaksudkan dalam buku ini bahwa para narasumber itu mewakili kalangan atau kelompok masing-masing. Mereka diminta menjadi narasumber hanya karena “kebetulan” mereka berasal dari kelompok tertentu. Pada saat yang sama harus diakui, akan kelihatan bahwa keanggotaan mereka dalam kelompok-kelompok itu memiliki pengaruh atas cara pandang mereka mengenai Tragedi '65, baik sebelum, selama, maupun setelah peristiwa tersebut terjadi.

Baru setelah mengikuti narasi dari para saksi itu Anda akan diajak menemui para narasumber yang adalah korban dari Tragedi '65. Tujuannya adalah agar Anda berkesempatan untuk mendengarkan narasi mereka yang telah menjadi korban langsung dari salah satu tragedi kemanusiaan terbesar (di luar perang) pada abad 20 itu. Salah satu hal penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa para narasumber itu merasa bersyukur, karena meskipun telah menjadi korban kekejaman yang luar biasa mereka telah mampu *survive* sehingga masih bisa menuturkan apa yang mereka alami itu kepada Anda. Mereka sadar, pada satu sisi mereka memang telah berhasil untuk bertahan hidup, tetapi pada sisi lain ada ratusan ribu orang-orang seperti mereka yang terpaksa gugur sebelum waktunya. Orang-orang itu ada yang mendadak tewas bersimbah darah di tengah brutalnya sebuah rezim

kekuasaan terhadap bangsanya sendiri. Ada pula yang menjadi gila atau memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan terhadap siksaan dan derita yang mereka alami dalam tahanan Orde Baru. Tentu saja banyak pula para *survivors* yang telah selamat dari itu semua namun kini telah tiada karena telah dipanggil kembali untuk menghadap Sang Pencipta, mendahului kita semua.

Penuh Harapan

Sebagaimana akan Anda lihat, dari sudut pandang sejumlah saksi, Tragedi '65 merupakan kulminasi atau puncak dari ketegangan-ketegangan politik yang telah berlangsung sebelumnya. Kehidupan di kampus-kampus yang pada awal tahun 1960-an biasa-biasa saja, pada pertengahan dekade itu mulai diwarnai dengan ketegangan-ketegangan. Demikian juga yang terjadi di masyarakat di luar kampus, seperti misalnya di Kotagede, Yogyakarta. Namun demikian, sebagaimana diuraikan oleh para narasumber kita dari kalangan saksi, ketegangan itu tidak berarti ketegangan fisik. Ketegangan yang ada lebih melibatkan ketegangan-ketegangan psikologis, misalnya saling bersaing dalam pemilihan anggota Senat Mahasiswa atau dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan politik di kampung.

Di antara para narasumber dari kelompok saksi ada yang bisa menerangkannya secara umum dalam konteks politik nasional, namun ada pula yang hanya bisa terheran-heran mengapa ketegangan yang sifatnya lokal itu bisa berubah menjadi suatu tindakan massal yang mengorbankan begitu banyak nyawa manusia. Apa pun pemahaman mereka, semua narasumber saksi berusaha memaknai apa yang mereka alami itu, sembari menarik pelajaran yang kiranya berguna untuk masyarakat sekarang dan di masa depan.

Sementara itu, akan Anda lihat pula bahwa dari sudut pandang sejumlah korban, apa pun latar belakangnya, Tragedi '65 itu merupakan sebuah tragedi pribadi yang terjadi secara acak, luar biasa kejam, dan semena-mena. Misalnya apa yang dialami oleh orang seperti Mujilah, salah seorang narasumber yang tadi telah kita singgung. Pada tahun 1965 dia adalah seorang gadis desa berumur 14 tahun dan tinggal di daerah Prambanan, Yogyakarta. Siang itu ia ditugaskan mengasuh adiknya di depan rumah, karena ibunya sedang sibuk memasak di dapur. Tiba-tiba seorang petugas datang kepadanya menanyakan apakah namanya Mujilah. Ketika mengatakan iya (karena memang begitu namanya), ia langsung dinaikkan truk untuk kemudian dimasukkan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta, dan selanjutnya dibuang ke penjara-perempuan Plantungan, Jawa Tengah, selama 14 tahun.²⁵ Ia adalah korban salah tangkap. Kebetulan sekali orang yang harusnya ditangkap adalah seorang guru yang persis sama namanya, tetapi guru itu sedang berada di tempat lain. Apa pun alasannya, Mujilah kehilangan 14 tahun hidupnya secara sia-sia. Dan ketika ia dibebaskan, tak sepele kata maaf-pun terucap dari para penguasa, apalagi ganti-rugi terhadap apa yang telah diderita dan yang telah hilang dari hidupnya.

Hal serupa juga dialami oleh narasumber lain yang namanya juga kita samarkan, yakni Agatha Sumarni. Ia adalah seorang mahasiswi di Yogyakarta yang tiba-tiba ditangkap karena tuduhan tertentu. Setelah disiksa dan sebagainya, ternyata para petugas itu menyadari bahwa mereka telah keliru tangkap dan memberi surat pembebasan bagi Sumarni. Sumarni lantas berusaha hidup seperti sediakala sebagai seorang mahasiswi. Entah mengapa, terjadi upaya penangkapan kedua. Ketika Sumarni mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan dengan tuduhan yang dilontarkan kepadanya dan menunjukkan surat

25 Lihat HD. Haryo Sasongko dan Melani Budianta, hlm. 1995-216.

pembebasannya, para petugas justru berdalih bahwa karena ia memiliki surat pembebasan berarti dulu pernah ditahan. Dia ditahan pasti karena dinyatakan bersalah, demikian jalan pikiran para penangkapnya. Oleh karena itu, para petugas memutuskan untuk secara paksa menangkap dan menahannya lagi tanpa Sumarni mampu melawan mereka. Selama belasan tahun kemudian ia juga dijebloskan ke dalam penjara, disertai siksaan yang nyaris di luar batas-batas perikemanusiaan.

Seorang korban lain yang oleh teman-temannya sering dipanggil “Al Capone” menceritakan dalam buku ini bagaimana pada usia 19 tahun ia tiba-tiba ditangkap tanpa diberi kesempatan menerangkan diri. Ia dibuang ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, sebelum kemudian dibawa secara ramai-ramai dengan sebuah kapal yang sempit macet berhari-hari di tengah laut dan nyaris tenggelam menuju ke Pulau Buru. Ada banyak hal yang ia alami dan saksikan selama lebih dari sepuluh tahun berada di kamp pembuangan di pulau terpencil yang ada di Kepulauan Maluku itu. Ia saksikan misalnya, bagaimana sesama tahanan disiksa dan ditembak mati seperti binatang di depan barak mereka tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Al Capone mencoba mengingat sebanyak mungkin apa yang ia lihat dan alami itu, untuk kemudian mencatat dan menarasikannya kembali untuk Anda dalam buku ini.

Dengan mengikuti paparan para korban maupun non-korban, dalam buku ini diharapkan Anda bisa terbantu untuk melihat apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya. Bukan hanya sebagai angka-angka statistik atau tebak-menebak siapa “dalang” dan siapa “bukan-dalang” dalam peristiwa itu, melainkan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang korbannya adalah manusia-manusia biasa yang konkret—sama seperti kita semua. Para korban ternyata juga mempunyai nama, mempunyai tempat tinggal, mempunyai orangtua,

mempunyai kakak dan adik, mempunyai wajah dengan segala ekspresinya, bahkan mempunyai kerinduan dan harapan sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka adalah manusia-manusia biasa seperti orang-orang lain yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Apa boleh buat, gara-gara upaya-upaya demonisasi alias “penyetanan” yang dilakukan oleh suatu rezim kekuasaan tertentu beserta para pengikutnya, mereka sering ditampilkan dalam benak dan ingatan kita sebagai semacam “monster” yang menakutkan dan selalu siap menghabisi lawan politiknya.

Salah satu hal menarik yang penting untuk dicatat ialah bahwa betapa pun berat siksaan dan hinaan yang dialami, para korban yang ada dalam buku ini tidak sedikit pun menyimpan rasa dendam. Sebaliknya, mereka justru penuh harapan. Hiruk-pikuk prahara Tragedi '65 memang luar biasa, dengan jumlah korban yang luar biasa pula. Penderitaan yang dialami para korban dan keluarganya nyaris tak tertanggungkan. Namun demikian, mereka yang telah menjadi korban tetapi bisa bertahan hidup biasanya enggan dan takut untuk bercerita mengenai apa yang dialami. Mereka memilih bungkam. Bahkan mereka yang tidak menjadi korban tetapi sempat menyaksikan apa yang terjadi biasanya juga memilih untuk diam seribu bahasa. Melalui buku ini kedua kelompok itu diberi kesempatan untuk memperdengarkan suara mereka—suara di balik prahara yang selama ini cenderung dibenam saja. Diharapkan bahwa suara dan narasi-narasi yang ada dalam buku ini tidak akan membuat para pembacanya termangu apalagi berhenti dalam keputusan, melainkan justru melangkah dengan penuh harapan akan lebih baiknya masa depan bangsa ini. Dengan begitu, diharapkan pula bahwa kita akan terus berupaya agar tidak mudah melupakan masa lalu melainkan terus mengingat dan mengolahnya supaya kita bisa bersama-sama belajar sebagai bangsa yang semakin dewasa.

Shared Narratives

Bagaimana “sejarah” munculnya buku ini? Sudah sejak beberapa tahun ini kami di PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta bersama sejumlah pihak lain merasa prihatin atas bagaimana narasi sejarah bangsa ini disampaikan dan dimaknai. Sebagai sebuah pusat studi yang berkiprah dalam kajian sejarah dan etika politik, PUSdEP melihat adanya sejumlah keprihatinan yang patut diamati dan dicari jalan keluarnya.

Pertama, untuk waktu yang lama—khususnya selama masa pemerintahan Orde Baru—narasi sejarah Indonesia sangat lekat dengan kepentingan rezim kekuasaan politik. Hal ini sudah banyak kita bicarakan di depan. Kedua, selain melarang buku-buku sejarah yang tidak sejalan dengan kepentingannya, rezim itu juga rajin memproduksi narasi sejarah menurut sudut pandangnya. Hal itu dilakukan baik lewat buku, lewat film, media cetak, penataran yang bersifat wajib, atau media-media yang lain. Ketiga, banyak narasi yang muncul dari lingkungan kekuasaan itu cenderung mengabaikan suara atau narasi-narasi yang berasal dari warga masyarakat di luar kekuasaan. Padahal sebagaimana telah kita lihat, dalam pemahaman atau penulisan sejarah suara-suara dari masyarakat itu penting perannya.

Keempat, semakin meningkatnya minat kalangan muda untuk mengetahui sejarah bangsanya, namun keinginan itu belum sepenuhnya terakomodasi.²⁶ Kelima, semakin kuatnya globalisasi ekonomi, politik, dan budaya serta banyaknya gerakan-gerakan transnasional yang kalau tidak hati-hati membuat masyarakat Indonesia

26 Ketika pada akhir tahun 2010 panitia konferensi “*Indonesia and the World in 1965*” di Jakarta mengumumkan lomba penulisan essay tentang Tragedi '65 dan Rekonsiliasi bagi kaum muda, ada sekitar 1.000 (seribu) naskah yang masuk. Hal ini kiranya menunjukkan minat kaum muda tidak hanya pada soal Tragedi '65 melainkan juga pada sejarah bangsanya.

semakin lupa akan sejarah dan jati diri bangsanya sendiri. Keenam, adanya gejala-gejala makin merosotnya etika politik dan etika publik baik di kalangan para pengambil keputusan maupun di luarnya. Ketujuh, makin kurang jelasnya arah bersama yang hendak dituju oleh bangsa ini. Ada dugaan, penyebab dari situasi demikian antara lain adalah kurang berakarnya kita pada sejarah kita sendiri, sekaligus karena kurang terolahnya pengalaman masa lalu secara matang.

Di tengah keprihatinan-keprihatinan seperti itu kami di PUSdEP berusaha menjalin kerja sama dengan sebanyak mungkin pihak, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Tujuannya adalah membantu masyarakat untuk semakin tertarik mempelajari sejarah dan mengolah pengalaman kolektif sebagai bangsa. Banyak sudah pihak yang bekerja sama dengan kami dalam hal ini. Salah satunya adalah Salzburg Global Seminar yang kantor pusatnya ada di kota Salzburg, Austria. Bagai gayung bersambut, ketika kami utarakan cita-cita kami Salzburg Global Seminar bersedia membantu kami melalui Institute for History, Justice, and Reconciliation (IHJR). IHJR sendiri semula berkantor di Salzburg, tetapi kemudian pindah ke Paris, dan kini menetap di Den Haag, Negeri Belanda.

Kebetulan sekali IHJR sedang mengerjakan suatu upaya internasional untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai program "*Shared Narratives*", yakni menampilkan narasi dari dua pihak yang sedang atau pernah berseberangan karena suatu konflik sosial, politik, atau militer. Masing-masing kelompok diminta menuliskan kisah dan pandangannya tentang konflik yang sedang atau telah mereka alami, dengan maksud agar mereka bisa saling memahami untuk kemudian terdorong melakukan proses rekonsiliasi. Di antara pihak-pihak yang berseberangan yang diminta menuliskan narasinya

oleh IHJR itu adalah mereka yang terkait dengan konflik Serbia-Bosnia; Turki-Armenia; dan Israel-Palestina.

Dalam kaitan dengan Indonesia, IHJR mendukung gagasan PUSdEP untuk mendengarkan dan mencatat narasi dari pihak-pihak yang secara langsung atau tak langsung terlibat dalam gemuruh Tragedi '65. Tujuannya sama, yakni agar tercipta sikap kritis, saling terbuka, dan saling memahami, hingga selanjutnya saling terdorong untuk melakukan proses rekonsiliasi. Bertolak dari dukungan IHJR ini, PUSdEP lantas mengumpulkan sejumlah peneliti yang tertarik dalam bidang sejarah, baik yang senior maupun yang junior, guna menemukan, meminta, mendengarkan, mencatat dan mengolah pengalaman para narasumber berkaitan dengan sejarah Tragedi '65. Bersama mereka, kami lantas membentuk sebuah tim penelitian dengan sebutan “Komisi Sejarah PUSdEP” dan merencanakan suatu penelitian (kualitatif) dengan mewawancarai narasumber dengan latar belakang se-*beragam* mungkin agar bisa mencerminkan semangat “*shared narrative*” sebagaimana diharapkan bersama.

Semula kami membagi diri untuk melakukan penelitian dengan mewawancarai sejumlah saksi yang memiliki beragam latar belakang: dari kalangan Muslim, Kristiani (khususnya Katolik), Kejawan, Tionghoa, militer, dan pejuang kemerdekaan. Dalam perjalanan selanjutnya, kami terdorong untuk memperluas cakupan penelitian kami sehingga menjangkau mereka yang telah menjadi korban dari Tragedi '65. Apalagi mengingat bahwa narasumber dari kalangan mantan pejuang kemerdekaan ternyata adalah orang yang dulunya ikut terlibat langsung dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, tetapi yang kemudian justru menjadi korban dalam Tragedi '65. Jadilah kami melibatkan para narasumber yang berasal

dari kalangan korban. Dengan begitu kami berharap agar bisa setia pada semangat *shared narratives* tersebut.

Pada Narasinya

Narasi-narasi yang ada dalam buku ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan apakah hal-hal yang dikatakan oleh para narasumber itu benar atau tidak benar. Tujuannya lebih pada keinginan untuk melihat bersama bagaimana Tragedi '65 di mata para narasumber. Di sini mereka diberi ruang untuk menghadirkan kembali *ingatan* mereka tentang apa yang mereka lihat, dengar dan alami, serta bagaimana mereka memaknai semua itu. Dalam kaitan dengan para saksi, hal itu berarti mencermati bagaimana mereka memandang, menganalisis, dan memberi makna atas apa yang terjadi pada tahun 1965. Dalam kaitan dengan para korban, hal itu berarti menyimak bagaimana mereka mengalami, menganalisis, dan memaknai apa yang mereka alami berkaitan dengan tragedi kemanusiaan nasional tersebut. Dengan kata lain, buku ini bukan terutama ingin menyampaikan “apa yang terjadi di seputar Tragedi '65 melainkan lebih pada “bagaimana para narasumber mengingat dan memaknai apa yang terjadi berkaitan dengan Tragedi '65”.

Pada bagian ketiga dari buku ini kami sampaikan tulisan dua anggota Komisi Sejarah PUSdEP Y. Tri Subagya M.A. dan Dr. G. Budi Subanar, SJ. Isinya adalah laporan dan ulasan atas hasil penelitian mereka tentang sikap sebuah lembaga agama (dalam hal ini Hirarki Gereja Katolik) terhadap Tragedi '65. Sebagai bagian dari generasi muda Indonesia yang bukan merupakan saksi ataupun korban Tragedi '65 keduanya mewawancarai sejumlah narasumber dan membaca sejumlah literatur berkaitan dengan tragedi tersebut, untuk kemudian menyampaikan pandangan mereka. Diharapkan bahwa bagian ini

bisa memberikan dimensi lain terhadap narasi-narasi dari para saksi maupun korban yang ada dalam dua bagian sebelumnya. Idealnya memang ada lebih dari satu tulisan di bagian ini, namun karena keterbatasan kami hanya satu tulisan yang bisa ditampilkan.

Kiranya perlu disampaikan pula di sini bahwa buku ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk “membersihkan” atau “*white washing*” pihak-pihak yang selama ini oleh narasi versi resmi telah dituduh sebagai pihak yang “bersalah” atas apa yang terjadi pada tahun 1965-1966, entah itu mereka yang terkait dengan Gerakan Wanita Indonesia, para anggota Partai Komunis Indonesia, para pendukung Presiden Sukarno atau bahkan Presiden Sukarno sendiri. Seperti telah dikatakan, buku ini hanya bermaksud menyampaikan narasi-narasi yang bertolak dari ingatan dan upaya pemaknaan dari sejumlah warga masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung telah menjadi saksi atau korban dari Tragedi Kemanusiaan '65.

Ada beberapa cara yang telah kami tempuh dalam rangka penelitian sejarah lisan agar bisa menyuguhkan narasi penuh ingatan dan pemaknaan itu ke hadapan Anda. Salah satunya adalah melalui wawancara langsung yang kemudian ditranskrip dan diolah kembali. Ada pula yang melalui tulisan tangan dari para narasumber setelah mendapat penjelasan berkaitan dengan maksud dan tujuan usaha bersama ini. Ada lagi yang dengan menggunakan wawancara lisan yang kemudian dilengkapi dengan wawancara tertulis. Sementara itu, ada pula yang narasinya didapatkan dari penulisan kembali atas hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian dilengkapi dengan tulisan-tulisan yang narasumber hasilkan sebelumnya dalam bentuk buku maupun makalah seminar. Sekali lagi, semua itu dihadirkan di sini supaya dalam melihat sejarah bangsa ini, khususnya berkaitan

dengan Tragedi '65, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Sebagai tambahan catatan teknis perlu kami sampaikan di sini bahwa hampir semua nama narasumber yang tercantum dalam buku ini adalah nama-nama samaran. Selain demi menghormati dan menjaga privasi para narasumber serta karena permintaan dari para narasumber sendiri, hal ini juga dimaksudkan supaya perhatian Anda sebagai pembaca tidak terutama terfokus pada orangnya melainkan pada narasi yang disampaikan. Apa pun keterangannya kiranya jelas bahwa dalam hal ini *apa* yang dinarasikan jauh lebih penting daripada *siapa* yang menarasikannya.

Menyimak Suara

Suatu narasi sejarah tidak ditulis demi dirinya sendiri, melainkan demi tujuan-tujuan sosial tertentu. Salah satu fungsi narasi sejarah, sebagaimana kita lihat di awal pendahuluan ini, adalah membantu masyarakat memahami apa yang bergerak dan berkembang di lingkungannya, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Itulah sebabnya, setiap masyarakat dan setiap generasi merasa perlu untuk terus-menerus menyampaikan sejarahnya ke masyarakat atau generasi lain.

Berkaitan dengan narasi sejarah tentang Tragedi '65, seperti yang sudah umum diketahui, narasi mengenai tragedi itu telah didominasi oleh narasi resmi yang sangat dekat dengan kepentingan kekuasaan waktu itu. Akibatnya adalah bahwa cara masyarakat memahami apa yang bergerak dan berkembang di lingkungannya sangat diwarnai oleh maksud-maksud yang terkandung di balik narasi resmi tersebut. Akibat lebih jauh adalah terdistorsi atau rusaknya pandangan masyarakat, tidak hanya dalam melihat masa lalunya, melainkan juga

dalam melihat dirinya sendiri sekarang ini dan di masa depan. Jika distorsi-distorsi itu tidak dibenahi, tentu dampak negatif yang telah diakibatkannya akan terus berkepanjangan.

Masih berkaitan dengan Tragedi '65, di masa lalu upaya untuk mendengarkan dan mencatat narasi tentang tragedi tersebut dari perspektif masyarakat atau korban sering dicap sebagai upaya untuk menyebarkan paham-paham tertentu. Terkadang bahkan dituduh ingin membangkitkan kembali partai politik tertentu. Namun demikian, sekarang ini kiranya masyarakat—khususnya generasi muda—sudah tahu bahwa cap dan tuduhan seperti itu tidak lagi bisa dipertahankan. Masyarakat semakin sadar bahwa upaya-upaya menyampaikan narasi dari perspektif masyarakat justru penting untuk membuka ruang dialog, supaya dengan begitu terbuka pula ruang untuk belajar bersama tentang sejarah bangsa. Yang dimaksud tentu bukan hanya sejarah menurut versi penguasa yang sarat dengan kepentingan—entah itu penguasa sosial, politik maupun keagamaan—melainkan sejarah menurut kita semua sebagai anak-anak tercinta dari bangsa yang luhur dan mulia ini.

Dengan menyimak suara dan narasi-narasi di balik prahara politik-kemanusiaan Tragedi '65 yang datang dari berbagai perspektif semoga menjadi segarlah ingatan kita akan apa yang terjadi pada waktu itu dan setelahnya. Dengan begitu, semoga kita akan menjadi lebih bersemangat dan lebih dewasa dalam memperjuangkan hari-hari depan bersama yang lebih cemerlang.[]

Baskara T. Wardaya, SJ

Ucapan Terima Kasih

MUDAH diduga, penelitian dan penulisan untuk buku seperti buku ini melibatkan banyak orang. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Salzburg Global Seminar di Salzburg, Austria, yang melalui Institute for History, Justice and Reconciliation (IHJR) telah mendorong dan membiayai kami sejak awal penelitian kami hingga ke tahap-tahap akhir penulisan buku. Secara khusus kami ingin menyebut Dr. Timothy Ryback Académie *Diplomatique* Internationale Paris, Marie-Louise Ryback, dan Catherine Cissé van den Muijsenbergh. Terima kasih juga karena ketiganya telah dengan sabar mengikuti presentasi kami di kampus Académie *Diplomatique* Internationale di Paris pada tahun 2008. Tentu kami berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada rekan kami Brian Harding yang telah menghubungkan PUSdEP dengan Salzburg Global Seminar ketika sebagai peneliti Fulbright dia bermarkas di kantor PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik), Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Ketika baru memasuki tahap awal pembentukan Komisi Sejarah PUSdEP, kami sangat dibantu oleh Dr. Leslie Dwyer dan Degung Santikarma yang waktu itu keduanya masih mengajar di Haverford College, Pennsylvania, dan kemudian pindah ke George Mason

University, Washington D.C., AS. Kepada mereka berdua kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas gagasan-gagasan awal yang terus menginspirasi kami pada tahap-tahap selanjutnya.

Kepada para anggota Komisi Sejarah PUSdEP yang lain, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mereka adalah rekan Chandra Halim yang meneliti komunitas Tionghoa; Muhammad Subkhi Ridho yang meneliti komunitas Muslim khususnya dari kalangan Muhammadiyah; Choirotun Chisaan yang meneliti komunitas Muslim khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama; Kiswondo yang meneliti komunitas pemeluk Kejawen; G. Budi Subanar dan Y. Tri Subagya yang meneliti kalangan Kristiani, khususnya Katolik; dan Tri Chandra Aprianto yang meneliti kalangan mantan pejuang kemerdekaan. (Penulis sendiri meneliti kalangan militer dan bertanggung jawab atas keseluruhan narasi dari para narasumber korban). Ketekunan, diskusi-diskusi rutin serta ketekunan rekan-rekan anggota Komisi Sejarah PUSdEP telah membuat buku ini menjadi kenyataan.

Tidak perlu dikatakan, tentu buku ini tidak mungkin terwujud jika tidak ada kesediaan para narasumber untuk bersusah payah dengan kami baik dalam berpikir bersama, berpikir sendiri-sendiri, maupun menulis, dan menjawab wawancara. Untuk itu kepada mereka semua kami ingin mengucapkan rasa terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Tidak ada ungkapan balas budi yang menurut kami paling tepat yang bisa kami haturkan selain harapan bahwa narasi-narasi yang para narasumber sampaikan dalam buku ini akan membantu memberi pencerahan dan semangat kepada segenap pembacanya.

Telah terlibat pula dalam pertemuan-pertemuan maupun pengerjaan teknis buku ini rekan-rekan kami di PUSdEP, khususnya rekan Dedy Kristanto, Monica Laksono, Darwin Awat, Deddy Hermawan, M.M. Ambarastuti, Yohana Intan Dias Sari, senior kami Bapak Ronnie Hatley dan Dr. George Aditjondro. Begitu juga Yohanes Setiawan, Dian Beni Yuda Ismiyati, Vina Rahayu, serta Chekka Cuomova dari Universitas Atma Jaya Jakarta. Kepada mereka semua kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Demikian pula kepada J. Bambang Agung serta rekan-rekan dari Komunitas Kotak Hitam (A. Dananjaya, Kartika Pratiwi, Aquidom Adri dan Krisdemon Sallata), kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Untuk saudari kami Gina Donoso dari Ecuador, kami ingin menyampaikan terima kasih atas inspirasi dan dukungannya. *Gracias*, Gina. Kepada *civitas academica* Universitas Sanata Dharma kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami, khususnya kepada Romo Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik yang secara langsung maupun tak langsung telah setia mendukung tugas dan karya-karya PUSdEP selama ini. Rasa terima kasih yang sama ingin kami sampaikan kepada Tim Penasehat Ahli PUSdEP dan kepada Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, khususnya Dr. St. Sunardi. Tentu saja kami juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan kami di Penerbit Galangpress atas kerja sama dan kesediaannya untuk menerbitkan buku ini.

Kami berharap bahwa hasil jerih payah dan keterlibatan bersama ini akan membawa hasil yang bermanfaat, tidak hanya bagi Anda sebagai pembaca, melainkan juga kepada rakyat Indonesia, syukur-syukur kepada masyarakat internasional pada umumnya. Sebagaimana kita pahami, setiap peristiwa manusia selalu mengandung pelajaran yang berguna bagi manusia lain di mana pun dan kapan pun.

Baskara T. Wardaya, SJ

Penulisan sejarah telah membantu kita untuk memetik pelajaran dari setiap peristiwa manusia di masa lalu. Semoga buku ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk bisa memetik dan mengolah pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu bangsa yang kita cintai dan perjuangkan bersama ini. []

Daftar Isi

Memulihkan Sejarah, Memulihkan Kehormatan Bangsa
Sebuah Pengantar — 7

Ronnie Hatley

Menyimak Suara Terbungkam
Sebuah Pendahuluan — 17

Baskara T. Wardaya, SJ

Ucapan Terima Kasih — 51

Daftar Isi — 55

BAGIAN I

NARASI PARA SAKSI — 59

Pengantar

1. Itu *kan* Akibat Saja

Tragedi '65 di Mata Seorang Anggota Militer — 63

2. Masanya Sudah Berbeda

Tragedi '65 di Mata Seorang Muslim — 99

3. Tetap Harus Diwaspadai

Tragedi '65 di Mata Seorang Muslim — 111

4. Harus Bangga Disebut Bangsa Indonesia

Tragedi '65 di Mata Seorang Penganut Kejawen — 121

5. Mereka Mau Memanfaatkan Situasi

Tragedi '65 di Mata Seorang Etnis Tionghoa — 143

6. Ada Skenario Besar

Tragedi '65 di Mata Seorang Katolik — 153

BAGIAN II

NARASI PARA MANTAN KORBAN — 175

Pengantar

1. **Ini Problem Kita Sebagai Bangsa** — 183
2. **Setiap Orang Merasa Ketakutan** — 221
3. **Belajarlh dari Sejarah dengan Bijak** — 269
4. **Suatu Pelajaran Berharga** — 279
5. **Tiba-tiba Saya *Diciduk*** — 289
6. **Nasib Malang Menimpa Diriku** — 295
7. **Derita Tiada Henti** — 301
8. **Aku Anak Tapol dan Istri Tapol** — 309
9. **Cukup Sudah Potret Buram Bangsa Ini** — 331

BAGIAN III

GENERASI MUDA, LEMBAGA KEAGAMAAN, DAN TRAGEDI '65 — 345

Pengantar

Ketegangan Antara Lembaga Keagamaan dan Praktik Sosial
Studi Kasus Hirarki Gereja dan Umat Katolik di Yogyakarta
— 347

Menyegarkan Ingatan — 369

Sebuah Penutup

Daftar Acuan — 373

Daftar Singkatan — 379

Indeks — 385

Tentang Penulis — 397



Presiden Sukarno berpidato di depan massa, Mei 1965 (Ist.)

BAGIAN I

NARASI PARA SAKSI

Pengantar

NARASI-NARASI yang akan Anda simak dalam Bagian I ini adalah narasi-narasi yang berasal dari orang-orang yang dalam Tragedi '65 *tidak* menjadi korban—atau setidaknya tidak menjadi korban langsung. Dalam posisi itu mereka bisa "mengambil jarak" dari apa yang waktu itu terjadi, dan bisa melihatnya dalam konteks yang lebih luas, serta mengisahkannya kepada Anda.

Narasumber yang berasal dari kalangan militer, misalnya, melihat apa yang terjadi di seputar tahun 1965 itu sebagai puncak dari sebuah ketegangan politik yang sudah mulai berlangsung sejak tahun 1963. Pembunuhan para jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 menurutnya telah menyulut kemarahan orang-orang tertentu di kalangan militer. Presiden Sukarno yang sama sekali tidak mau bertindak tegas terhadap Partai Komunis Indonesia (yang oleh kalangan militer dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu) membuat wibawanya merosot. Apalagi ketika Presiden menolak membubarkan partai tersebut. Soeharto, menurut narasumber ini, lalu mengambil inisiatif untuk mengendalikan situasi. Jadilah penangkapan dan pembuangan para Tahanan Politik ke Pulau Buru menyusul turunnya Presiden Sukarno dari kursi kepresidenan.

Narasumber lain melihat bahwa kondisi ekonomi yang sulit waktu itu membuat masyarakat resah dan mudah terprovokasi. Selain kondisi ekonomi yang sulit, gagasan Presiden Sukarno tentang NASAKOM juga mendorong partai-partai politik bertegangan satu-sama lain dan membuat meningkatnya suhu politik waktu itu, yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam situasi demikian, berita-berita lewat media massa yang bersifat propaganda mudah diterima begitu saja oleh masyarakat. Masyarakat lantas membentuk opininya sendiri. Berdasarkan opini itu mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan kolektif tertentu. Padahal, dikatakan oleh narasumber ini, banyak berita yang beredar waktu itu sebenarnya sengaja dibuat untuk menyesatkan opini masyarakat tanpa mereka sadar akan hal itu.

Ada dua narasi menarik yang datang dari dua narasumber yang berasal dari sebuah kampung yang sama di Yogyakarta. Keduanya melihat bahwa menjelang 1965 tidak ada ketegangan sosial yang mengkhawatirkan. Bahwa ada persaingan antara kelompok agama tertentu dengan kelompok Pemuda Rakyat yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia memang benar, tetapi persaingan itu hanya berlangsung dalam bentuk unjuk kebolehan dalam berkesenian dan semacam “perang spanduk”. Keduanya menegaskan bahwa tak ada kekerasan fisik atau semacamnya. Oleh karena itu, mereka heran mengapa pada akhir 1965 tiba-tiba bisa terjadi berbagai tindak kekerasan kolektif yang sedemikian besar, entah itu penangkapan, pembunuhan atau pemenjaraan. Menariknya, bertolak dari pengalaman serupa, narasumber yang satu tidak menyetujui pembubuhan kode “ET” pada Kartu Tanda Pengenal para mantan Tahanan Politik, sedang narasumber yang satunya lagi merasa tidak keberatan akan pembubuhan kode semacam itu.

Seorang narasumber non-korban melihat bahwa bencana kemanusiaan yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an itu penyebabnya adalah karena manusia telah melanggar aturan dari Tuhan. Padahal setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya. Bertolak dari refleksinya atas situasi waktu itu, narasumber ini mengingatkan bahwa sesama manusia tidak boleh saling menuduh, menculik, apalagi menghukum. Manusia tidak punya hak untuk mengadili manusia lain. Menurutnya yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan sendiri.

Berbeda dengan narasumber yang melihat pelanggaran akan aturan dari Tuhan sebagai penyebab bencana kemanusiaan 1965, narasumber lain melihat bahwa Blok Barat dalam Perang Dingin yang dipimpin oleh Amerika Serikat merupakan faktor penting dalam bencana kemanusiaan tersebut. Amerika dan sekutunya takut bahwa jika Bung Karno dibiarkan berkuasa, maka kepentingan mereka akan terganggu. Sebagai “bukti”, narasumber ini menunjukkan bahwa dalam situasi Indonesia pasca-1965 itu Amerika-lah yang paling diuntungkan secara ekonomis.

Lepas dari apakah pengamatan-pengamatan semacam itu tepat atau kurang tepat, kita bisa melihat bahwa dari perspektif orang-orang yang tidak menjadi korban langsung atas Tragedi '65 itu ada banyak kemungkinan alasan mengapa tragedi tersebut terjadi. Ada yang melihat penyebabnya adalah ketegangan politis di tingkat elite, ada yang melihat penyebabnya adalah kesulitan ekonomi yang disertai rekayasa di tingkat pusat, ada yang melihatnya sebagai bagian dari konflik kepentingan dalam konteks Perang Dingin, namun ada pula yang melihat penyebabnya adalah pelanggaran akan aturan Tuhan. Tak cukup dengan penjelasan mono-kausal alias penyebab tunggal. Semua itu menunjukkan bahwa jika dilihat dari luar narasi resmi, pandangan tentang Tragedi '65 bisa menjadi lebih kaya dimensi.

Baskara T. Wardaya, SJ

Narasi-narasi yang kaya dimensi dalam bagian ini diharapkan bisa merangsang Anda (dan kita semua) untuk berpikir sendiri secara kritis dan terbuka terhadap Tragedi '65. Demikian juga terhadap momen-momen penting lain dalam sejarah bangsa ini. Selamat menekuni.[]

Itu kan Akibat Saja

Tragedi '65 di Mata Seorang Anggota Militer

Pengantar

LAHIR pada tahun 1938 di Malang, Jawa Timur, Dr. Sofyan Djaenuri (bukan nama sesungguhnya) adalah penutur narasi kita di bawah ini. Ayahnya adalah seorang tentara. Setelah lulus pendidikan sekolah menengah atas ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, sebagai mahasiswa Ikatan Dinas. Saat menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

Seusai studi di Yogyakarta, ia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta, dan kemudian bekerja di Lembaga Sejarah dan Antropologi di kota tersebut. Salah satu tugas yang ia emban adalah menjadi Asisten Peneliti di Monumen Nasional (Monas). Selain itu, selama 30 tahun, ia juga berkarir di bidang militer. Pada tahun 1995 ia pensiun dan pangkat terakhir adalah Kolonel. Meskipun sudah pensiun, ia tetap bekerja sebagai staf ahli.

Sofyan melihat bahwa sebelum tahun 1965 hubungan antar mahasiswa baik-baik saja. Ada banyak sekali organisasi kemahasiswaan, tetapi semua melakukan aktivitasnya dengan baik dan membina relasi satu-sama lain dengan baik pula. "Seneng rasanya jadi mahasiswa waktu itu," katanya. Meskipun demikian, mulai tahun 1963 terasa bahwa ada peningkatan persaingan di antara kelompok-kelompok mahasiswa. Yang

makin terasa waktu itu adalah adanya “atmosfir revolusi” di antara para mahasiswa. Artinya, mulai terjadi semacam ketegangan politik dalam kehidupan kampus.

Sementara itu Sofyan mengamati bahwa di tingkat nasional sedang terjadi persaingan terbuka antara Tentara dan Partai Komunis Indonesia. Dengan menggunakan konsep “Nasakom Bersatu” Partai Komunis Indonesia menyerang Tentara. Tentara balik menyerang dengan menggunakan slogan “Nasakom Jiwaku”. Pada kubu yang satu, Tentara mendukung Presiden Sukarno tapi anti-Partai Komunis Indonesia, pada kubu yang lain Partai Komunis Indonesia mendukung Presiden Sukarno tetapi anti-Tentara.

Waktu Peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi, Sofyan sudah berada di Jakarta. Menurutny, waktu itu Angkatan Darat tidak bisa menerima bahwa Panglima dan kawan-kawan mereka dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia yang menggunakan Letnan Kolonel Untung. Soeharto lalu meminta Presiden Sukarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia, tetapi Presiden Sukarno tidak segera melakukannya. Bung Karno malah berdalih bahwa kalau ia membubarkan partai tersebut berarti ia tidak konsisten dengan Nasakom. Selain itu, Bung Karno juga mengatakan bahwa jika dibubarkan, anggota-anggota partai tersebut justru akan melakukan gerilya politik. Menanggapi kata-kata Bung Karno itu, menurut Sofyan, Soeharto lantas berkesimpulan: “Daripada direcokin [diganggu] oleh pemimpin-pemimpin PKI, ya tangkapi saja itu pemimpin-pemimpin PKI, dan kader-kadernya. Kumpulkan saja di satu tempat.” Dari situlah, menurut Sofyan, muncul ide mengenai pembuangan para Tahanan Politik ke Pulau Buru. Tentang kedekatan antara Soeharto dengan Letkol Untung bagi Sofyan hal itu merupakan sesuatu yang wajar, mengingat bahwa keduanya adalah bagian dari Tentara Revolusi. Namun demikian menurutny Soeharto lantas sadar

bahwa Untung itu dekat dengan Partai Komunis Indonesia dan oleh karena itu ia lawan.

Bagi Sofyan, Tragedi '65 itu merupakan sesuatu yang rumit. Tragedi itu melibatkan massa, sehingga menurut pemikirannya "kalau tragedi itu dibebankan pada tentara saja ya itu tidak bisa." Ia berpendapat bahwa apa yang terjadi itu merupakan akibat dari perbuatan Partai Komunis Indonesia. Dengan bertolak pada prinsip "progresif revolusioner" partai tersebut menurut Sofyan telah menyakiti hati lawan-lawannya. Ketika gerakannya gagal, orang-orang yang dulu dikatakan kontra-revolusi lantas bertindak melawan partai tersebut. Berkaitan dengan Tragedi '65 sendiri, Sofyan mengatakan, "Tapi ya sudahlah, ini merupakan sejarah bangsa kita yang memang mengerikan... ya patut disesalkan. Namun demikian, semuanya sudah terjadi." Ia tambahkan, "Kalau para sejarawan ingin berkomentar ini atau itu, ya terserahlah. Tapi yang jelas itulah sejarah kita."

Setidaknya ada dua pelajaran penting yang menurut Sofyan bisa ditarik dari apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Yang pertama, hendaknya dalam berpolitik para pemimpin partai politik jangan membawa-bawa tentara untuk mencapai kekuasaan. Berkaitan dengan itu, dalam setiap usaha mencapai kekuasaan, hendaknya tidak dipakai kekerasan. "Ini renungan saya sebagai orang militer," katanya. Kedua, untuk Tentara, ia mengatakan bahwa hendaknya Tentara tidak ikut-ikutan berpolitik. Mengapa? Karena akibatnya bisa fatal untuk seluruh bangsa. "Kalau jadi tentara ya jadilah tentara, jangan ikut main politik," pesannya.

Narasi berikut merupakan hasil transkrip dan pengolahan kembali wawancara penulis dengan Kol. (Purn.) Sofyan Djaenuri. Wawancara dilakukan penulis di Museum Satria Mandala, Jakarta, sebuah museum yang dikelola oleh Angkatan Darat.

NAMA saya Sofyan Djaenuri. Saya lahir tahun 1938 di Malang, Jawa Timur. Pada zaman Jepang saya mulai sekolah. Tapi lalu terjadi Revolusi mulai tahun 1945. Peristiwa itu menjadikan keluarga saya harus berpindah-pindah, mengingat Bapak saya seorang tentara. Namun saya tidak boleh mengaku kalau Bapak saya tentara. Kami berpindah-pindah dari Jombang ke Ponorogo, Malang, Plaosan, dan sebagainya [semuanya di Jawa Timur]. Saya bahkan sempat jadi “anak yatim” karena terus-menerus ditinggal Bapak. Saya masuk asrama anak yatim. Ayah saya selalu berpindah-pindah. Sekolah saya juga tidak bisa *ajeg* [tetap], melainkan harus pindah-pindah juga. Saya lalu kembali ke Malang, masuk SMA Negeri I di sana, SMA bagian A, yakni bagian Sastra, sesuai dengan model pendidikan Belanda. Tahun 1958 saya lulus SMA. Saya lalu meneruskan kuliah di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada [UGM], sebagai mahasiswa ikatan dinas. Mahasiswa ikatan dinas itu paling gampang: tidak usah melamar, hanya lapor begitu saja. Tetapi setelah lulus saya wajib bekerja untuk pemerintah. Jumlah beasiswanya sekitar Rp 414,-

Saya kemudian bekerja di Lembaga Sejarah dan Antropologi. Aktivitas yang saya kerjakan ada banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah sebagai Asisten Peneliti di Monas [Monumen Nasional], Jakarta. Dalam dunia militer, saya bekerja lebih dari 30 tahun. Setelah Pensiun tahun 1995 [Pangkat terakhir Sofyan Djaenuri adalah Kolonel, ed.] saya masih bekerja sebagai staf ahli.

Kalau bicara mengenai sejarah, bagi saya Sejarah itu perubahan. Setiap generasi punya sejarahnya sendiri. *Every generation has its own history.*

Sudah Mulai Panas

Tentang periode tahun 1960-an kebetulan saya mengalaminya sendiri. Saya mengalami dengan kesadaran dan sebagai orang yang berpendidikan. Saya sadar, karena saya sudah terdidik, sudah berpendidikan tinggi.

Saya mulai menjadi mahasiswa di Yogyakarta itu tahun 1958. Saya belajar di Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Jurusan Sejarah, UGM. Latar belakang saya Muslim. Oleh karena itu waktu kuliah di UGM saya ikut menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam [HMI]. Ketua Komisariatnya waktu itu adalah Taufik. Saya anggota Komisariat HMI Fakultas Sastra.

Waktu itu hubungan antar mahasiswa *ya* rukun-rukun saja. Ada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang besar, seperti HMI, GMNI, CGMI, PMKRI, GMKI, PERHIMI²⁷ tapi hubungannya *ya* baik-baik saja. Di jurusan saya ada sekitar 50-an mahasiswa dan kami rukun bahkan merasa sebagai satu korps. Begitu. Tak ada masalah. Itu situasi antara tahun 1958-1959. *Seneng* rasanya jadi mahasiswa waktu itu.

Tapi sedikit demi sedikit, suasananya menjadi makin panas, dan makin hari makin meningkat. Khususnya mulai tahun 1963. Kelompok-kelompok itu mulai saling bersaing. Mulai ada persaingan di sana-sini. Seiring dengan meningkatnya suhu politik, persaingan antar mahasiswa mulai terasa. Apalagi atmosfer waktu itu adalah atmosfer “revolusioner”. Persaingan antar organisasi mahasiswa makin meningkat.

27 HMI: Himpunan Mahasiswa Islam; GMNI: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia; CGMI: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia; PMKRI: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia; GMKI: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia; PERHIMI: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia [Tiong hoa].

Bagaimana mengukurnya? Dengan mengamati proses pemilihan Ketua Senat mahasiswa. Suasana terasa hangat, lalu menjadi panas. Terjadi konflik yang berat antara tokoh-tokoh dari masing-masing kelompok. Kalau di HMI tokoh-tokoh yang maju itu antara lain *ya* Taufik itu tadi, kemudian juga Yusuf Sakir. Ini Yusuf Sakir yang pernah menjadi anggota DPR itu. Ada juga almarhum Muhamad Qolil. Kalau dari CGMI ada Mas Tjipto. Ini Sutjipto yang juga dikenal sebagai Sutjipto pendek, bukan F.A. Sutjipto yang kelak menjadi Dr. F.A. Sutjipto. Ada juga Suparto Ibnu Ruslan. Dia anggota CGMI. Pokoknya di antara tokoh-tokoh itu terjadi persaingan. Persaingan untuk menjadi Ketua Senat Mahasiswa. Waktu pemilihan yang menang bukan CGMI tetapi GMNI karena lebih populer. Pemilihannya sendiri berjalan dengan enak, tetapi situasinya sudah mulai panas. Itu tahun 1962.

Persaingan Terbuka

Situasi panas pada waktu itu juga tergambar dengan persaingan dan klaim “golongan” antar kelompok. Yang satu mengklaim diri “komunis”, yang lain “nasionalis”. Sementara itu HMI disebut sebagai “kontra revolusioner”. Tapi HMI juga berani. Pokoknya tiga-tiganya sama-sama berani. Maklum, semua itu terdiri dari anak-anak muda.

Dalam situasi demikian, sebagai mahasiswa ikatan dinas, saya ini “tahu diri”. Untuk mahasiswa ikatan dinas seperti saya ini ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Sebenarnya bebas, tapi bagaimana pun ‘kan ada ikatan dengan pemerintah.

Selesai studi dan mendapatkan gelar *Bachelor of Arts* [B.A.] saya langsung mencari kerja di Jakarta. Dan sejak itu, antara tahun 1962-1965, saya tidak tahu lagi bagaimana situasi di Yogyakarta. Tapi katanya makin memanas. Di Jakarta saya bekerja sambil kuliah

di Fakultas Sastra UI [Universitas Indonesia]. Nah, di sini ternyata situasinya juga sama, yakni sama-sama panas.

Di UI terjadi persaingan antara CGMI, GERMINDO, PMKRI, GMKI, dan lain-lain. Waktu itu ada juga PERHIMI. PERHIMI itu merupakan perhimpunan mahasiswa Indonesia keturunan China. Itu sebuah kelompok minoritas. Orientasinya “kiri”. Yang kiri itu misalnya CGMI dan PERHIMI. GERMINDO belum ada, karena GERMINDO itu zaman saya. Yang dianggap “kanan” itu misalnya HMI, PMKRI, GMKI dan PMII, tapi PMII itu kecil.

Ketika saya di Jakarta [antara tahun 1962-65, ed.], sudah terasa sekali adanya konflik yang panas antara HMI lawan mahasiswa yang posisinya tengah tapi revolusioner, yakni GMNI. GMNI itu kekiri-kirian. Kalau yang kiri betul itu CGMI dan GERMINDO. Di Fakultas Sastra UI, saya tidak melihat adanya PERHIMI. Mungkin ada, tetapi saya tidak melihatnya.

Persaingan di antara mereka makin memanas. Bagaimana diketahui? *Ya* waktu perploncoan. Itu kelihatan sekali. Di Yogya dulu perploncoan berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi di Fakultas Sastra UI perploncoan itu panas. Kalau di Yogya panasnya itu hanya terjadi saat pemilihan Ketua Senat, tapi di UI terjadi suasana panas baik waktu pemilihan Ketua Senat maupun waktu perploncoan. Sangat jelas. Saya tidak terlibat, tapi saya lihat sampai ada yang berkelahi segala. Tapi saya tidak banyak terlibat, karena sejak tahun 1962 itu saya sudah berstatus sebagai pegawai negeri.

Suasana panas di Jakarta kelihatan dari adanya demonstrasi-demonstrasi di jalanan. Tahun 1962-1965 suasana memanas. Waktu itu demonstrasi boleh. Pertentangan politik yang terjadi itu antara yang “revolusioner” dan yang “kontra-revolusioner”. Konon situasi memanas sejak adanya pidato Presiden Bung Karno yang berjudul

“*The Rediscovery of Our Revolution*” tanggal 17 Agustus 1959. Terjadi persaingan publik antara [Partai] Murba dan Partai Komunis Indonesia [PKI]. Keduanya memang kiri, tapi berbeda. Kalau Murba itu dasarnya ‘kan Materialisme, Dialektika, Logika [*Madilog*], tetapi kalau PKI dasarnya adalah MDH, yakni Materialisme, Dialektika, dan *History* atau Sejarah. Mereka ini satu atap, tapi berbeda. Mereka bahkan merupakan musuh bebuyutan. Terjadi tuduh-menuduh antara PKI dan Murba. Itu persaingan yang paling sengit, nomor satu. Yang nomor dua adalah persaingan antara Tentara lawan PKI, atau PKI lawan Tentara. Jadi PKI itu di satu sisi melawan Murba, tetapi di sisi lain juga melawan Tentara. Kalau Partai Nasional Indonesia [PNI] itu politiknya lain, mendua. Konsep mereka Marhaenis. Persaingan terjadi antara PNI dengan Partai Indonesia [Partindo]. Ini persaingan terbuka yang bisa kita baca di koran-koran. Ini persaingan di bidang politik.

Di bidang budaya dan sastra terjadi pula persaingan antara kelompok Islam dan Lembaga Kebudayaan Rakyat [Lekra]. Kelompok Islam antara lain diwakili oleh Hamka, sedang kelompok Lekra diwakili oleh Pram [Pramoedya Ananta Toer]. Hal itu misalnya tampak dalam persaingan antara *Harian Rakyat* dengan rubrik “Bintang Timor”-nya yang kiri dan koran *Merdeka* serta *Berita Indonesia* dan lain-lain. Waktu itu, koran-koran terbagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok kiri, tengah, dan kanan. Di tengah ada koran yang bernama *Suluh Indonesia*, yang haluannya adalah Marhaenisme. *Suluh Indonesia* itu haluannya tengah tetapi agak kekiri-kirian dan dimiliki oleh PNI. Anehnya, Ketua Redaksi *Suluh Indonesia* itu Sajuti Melik. Padahal ini milik PNI. Suara *Suluh Indonesia* itu tidak bisa ditebak. Tapi tujuannya jelas untuk mempertahankan Sukarnoisme.

Jadi jelasnya, waktu itu kalau yang kiri itu berhaluan Marxis sedang yang kanan itu jelas berhaluan Islam. *Nah*, kalau yang tengah itu tidak jelas. Pokoknya ingin bahwa Indonesia itu *status quo* dan Sukarno. Itu yang saya lihat. Ekonominya waktu itu tetap berdasar pada Demokrasi Ekonomi [Dekon]. Artinya, ekonomi yang ada di bawah kontrol langsung negara. Semua ini sifatnya terbuka, bisa dibaca di koran-koran. Semuanya berkonfrontasi satu sama lain, dan *gor-goran* [berlomba-lomba] dalam menggunakan istilah “revolusioner”.

Nah, soal persaingan terbuka yang terjadi antara Tentara dan PKI. PKI menyerang Tentara dengan konsep “Nasakom Bersatu”. Tentara menjawab serangan tersebut dengan mengatakan “Nasakom Jiwaku”. Ini menjadi *political issue* yang serius. Tentara mendukung Sukarno, tetapi anti-PKI. PKI mendukung Sukarno tapi anti-Tentara. Ini *kan* repot. Ini juga merupakan persaingan yang terbuka pada waktu itu.

Luar Biasa

Sekarang mengenai peranan Pak Karno²⁸, Presiden Sukarno. Pada saat yang sama sejak 1959, Presiden Sukarno mencanangkan apa yang ia sebut sebagai “Revolusi Baru”. Idenya mungkin dari Revolusi Perancis. Dalam Revolusi Perancis [1789] itu *kan* ada dua tahap. Ada tahap pertama revolusi, lalu disusul revolusi tahap kedua yang dipimpin oleh Danton, Robespierre, dan Marat. Revolusi kedua ini dalam sejarah dunia sering disebut sebagai “*the second revolution*”. *Nah*, sejak tahun 1959 Bung Karno memiliki cita-cita mulia agar terjadi “revolusi kedua” itu.

Sebetulnya yang menjadi keinginan dia itu sangat agung dan mulia. Kalau dibahasakan mungkin bunyinya begini, “Saya ingin

28 Narasumber kadang-kadang dengan sengaja menggunakan istilah ini untuk Presiden Sukarno.

supaya sebelum saya mati Bangsa Indonesia ini bersatu—bersatu antara ideologi-ideologi “Nas” [Nasionalis], “A” [Agama] dan “Kom” [Komunis]”. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar ’45 yang akan mendukung sosialisme Indonesia, sebab cita-cita revolusi adalah terwujudnya Sosialisme Indonesia atau Keadilan Sosial. Kembalilah ke cita-cita Revolusi.” Sukarno menilai bahwa demokrasi yang ada sejak Konferensi Meja Bundar [KMB] 1949 hingga tahun 1959 itu disebut Demokrasi Liberal. Yang menyebut “Demokrasi Liberal” itu Sukarno. Hal ini bisa dilihat dari pidato-pidato Bung Karno waktu itu.

Bung Karno menyampaikan konsep “*samen-bundelling van alle revolutionaire krachten*”—yakni menghimpun semua kekuatan sosial-politik yang ada dalam satu kekuatan revolusioner. Cita-citanya sangat mulia. Bung Karno mau menjungkir-balikkan nilai-nilai lama yang sudah lapuk dengan nilai-nilai yang baru. Mirip dengan gagasan Nietzsche. Ia mau menjungkirbalikkan nilai-nilai liberal. Untuk bisa menjungkirbalikkan *ya* harus ada “*samen-bundelling van alle revolutionaire krachten*” itu tadi. Itu maksudnya Pak Karno.

Tingkah-laku Sukarno ini diamati baik oleh PKI maupun Tentara. Mereka setuju. Ada konsep “Nasakom Jiwaku”, mendukung demokrasi, dan sebagainya. PKI mengatakan itu tadi, “Nasakom Bersatu” dan ingin mendominasi. Dalam rangka memperoleh simpati masyarakat dan sebagainya, PKI menyatakan ofensif revolusioner. Ini semua dinyatakan terbuka. Kalau Anda buka koran *Harian Rakyat*, akan sering Anda temukan istilah: ofensif revolusioner. Jadi semua kekuatan dikerahkan melalui mobilisasi massa dan sebagainya untuk tujuan ofensif revolusioner itu. Di segala bidang. Misalnya dalam melakukan aksi sepihak.²⁹

29 Pengambilalihan tanah secara paksa oleh rakyat berdasarkan UUPA (Undang-undang Pokok Agrarian) dan UUBH (Undang-undang Bagi Hasil) tahun

Dalam bidang budaya dan sastra, ketegangan juga terjadi. Misalnya ketegangan antara kelompok KKPI³⁰ lawan Lekra. KKPI itu kemudian disebut Kelompok Manifes Kebudayaan, disingkat Manikebu. Istilah Manikebu itu bernada peyoratif atau makian, karena diasosiasikan dengan mani-nya kerbau. Semua ini bisa dibaca dalam buku-buku yang membahas situasi waktu itu, misalnya buku *Sebelum Prahara* karya Rosihan Anwar.

Ketegangan dalam bidang politik yang terjadi adalah pada bulan Agustus tahun 1960. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia [PSI] dibubarkan oleh Presiden Sukarno [melalui UU No. 200/1960]. Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI ditangkapi semua dan dikurung, khususnya di Wisma Jl. Keagungan, Jakarta. Ada juga yang ditahan di tempat lain. Ini semua bisa dibaca di bukunya Pak Mochtar Lubis, *Harimau, Harimau*. Terjadi pula polemik yang dilancarkan oleh Partai Murba. Ada buku tentang itu. Polemik antara *Harian Rakyat* dan *Merdeka*. Njoto terlibat dalam polemik ini. Ini menarik, polemik antara Murba dan PKI, Murba dan Komunis, antara Tan Malakais dan Komunis. Menarik. Kemudian, PKI menghimpun apa yang disebut sebagai “Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi”, yakni ajaran-ajaran Bung Karno. Ini mirip dengan “buku merah” yang berisi ajaran-ajaran Mao Tze-tung. Ajaran-ajaran itu dimuat semua surat kabar.

Hal yang aneh pada waktu itu adalah tulisan di koran *Suluh Indonesia*. Ada reaksi terhadap “Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi” itu, yakni dengan cara memuat semua tulisan dan pidato Bung Karno dari awal sampai akhir, tiap hari. Itu dimaksudkan sebagai reaksi terhadap tulisan-tulisan Sajuti Melik yang nama samarannya S. Juti, yang judulnya “Memahami Sukarnoisme”. Itu reaksinya. Ini

1960. Kebanyakan usaha ini dipelopori oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) yang bernaung di bawah PKI. ed.

30 KKPI: Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (*KKPI*), Februari 1964.

aneh. *Kok* “memahami Sukarnoisme” itu pertama kali dimuat dalam koran yang namanya *Suluh Indonesia*, yang adalah milik PNI. Jadi studi tentang PNI ini penting *lho*, karena media massanya *kok* seperti Murba, tapi kemudian kekiri-kirian.

Ini semua yang bergerak di sekitar tahun 1965. Waktu itu membaca koran itu menyenangkan. Koran-koran laris, karena semua bicara soal politik. Tidak ada koran yang asal-asalan. Isi politiknya jelas. Begitu sebuah koran itu terkesan bergaya “koran kuning” wah, pasti dipandang tidak beres. Pasti tidak akan mendapat Surat Izin Terbit (SIT). Itu yang berlangsung sampai tahun 1965, sampai terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September [G30S]. Itu yang namanya progresif revolusioner. Suasana demikian juga amat terasa di Universitas Indonesia di mana saya belajar, khususnya menyangkut masalah perlu atau tidaknya perploncoan.

Yang juga ramai waktu itu tentu saja adalah soal Konfrontasi dengan Malaysia. Itu tahun 1964. Itu juga ramai. Nah, situasi yang paling ramai itu adalah pertentangan antara kelompok “revolusioner”, istilah PKI, melawan kelompok “kontra-revolusioner”. Kalau ada orang atau kelompok yang sampai disebut kontra-revolusioner, *ya “finished”*, habis. Semua itu bisa dibaca di media massa.

Dalam bidang ekonomi, konsep Bung Karno itu hebat. Luar biasa. Misalnya soal “Berdikari” [berdiri di atas kaki sendiri]. Saya mengagumi cita-cita Bung Karno dalam hal ini. Cita-citanya untuk mengubah masyarakat luar biasa. Dalam istilah yang ia ciptakan, Bung Karno ingin mengubah Indonesia dari “bangsa tempe” menjadi bangsa yang terhormat. Bung Karno ingin menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang memimpin bangsa-bangsa yang tertindas atau terjajah. Terhadap negara-negara yang belum maju, Bung Karno tidak mau menyebut mereka sebagai “*under-developed*” melainkan “*developing*”

countries”. Sebenarnya dalam Konferensi Colombo di Yogya masih mau digunakan istilah “*under-developed*”. Tapi Bung Karno marah, lalu minta supaya digunakan istilah “*developing countries*”. Kalau tak salah konferensi itu diadakan tahun 1960-an. Para tamu konferensi yang datang dari luar negeri tinggal di tempat yang namanya Kompleks Colombo dan letaknya dekat dengan Kampus Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta sekarang. Oleh karena itu, jalan di dekat situ sekarang bernama Jalan Colombo. Konferensinya sendiri diadakan di beberapa lokasi, termasuk di kampus Universitas Gadjah Mada.

Karirnya Bagus

Tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 itu sumber saya ada dua, yakni pengalaman pribadi dan dari hasil studi. Kalau pengalaman saya pribadi itu begini. Waktu itu saya tinggal di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Saya ikut tinggal bersama teman dari ayah saya. Namanya Mukhlas Rowi. Dia itu Kepala Pusat Rohani [Pusroh] Islam. Saya ikut dia dari tahun 1962 hingga tahun 1966. Dia menjadi semacam Bapak saya yang kedua. Beliau itu staf-nya Pak Ahmad Yani. Kantornya tidak jauh dari Gereja Cathedral Jakarta. Ketika terjadi peristiwa G30S itu saya tidak tahu. Pak Mukhlas Rowi juga tidak tahu. *Ya* memang itu *kan* kudeta. Jadi rahasia.

Lama kemudian saya pikir-pikir, saya lakukan studi, mengapa banyak orang tidak tahu [tentang kudeta tersebut], kecuali mereka yang berkepentingan. Saya lalu baca buku yang judulnya *The Coup d’Etats*. Isinya studi tentang kasus-kasus kudeta. Nama penulisnya saya lupa. Tapi dia orang Amerika. Tentang Peristiwa 1 Oktober [1965] itu setelah saya pikir-pikir, ternyata persis dengan apa yang dikatakan dalam buku *The Coup d’Etats* itu: bagaimana direncanakan, bagaimana dilaksanakan, dan sebagainya. Pak Karno memang dikudeta. Teori

dan poin-poinnya mirip dengan yang diuraikan dalam buku itu. Ada buku-buku lain yang juga bicara tentang kudeta. Sifat kudeta memang rahasia.

Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya pelaku kudeta itu? Jelas bahwa kudeta itu dipimpin oleh satu kelompok, satu intrik, yang rahasia, diketuai oleh Letnan Kolonel Untung. Tahap pertama kudeta itu sukses, tetapi tahap keduanya gagal. Sudah ada banyak analisis tentang ini. Bagian kedua dari kudeta ini terbuka, sehingga banyak orang mengetahuinya. Lalu muncullah seorang tokoh, namanya Soeharto. Pertanyaannya, mengapa Soeharto muncul sehingga Untung harus berhadapan dengannya? Siapa sebenarnya Untung? Mengapa dia memimpin sebuah pasukan gerakan kudeta? Apa ideologinya?

Kalau Anda baca harian *Kompas*, Untung itu nama aslinya Untung Kasmuri. Bukan Samsuri. Ia adalah anggota Batalyon Digdo. Ini adalah salah satu batalyon dari Divisi Surakarta, di bawah Brigadir Slamet Riyadi. Pak Digdo itu lengkapnya Sudigdo Honggotirtono. Dulu untuk memberi nama batalyon itu kan meniru zaman Jepang. Jadi kalau ada batalyon *ya* dinamakan menurut komandannya. Jadi ada Batalyon Bedjo, ada Batalyon Malau, Batalyon Mukhlas, Batalyon Sumitro, dan sebagainya.

Pak Digdo itu mantan Pasukan Pembela Tanah Air [PETA]. Tetapi Pak Digdo ini berhaluan kiri. Dan dia juga terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948. Dia ikut berontak di Solo. Nah, salah satu anggota Batalyon Digdo itu namanya Untung. Yang jelas dia itu *kan* bekas Bintara. Kalau Bintara, zaman dulu itu, Nomor Registrasi Personil [NRP]-nya itu enam angka. Kalau Perwira itu lima angka. Itu dulu lho *ya*? Yang sekarang saya tidak tahu. NRP itu sampai mati. Kemudian karir Untung ini naik terus sampai jadi Komandan Banteng Raiders. Di Semarang. Kalau tak salah dia menggantikan Pak Sugijono. Ini

Letnan Kolonel Infantri Sugijono, Kepala Staf Korem 72 yang kelak dibunuh di Yogya itu. Dia wakilnya Brigjen Katamso, Komandan Korem 72 Yogyakarta. Tapi Untung itu sebelumnya, pada zaman Pak Harto di Trikora, dia berada dalam Kesatuan Angkatan Darat Mandala yang diterjunkan di Irian Barat. Dan kata Ben Anderson itu, Untung pernah jatuh di kamp Belanda, lalu ditawan atau apa... Pokoknya nasibnya jelek-lah dia itu. *Nah*, dalam kemiliteran itu memang, *yes*, orang ini karirnya bagus. Dia bisa naik jenjang menjadi militer lapangan, begitu, walaupun pendidikannya kurang. Tapi saya melihat bahwa kalau bekas Batalyon Digdo itu landasan ideologinya sudah komunis. Mungkin kemudian ada yang berubah, ada yang tetap, dan sebagainya. Itu hal lain.

Begitu Dekat

Nah, lalu banyak yang menanyakan bagaimana hubungan dan ikatan antara Soeharto dengan Untung, dan sebagainya. *Lha* memang, dalam Tentara itu ada ikatan-ikatan tertentu. Orang yang tidak mempelajari militer itu sering salah menafsirkan. Dalam sejarah Tentara kita, Tentara Nasional Indonesia [TNI] itu berangkat dari Tentara Revolusi. Tentara Revolusi ini merupakan bagian dari Generasi'45 dan berlangsung sampai katakanlah sekitar tahun 1982-an. Si Katharine McGregor [penulis buku *History in Uniform*, ed.] itu keliru. Dia tidak tahu bagaimana Tentara Revolusi ini. Pada zaman Revolusi itu, kita ini *kan* tidak punya tentara. Yang ada adalah tentara rakyat atau *people's army*. Waktu itu semua orang bebas, boleh angkat senjata.

Yang namanya organisasi tentara itu '*kan* baru kemudian, yakni setelah tanggal 5 Oktober 1945 itu. Itu pun mulai dengan Badan Keamanan Rakyat [BKR]. BKR lahir karena adanya anjuran, bukan karena dibentuk. BKR lahir karena dianjurkan oleh Pak Karno, "Hai,

kamu akan dibentuk tentara”. Tapi waktu itu rakyat *kan* memang sudah sadar mau berjuang untuk kemerdekaan. Mereka lantas ada yang masuk BKR, ada yang masuk laskar-laskar, yakni laskar-laskar dengan segala latar belakang ideologinya. Pokoknya semuanya revolusioner. Lalu lahirlah apa yang disebut sebagai “tentara revolusi”. Tapi untuk paham soal “*revolutionary army*” ini dibutuhkan studi secara khusus. Kalau saya sendiri, saya membandingkan Tentara Revolusi kita itu dengan bagaimana terbentuknya tentara revolusi di Uni Soviet. Juga, dengan bagaimana terbentuknya tentara revolusi Amerika Serikat. Ingat, tentara Amerika itu bermula dari tentara revolusi juga. Kalau tentara Malaysia, India, Pakistan, dan sebagainya itu bukan tentara revolusi tapi “tentara reformasi”. Banyak buku bisa dibaca tentang hal ini.

Jadi Tentara Revolusi itu karakternya khusus. Semua begitu. Tentara China juga begitu. Yang pertama karakternya itu adalah kuatnya solidaritas atau rasa persaudaraan di antara mereka. Dalam bahasa sekarang, jiwa korps-nya sangat kuat. Yang kedua, demokratis. Tentara Revolusi itu sifatnya demokratis. Jadi Tentara kita itu berangkat dari ciri-ciri seperti itu. Jadinya *ya* demokratis. Memang agak aneh, tentara *kok* demokratis. Itu *kan contradictio in terminis*. Tapi ini tentara revolusi. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang yang menulis tentang militer di Indonesia itu. Padahal memang kenyataannya begitu, yakni bahwa Tentara kita berangkat dari latar belakangnya sebagai tentara revolusi. Terjadi ikatan satu korps, satu jiwa: ini “Bapak”-mu, yang lain anak-anaknya.

Selain itu, tentara revolusi juga merasa bahwa mereka memiliki hak-hak politik. Mereka tidak memisahkan antara politik dan militer. Mereka memandang diri sebagai pejuang, baik pejuang bersenjata maupun pejuang politik. Yang melakukan pembagian antara pejuang

politik dan pejuang bersenjata itu Nugroho [Notosusanto]. Tapi yang jelas semua mengaku diri sebagai pejuang, sebagai *freedom fighters*. Itulah karakter dari tentara revolusi.

Tapi kalau masalah pendidikan ya jangan ditanya-lah. Waktu itu orang buta huruf juga diterima sebagai tentara. Tapi jiwa mereka untuk mempertahankan hak untuk merdeka itu sangat kuat. Jadi motivasi perjuangannya itu sangat kuat. Bahkan komandan-komandan saja hanya Sekolah Menengah Pertama [SMP] *kok* sekolahnya. Lihat saja riwayat tentara-tentara itu. Memang ada yang sekolahnya tinggi atau yang akademisi, tapi itu minoritas. Bisa dihitung dengan jari. Misalnya Nasution. Tapi kebanyakan *ya freedom fighters* itu. Bayangkan saja, seperti Pak Bedjo itu *'kan* buta huruf. Dia komandan batalyon. Demikian juga Malau, Abdullah yang tukang becak, semua itu komandan batalyon. Dan semuanya jalan. Mereka dihormati oleh anak-buah masing-masing. Jarang, tentara kita yang mengerti politik dan sebagainya. Tapi solidaritasnya sangat tinggi. Di Uni Soviet juga begitu. Jadi sifat tentara revolusi yang demikian itu sifatnya universal. Maka kita di Indonesia juga begitu. Begitu merasa satu korps, *ya* sudah mereka sangat dekat.

Oleh karena itu, aneh bahwa orang menebak-nebak kedekatan Soeharto dengan Untung. Ketika Soeharto datang ke pernikahan Untung lalu ditafsirkan lain... *Ya gimana sih, kan* bekas komandan batalyon-nya? Untung itu mantan komandan batalyon yang diterjunkan di Irian. Sementara itu Pak Harto *ya* tentara tulen. Ada banyak cerita tentang Pak Harto yang menyatakan bahwa Pak Harto itu semangat korps-nya sangat kuat. Jiwa korpsnya kuat. Sementara itu Untung adalah anak buahnya. Ini yang tidak dipahami oleh beberapa peneliti yang non-militer. Ini tidak dipahami. Bagi Pak Harto siapa pun yang menghadap dia yang bekas anak buahnya, tentu dia terima dan dia bantu. Ini terjadi karena jiwa korps-nya sangat tinggi.



Soeharto dan Keluarga berlatih menembak (Ist.)

Yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Pak Harto saja. Juga pada Bung Tomo, misalnya. Saya pernah ke rumahnya yang terletak di Jl. Blitar itu. Di sana saya lihat tamunya itu banyak sekali dan mereka ini adalah anak buah Bung Tomo. Bagaimana itu mungkin kalau bukan karena jiwa korps-nya luar biasa. Meskipun sekian tahun sudah lewat, Bung Tomo masih menganggap saya sebagai anak buahnya, dan dia merasa diri sebagai “bapak buah” saya. Semua itu masih berlaku pada waktu itu, yakni di antara tentara Angkatan ’45. Jadi tidak malu-malu anak buah itu meminta sesuatu kepada bekas atasannya. Kalau sekarang, *wah*, lain. Beda sekali.

Dari jiwa korps yang kuat itu memang lalu lahir “bapakisme” itu. Yang terjadi bukan soal *primus inter pares*, tapi hubungan “patron-klien”. Para peneliti non-militer biasanya tidak memahami keadaan para tentara revolusi ini. Bagi seorang tentara revolusi, meskipun tidak senang pada seseorang, tetap saja akan bersikap hormat pada orang

itu, karena dia merupakan teman seperjuangan. Ini tidak dipahami oleh beberapa peneliti non-militer.

Yang kita bicarakan tadi memang kasus Pak Harto *ya*. Tapi hal serupa juga terjadi di Mesir atau di mana saja. Tentara revolusi itu patriot, pembela negara. Pak Nasution pernah mengatakan, tentara itu “pemilik saham utama” dari Republik ini. Itu kata Pak Nas. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa korps militer itu sangat kuat. *Nah*, ini yang sering tidak dipahami oleh para penulis sejarah militer tersebut. Kalau mau tahu bagaimana hubungan Soeharto dan Untung *ya* [pahamilah] hubungan Komandan atau Panglima dan anak buah, gimana *sib*? Kalau ada bekas anak buah yang menghadap bekas Panglima, tentu sang bekas Panglima sudah tahu bahwa bekas anak buah itu sedang ada apa-apa. Maksudnya sedang ada masalah dengan soal kesejahteraan dan sebagainya, entah itu anaknya mau sekolah, atau sedang ada anggota keluarga yang sakit, atau apa. Memang hubungan kesatuan sudah putus, tapi hubungan kejiwaan *kan* tetap ada. Jadi kalau ada bekas komandan memenuhi undangan bekas anak buah itu biasa. Saya sendiri juga akan begitu. Itu merupakan suatu kehormatan. Kehormatan yang sifatnya timbal balik antara dia dan saya.

Jadi hubungan antara Pak Harto dengan Untung itu jangan dilihat lain selain sebagai bagian dari karakter tentara pejuang. Hubungan antara anak buah dengan komandan itu begitu dekat. Kalau bawahan mengatakan “Mohon menghadap”, komandan sudah tahu, pasti bawahan itu sedang membutuhkan sesuatu dan biasanya diberikan. Itu biasa di antara tentara Angkatan ’45.

Pulau Buru

Tentang Pak Harto sendiri, Pak Harto itu *kan* berangkatnya dari seorang kopral di KNIL,³¹ sebelum zaman perang. Dulu, dia masuknya dari Gombang, Jawa Tengah. Di sana, dia mulai pelatihan prajurit. Di sana, dia sekolah kadernya. Di sana, latihan dasarnya. Kemudian dari sana, dia naik-naik terus pangkatnya sampai akhirnya menjadi Jenderal.

Waktu terjadi peristiwa Gerakan 30 September itu, Pak Harto tahu siapa yang memimpin, yakni Untung, karena disiarkan di Radio Republik Indonesia [RRI]. Sebetulnya, Pak Harto juga sudah tahu siapa Untung itu. *Kan* Untung anak buahnya. Pak Harto juga tahu kalau Untung itu dekat dengan PKI, dengan komunis. *Nah*, ini yang jarang diketahui umum. Mengapa Soeharto bertindak? Tentang hal ini, ada banyak interpretasi. Itu pun macam-macam.

Padahal sebenarnya begini. Waktu itu di Angkatan Darat Pak Harto *kan second in command* setelah Jendral A. Yani. Ia komandan nomor dua. Dia Panglima KOSTRAD. Komandan pertama itu namanya Jenderal. Tahun 1962 bulan Juni, Presiden Sukarno mengadakan reorganisasi Angkatan Bersenjata Indonesia. Ini informasi dari hasil studi *lho ya?* Dia mengubah sistem yang lama yakni sistem staff, seperti Kepala Staff Angkatan Darat, Kepala Staff Angkatan Laut, Kepala Staff Angkatan Udara menjadi Panglima. Yang dulu Kepala Staff itu sekarang menjadi Panglima. Jadi sekarang ada Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara, Panglima Kepolisian. Dengan kata lain, yang ada sekarang adalah ke-panglimaan. Panglima-panglima angkatan ini dibawah oleh Panglima Tertinggi, atau Pangti. Ini *commander-in-chief*-nya.

31 *Het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger*, Tentara Kolonial Hindia Belanda.

Kalau di Angkatan Darat Panglimanya itu Jendral A. Yani. Di bawah Panglima Angkatan Darat (PANGAD) ada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD). Meskipun punya komando, KOSTRAD itu hanya cadangan. Tidak punya pasukan khusus. Pasukannya tersebar. KOSTRAD ini dipimpin PANGKOSTRAD dan berada di bawah PANGAD. Selain membawahi PANGKOSTRAD, PANGAD juga membawahi KODAM-KODAM beserta PANGDAM-nya masing-masing.

PANGKOSTRAD tidak punya pasukan. Pasukannya tersebar. Tersebar pada KODAM-KODAM. Untung dan Banteng Raiders itu pasukan KOSTRAD, atau lebih tepatnya di bawah KOSTRAD. *Kan* ada di Semarang? Misalnya Brigade Kujang. Itu di bawah KOSTRAD. Tapi tempatnya *ya* di sana, tidak di Jakarta. Di Solo juga ada brigade. Itu di bawah KOSTRAD. KOSTRAD sendiri tidak punya pasukan. Nah, kalau PANGDAM itu membawahi teritorial. Waktu itu istilahnya pakai A, B, C, dan sebagainya. Bukan pakai nomor. Misalnya Batalyon Katamso yang di Kentungan, Yogyakarta, itu batalyon teritorial. Itu di bawah PANGDAM. Nah, soal pemeliharaan itu urusan setempat. Jadi pembinaan itu di bawah KODAM, bukan oleh KOSTRAD. KODAM tidak boleh menggerakkan pasukan.

Nah pemimpin tertinggi Angkatan Darat *kan* Yani? Kalau yang kedua *ya* Soeharto, sebagai *second in command*. Maka, mengapa pada tanggal 1 Oktober 1965 itu Soeharto bertindak? Karena dia tahu bahwa komandannya dibunuh. Enam perwira tinggi Angkatan Darat *kok* dibunuh. Siapa yang membunuh? Tahu-tahu Untung. *Wah*, kurang ajar Untung ini. Di sini lalu muncul jiwa korps-nya yang tinggi. Lalu dia meneliti siapa Untung itu. *Kok* Untung berkhianat? Lalu siapa di belakangnya? Ternyata PKI. Selain PKI siapa lagi yang kira-kira mendukung Untung? Ternyata Angkatan Udara. Itu ada

hasil interogasinya, memang. Pak Harto menganalisis semuanya yang terjadi tanggal 1 Oktober itu. Cepat sekali. Soeharto memang hebat. Harus diakui itu, kecepatannya dalam menganalisis situasi. Siapa ini? Untung. *Wah*, Untung mesti PKI, begitu dia langsung menyimpulkan.

Bagaimana Pak Harto tahu bahwa itu Untung? Tentu saja, karena sudah kenal sebelumnya. Untung anak buahnya. Di mana basisnya? Halim [Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma]. Siapa di situ? Omar Dhani. Lalu dipanggilah Resimen Para Komando Angkatan Darat [RPKAD] untuk mengamankan situasi. Untuk merebut kembali keadaan. Itu namanya *counter-coup*. Jadi ada *coup d'etat*, lalu ada *counter-coup* untuk menggagalkannya. Lalu *coup* itu gagal. Nah sekarang siapa pelakunya? PKI. PKI *kan*? PKI itu unsur Nasakom. Angkatan Darat lalu bertanya kepada Bung Karno, “Pak bagaimana PKI ini?” Bagi Angkatan Darat ini sudah jelas, “Mereka telah membunuh rekan-rekan saya.... Jadi singkatnya bagaimana Pak?!” Angkatan Darat atau Soeharto ini *keukeuh* minta supaya PKI dibubarkan. Nah, Sukarno berada dalam cobaan.

Singkatnya saja *ya*? Pokoknya, Angkatan Darat itu tidak bisa terima bahwa Panglimanya dan kawan-kawannya dibunuh oleh PKI yang menggunakan Untung. Lalu mengadu pada Bung Karno: Pak bagaimana ini PKI, sudah jelas, dan sebagainya. Tapi tampaknya, Bung Karno ragu-ragu atau apa. Tapi ini tafsiran dari saya *lho ya*? Berdasar pada apa yang saya baca mengenai dialog-dialog Sukarno dengan Soeharto, pada intinya Soeharto mengatakan, “Pak, bubarkan PKI, Pak. Nanti kalau PKI sudah dibubarkan *ya* kita aman, Pancasila aman”. Ini ada dialognya. Lalu Pak Karno ya seperti biasa, “To [maksudnya Soeharto], kita itu sudah punya Nasakom. Dan Nasakom itu sudah saya populerkan ke seluruh dunia. Kita ini punya kesatuan

antara nasionalis, agamawan, dan komunis. Semuanya jadi satu. Lha kalau saya bubarkan, lalu bagaimana konsep saya? *Kan* saya malu, malu pada dunia.” Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Karno mengatakan, “Kalau PKI saya bubarkan, pemimpin-pemimpin PKI akan melakukan gerilya politik. Kamu akan sulit menghadapi mereka.” *Nah*, ini ditangkap oleh Pak Harto, lalu dianalisis. Dia berpikir, “*Kok* Pak Karno, Pak Presiden, ini tidak mau benar-benar membubarkan PKI. Hanya janjiiii... saja. Janji terus. Dia hanya *delaying action*.” Di mata Soeharto, pemimpin begini sudah tidak bisa dipercaya. Pak Harto sudah tidak percaya lagi pada Pak Karno. Pokoknya wibawa Sukarno di mata Angkatan Darat sudah turun. Di mata Pak Harto wibawa Sukarno sudah merosot. Maka kritislah situasinya. Di mata Angkatan Darat, Sukarno itu sudah menjadi tidak adil. Dia menjadi sangat kiri.



*Soeharto di lokasi Monumen untuk para korban kekejaman
1 Oktober 1965 (Ist.)*

Kesimpulannya, kalau begitu Bung Karno ini membela PKI. Itu yang pertama. Yang kedua, soal gerilya politik, omongan Bung Karno itu dianalisis juga oleh Soeharto. Soeharto berpikir, “Daripada... daripada *direcokin* [diganggu] oleh pemimpin-pemimpin PKI, *ya* tangkapi saja itu pemimpin-pemimpin PKI, dan kader-kadernya. Kumpulkan saja di satu tempat.” Sehingga *kan* lahirlah gagasan mengenai [pembuangan ke] Pulau Buru itu. Jadi dasarnya *ya* perkataan Bung Karno sendiri. Bagi Soeharto, daripada diganggu oleh gerilya politik, lebih baik *ya* mengambil tindakan tertentu untuk menghindarinya. Jadi kata-kata Pak Karno itu diterima secara tersendiri oleh Soeharto dengan menggunakan pikirannya sendiri. Banyak yang ditangkap, tapi itu lalu menimbulkan problem berkaitan dengan soal memberi makanan dan sebagainya. Susah itu. Maka perlu dikumpulkan di satu tempat. Sekali lagi dari situ kemudian lahirlah pikiran untuk mengirim mereka ke Pulau Buru.

Sukarno Bisa Kecolongan

Nah, sementara itu terjadi pertarungan politik, yakni pertarungan politik antara Sukarno dan Soeharto. Pertarungan politik. *Ya?* Jadi kalau Anda membaca buku B.M. Diah, dalam pertarungan politik ini Pak Karno kalah. Mengapa Sukarno kalah? Kata B.M. Diah, karena Sukarno berjuang sendirian. Dia sendiri! Benar-benar sendiri. Dia sendirian dalam menghadapi tekanan dari Angkatan Darat. Ke mana pendukung-pendukung Sukarno? Nah, sebenarnya pendukung Sukarno dalam masa krisis ini adalah PKI. Tapi PKI sudah di-“operasi”, sudah bubar. Secara formal belum bubar, tapi sudah kocar-kacir. Kekuatannya sudah hancur. Baik yang di militer maupun kader-kader sudah hancur. Selain itu, semua pembantu Sukarno sudah diisolasi dari Sukarno. Istilah militernya, *knocking the props*. Itu yang pertama.

Yang kedua, semua pembantu Sukarno sudah diisolasi. Terhadap Sukarno, pihak Angkatan Darat telah melakukan apa yang sering disebut sebagai “*knocking the props*”, menghancurkan tiang-tiang penyangganya. *Bres! Bres! Bres!...* Dihancurkanlah tiang-tiang penyangganya, dan Sukarno tinggal sendirian. Tiang penyangga dia itu *kan* para pendukungnya, terutama massa. Begitu ada yang *knocking the props*, *dok-dok-dok*, hancurlah dia.

Yang ketiga, Soeharto berhasil meminiaturisasi, mengerdilkan, menjadikan miniatur, seluruh organisasi buatan Sukarno. Bukan hanya yang buatan Sukarno saja, melainkan semua organisasi yang mendukungnya. Kalau “*props*” itu *kan* orangnya. Ini organisasinya. Organisasi-organisasi itu diminiaturkan.

Misalnya Komando Operasi Tertinggi [KOTI]. Sebagai kepala pemerintahan, jabatan Sukarno adalah presiden. Tetapi sebagai Panglima KOTI dia adalah Panglima Tertinggi [Pangti]. Sebagai Panglima KOTI, kekuasaan Sukarno luar biasa. Tapi Pak Harto bisa meminiaturisasinya. Waktu itu *kan* lagi ramai-ramainya operasi “Ganyang Malaysia”. Pak Harto lantas mengganti KOTI menjadi Komando Ganyang Malaysia [KOGAM]. Pak Karno tidak lagi menjadi Pangti KOTI melainkan Pangti KOGAM saja.

Lalu mengingat bahwa pasca-Gerakan 30 September, Soeharto diperintahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban maka ia membentuk sebuah komando yang namanya KOPKAMTIB, yakni Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sementara Soeharto membuat KOTI semakin kecil perannya, ia membuat KOPKAMTIB makin berkembang perannya. KOTI diminiaturisasi, tapi KOPKAMTIB dibuat besar. Besaaarr... sekali. Padahal KOPKAMTIB itu cuma “anak”-nya KOTI. Sukarno tidak sadar kalau ia sedang *digembosi*. *Wesss...!* Lalu Sukarno tidak bisa apa-apa lagi. Dia

hanya boleh “mengganyang Malaysia” saja. Mungkin saja, ia masih merupakan Pangti, tapi *de facto* kekuasaan ada pada Soeharto. Begitu KOTI bubar, Sukarno tidak punya kekuasaan apa-apa. Soeharto berhasil meminiaturisasi kekuasaan Sukarno.

KOPKAMTIB itu digunakan oleh Soeharto untuk pertama-tama membasmi PKI, tapi sekaligus untuk meminiaturisasi Sukarno. Dan Sukarno tidak mampu melawan kekuatan Angkatan Darat yang sangat terorganisasi. Sukarno juga tidak mampu berbuat banyak ketika ada demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Pada satu sisi mahasiswa itu ada unsur spontannya, tetapi pada sisi lain juga merupakan bagian dari operasi untuk meminiaturisasi Bung Karno. Mahasiswa adalah bagian dari operasi sosial-politik [sospol].

Dalam menghadapi lawannya, tentara revolusi itu *kan* menggunakan dua “senjata” yakni senjata teknologi dan senjata sosial. Senjata teknologi itu digunakan ketika menghadapi lawan yang bersenjata, sedang senjata sosial itu digunakan untuk menggunakan lawan yang non-kombatan. Bentuknya bisa macam-macam: bisa tekanan, bisa fitnah, bisa yang lain. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa adalah bagian dari “senjata sosial” untuk melawan non-kombatan itu.

Dan ternyata, Sukarno tidak mampu menghadapinya. Dalam pertarungan itu, ia terus kalah. Dan puncak dari kekalahan dalam pertarungan itu adalah munculnya Surat Perintah 11 Maret [1966] atau Supersemar. Orang boleh tertawa, tapi adanya Supersemar itu menunjukkan bahwa Sukarno bisa kecolongan. Supersemar berarti “*skaak-mat*” untuk Soekarno. Yah, ini tafsiran saya setidaknya. Tapi tafsiran ini berdasarkan analisis.

Sudah Habis Kekuasaannya

Yang jelas Sukarno sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mau apa Sukarno?! Teriak, dia sudah tidak bisa lagi. “*Props*”-nya sudah berjatuh. Tak ada lagi pendukungnya. Massa pendukung dia sudah diisolasi. Sementara itu organisasi-organisasi pendukungnya telah diminiaturisasi. *Ya, kan?*

Sementara itu Angkatan Darat begitu terorganisasi. Kompak. Angkatan Darat itu kompak, kecuali yang berpihak ke PKI. Tapi mereka yang memihak PKI segera diserbu dengan kekuatan militer penuh. Apalagi setelah Bung Karno menyatakan bahwa revolusi sering memakan anak-anaknya sendiri. Tapi ternyata revolusi tidak hanya memakan anak-anaknya, melainkan juga “Bapak”-nya. Buktinya *ya* Supersemar itu.

Tentang Supersemar memang ada berbagai versi. Tapi macam-macam versi itu hanya bohong saja. Sudah jelas Sukarno itu kalah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kekuasaannya sudah *digembosi*. Sudah hancur. Ia bahkan sempat bertanya kepada Soeharto, “*Aku iki arep kok kapakake?*” [Saya ini sebenarnya mau kamu apakan?]. Sukarno sudah hancur. Pak Harto itu tetap orang Jawa *ya?* Ditanya begitu bahasanya *wah*, tetap halus, tetap bagus.

Dalam penyusunan naskah Supersemar itu tidak ada rekayasa. Waktu itu Pak Harto sakit. Apakah itu sakit politik atau bukan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka yang datang ke Istana Bogor itu adalah orang-orang yang setia pada Pak Karno. Mereka adalah pencinta Bung Karno sejati. Basuki Rachmat misalnya. Dia itu mantan Sekretaris Bung Karno sebagai Panglima PEPERTI, Penguasa Perang Tertinggi. M. Jusuf juga Sukarno. Amir Machmud itu kalau melayani Bung Karno *ya* total. Ia melayani segalanya. Umar Wirahadikusumah apalagi. Kalau di kalangan tentara, ia bahkan dikenal sebagai “antek

Bung Karno”. Apalagi Sabur. Sabur itu ajudan Bung Karno sendiri. Ia adalah Komandan Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Pribadi Bung Karno sebagai Presiden. Wakilnya Maulwi Saelan. Panggabean tidak ikut ke Istana Bogor. Ini bisa dicek di *Log Book* Istana.

Soal naskah Supersemar, menurut saya draft pertamanya itu tulisan tangan yang didiktekan oleh Bung Karno ke Sabur, baru kemudian diketik. Kalau naskah Proklamasi *kan* yang menulis Bung Karno. Kalau naskah Supersemar itu yang menulis pertama adalah Sabur. Baru kemudian diketik.

Pokoknya dengan Supersemar itu Pak Karno sudah habis kekuasaannya. Sudah *skaak mat* [tak ada jalan keluar]. Dia sudah mengalami *stalemate* [jalan buntu]. Kalau menurut saya begitu. Saya ini tidak ada kepentingan untuk membela Sukarno atau Soeharto. Menurut saya dalam penyusunan Supersemar itu tidak ada yang berkhianat. Bagaimana mungkin? *Wong* menulisnya saja bertiga *kok*. Jadi kalau mereka berkhianat pada Sukarno itu *impossible*. Apalagi itu tentara. Tentara itu melihat komandan di atasnya saja takut. Jaraknya seperti bumi-langit. Cintanya tentara-tentara itu pada Sukarno itu luar biasa. Tidak ada yang berani menggantikan Sukarno. Apalagi Sukarno itu Presiden seumur hidup ‘*kan?*

Melahirkan Balasan

Nah, tetapi ketika Sukarno mulai dianggap tidak adil, *ya* tidak ada cara lain. Bung Karno itu pemimpin, tetapi tidak bisa dipercaya. Angkatan Darat merasa begitu. Ini kesimpulan saya. *Ya*, Sukarno harus diganti. Tetapi bagaimana mengganti Sukarno itu *kan* susah. Siapa berani mengganti Sukarno? Sekali lagi, ia itu Presiden seumur hidup. Dan itu sah. Dan itu merupakan keputusan MPRS. Tapi Pak Harto kan

pinter. Dia panggil MPRS. Dia panggil sisa-sisa anggota MPRS pasca-pembersihan.

Kalau ingin menjatuhkan Sukarno melalui kudeta, tidak akan bisa. Rakyat tidak akan terima. Maka Pak Harto panggil MPRS. Dia bilang, tolong ini. Lalu Sukarno dipanggil ke MPR. Dia lalu pidato macam-macam. Antara lain *ya* pidato *Nawaksara* itu. Pokoknya untuk kepentingan sejarah, ia mengatakan ada orang yang tidak baik, ada pemimpin PKI yang *keblinger* [tersesat], dan sebagainya.

Lalu ada interpretasi macam-macam. Tapi pertanyaan adalah apakah Soekarno telah melaksanakan pembubaran PKI. Kalau sudah, mengapa tidak melapor. Dari sini lalu timbul pandangan macam-macam. Ada orang seperti Asvi [Dr. Asvi Warman Adam] yang mengatakan ini kudeta merangkak, lalu ada John Roosa [Dr. John Roosa, penulis buku *Dalih Pembunuhan Massal*, ed.] yang mengatakan lain lagi, dan sebagainya. Yang jelas Pak Harto mengatakan pada MPR, “Ini masalahnya. Terserah mau diapakan”. Kalau MPR mau “menyodok” sendiri Sukarno *ya* terserah.

Nah, dalam kaitan dengan ini, ada satu Angkatan dalam militer yang dianggap terlibat Gerakan 30 September, yakni Angkatan Udara. Kalau menurut kajian saya tentang pertanyaan apakah Omar Dhani itu PKI, hal itu tidak pernah terbukti. Dalam bahasa Jawanya bisa ditanyakan “*Ketemu pirang perkara kok Omar Dhani terlibat PKI?*” Artinya, mana mungkin Omar Dhani terlibat? Sebab latar belakang Omar Dhani itu lain. Dia bangsawan. Kalau tak salah keturunan Raden Mas *kan? Iya*, Raden Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu hidupnya *kan* borjuis, bukan proletar. Apalagi dia ganteng sekali orangnya. Julukannya “Gatotkaca”. Kalau secara ilmu Komunis, apa mungkin orang seperti dia itu bisa masuk PKI? Orang mau masuk PKI itu “diurut”, dicari dia itu keturunan siapa, jasanya apa, dan

sebagainya. Harus keturunan proletar. Padahal Omar Dhani *kan* keturunan bangsawan, keturunan feodal. Jadi tidak bisa masuk PKI. Dengan kata lain, *impossible*.

Pertanyaannya, mengapa *kok* sampai ada tuduhan dia terlibat PKI? Karena dia itu Sukarno. Dia itu Sukarno “tanpa *reserve*” menurut istilah waktu itu. Sukarno sendiri juga merasa cocok dengan Omar Dhani. Dalam beberapa tahun, dia cepat sekali naik pangkat. Dia sendiri yang mengatakan pada saya. Saya kenal dengan Omar Dhani.

Dia Sukarno sejati. Dia itu orangnya sensitif. Bagi dia, siapa pun yang mengganggu Sukarno akan dia lawan. Sukarno akan dia bela sampai titik darah penghabisan. Mungkin dia mendapat informasi atau dibisiki bahwa akan ada gerakan yang dapat membahayakan keselamatan Pemimpin Besar Revolusi. Maka dia langsung masuk. Tapi dia lupa bahwa dia itu Panglima dari sebuah Angkatan yang kekuatannya sangat besar! Dan mungkin terbesar di Asia Tenggara. *Nah*, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa sebenarnya Omar Dhani ini tidak tahu politik, tapi ikut main politik. Dia itu tentara yang dipermainkan oleh politik. Dipermainkan. Bukan membiarkan diri, tapi dipermainkan. Dia itu bukan orang politik. Dia itu tentara. Dia tidak tahu politik. Tapi lalu dia mendukung Gerakan 30 September dan mengeluarkan surat perintah harian segala. Bagi dia pokoknya Sukarno. Sukarno. Dia tidak tahu bahwa Sukarno sudah dijadikan “anak catur” oleh PKI. Tema dari Gerakan 30 September itu “menyelamatkan Sukarno” *kan?* Sebaliknya Soeharto dituduh kontra-revolusi dan akan membunuh Sukarno. Tapi kenyataannya Bung Karno selamat ‘*kan?*

Lalu ada Supersemar itu tadi. Sejak itu Pak Harto mengambil berbagai tindakan politis, seperti membentuk presidium, dan

sebagainya, dan Sukarno diam saja. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia masih pidato soal “Jasmerah” [Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah], tapi gemanya juga sudah tidak ada. *Lha* siapa lagi “*bala*” atau pendukung dia? Sudah tidak ada. Kalau pun ada, mereka ini sudah tidak akan berani menuntut Pak Harto. *Kan* semua tentara yang mendukung dia dan PKI sudah dihancurkan? Para pemimpin PKI sudah tidak *tentrem* [tidak tenteram]. Mereka dikejar di mana-mana. Yang bergerak *cuma* Sudisman yang dikenal dengan kritik-otokritik-nya itu. Yang dia kritik kepemimpinan Aidit. Menurutnya, Aidit sudah jadi diktator. Tidak demokratik lagi seperti sebelumnya. Tradisi kritik-otokritik sudah dihilangkan. Sudisman sangat mengkritik Aidit yang menurutnya berusaha menyamakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat China. Konsep-konsep Partai Komunis China [PKC] mau diterapkan di Indonesia begitu saja. Konsep-konsep pemikiran dan perjuangan Partai Komunis China Tiongkok mau dipakai begitu saja. Pandangan-pandangan Aidit persis sama dengan pandangan-pandangan Mao Tze-tung. Sekadar “fotokopian”-nya saja.

Sudisman memberi contoh, misalnya Aidit ingin menerapkan gagasan tentang tuan tanah yang jahat. *Lha* di sini *kan* tidak ada tuan tanah? Ada kyai, tetapi Aidit melupakan kepemimpinan sosial para kyai. Tapi oleh Aidit mereka dituduh begitu saja sebagai tuan tanah. Padahal ‘*kan* berbeda. *Nah*, tapi lalu diadakan gerakan Aksi Sepihak dan sebagainya. *Nah*, tindakan-tindakan seperti ini nantinya melahirkan balasan yang juga luar biasa besarnya, yang luar biasa ngerinya.

Menjadi Gila

Pandangan saya pribadi tentang tragedi nasional [1965] itu, *yah*, itu

rumit *ya*? Yang jelas kalau tragedi itu dibebankan pada tentara saja *ya* itu tidak bisa. Itu '*kan* melibatkan massa. Saya juga *anu ya*... sebab itu '*kan* akibat saja. Yakni akibat dari perbuatan PKI. Pada masa yang disebutnya sebagai "progresif revolusioner" PKI telah menyakiti hati, menyakiti lawan-lawannya. Misalnya *ya* menyamakan masyarakat kita dengan masyarakat China itu tadi. Kelihatannya masyarakat kita setuju dan tidak mengadakan *counter-offensive*. Tapi begitu gagal gerakannya, *ya* rakyat yang dulu dikatakan kontra-revolusi *ya* bertindak...

Tapi *ya* sudahlah, ini merupakan sejarah bangsa kita yang memang mengerikan.... *ya* patut disesalkan. Namun demikian, semuanya sudah terjadi. Apakah kekerasan yang terjadi itu kekerasan antara kaum feodal dengan proletar, *ya* tidak. Yang terjadi *kan* proletar lawan proletar, petani lawan petani. *Gimana sih?* Apalagi saat PKI sudah kalah itu *ya*, tidak ada jalan lain kecuali[kalimat tidak diteruskan, ed.]. *Ya* sudah... [kalimat tidak jelas, ed.]. Itu konflik yang... saya tidak bisa membayangkan. Bahkan jauh setelah peristiwa itu saya juga tetap merasakannya.

Waktu peristiwa itu terjadi saya berada di Jakarta. Saya sudah menjadi pegawai di Jakarta. Tapi saya tahu tentang apa yang terjadi di daerah-daerah. Misalnya yang dialami oleh Ibu saya di Malang, Jawa Timur. Ibu saya itu *kan* rumahnya besar. Dia bekerja sebagai seorang tengkulak. Dia membeli bahan-bahan makanan rakyat untuk kemudian dijual kembali. Misalnya jagung. Di depan rumah ada *latar*, atau halaman depan, yang digunakan untuk menjemur bahan-bahan makanan itu. Di situ juga ada gudang yang besar, tempat menyimpan barang-barang hasil *kulakan* itu tadi.

Nah, waktu terjadi Peristiwa G30S, gudang itu diminta oleh tentara untuk menampung para tawanan. Ada tawanan laki-laki, ada tawanan perempuan. Tak tahu maksudnya, apakah mereka ini

diamankan atau ditawan atau bagaimana. Ibu saya gemetar. Ibu saya juga tidak berani keluar. Yang ditawan banyak sekali, tapi WC-nya cuma satu.

Orang-orang yang ada di situ itu di-“bon” oleh orang lain. Tentaranya itu hanya sedikit. Koramil³² itu anggotanya berapa *sib*? Menurut Ibu saya banyak yang di-bon. Artinya, mereka dibawa pergi dan biasanya tidak kembali. Ada yang teriak-teriak, ada yang ini atau itu. Maklum di antara para tawanan itu ‘*kan* banyak yang perempuan. Ada yang ditangkap di rumahnya, ada yang ditangkap di tempat-tempat lain. Mengerikan.

Ada orang yang pekerjaannya hanya pengemudi *cikar* atau gerobak untuk mengangkut barang-barang juga ditangkap. Alasannya hanya karena boss-nya itu PKI dan dia itu kulinya. Maka dia ditangkap. Ada juga yang sebenarnya santri, tetapi juga “hilang” tak tahu ke mana. Padahal dia ini rajin pergi ke masjid. *Kan* dulu di kampung saya kalau orang mau apa-apa perginya ke masjid, termasuk mandi, shalat dan sebagainya. *Nah* orang ini sebenarnya rajin ke masjid. Tapi karena boss-nya PKI maka dia ditangkap. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, *wah...* pokoknya sedih saya kalau bicara soal itu. Tidak enak. *Ya* itu yang... *Ya* itu saya kira alasan saja pada... *yah*, betapa ganasnya pada waktu dicanangkan politik yang progresif revolusioner itu.

Tapi ini semua pandangan saya sekarang, setelah kita punya kesempatan untuk merenung dan sebagainya. Sekaligus ini merupakan renungan saya sebagai orang yang sudah tua, yang ilmunya sudah jauh lebih mendalam daripada orang-orang yang lebih muda seperti Anda ini. Saya *kan* sudah pernah muda, tapi orang-orang muda itu *kan* belum pernah tua, *haha...* Pokoknya situasi pada saat itu amat mengerikan. Sungguh. Saya sering merenung-renungkan dan bertanya,

32 Komando Rayon Militer.

apakah begini ini perjalanan bangsa Indonesia? Apa dan bagaimanakah seharusnya seorang pemimpin itu dengan segala tanggung jawabnya yang berat?

Di Jawa Timur suasananya mengerikan sekali. Sampai-sampai ketika Onghokham³³ datang ke Jawa Timur dan melihat mayat-mayat di Sungai Brantas. Ia menjadi *gendheng*, menjadi gila, karena stress. Tidak tahan. Ia berteriak-teriak: “Hidup PKI! Hidup PKI!” Akibatnya dia ditangkap lalu ditahan. Ia baru dilepas ketika ada campur tangan dari Pak Nugroho Notokusanto.³⁴

Politik Itu Penting

Ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik. Pertama, untuk para pemimpin dan partai-partai politik. Hendaknya para pemimpin dan partai politik itu kalau berpolitik jangan membawa-bawa tentara. Jangan bawa-bawa tentara untuk mencapai kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan janganlah memakai kekerasan. Ini renungan saya sebagai orang militer.

Kedua, untuk pihak militer, kalau tidak tahu politik janganlah ikut-ikutan berpolitik. Bisa fatal akibatnya bagi bangsa ini. Cukuplah sampai Generasi Tentara Revolusi atau Generasi '45 saja yang begitu. Cukup di situ saja. Cukup.

Kalau jadi tentara *ya* jadilah tentara, jangan ikut main politik. Letkol Untung itu *kan* tentara. Tapi dia mau ikut main politik.

33 Onghokham (1933-2007), dosen Universitas Indonesia dan sejarawan terkemuka. Ia antara lain menerbitkan buku berjudul *Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang* (2002).

34 Nugroho Notokusanto (1930- 1985) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (1983-1985). Sebelumnya juga ia pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia (1982-1983). Ia berkarier di bidang militer dan pendidikan. Ia dikenal sebagai seorang sejarawan yang sangat pro-pemerintah Orde Baru.

Janganlah tentara ikut main politik seperti orang-orang yang memang dididik untuk berpolitik. Baik yang intervensi ke luar maupun ke dalam sendiri menginginkan kekuasaan politik. Kalau menggunakan istilah sekarang, perlu adanya netralitas TNI. Intervensi politik bisa sangat merugikan bangsa. Bahaya bagi negara. Soal Dwifungsi ABRI, cukup pada Generasi '45 saja-*lah*. Cukup. *Plek*. Selesai. Dengan kepergian Soeharto, cukuplah keterlibatan politik itu. Soeharto *kan* termasuk Generasi '45? Cukup. Biarlah Generasi Tentara Revolusi yang begitu. Cukup. Saya kan netral *to*? Dalam istilah sekarang netral itu berarti kembali ke profesi. Jadi tidak usah terlibat politik. Sebaliknya partai politik *ya* jangan menarik tentara untuk ikut intervensi.

Bahayanya adalah bahwa orang lalu ingin memiliki segalanya. *Hayo*, Anda punya apa? Intelijen punya, senjata punya, personil punya, dan sebagainya. Maka disentuh sedikit saja bisa langsung bereaksi.

Kalau orang mau *gepuk-gepukan* [saling menyerang] di Parlemen atau di mana saja biarlah, tapi jangan ada intervensi militer. Cukup Generasi Tentara Revolusi saja yang intervensi di bidang politik. Lalu tutup buku, dan biarlah itu menjadi bagian dari sejarah kita. Tapi mereka *ya* jangan disalahkan-*lah*. Anggap saja, itulah Indonesia, itulah sejarah kita.

Kalau para sejarawan ingin berkomentar ini atau itu, *ya* terserahlah. Tapi yang jelas itulah sejarah kita. Politik itu penting. Tentara juga penting, tapi tentara yang profesional. Jangan sebaliknya, di mana tentara ikut mengurus politik. *Ya* memang, istilah PKI dulu adalah "Politik adalah panglima". Jadi tentara juga boleh berpolitik dan menjadi objek politik. *Nah*, ini ditiru begitu saja oleh Pak Karno lalu kemudian Pak Harto. Pak Harto juga menjadikan politik sebagai panglima, sehingga tentara juga ikut berpolitik. Tapi sekarang ini biarlah semua itu ditutup dengan lengser dan meninggalnya Pak

Baskara T. Wardaya, SJ

Harto. Jadi, tamat dan selesailah Generasi Tentara Revolusi. Lalu kader-kadernya Dwifungsi bagaimana? *Ya* kalau masih dibutuhkan ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya itu sudah selesai. Sebab Dwifungsi itu merupakan produk dari Generasi Tentara Revolusi.[]

Masanya Sudah Berbeda

Tragedi '65 di Mata Seorang Muslim

Pengantar

PENUTUR dari narasi kita berikut ini lahir pada tanggal 26 Desember 1937. Nama tidak resminya adalah **Suberjanto**, ayah dari enam orang anak, semuanya laki-laki dan sudah menikah. Ia berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Pendidikan terakhirnya Akademi Seni Rupa. Ketika Tragedi '65 mulai berlangsung anak pertamanya baru saja lahir dan berusia tiga bulan. Sebagai anggota Muhammadiyah, waktu itu ia bekerja di bagian Pusat Kesehatan Umat (PKU), sebuah pusat pelayanan kesehatan milik Muhammadiyah.

Keluarganya aktif dalam gerakan Muhammadiyah, dan sejak kecil ia sudah menjadi anggota Hizbullah. Menurut penuturannya, pada tahun 1965 ia tidak terlalu aktif dalam gerakan-gerakan untuk menanggapi gejolak politik waktu itu, karena anak pertamanya baru saja lahir, sebagaimana tadi disebutkan.

Dalam pengamatannya, sebelum tahun 1965 memang sering terjadi “gesekan” antara orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang dari Partai Komunis Indonesia, terutama di kalangan mudanya. Mereka biasanya tergabung dalam organisasi Pemuda Rakyat dan Pemuda Muhammadiyah. Ketika melangsungkan acara perayaan-perayaan tertentu yang besar, biasanya terjadi semacam persaingan

antara kedua kelompok. Namun demikian, menurutnya, “gesekan” itu tidak mengandung unsur kekerasan. “Aktivitas yang dimaksudkan untuk mengganggu itu biasanya tidak agresif. Tidak ada aksi penyerangan atau apa.” Begitu kata Suherjanto. Ia lalu menambahkan, “Sekali lagi, meskipun secara psikologis ada persaingan antara kelompok Pemuda Rakyat dan kelompok Pemuda Muhammadiyah, tetapi tidak pernah terjadi bentrokan fisik atau tindakan kekerasan.”

Ketika Peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi, ia mendengar berita tentang peristiwa itu dari radio, tetapi menurut dia beritanya simpang-siur. Sebagaimana dia tuturkan di bawah, semula diberitakan bahwa telah terjadi kudeta, dan yang melakukannya adalah Dewan Jenderal. Tetapi kemudian ada berita lain yang mengatakan bahwa pelakunya adalah Letnan Kolonel Untung. Yang jelas berita-berita berikutnya mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia sedang mau mengganti pemerintahan dan oleh karena itu masyarakat harus waspada. Setelah itu beredar pula berita bahwa di Kotagede telah ditemukan dokumen yang berisi daftar tokoh-tokoh yang akan dibunuh oleh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia. Yang terjadi kemudian, menurut Suherjanto, adalah banyak tokoh Partai Komunis Indonesia dan Gerakan Wanita Indonesia ditangkap dan selanjutnya dibuang ke Pulau Buru.

Suherjanto tidak banyak memberikan ulasan mengenai Tragedi '65 itu sendiri. Ia hanya berpesan, sebaiknya kalau seseorang ingin mengikuti suatu organisasi hendaknya orang itu benar-benar memahami betul apa yang akan ia ikuti itu. Jangan hanya sekadar ikut trend saja, ujarinya. Ia katakan, “Kalau mau mengikuti Islam ya harus jelas Islam yang bagaimana. Kan ternyata Islam juga ada bermacam-macam. Kan ada yang alirannya aliran keras, yang langkah-langkah dan tindakannya seringkali justru tidak sesuai dengan petunjuk Islam yang damai, yang

lembut, yang ramah, dan yang penuh kasih sayang. Nah, kalau saya mau mengikuti paham tertentu ya harus paham betul mengenai paham itu.”

Ia menambahkan bahwa orang-orang dari kelompok Partai Komunis Indonesia yang pada tahun 1965 masih dalam kandungan, baru lahir, masih kecil, atau tidak tahu-menahu tentang apa yang terjadi waktu itu jangan sampai dikurangi hak-haknya. Di lain pihak, ia tidak keberatan jika orang-orang yang waktu itu sudah remaja atau dewasa sekarang ini Kartu Tanda Pengenal (KTP) mereka dibubuhi tanda “ET” yang berarti Eks Tahanan Politik. “Semua itu masih dalam rangka mewaspadaai jangan sampai timbul lagi peristiwa serupa untuk yang kedua kalinya”, kata Suherjanto.

*Narasi Suherjanto berikut adalah pengolahan kembali atas hasil wawancara yang dilakukan **Mohammad Subkhi Ridho**, orang muda aktivis Muhammadiyah dan alumnus Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Wawancara dilakukan di rumah Suherjanto, di Kotagede, Yogyakarta, pada tanggal 3 September 2009.*

NAMA saya Suherjanto.³⁵ Saya lahir pada tanggal 26 Desember 1937. Saya memiliki anak 6 orang. Semuanya laki-laki dan semuanya sudah berkeluarga. Pendidikan terakhir saya di seni rupa. Dulu saya kuliah di Akademi Seni Rupa. Saya menikah tahun 1964. Pada tahun 1965 anak pertama lahir. Waktu terjadi Peristiwa G30S/1965 umur anak pertama saya baru 3 bulan.

Pada tahun 1965 itu saya bekerja membantu di bagian Pusat Kesehatan Umat (PKU). Saya membantu pengurus PKU. PKU itu

35 Pada tahun 1965 itu Suherjanto merupakan anggota Hizbullah.

istilah untuk pelayanan kesehatan. Saya banyak berkiprah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Saya lahir dari keluarga yang aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Sejak kecil saya sudah menjadi anggota Hizbullah.³⁶ Hanya saja, pada tahun 1965 itu saya tidak terlalu aktif dalam gerakan-gerakan untuk menanggapi G30S, karena saya baru saja memiliki anak pertama yang baru berumur tiga bulan itu tadi. Jadi saya lebih banyak berada di rumah.

Waktu Peristiwa G30S/1965 terjadi saya berpikir, jangan sampai rumah kosong. Orang tua, bapak, ibu, kemudian kakak-kakak laki-laki saya, juga Pak Asnawi dan Pak Basori, *nah* mereka itulah yang justru aktif ikut gerakan-gerakan menanggapi Peristiwa G30S. Waktu itu Muhammadiyah *kan* jelas punya tenaga-tenaga ataupun kader-kader tertentu. Tokoh-tokohnya aktif sekali dalam hal ini.

Meningkatkan Kewaspadaan

Pada tahun 1948, ketika terjadi peristiwa pemberontakan di Madiun, di Kotagede [Yogyakarta] sendiri ada gerakan dari Muhammadiyah yang dikhususkan untuk “tanggap bencana”. Pada tahun 1948 itu saya masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar [SD] sehingga saya kurang tahu persis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi secara resmi, Hizbullah itu bersikap anti terhadap gerakan Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Muso [PKI-Muso]. Waktu itu, Hizbullah sudah giat sekali. Adapun kegiatan yang dilakukan Hizbullah waktu itu adalah mengadakan pertemuan-pertemuan, pengajian, dan sebagainya. Semuanya dilakukan dalam rangka membantu menggencarkan semangat perlawanan umat Islam

36 Salah satu laskar rakyat di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Belakangan melebur ke dalam Tentara Islam Indonesia (TII).

di Madiun sana. Melalui pengajian-pengajian, khotbah-khotbah di masjid dan sebagainya diinformasikan bahwa di sana [di Madiun] ada gerakan-gerakan yang dilakukan pihak Komunis.

Sebelum tahun 1965 memang sering terjadi pergesekan antara orang-orang Muhammadiyah dengan orang-orang PKI. Pergesekan terutama dilakukan para pemuda. Dari pihak PKI, para pemudanya direpresentasikan oleh Pemuda Rakyat, sedangkan dari Muhammadiyah diwakili oleh Pemuda Muhammadiyah. Seringkali dalam kegiatan-kegiatan pemuda yang menyangkut kegiatan masyarakat seperti peringatan hari besar, baik hari raya Islam maupun hari nasional, terjadi semacam persaingan. Pihak Pemuda Rakyat sering menyaingi atau membuat hal-hal yang dimaksudkan untuk mengganggu atau menggagalkan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah. Hal-hal seperti ini terasa sekali waktu itu.

Aktivitas yang dimaksudkan untuk mengganggu itu biasanya tidak agresif. Tidak ada aksi penyerangan atau apa. Hanya mengganggu saja, atau menakut-nakuti kelompok pengajian. Hanya seperti itu. Misalnya orang-orang yang mau datang ke pengajian dicegat supaya tidak jadi ikut. Jadi gangguannya *ya cuma* dengan menakut-nakuti dan mencegat orang-orang. *Ah*, sebetulnya *ya* tidak mencegat juga. Cuma melakukan gerakan-gerakan tertentu yang menyebabkan orang jadi takut. Memang kalau tidak salah, waktu itu pernah ada bentrokan antar pemuda, ada perkelahian atau kontak fisik, dan memang ada yang terluka, tapi tidak apa-apa. Tidak besar. Cuma lokal dan biasa saja.

Sekali lagi, meskipun secara psikologis ada persaingan antara kelompok Pemuda Rakyat dan kelompok Pemuda Muhammadiyah, tetapi tidak pernah terjadi bentrokan fisik atau tindakan kekerasan. Pihak Islam sendiri itu tidak pernah membuat gerakan-gerakan yang

sifatnya agresif. Mereka tetap mau bersikap menghormati. Yang penting menjaga agar jangan sampai umat Islam terganggu dan jangan mengganggu. Maksudnya supaya tidak terjadi konflik.

Waktu itu yang dilakukan oleh pihak Islam atau Muhammadiyah hanyalah meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengamati gerakan-gerakan mereka [maksudnya pihak PKI, ed.]. Misalnya kalau mengadakan suatu kegiatan selalu melakukan koordinasi. Selain itu pihak Islam juga sering menggaji atau membayar orang untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pihak sana [pihak PKI], supaya tahu apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang perlu diwaspadai.

Tidak Bisa Menerima

Suatu saat saya mendengar langsung dari sebuah siaran, tapi saya kurang tahu itu siaran dari siapa. Menurut siaran itu, PKI akan melakukan kudeta dan bermaksud mengganti pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada. Masyarakat perlu menjaga rumah masing-masing. Apalagi waktu itu beredar kabar bahwa telah ditemukan dokumen berisi catatan nama tokoh-tokoh di Kotagede yang akan menjadi sasaran pembantaian oleh PKI. Berdasarkan berita seperti itu kita lalu memberi tahu, bahwa si “Anu” itu anaknya tokoh PKI, atau keluarganya ada sangkut-pautnya, dan sebagainya, sehingga kita perlu mewaspadai mereka dan sebagainya.

Informasi mengenai kudeta seperti itu kebanyakan didapat melalui radio. Semula melalui radio kita menerima berita dari pusat bahwa ada kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal dan sebagainya. Tapi beritanya simpang-siur. Mendengar berbagai informasi seperti itu semula kita bingung juga. Ini yang *bener* yang mana? Yang diberitakan pertama kali itu adalah bahwa kudeta itu dilakukan oleh Dewan

Jenderal. Tapi saya mendengar informasi yang menegaskan bahwa Letnan Kolonel Untunglah yang melakukan kudeta. Informasi lain belum ada. Apalagi waktu itu tampaknya Bung Karno bagaimana *ya, nggak* ada suaranya. *Nggak* ada apa *ya, nggak* ada pernyataan bagaimana dan sebagainya. Waktu itu yang saya dengar *ya* hanya bahwa kudeta itu dilakukan oleh Untung. Lalu ada juga tokoh-tokoh PKI.

Ya, baru setelah ada kejelasan bahwa PKI yang melakukan kudeta, masyarakat di sini semakin menyiapkan diri. *Kan*, Kotagede termasuk salah satu pusat untuk *training* Pemuda Rakyat. Lokasinya di sebelah timur Jalan Kemas. *Wow*, itu dulu itu wilayah “merah”. Tapi alhamdulillah setelah jelas terungkap bahwa kegiatan itu [kudeta] dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya, kita lalu menyiapkan diri untuk menghadapi wilayah itu. Kemudian setelah ada koordinasi dan macam-macam, ada informasi yang sudah jelas dan sebagainya, lalu kita lantas mulai membantu aparat pemerintah, yang waktu itu berarti pihak militer. Mulailah ada pencidukan orang-orang “merah” itu.

Yang dicituk waktu itu laki-laki maupun perempuan. Semua. Yang PKI, yang Gerwani, yang Pemuda Rakyat, semua dicituk. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Pokoknya aktivis yang selama pra-Gestapu itu tampak aktif, semua itu didaftar [untuk kemudian dicituk, ed.]. Mereka itu kami ketahui dari peristiwa-peristiwa persaingan atau pergesekan yang terjadi sebelum Peristiwa G30S. Dari situ kami ketahui siapa tokoh-tokohnya dan sebagainya.

Dari Muhammadiyah sendiri memang tidak ada semacam surat resmi yang menolak keberadaan PKI. Tapi jelas bahwa semuanya *ya* terutama masyarakat Islam di Kotagede yang mayoritas Muhammadiyah tidak bisa menerima [keberadaan PKI]. Tapi tampaknya *kok nggak* ada [surat resmi macam itu]. Atau mungkin karena saya tidak tahu. Yang jelas, entah ada surat resmi atau tidak, dalam Muhammadiyah

sendiri kerja samanya bagus dalam upaya menanggulangi ataupun menanggapi dan melawan gerakan G30S.

Bisa Saja Diterapkan

Penangkapan para tokoh PKI, Gerwani, dan Pemuda Rakyat di Kotagede banyak dilakukan oleh aparat keamanan. Di antara tokoh-tokoh itu banyak yang juga berasal dari Kotagede sendiri, yang setelah ditangkap juga dibuang sampai ke Pulau Buru. Tapi alhamdulillah, setelah para tokohnya ditangkap, mereka yang tersisa dan tinggal di Kotagede bisa dikatakan sudah tidak berdaya lagi *'kan?* Banyak di antara mereka yang bisa menerima ajakan-ajakan untuk kembali ke ajaran Islam.

Mereka yang pada waktu peristiwa itu terjadi masih kecil, baru lahir, atau masih dalam kandungan, dan sebagainya tentu tidak tahu-menahu mengenai apa yang terjadi. Oleh karena itu kalau mereka ini sampai ikut-ikutan dikurangi hak-haknya, *kok* menurut saya kurang pas.

Akan tetapi mereka yang waktu itu sudah cukup dewasa atau barangkali sudah remaja pasti tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu saya pikir kebijakan untuk membubuhkan tanda “ET” atau “eks tapol” pada KTP orang-orang PKI itu bisa saja diterapkan karena memang semua itu masih dalam rangka mewaspadaai jangan sampai timbul lagi peristiwa serupa untuk yang kedua kalinya.

Tetapi kalau hal itu dilakukan terus sampai ke anak-cucu mereka, artinya disamaratakan, itu namanya sudah kurang tepat. Kalau akhirnya kebijakan seperti itu dicabut saya pikir itu tepat. Tapi kewaspadaan harus tetap ditanamkan. Meskipun hak-haknya sudah dikembalikan, mereka ini perlu diberi surat pernyataan, misalnya surat pernyataan bebas G30S, supaya kalau ada keraguan bisa diatasi.

Cara yang Damai

Kalau menurut pendapat saya, sekarang ini masanya sudah berbeda dengan dulu. Sekarang ini kalau seseorang mengikuti suatu paham tertentu atau menjadi anggota atau ikut serta dalam kelompok tertentu, semuanya sudah dilakukan dengan kesadaran.

Oleh karena itu, sebaiknya kalau seseorang mau mengikuti suatu organisasi, dia harus paham betul tentang organisasi yang akan ia ikuti. Kalau mau mengikuti Islam *ya* harus jelas Islam yang bagaimana. *Kan* ternyata Islam juga ada bermacam-macam. *Kan* ada yang menganut aliran keras, yang langkah-langkah dan tindakannya seringkali justru tidak sesuai dengan petunjuk Islam yang damai, yang lembut, yang ramah, dan yang penuh kasih sayang. *Nah*, kalau saya mau mengikuti paham tertentu *ya* harus paham betul mengenai paham itu. Bukan sekadar karena paham itu baru terkenal atau baru *nge-trend*. Jangan sampai kita mengikuti suatu kelompok tanpa mengetahui apa misi dan visinya. Kalau Muhammadiyah *kan* jelas. Itu organisasi masyarakat yang bukan politik. Cara mengajak seseorang supaya ikut atau dakwahnya supaya mengikuti agama dilakukan dengan cara yang lembut.

Dengan demikian, kalau seseorang memilih untuk ikut Muhammadiyah tampaknya dia tidak akan terpengaruh menjadi orang yang keras. Cara Muhammadiyah memperjuangkan agama itu cara yang damai, cara yang bisa diterima, sebab pedomannya *amar ma'ruf, nahi mungkar*. Jadi *amar ma'rufnya* yang didahulukan, yakni mengajaknya lebih dulu, dan bukan *nahi mungkar-nya*, yakni menghabiskan kemungkaran-kemungkaran dengan keras. Pertama-tama diberikan penjelasan dulu. Kalau sudah diberikan penjelasan belum berhasil dan sebagainya, barulah kalau memang perlu ada

kekerasan-kekerasan. Tapi kekerasan yang tidak menimbulkan masalah.

Saat ini masih ada orang-orang “merah”, yakni bekas-bekas PKI, yang masih hidup di lingkungan Ledok [Kotagede]. Sekarang masih. Tapi saya tidak hafal persis nama-namanya. Ada orang-orang tamatan guru, yang dulu ditahan dan setelah bebas ditugaskan kembali di sini dan berbaur lagi dengan masyarakat. *Ya*, kita bisa menerima orang-orang seperti itu, asal dalam masyarakat, mereka menunjukkan sikap yang baik. Biasanya kalau yang dulunya guru itu setelah bebas ada yang terus menjadi orang yang punya keahlian pijat dan sebagainya. Mereka di sini lalu buka layanan pemijatan, dan sebagainya. *Ya*, mereka itu kita terima.

Tokoh-tokoh yang melakukan pendekatan kepada orang-orang eks-PKI supaya menjadi lebih baik adalah mereka yang pada tahun '65 sudah aktif di Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pengajian atau khotbah. Yang mengajak mereka adalah dari pimpinan Muhammadiyah dan pokoknya dari orang-orang Muhammadiyah yang waktu itu sudah bergerak di bidang dakwah. Kini mereka mengajak eks-PKI untuk bisa bergabung dan kita juga tidak menganggap mereka itu musuh. Kami tidak menganggap bahwa semua yang PKI harus dimusuhi. Tidak. Tokoh-tokohnya saja yang kita *anu*-kan, tapi kalau yang lain, *ya* kalau bisa *ya* kita ajak. Kalau memang yang *nggak* mau dan sebagainya, kita awasi saja. Kalau mereka itu aktif *ya* kita laporkan. Lalu mereka ditangani oleh aparat, sehingga akhirnya banyak yang mau ikut ke masjid, ikut shalat-shalat...

Kelompok perempuan Muhammadiyah atau Aisyiah juga aktif mengajak eks-PKI [perempuan] supaya masuk Islam. Semuanya diberi petunjuk. Pokoknya mereka itu kalau mungkin kita ajak. Tapi kalau memang ada yang sikapnya masih memusuhi, atau pun masih

berkeras, biasanya dikoordinasikan dengan aparat pemerintah, supaya jangan sampai mereka yang masih berpegang pada idealisme PKI-nya tetap dibiarkan.

Ketika orang-orang “merah” [eks-Tapol] itu diajak supaya masuk ke Islam ada yang menolak, meskipun yang mau menerima juga banyak. Yang mau menerima dan ikut ada, tapi yang masih belum ikut atau belum mau mengikuti ada juga. Macam-macam. Tapi kebanyakan dari mereka yang asalnya adalah keluarga Muslim biasanya mudah diajak kembali. Tapi kalau yang semula asalnya bukan keluarga Muslim belum tentu terus mau.

Cara kita mengajak itu seringkali justru tidak formal, melainkan personal. Seperti yang pernah saya katakan, ada orang “merah” yang mempunyai seorang anggota keluarga yang Muslim. *Nah*, melalui pendekatan-pendekatan personal akhirnya tertarik dan menikah dengan seorang Muslim. Seperti itu ada. Ada juga orang yang ber aliran “merah” yang kemudian *besanan* dengan keluarga Muslim, dan sebagainya.

Pendekatan formal justru tidak ada. Biasanya mereka diajak untuk mengikuti suatu pertemuan. Jika mereka ikut, mereka kita sambut dengan ramah. Tidak usah disinggung-singgung latar belakang politiknya. Apalagi soal apakah dia eks-Tapol atau bukan. Kalau mereka ini sudah ikut bergabung, *ya* harus disambut dengan baik. Jadi cara yang dipakai adalah cara kekeluargaan.[]

Tetap Harus Diwaspadai

Tragedi '65 di Mata Seorang Muslim

Pengantar

*LAHIR tanggal 23 Januari 1944 di Kotagede, Yogyakarta, narasumber dari tuturan berikut adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Secara tradisional, **Asnawi** (bukan nama sebenarnya) dan keluarganya adalah keluarga Muhammadiyah, mirip dengan Suherjanto di atas. Ayahnya seorang aktivis Muhammadiyah di tingkat cabang dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Saat Tragedi '65 terjadi, usianya sekitar dua puluh atau dua puluh satu tahun dan merupakan anggota Pemuda Muhammadiyah. Waktu itu ia sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.*

Sejauh dia ingat, berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda di daerahnya pada awal 1960-an berjalan dengan baik dan kompak. Misalnya, kegiatan-kegiatan dalam bidang seni dan beladiri. Seandainya pun ada semacam “konfrontasi” di bidang budaya antara kelompok Muhammadiyah dengan kelompok Pemuda Rakyat, biasanya bentuknya hanya sekadar “perang propaganda” melalui papan yang dibuat oleh masing-masing pihak. “Paling itu saja. Jadi cuma sekadar perang kata-kata saja lewat karya. Tidak ada kejadian bentrok secara fisik,” kata Asnawi.

Tentang Tragedi '65 sebagai sebuah peristiwa besar Asnawi tidak banyak memberikan refleksinya. Meskipun demikian, menurutnya pemberian kode khusus (misalnya kode "ET") pada Kartu Tanda Pengenal milik para mantan Tahanan Politik tidak tepat lagi. Ia mendukung usaha orang-orang Muhammadiyah untuk mengadakan rekonsiliasi dengan para mantan Tahanan Politik yang bentuknya adalah sosialisasi dan dakwah.

Menurutnya pula yang terjadi pada tahun 1960-an adalah konflik ideologi. Namun demikian, sejauh dia mengamati, sekarang ini konflik macam itu sudah tidak ada, mengingat peran ideologi sudah tak menonjol lagi. Kalaupun ada perbedaan pandangan, biasanya lebih menyangkut soal sistem-sistem ekonomi, misalnya ekonomi kapitalis lawan ekonomi non-kapitalis. "Kalau soal paham monotheis atau anti-monotheis, percaya pada Tuhan atau tidak percaya Tuhan, sekarang ini kelihatannya orang lebih berpikir secara rasional," kata Asnawi lagi.

*Seperti narasi sebelumnya, narasi berikut adalah pengolahan kembali hasil wawancara yang dilakukan **Mohammad Subkhi Ridho**, orang muda aktivis Muhammadiyah dan alumnus Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Wawancara dilakukan tanggal 17 September 2009 di kantor di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) an-Nikmah, Kotagede, Yogyakarta*

NAMA saya Asnawi. Saya lahir tanggal 23 Januari 1944 di Kotagede, Yogyakarta. Saya terlahir sebagai anak *ragil* [bungsu]. Kakak tertua saya adalah seorang perempuan, dan saat ini menetap di Wonosobo, Jawa Tengah. Kakak kedua saya seorang laki-laki, tetapi sudah meninggal pada tahun 1999. Saya mempunyai seorang anak perempuan. Suami

anak saya dari Pekalongan dan saat ini mereka sudah memberikan cucu pertama untuk saya.

Saya lahir dari tradisi keluarga Muhammadiyah. Bapak saya aktivis Muhammadiyah, meskipun hanya di tingkat cabang dan bukan di tingkat pusat. Ayah saya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Misalnya dalam kegiatan koperasi di kampung, di mana Bapak saya adalah ketuanya.

Saat terjadi Tragedi '65, umur saya sekitar 20-21 tahun. Saya masih berstatus mahasiswa, kuliah di Fakultas Ekonomi UGM [Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta]. Waktu itu saya baru saja masuk kuliah, tetapi kemudian kuliah terhenti karena adanya peristiwa Gestapu itu.

Ketika itu seluruh kegiatan di UGM berhenti selama satu semester. Kuliah baru dimulai lagi pada tahun 1967-an. Saya menyelesaikan program sarjana pada tahun 1971. Sejak mahasiswa, saya sudah aktif di organisasi sayap Muhammadiyah, yakni di Pemuda Muhammadiyah. Saya sempat menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah sekitar tahun 1968-1970, sebelum saya lulus ujian sarjana dari UGM.

Setelah menyelesaikan kuliah sarjana pada tahun 1971, mulai akhir tahun 1972 saya merantau ke Jakarta dan bekerja di sana. Selama sekitar 30 tahun saya meninggalkan Yogya dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta, dan pada tahun 2003 saya kembali ke Kotagede. Di Kotagede saya diminta untuk mengelola kegiatan di Baitul Mal wa Tamwil atau BMT.

Memang Ada Ketegangan

Berkaitan dengan Tragedi '65, baik sebelum maupun sesudahnya, saya hanya berperan sebagai “pemain figuran” saja. Ini meminjam istilah dari dunia film. Itu pun mungkin peran saya masih di bawah peran pembantu, bukan sebagai aktor intelektual atau aktivis. Memang

setiap malam saya terlibat dalam ronda, akan tetapi masih dalam bentuk sebatas *wira-wiri, ubyang-ubjung* [mondar-mandir dan ikut-ikutan] saja, bukan terlibat aktif, apalagi mengetahui berbagai hal secara detil. Waktu itu masih *croco*. Saya belum aktif sebagai pengurus di Muhammadiyah. Memang saya sudah mulai ikut di Pemuda Muhammadiyah, tetapi hanya sebagai anggota saja.

Sementara itu pada tahun 1960-1965 itu saya masih kecil. Ibaratnya saya ini masih *precil* [anak katak]. Saya menjadi anggota "Sanggar Bulus Kuning", sebuah kelompok seni milik Muhammadiyah di Kotagede. Saya menjadi anggota di Divisi Publikasi. Tugasnya antara lain membuat spanduk, membikin gambar-gambar, baik menggunakan papan ataupun kertas. Sanggar seni ini dibuat untuk "mengimbangi" program-program kesenian Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di kalangan Muhammadiyah memang ada banyak kegiatan bidang seni. Terutama di antara Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiah (NA). NA adalah organisasi sayap perempuan muda Muhammadiyah. Aktivitas seninya antara lain permainan musik angklung, yang dibuat untuk mengimbangi kesenian ketoprak dan tari Genjer-genjer milik Lekra. Akan tetapi tentang tari Genjer-genjer, bentuknya bagaimana, saya tidak mengetahuinya. Hanya saja dahulu pada tahun-tahun sebelum terjadinya Tragedi '65, tarian itu memang terkenal. Dulu sering dipentaskan di Jalan Sopingan, Yogyakarta.

Pada waktu itu di Kotagede Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani tidak begitu menonjol. Yang menonjol kala itu adalah kesenian dari Pemuda Rakyat. Dengan demikian NA bukanlah kompetitor dari Gerwani. Adapun NA waktu itu sangat terkenal. Kesenian angklung di Kotagede itu penggeraknya adalah para anggota NA. Setiap ada perayaan hari besar Islam, di samping ceramah dan

sebagainya, biasanya hiburannya adalah musik. *Nah*, musiknya itu musik angklung dan tari-tari yang Islami. Tarian Islami ini dilakukan oleh orang-orang Kotagede sendiri, khususnya orang-orang Kotagede yang tinggal di daerah sebelah timur, seperti di Mertosanan, Jampitan, dan Piyungan.

Perlakuan di Muhammadiyah kepada orang-orang ”merah” [maksudnya orang-orang berhaluan kiri atau anggota PKI, ed.] secara spesifik saya tidak mengetahuinya. Yang saya ketahui, sebelum terjadinya Tragedi ’65 memang ada ketegangan. Ketegangan yang saya maksud adalah ketegangan yang terjadi karena ketika orang-orang Islam melakukan kegiatan pengajian dan sebagainya, orang-orang ”merah” itu melakukan kegiatan lainnya seperti latihan ketoprak, kumpul-kumpul, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk ”menandingi” kegiatan di masjid.

Tidak Ada Bentrok Fisik

Informasi mengenai terjadinya Peristiwa Gestapu baru saya dengar beberapa hari kemudian. Saya mendapat informasi bahwa peristiwa itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Informasi ini saya terima dari salah satu keluarga saya yang kebetulan bekerja sebagai intelijen. Ia menginformasikan kalau peristiwa Gestapu pelakunya adalah PKI. Intel tersebut yang memberi tahu kepada orangtua saya bahwa ada gerakan-gerakan seperti ini atau seperti itu. Saudara saya itu lalu bilang kepada Bapak saya, ”Tapi Bapak tidak usah khawatir, tidak usah mengungsi karena rumah sudah teratasi dengan baik.” Demikian kata kakak saya.

Informasi bahwa pelaku Peristiwa G30S adalah Partai Komunis sebetulnya simpang siur. Saya sendiri sebenarnya kurang tahu. Informasi yang saya ketahui hanya saya terima dari kakak saya saja.

Kakak saya memberi tahu supaya jangan keluar malam sendirian. Yang saya dengar hanya itu saja.

Memang ketika meletus peristiwa pembunuhan para Jenderal di Jakarta, terjadi semacam tindakan *counter attack* [perlawanan-balik] terhadap kegiatan orang-orang PKI. Jadi, waktu itu setiap malam warga Muhammadiyah melakukan siskamling [kegiatan sistem keamanan lingkungan], dan terus melakukan latihan beladiri. Di kalangan anak-anak Muhammadiyah ada kecondongan untuk melakukan latihan beladiri secara rutin. Padahal sebelumnya mereka tidak terlalu giat. Tapi saya tidak ikut. Saya sendiri waktu itu senangnya pada kegiatan gambar-menggambar dan lukis-melukis. Pokoknya lebih pada kegiatan yang dekat dengan bidang kesenian. Karena sejak kecil badan saya sudah kurus, maka saya tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan beladiri.

Yang jelas waktu itu semua kegiatan berjalan dengan kompak, baik kegiatan di bidang seni maupun beladirinya. Kekompakan ini terlihat dari kegiatan jaga malam yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian kegiatan dapur umum diselenggarakan oleh NA dan dipusatkan di mushola dan sekitarnya.

Saya punya pengalaman pribadi yang membekas berkaitan dengan riak-riak hubungan antara Muhammadiyah dengan PKI. Pengalaman saya itu dalam bidang seni budaya yang mungkin dianggap berkonfrontasi dengan seniman Lekra. Polemik muncul ketika kita sama-sama membuat tulisan propaganda lewat papan yang dibuat oleh masing-masing. Paling itu saja. Jadi cuma sekadar perang kata-kata saja lewat karya. Tidak ada kejadian bentrok secara fisik.

Tetap Mewaspada

Terkait kebijakan yang memberi tanda khusus di KTP orang-orang yang dianggap PKI pada zaman Orde Baru, menurut saya situasi pada waktu itu diperlukan. Akan tetapi dengan adanya perjuangan di bidang Hak-hak Asasi Manusia [HAM] seperti sekarang ini, kelihatannya sudah tidak tepat lagi memberikan cap seperti itu.

Waktu itu tak lama setelah Tragedi '65, orang-orang Muhammadiyah di Kotagede mencoba melakukan rekonsiliasi, dan bentuknya adalah sosialisasi dan dakwah. Sosialisasi dan dakwah dilakukan dengan cara bertemu dengan tokoh-tokoh PKI. Tapi waktu itu saya sendiri tidak ikut melakukannya, karena saya masih terlalu muda. Menurut saya setelah terjadinya Tragedi '65, dakwah berkembang pesat di Kotagede. Tandanya adalah munculnya banyak masjid. Sebelum terjadi Tragedi '65 di sini jumlah masjid hanya ada dua, yakni Masjid Gede dan Masjid Perak. Tapi setelah Tragedi '65 setiap kampung sudah memiliki masjid atau musholanya sendiri. Dan itu berjalan hingga sekarang.

Sekarang ini kebetulan saya bergiat di bidang dakwah. Sekaligus saya juga jadi jamaah di Masjid Mataram. Masjid Mataram itu masjid kuno dan di sampingnya *petilasan* [peninggalan] makam raja-raja. Di situ *kan* masih ada *klenik* [ilmu gaib]. Misalnya ada *sirep*³⁷ dan sebagainya. Paham *klenik* seperti itu *kan* harus dilawan.

Saya kira salah satu caranya supaya paham seperti itu tidak sampai masuk lagi, *ya* dengan mengadakan sosialisasi sambil mengatakan kepada mereka yang masih melaksanakan *sirep* bahwa hal macam itu keliru. Praktik seperti itu berarti mengkultuskan, menghormati arwah-arwah, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sebetulnya bukan

37 Membuat orang tertidur di luar kemauannya supaya barang-barangnya bisa dicuri.

suruhan [perintah] agama. Agama apa pun, mana pun, *kan* begitu *ya?* Jadi, caranya dengan melakukan banyak sosialisasi. Menurut saya perlu sosialisasi dan dakwah. *Nah*, dakwahnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Pak AR [maksudnya AR Fachruddin],³⁸ yakni cara-cara yang sejuk dan persuasif.

Cara yang tidak persuasif itu misalnya mengatakan kepada tetangga “*kowe kok ra salat?*” [kamu kok tidak shalat?]. *Wuuah...*, kalau caranya begitu mungkin tetangga itu malah akan benci. Perlu dicari cara-cara lain. Misalnya melalui *takjilan* sore hari.

Mungkin juga dengan pendekatan ekonomi. Misalnya, sekarang ini *kan* secara ekonomis banyak orang bekerja dengan gaji di bawah ketentuan upah minimum regional. Ada buruh *benik* [kancing baju], yakni buruh yang tugasnya memasang *bat* kancing baju, pendapatannya sehari hanya Rp 4.000,- sampai Rp 5.000,-. *Jauuhhh...*, jauh dari upah minimum. Coba kalau jumlah itu dikalikan 30 [hari]. *Kan* jumlahnya hanya antara Rp 120.000,- dan Rp 150.000,-? Padahal ketentuan Upah Minimum Regional [UMR] untuk Yogya adalah Rp 672.000,- sekarang ini. Kalau seseorang menerima upah di bawah itu *kan* berarti dia masih miskin.

Nah, kemiskinan seperti ini *kan* mirip sekali dengan kemiskinan yang terjadi dulu itu. Banyak pemilik pabrik sangat kaya, tapi buruh-buruhnya *miskin-miskin*. Situasi seperti ini harus diatasi melalui sosialisasi dakwah. Selain itu, perlu juga meningkatkan kemampuan ekonomi umat, khususnya mereka yang ada di *grass roots*, di lapisan bawah. Saya yakin kalau kehidupan masyarakat sudah sejahtera *nggak* akan timbul lagi hal-hal seperti dulu. Orang tidak akan *aeng-aeng* [aneh-aneh] lagi. Kalau hidupnya sudah sejahtera, orang akan berpikir, “*Ah*,

38 AR Fachruddin (1916-1995) adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1968-1990.

ngapa aku golek gawean sing malah dilarang ro pemerintah? [Ah, kenapa saya musti mencari pekerjaan yang dilarang oleh pemerintah?]

Menurut saya dulu itu yang paling bahaya sebetulnya adalah paham ideologinya. Kalau zaman sekarang, sepertinya peran ideologi itu tidak lagi menonjol. Yang ada malah paham-paham, atau sistem ekonomi, misalnya paham kapitalisme. Kalau soal paham monotheis dan anti-monotheis, percaya pada Tuhan atau tidak percaya Tuhan, sekarang ini kelihatannya orang *kan* lebih berpikir secara rasional. Meskipun demikian, kita harus tetap mewaspadaai, jangan sampai ada paham-paham yang seperti dulu itu. Sekarang *kan* zamannya sudah lain. Tapi tetap harus diwaspadai, jangan sampai bahaya laten itu timbul. Tapi *ya*, mungkin selama Rusia atau negara-negara lain tidak memunculkan paham seperti itu [maksudnya paham komunis] kemungkinannya kecil saja untuk bangkit lagi. Tapi bukan berarti kita boleh mengabaikannya *lho ya?* []

Harus Bangga Disebut Bangsa Indonesia

Tragedi '65 di Mata Seorang Penganut Kejawen

Pengantar

*Yang akan Anda baca berikut ini adalah narasi tentang Tragedi '65 di mata seorang penganut Kejawen. Penuturnya adalah **Agung Priyambodo** (bukan nama resmi tentu saja) yang berasal dari Yogyakarta. Waktu Tragedi '65 berlangsung ia adalah seorang remaja berusia 14 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjadi anggota dari Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia (GSNI).*

Seingat dia, pada saat menjelang Tragedi '65 relasi sosial antara kelompok Agama, Nasionalis, dan Komunis biasa-biasa saja. Meskipun resminya kelompok Nasionalis dan Komunis itu tidak menjadi bagian dari kelompok Agama, menurut Agung, hal itu “ tidak berarti bahwa yang kaum Nasionalis dan Komunis itu tidak beragama. Teman-teman saya yang aktif di Pemuda Rakyat juga beragama.” Dia akui, mungkin saja ada yang tidak beragama. Namun demikian, itu adalah urusan pribadi.

Di bawah pemerintahan Presiden Sukarno, sejauh dia tahu, meskipun masyarakat terbagi dalam berbagai golongan, dalam hal kebudayaan maju. Masing-masing kelompok, seperti kelompok Partai Nasional

Indonesia dan kelompok Partai Komunis Indonesia, memiliki grup seni ketoprak sendiri-sendiri. Semuanya berjalan dengan “guyup rukun” alias rukun dan saling bekerjasama. Ia bahkan mendapat kesan bahwa waktu itu bangsa Indonesia bangga dengan budayanya sendiri.”Kita betul-betul berkepribadian di bidang kebudayaan,” ujarnya.

Agung menolak penggambaran dari masa Orde Baru bahwa sebelum Peristiwa 1 Oktober 1965 itu suasana masyarakat kacau dan saling bertentangan. Apalagi gambaran bahwa setiap orang seakan sudah siap untuk saling berperang dan saling membunuh sebagai sesama anak bangsa. “Itu tidak benar!” tandas Agung.

Menengok kembali pada apa yang telah terjadi, Agung yakin bahwa setiap peristiwa tentu ada penyebabnya. Demikian pula dengan Tragedi ’65. Tragedi itu terjadi, menurutnya, karena ada yang melanggar aturan Tuhan. Pelanggaran itu kemudian melahirkan penderitaan. Melalui kaca mata Kejawen, ia melihat bahwa seharusnya orang tidak boleh terlibat dalam tindak pengucilan, penangkapan atau pembunuhan. Alasannya, karena dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu berarti seseorang menghakimi orang lain. Padahal seharusnya manusia itu hidup dengan penuh kasih sayang dan saling mengampuni. Pesan Agung, “Kepada siapa pun kita harus bersifat kasih sayang. Harus didasari [keyakinan] bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, dan oleh karena itu manusia harus belajar saling mengampuni. Orang tidak boleh membenci siapa pun. Yang berhak menghukum itu hanya Tuhan.”

Agung juga mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 dan sesudahnya itu tidak lepas dari dinamika politik internasional. Waktu itu Amerika dan seluruh Blok Barat sangat anti-komunis dan merasa cemas ketika Bung Karno membentuk “Poros Jakarta-Peking-Pnompenh”. Itulah sebabnya, menurut pendapat Agung, “Mereka pun mendukung

apa yang terjadi pada tahun 1965. Nyatanya setelah terjadinya Tragedi '65 mereka melakukan penjajahan ekonomi di sini."

*Narasi di bawah merupakan rangkuman hasil wawancara dengan Agung yang ditulis kembali oleh **Kiswondo**, anggota Komisi Sejarah PUSdEP yang sejak kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta aktif dalam gerakan mahasiswa. Kini Kiswondo banyak tertarik untuk melakukan penelitian dan bekerjasama dengan para survivors Tragedi '65.*

NAMA saya Agung Priyambodo. Dalam hal pilihan agama, saya Islam, namun dalam hal kebudayaan saya penganut Kepercayaan atau Kejawen. Saya bertempat tinggal di Yogyakarta. Ketika Peristiwa 1 Oktober 1965 terjadi, saya masih berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP Negeri II Yogyakarta, kelas 3. Waktu itu saya aktif di organisasi ekstra sekolah Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia atau GSNI.

Semua Kebudayaan Hidup

Menurut saya kotak-kotak golongan politik, yakni golongan nasionalis, golongan agama (terutama agama Islam) dan golongan komunis, dulu itu memang ada. Di sekolah pun ada. Tetapi tidak begitu tajam. Hanya bersaing, dan tidak ada bentrok kekerasan. Kalau di sekolah tidak ada. Itu yang saya alami *ya*. Tetapi kalau di luar, misalnya di kampung, itu jelas sekali. Ada persaingan dan bentrokan. Dulu di kampung ada kelompok Pemuda Rakyat dari PKI, lalu Pemuda Marhaen dari PNI, kemudian ada juga Pemuda Muslim. Pengkotak-kotakan itu jelas sekali ada pada waktu mendekati meletusnya Tragedi '65. Waktu itu situasi terasa panas.

Tentang paham NASAKOM yang ada pada waktu itu saya menangkapnya sebagai suatu rumusan untuk menunjukkan bahwa dalam kenyataannya di Indonesia itu terdapat tiga golongan, yakni golongan nasionalis, golongan agama, dan golongan komunis. Tetapi ketiganya itu bisa disatukan dengan Pancasila. Yang ditonjolkan itu, Pancasila. Boleh saja orang bergolong-golongan untuk menuju ke Pancasila. Waktu itu menurut ajaran Bung Karno, kaum nasionalis di Indonesia itu bukan seperti kaum nasionalis zamannya Hitler, yakni kaum nasionalis yang sangat ekstrem, yang merasa bahwa menjadi bangsanya adalah bangsa yang paling menonjol atau paling tinggi di antara bangsa-bangsa lain, dengan kata lain bersikap chauvinistik. Bukan. Kemudian agama di Indonesia pun bukan agama yang mendorong sikap ekstrem, di mana orang menjadi yang paling benar. Kaum agamawan di Indonesia tetap ingat, dasar negaranya adalah Pancasila. Begitu. Jadi penggolongan itu hanyalah penggolongan berdasarkan suatu ideologi. Mereka terpisah-pisahkan secara tegas. Yang lebih penting lagi, pada waktu itu semua golongan itu beragama. Hanya ideologi-ideologi politiknya saja yang berbeda.

Jadi, tidak berarti bahwa yang kaum Nasionalis dan Komunis itu tidak beragama. Teman-teman saya yang aktif di Pemuda Rakyat juga beragama. Tetapi mungkin ada juga sebagian yang tidak beragama. Tetapi itu *kan* urusan pribadi. Di Indonesia itu memang begitu. Berbeda dengan di luar negeri. Di sini yang ada itu hanya pengelompokan berdasarkan pandangan politik: Nasionalis, Agama, Komunis. Itu pandangan politik, bukan rasa Ke-Tuhan-an. Saya rasa pada waktu itu semua orang beragama, ber-Tuhan. Apalagi negara berdasar Pancasila, khususnya sila pertama, yakni Ke-Tuhan-an yang Maha Esa. Itu yang saya tangkap pada waktu itu, ketika umur saya masih 14 tahun.

Pada masa Bung Karno itu meskipun secara politik masyarakat terbagi-bagi dalam golongan, tetapi dalam bidang kebudayaan suasananya terasa lebih semarak. PNI punya ketoprak sendiri, PKI juga punya ketoprak sendiri. Anehnya waktu itu malah terkesan muncul suasana *guyup rukun*. Semua kebudayaan hidup dan kita bangga dengan kebudayaan kita sendiri. Kita betul-betul berkepribadian di bidang kebudayaan.

Sebenarnya Potensial Sekali

Kalau mengikuti cerita yang berkembang di masyarakat dan di buku-buku sejarah pada masa Orde Baru dan setelahnya, seolah-olah situasi masyarakat sebelum Peristiwa 1 Oktober 1965 itu kacau. Seolah-olah setiap orang siap berperang, siap untuk saling membunuh sesama anak bangsa. Itu tidak benar! Menurut saya situasi waktu itu malah tidak begitu tragis seperti sekarang. Pada waktu itu ada kepemimpinan yang jelas. Meskipun ada perbedaan pendapat di sana-sini, rasa kebangsaan itu masih kuat.

Misalnya, pernah ada peristiwa di mana ketika Pemuda Marhaen melakukan *long march* lengkap dengan atribut-atributnya dari Klaten ke Yogyakarta, dicegat di Prambanan oleh golongan Komunis. Memang ada *tawuran* sebentar, tetapi tawurannya tidak sehebat sekarang ini. Sekarang ini ada tawuran mahasiswa antar universitas. Bahkan antar fakultas saja terjadi tawuran, seperti yang sering terjadi di Jakarta dan Makasar. Tawuran antar pelajar SMP dan SMA saja juga sering terjadi di Jakarta. Kalau dulu itu tidak begitu. Hanya ada beberapa orang nakal yang suka memancing-mancing, sehingga terjadi tawuran, tetapi lalu sudah. Tidak dahsyat dan berlarut-larut seperti sekarang ini.

Waktu Tragedi '65 itu terjadi sebenarnya bangsa Indonesia bingung dan bertanya-tanya: sebenarnya ada apa dengan semua yang

terjadi ini? Lalu tiba-tiba ada peristiwa G30S itu, Peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Dalam pidatonya Bung Karno tidak menyebutnya “G30S”, tetapi “Gestok”. Artinya, Gerakan Satu Oktober. Bung Karno tahu-tahu diungsikan di Halim [Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, ed.] dan sebagainya dan sebagainya. Semua orang tahu ceritanya.

Berdasar ingatan saya waktu itu, terdapat situasi politik yang gawat, dan di situ ternyata ada dua blok di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [ABRI] sendiri. Jadi di angkatan bersenjata sendiri ada dua blok, yakni blok yang termakan oleh ideologi komunis, dan blok yang nasionalis dan agama. Keduanya berebut pengaruh. Hal itu terjadi karena pengaruh masuknya partai politik ke ABRI. Lalu ABRI terpecah dan termakan oleh politik partai itu. Akibatnya terjadi bentrokan atau benturan.

Itu yang saya ingat dari masa kecil saya waktu itu. Waktu itu saya belum bisa menghubungkan-hubungkan satu peristiwa dengan yang lain. *Iki ana apa sih sakjane?* (Ini sebenarnya ada apa *sih?*). Apakah yang menggerakkan bangsa ini sehingga pecah? Siapa yang berperanan? Waktu itu lalu ada Jenderal Soeharto, komandan Kostrad, yang demi keamanan memerintahkan penangkapan-penangkapan terhadap para “pemberontak” itu. Jelas yang bergerak di lapangan adalah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Saya sendiri pernah ikut melihat langsung di alun-alun utara Yogyakarta bagaimana Kolonel Sarwo Edhi Wibowo datang dengan mengendarai helikopter dan disambut.

Ternyata setelah peristiwa itu selesai, saya baru tahu bahwa ada unsur-unsur pemecah-belah bangsa yang masuk ke dalam ABRI. Seharusnya ABRI itu pengawal bangsa, pengawal Revolusi, tetapi dalam kenyataannya justru terpecah belah dan saling bersaing. Tetapi pada waktu itu saya tidak memiliki pandangan politik yang mendalam. *Ngertine ya mung ngana kuwi* (yang saya tahu *ya* hanya

sebatas itu). Jadi korban-korban jenderal itu katanya para pendukung Sukarno yang setia. Mereka dibunuh semua. Di Jakarta ada enam jenderal dan satu perwira tinggi dibunuh. Di Yogyakarta ada dua, yakni Komandan Komando Resort Militer [KOREM] dan Kepala Staf KOREM [KASREM]. Waktu itu kebetulan saya juga melihat prosesi penguburan dua komandan tersebut di Yogyakarta. Prosesinya dilakukan dengan menggunakan angkutan Panser, lewat di depan sekolah saya di SMPN II Yogyakarta. Dari arah Jalan Malioboro prosesi berbelok ke kiri ke Jalan Senopati, lalu ke Taman Makam Pahlawan. Saya melihat itu semua. Menurut cerita yang berkembang, katanya pembunuhan itu terjadi di daerah Kentungan, sebelah utara Yogyakarta.

ABRI di Yogyakarta pun terpecah. Batalyon 403 dulu terkenal sebagai Yon L atau Batalyon L. Sementara Yon C [Batalyon C] itu yang ada di Benteng Vredeburg. Yon L itu dulu katanya, sekali lagi katanya, *wong* dulu saya masih kecil jadi belum benar-benar mengerti, sudah termakan ideologi PKI. Artinya sudah mendukung PKI.

Kenyataan yang terpenting adalah bahwa meskipun situasinya kacau, tetapi ekonomi rakyat tidak terpengaruh. Misalnya pegawai negeri tetap kerja seperti biasa. Tidak terjadi *chaos* atau kekacauan sosial. Ibu saya kerja wiraswasta, pengusaha modiste. Ia tetap menerima jahitan, bordiran, dan sebagainya. Semuanya berjalan biasa saja. Hanya saja waktu genting-gentingnya memang diberlakukan jam malam, terjadi pemadaman listrik, serta tidak boleh menyalakan lampu besar. Yang dibolehkan hanya menyalakan lampu kecil.

Berikutnya lalu terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para anggota PKI. Entah orang itu tahu soal pemberontakan atau tidak, entah ikut berontak atau tidak, entah tahu politik atau tidak, pokoknya semua ditangkap. Istilahnya terjadi pen-*ciduk*-an. Orang di-*ciduk*.

Saya melihat hal itu dengan mata kepala sendiri. Suatu hari sewaktu saya pulang sekolah bersama segerombol anak melihat bagaimana pencidukan itu terjadi. Saya melihat pencidukan atas suami Ibu yang jualan *gudheg* di selatan Plengkung Wijilan. Tetapi saya tidak tahu apakah orang itu dipulangkan lagi atau tidak. Mungkin dia meninggal di tahanan atau dibunuh, atau apa. Saya lupa namanya. Kejadian itu saya lihat sendiri. Kalau sekarang membeli *gudheg* di situ saya masih ingat bahwa ibu yang jual *gudheg* ini dulu suaminya ditangkap. Saya masih ingat jelas. Ibu itu sekarang sudah tua, tetapi masih gesit. Itu salah satu peristiwa yang saya ingat.

Berkaitan dengan peristiwa pencidukan dan penculikan, menurut saya situasinya waktu itu tidak terlalu kacau. Setidak-tidaknya di daerah tempat tinggal saya. Saya dulu tinggal di Kecamatan Kraton di Panembahan, Yogyakarta. Ketua Pemuda Rakyatnya, yang saya kenal, memang diambil. Dia diambil bersama seorang pelukis. Ada juga orang dari Lembaga Kebudayaan Rakyat [Lekra]. *Kan*, waktu itu oleh PKI banyak seniman diwadahi di Lekra. Mereka itu memang sebetulnya potensial sekali. Ada seniman kethoprak, pelukis, maupun yang aktif di karawitan ikut ditangkap. Dua pemain kethoprak di Rotowijayan, yakni Yatin dan Kadhariyah, juga ikut ditangkap. Saya tahu itu.

Dimasukkan *Luweng*

Menjelang terjadinya Peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 itu kebetulan kampung saya sedang membangun gedung Balai Rukun Kampung [RK]. Dulu namanya RK, bukan Kelurahan. Untuk mencari dana guna membiayai pembangunan tersebut diadakanlah pertunjukan kethoprak “Kridho Mardi” di Sasono Hinggil. Dulu saya ikut menonton, karena Bapak saya adalah salah satu anggota panitia pertunjukkan. Tokoh-tokoh di Panembahan yang berkecimpung di

dunia seni Kethoprak itu ternyata semuanya tokoh Lekra. Lakon-lakon kethoprak yang saya lihat waktu kecil itu sampai sekarang masih saya ingat. Ceritanya memang bagus. Kalau dibandingkan dengan lakon-lakon kethoprak zaman sekarang memang berbeda. Jauh lebih bagus. Dulu para pemainnya adalah para pemain watak. Hanya sebatas itu yang saya ketahui.

Kalau mengenai pembunuhan-pembunuhan itu saya tidak melihat. Waktu itu saya masih sekolah, tapi lalu sekolah diliburkan sebentar. Bulan Agustus [1965] seharusnya saya ujian SMP. Tetapi ujian itu diundur. Baru pada bulan Januari 1966 ujian itu terselenggara. Tahun 1966 saya masuk SMA. Saya lupa kapan persisnya, tapi pokoknya pada bulan-bulan muda. Tapi situasi yang sebenarnya katanya sedang terjadi tragedi. Katanya mereka yang dicituk-cituk tentara itu kemudian dibawa pakai truk tertutup lalu dimasukkan kamp seperti pada zaman Hitler. Sebagian besar yang termasuk Golongan B ditahan di Pulau Nusa Kambangan, lalu dipindahkan ke Pulau Buru. Mereka yang termasuk Golongan A langsung diadili dan dihukum mati. Sementara itu, mereka yang termasuk Golongan C dijebloskan di penjara-penjara setempat.

Sebagian lagi katanya dieksekusi dengan cara *dicemplungke* [dimasukkan] ke dalam *luweng*³⁹ di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Mereka diperintah untuk berbaris lalu ditembaki dan dijatuhkan ke lubang luweng. Masih menurut cerita yang beredar, katanya ada yang tidak ditembak, tetapi ditutup matanya, diikat tangannya lalu disuruh jalan, padahal di depannya ada mulut luweng yang besar itu. Di bawah luweng ada sungai bawah tanah. Jadi mereka terjatuh ke dalam luweng. Waktu itu oleh orangtua saya tidak diperbolehkan bermain terlalu jauh, sebab situasi sedang genting. Jadi, saya tidak

39 Sumur alam yang terhubung dengan arus sungai bawah tanah menuju laut.

benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Saya hanya tahu dari cerita-cerita yang beredar. Setelah semuanya selesai, tahun berapa saya kurang ingat, saya baru tahu tragedi itu setelah diceritai.

Sebenarnya konflik dan benturan itu tidak ada. Aneh memang. Situasi di atas [elite politik] gawat, tetapi bagi pelajar dan mahasiswa biasa tidak ada apa-apa. Semuanya *ayem tentrem* [tenteram dan bahagia] dan lancar-lancar saja. Tidak ada konflik yang tajam sekali. Di sekolah misalnya, tidak terjadi konflik. Suasananya biasa-biasa saja. Misalnya, mereka yang masih sekolah dan orangtuanya PKI, atau ikut Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), tidak diapa-apakan oleh pihak guru. Hanya dipanggil dan diingatkan saja. Ada yang kemudian bisa terus sekolah sampai bisa kuliah. Waktu itu bahkan ada juga yang bisa masuk AKABRI.

Kemudian saya juga masih ingat peristiwa pengepungan Gedung *Chung Hua Tjung Hwee* [CHTH]. Gedung itu dikepung oleh massa, karena ada rumor yang berkembang dan mengatakan bahwa Pemuda Rakyat merencanakan pembakaran Masjid Agung atau Masjid Kauman, atau bagaimana persisnya saya kurang paham. Lalu datang ABRI dan terjadilah tembak-menembak, semacam perang-perangan. Saya ada di situ tapi bersembunyi di Kantor Pos Pusat Yogyakarta. Saya menyelinap di pagarnya bersama teman-teman saya, mengintip melalui kawat-kawat pagar di temboknya itu. Gedung KONI di sebelah barat Kantor Pos Pusat itu dahulu adalah Gedung CHTH. "CHTH" itu tulisan Cina yang artinya apa saya tidak tahu. Karena orang Cina banyak yang ikut Komunis, maka posisi mereka gawat. Teman saya yang menjadi ketua Pemuda Rakyat ditangkap lalu dibawa ke Pulau Nusa Kambangan. Saya lupa nama teman itu, tetapi saya tahu dia. Rumahnya di daerah Langenastran. Dia benar-benar tokoh Komunis. Seluruh keluarganya tokoh-tokoh komunis semua.

Selanjutnya waktu itu lalu terjadi ketegangan antar pelajar. Apalagi setelah Partai Nasional Indonesia [PNI] pecah. Saat itu sempat beredar isu bahwa PNI ikut terlibat, tokohnya ada yang ikut terlibat. PNI lalu terpecah menjadi “PNI Asu” dan “PNI Osa-Usep”.⁴⁰ Muncullah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Tempat yang dulunya menjadi markas Pemuda Rakyat dan Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia [IPPI], yang terletak di selatan Alun-alun Selatan, yang sekarang menjadi lokasi Warung sate Pak Ahmad, diduduki KAMI/KAPPI. Setelah terjadinya Tragedi ‘65 itu golongan Islam agak naik daun, karena golongan komunis dianggap atheis alias tidak beragama.

Tidak Boleh Menjadi Hakim

Pasca-Tragedi ‘65 itu situasi ekonomi memang terasa parah. Kalau soal situasi sosial-politiknya, karena waktu itu saya masih kecil, saya kurang begitu tahu. Setelah pemerintahan dipegang Soeharto ekonomi terasa lebih parah lagi. Kantor-kantor yang dulu mendapat jatah beras, sekarang mendapat beras tetapi beras *pengguk* [berbau apek] karena lama di gudang itu. Sebagian lagi hanya diberi bulgur berwarna coklat, yang rasanya *cethil-cethil*. Sebagian lagi berupa jagung yang digiling, tetapi hanya pecah-pecah dan tidak sampai menjadi tepung. Jauh setelah Soeharto memerintah, ketika wakil presidennya Sri Sultan Hamengku Buwono IX ada jatah “Beras Tekad”. Yang meresmikan program itu adalah Sri Sultan HB IX. Saya sendiri pernah merasakan pengalaman disuruh orangtua untuk mengambil jatah beras. Saya pergi dari Panembahan ke Kantor Pajak di Jalan Senopati. Kantor itu dekat dengan sekolah saya. Saya bersepeda memboncengkan beras

40 “PNI Asu” adalah sebutan untuk [PNI di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo dan Surachman, sedangkan “PNI Osa-Usep” adalah nama untuk PNI yang dipimpin oleh Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja.

jagung yang sudah digiling. Padahal kalau sekarang ini jagung hanya untuk pakan ayam. Dulu jagung itu untuk makanan manusia. Itu zaman Bung Karno menjelang turun, kira-kira tahun 1966-1967.

Kami makan beras campur bulgur [semacam gandum], lalu beras campur jagung. Saya ingat terus hal itu, karena sayalah yang ambil jatah beras-jagung itu. Pasokan bahan pangan lebih parah di awal-awal pemerintahan Pak Harto. Pada masa Sukarno, pegawai negeri makanan pokoknya tetap beras. Setelah ganti pemerintahan, beras diganti dengan bulgur dan beras-jagung. Benar-benar jagung giling itu yang baunya *penguk*. Itu yang saya rasakan. Tentang urusan sekolah semuanya tetap lancar-lancar saja, tidak ada gangguan.

Sekarang setelah dewasa, sesuai dengan ajaran yang saya pegang, saya meyakini bahwa tidak ada suatu keadaan yang terjadi tanpa sebab. Semua hal di atas terjadi hanya akibat saja dari kejiwaan seseorang yang melanggar aturannya Tuhan. Karena adanya pelanggaran itu akhirnya terjadi suatu penderitaan. Dalam pemahaman Jawa, di dunia ini sebenarnya orang hanya *ngundhuh pakerti* (memetik hasil dari tindakannya) dari kehidupan sebelumnya. Karena itu, sekarang kita diwajibkan *nandur kabecikan* (menanam kebaikan) supaya apa yang *diunduh* [dipetik] besok adalah *kabecikan* atau kebaikan. Entah pada periode berikutnya nanti orang *tumimba lahir* lagi [dilahirkan kembali] atau langsung kembali kepada Yang Maha Esa itu kita tidak tahu. Itu urusannya Tuhan. Yang kita tahu adalah bahwa kita diwajibkan menanam kebaikan. Mengenai Tragedi Kemanusiaan 1965, mungkin itu merupakan *unduh-uduhane* [buah atau hasil] dari apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin saja di kehidupan terdahulu di zaman Majapahit atau zaman Mataram terjadi sesuatu, lalu pada tahun 1965 itu kita meng-*unduh* [memetik] hasilnya *ta?* Jadi memanen apa yang dulu dia tanam.

Apakah hal itu berarti bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 itu bisa disebut “alami” atau “sah” terjadi? Menurut pandangan saya begini. Manusia itu sebetulnya boleh memilih untuk menjadi *lantaran* [perantara] kebaikan atau lantaran *piweleh* [keburukan]. Itu kenyataan yang tidak bisa diingkari. Karena itu sekarang ini kita wajib dengan penuh kesadaran menanam kebaikan, berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada negara, berbakti kepada pimpinan negara, berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada saudara tua, dan sebagainya. Juga, kita perlu berbakti kepada ajaran keutamaan, tidak mencela agama lain, dan sebagainya. Hal-hal di atas wajib dilakukan supaya terjadi ketenteraman dalam kehidupan, supaya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu tenteram dan damai. Jika hal-hal itu dilanggar pasti akan terjadi kekacauan. Penderitaan atau penebusan dosa itu ada dua, yakni fisik dan jiwa. Misalnya begini. Ada orang yang suka sekali berbakti, yang ibadahnya bagus, tetapi badannya sakit-sakitan, yang secara kejiwaan stabil dan bagus, tetapi secara fisik sakit. Itu berarti orang tersebut sedang *ngunduh* hasil dari perbuatannya yang dulu. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang fisiknya bagus, tetapi jiwanya sakit itu berarti karma yang ia terima adalah karma jiwa. *Nah*, dalam hal ini perlu dilihat, dulu itu dia berbuat apa *kok* sekarang dia *ngunduh* penderitaan jiwa seperti itu. Itu menurut pandangan ajaran Pengestu yang saya pegang teguh.

Menurut ajaran Kejawen, seharusnya orang tidak boleh ikut terlibat dalam pembunuhan, penangkapan atau pengucilan terhadap orang lain dengan alasan apa pun. Kenapa? Karena itu berarti menghakimi orang lain. Hal ini tidak boleh dilakukan. Kepada siapa pun kita harus bersifat kasih sayang. Harus didasari [keyakinan] bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, dan oleh karena itu manusia harus belajar saling mengampuni. Orang tidak boleh membenci siapa pun.

Yang berhak menghukum itu hanya Tuhan. Dalam kasus mereka yang berprofesi Hakim, mereka itu menghakimi, tetapi hal itu dilakukan karena pekerjaannya memang menjalankan hukum negara. Tetapi bagaimana pun ia harus memutuskan sesuatu atas nama Tuhan. Oleh karena itu harus berpegang pada dasar-dasar yang ada dan tidak boleh asal-asalan.

Pada prinsipnya kita tidak mungkin menjadi hakim terhadap sesama manusia, karena kita bukan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, maka kita harus belajar mengampuni. Karena Tuhan itu Maha Penolong maka kita harus belajar untuk menolong orang yang mengalami kesusahan atau sengsara. Kalau orang mau menebus dosanya maka ia harus belajar banyak untuk memaafkan, lalu suka menghibur orang yang susah. Orang tidak boleh menjadi hakim terhadap sesamanya.

Takut Dikira Ikut-ikutan

Konflik politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an itu dampaknya dirasakan sampai ke tingkat keluarga. Waktu itu terjadi perpecahan antara kakak dan adik dalam satu keluarga, atau antara Paklik [paman lebih muda] dan Pakdhe [paman yang lebih tua] gara-gara pilihan politiknya berbeda. Pada waktu itu suatu pilihan politik itu benar-benar dilakukan karena ideologi, sehingga orang cenderung menjadi ideologis. Sekarang ini orang berpartai bukan karena ideologi, tetapi hanya karena selera. Misalnya hari ini orang ikut partai A, lalu besok ganti ke partai B, dan sebagainya. Zaman dulu tidak begitu. Dulu itu sampai ada istilah *pejah gesang nderek Bung Karno* [hidup atau mati ikut Bung Karno]. Kalau sekarang apa ada yang berani seperti itu? Apa ada yang sampai mengatakan *pejah gesang nderek Soeharto*?..

Tidak ada. Kalau waktu itu slogannya jelas: *pejah gesang nderek Bung Karno*.

Pada masa pemerintahan Sukarno, orang memilih suatu partai politik karena partai itu ada ideologinya, ada cita-citanya, ada programnya yang jelas. Misalnya kalau PNI jelas dasarnya Pancasila, cita-citanya menuju Indonesia yang adil dan makmur, dan programnya mendukung program politik Sukarno. Jadi, jelas bahwa pemimpinnya itu Sukarno, partainya itu PNI Front Marhaenis, dan cita-citanya adalah menuju Indonesia Jaya berdasarkan Pancasila. Kalau sekarang partai-partai itu kabur. Waktu SMP saja saya sudah tahu politik. Saya sudah bisa merasakan politik dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang sangat berkobar. Semangat itu sangat tertanam. Ada *grensengnya* [gairahnya]. Kami kumpul-kumpul berorganisasi berpolitik. Walau masih kecil, masih pelajar di tingkat SMP, tetapi jiwanya sudah terbakar semangat patriotisme dan nasionalisme.

Salah seorang yang hebat dalam berpidato pada waktu itu bukan Megawati, melainkan adiknya, yakni Rahmawati Soekarnoputri. Rahmawati pada tahun 1960-an itu pernah menggembleng Pemuda Marhaen di Gedung Negara di Yogyakarta—sekarang Gedung Agung. Di situ ia menerangkan arti Pancasila itu sambil mengepalkan tangan kirinya, sambil berteriak “Marhaen menang”, “dengan dasar Pancasila wong cilik akan menang!” Dulu itu PNI nasionalismenya betul-betul murni. Sementara itu, partai-partai lain tidak. Mereka tidak mengedepankan nasionalisme. Waktu itu Pancasila, semangat cinta tanah air, dan rasa nasionalisme benar-benar berkobar. Bukan hanya di bibir saja, melainkan betul-betul dihayati, dari pikiran sampai ke hati dan tindakan. Pokoknya cita-citanya adalah Indonesia itu jaya berdasarkan Pancasila. Di dalam benak kami yang namanya pemimpin itu *ya* Sukarno. Tidak ada yang lain. *Pejah gesang nderek Bung Karno!*

Nah, dengan adanya situasi seperti itu seringkali hubungan antar-keluarga bisa menjadi renggang. Kalau dalam suatu keluarga besar ada anggotanya yang pernah ikut komunis, maka hubungan keluarga itu akan menjadi renggang, atau akan agak dikucilkan. Misalnya ada anggota keluarga jauh saya dari pihak Eyang, siapa namanya saya lupa, anak-anaknya banyak yang ikut komunis dan oleh karena itu, banyak yang *diciduki*. Lalu hubungan kami jadi renggang, tidak tahu karena apa. Bertahun-tahun setelahnya, tetap saja ada semacam trauma. Baru kemudian diketahui: *ooo...*, ternyata mereka itu ikut komunis. Belum tentu benar apakah dia itu ikut atau tidak, apakah dia itu salah atau tidak, karena memang tidak ada proses pengadilan, tetapi langsung saja mereka ini dituduh ikut komunis untuk kemudian dikucilkan dari masyarakat.

Waktu itu ada suatu kenyataan yang berkembang secara diam-diam, yaitu yang dilakukan oleh pihak Gereja. Gereja memberikan uluran tangan kasih kepada para korban Tragedi '65. Khususnya mereka yang dikucilkan. Mereka itu lalu menjadi umat Kristiani bersama keluarganya. Itu banyak contohnya. Misalnya beberapa orang di daerah [narasumber menyebut satu nama tempat tetapi tidak jelas, ed.]. Dulu di daerah itu ada keluarga yang orangtuanya tersangkut, lalu diayomi oleh Gereja. Akhirnya mereka diberi ideologi Kristiani dan sampai sekarang terus berkembang. Itu hanya sebagian saja *ya*, tidak semuanya. Jadi waktu itu memang Kristiani banyak berkembangnya dari segi itu. Perasaan sosial itu menolong.

Dalam bidang rohani keagamaan anak-anak dari keturunan PKI mengalami perkembangan yang menarik. Mereka intensif memeluk agama. Entah apa alasannya, tetapi kebanyakan memeluk Kristen atau Budha. Barangkali karena Islam sangat membenci mereka. Bagi Islam

mereka itu aib besar. Karena tidak diterima di golongan Islam, mereka lalu memeluk Kristen, Katolik, atau Budha.

Contohnya adalah ada kakak saya dari eyang jauh yang kemudian memilih menjadi Budha. Setelah situasi menjadi aman beberapa tahun kemudian kami saling berkunjung lagi. Saya kaget karena sekarang dia sudah berubah. Omongannya sudah lain. Yang diomongkan sudah berkaitan dengan agama-agama, khususnya ke-Tuhan-an yang sumbernya dari ajaran Budha. Dulu sebelum Peristiwa 1965, setiap kali lebaran, saudara-saudara datang berkunjung ke eyang-eyang. Akan tetapi setelah Tragedi '65, tidak pernah lagi untuk saling bertandang. Alasannya karena takut kalau dikira ikut-ikutan.

Tidak Boleh Mendapat Tempat

Menurut beberapa ahli, para pendukung PNI dan PKI itu mayoritasnya dari kalangan Kejawan atau Abangan. Memang ada golongan yang tidak memakai agama formal, tetapi memakai kepercayaan, karena dia sudah mempunyai keyakinan bahwa orang Jawa itu juga memiliki sumber kepercayaan sendiri yang benar. Menurut mereka, bangsa ini memiliki dasar-dasar spiritualitas sendiri. Di mata mereka meskipun agama-agama yang datang dari luar Indonesia itu juga benar, tetapi mereka merasa tidak perlu memeluknya, karena kita ini sudah memiliki kebenaran yang asli. Saya sendiri beragama Islam, karena saya dari kalangan keluarga Islam. Tetapi secara kepercayaan, saya adalah penganut Pangestu atau Paguyuban Ngesti Tunggal. Pangestu itu organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1949.

Karena merebaknya tuduhan bahwa mayoritas pendukung PKI dan PNI yang mengikuti aliran kepercayaan itu “atheis”, dampaknya adalah bahwa para Penghayat Kepercayaan seolah-olah tidak boleh mendapat tempat. Ada anggapan bahwa para Penghayat Kepercayaan

itu tidak beragama. Anggapan macam ini muncul karena orang memandang bahwa agama yang paling benar itu adalah agama yang diresmikan oleh negara. Di situ letak kesalahannya. Tetapi waktu zaman Pak Harto di dalam Tap MPR No IV tahun 1978, disebutkan istilah “Agama/Kepercayaan”.

Memberi Contoh

Kalau saya harus menjawab pertanyaan “Apa yang sebenarnya terjadi dengan Gerakan 30 September?” atau “Sebenarnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari itu ada persoalan apa?” saya akan mengatakan bahwa saat itu kehadiran ideologi komunis yang seolah-olah ingin mendominasi itu memang merupakan persoalan politik. Sampai sekarang yang namanya politik itu selalu mengandung keinginan untuk mendominasi. Dalam kampanye *kan* itu yang mereka lakukan. Jadi keinginan untuk mendominasi itu berlaku untuk kelompok politik apa pun. Persaingan politik itu biasa.

Menurut saya apa yang terjadi pada tahun 1965 itu ada hubungannya dengan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur waktu itu. Waktu itu Blok Barat, terutama Amerika Serikat, merasa ketakutan terhadap ideologi komunis yang sedang berkembang pesat di mana-mana. Apalagi dalam program politiknya, Bung Karno saat itu mencanangkan prinsip poros Jakarta-Peking-Pnompenh. Saya kira waktu itu Amerika Serikat dan seluruh Blok Barat merasa ketakutan di segala bidang. Mereka pun mendukung apa yang terjadi pada tahun 1965. Nyatanya setelah terjadinya Tragedi ‘65 mereka melakukan penjajahan ekonomi di sini. Produk-produk mereka menjadi bisa bebas dipasarkan di sini. Setelah tahun 1965 di sini terjadi dominasi politik Blok Barat, khususnya Amerika Serikat. Nyatanya begitu.

Seandainya Bung Karno tidak dilengserkan dan program-program pemerintahannya tentu akan masih bisa berjalan. Pertanyaannya, kira-kira kalau program-program itu berjalan, apakah negara dan masyarakat Indonesia ini bisa lebih maju? Menjawab pertanyaan ini, menurut saya begini. Ukurannya bukan maju atau tidak maju. Yang jelas, kalau saja program pemerintahan Sukarno bisa berjalan penuh, pasti setidaknya masyarakat Indonesia akan memiliki kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia itu mempunyai warna yang khas Indonesia, dan memiliki tingkah laku yang khas Indonesia. Cita-citanya Sukarno itu jelas. Dia tunjukkan bahwa kepribadian Indonesia itu seperti ini, kebudayaannya seperti ini, dan tingkah lakunya seperti ini. Nilai yang dipegang teguh Bung Karno, nasionalisme. Tetapi bukan nasionalisme yang chauvinistik. Kita mengakui nasionalisme orang lain juga, kita bergaul dengan bangsa-bangsa lain juga. Sayangnya Bung Karno itu lemah di bidang ekonomi. Ini karena dia itu basisnya bukan ilmu ekonomi. Selain itu, juga karena dia terlalu berambisi untuk menekankan “politik mercusuar”. Dia ingin mengangkat egonya supaya bisa menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa lain.

Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu terlalu dini. Program-programnya tidak didukung oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang kuat. Menurut saya saat itu belum waktunya. Akan tetapi, Bung Karno sudah [tidak sabar untuk tampil] ke depan. Tapi yang dilakukan itu memang luar biasa. Ditolak di Olimpiade, ia menyelenggarakan “Ganefo” atau *Games of the New Emerging Forces*; ia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Amerika Latin; ia membuat “Conefo” atau *Conference of the New Emerging Forces*; ia juga berani pidato di PBB; ia bahkan berani mengatakan kepada Amerika “*Go to hell with your aid!*”. Ia sadar, bantuan yang diberikan oleh negara-negara Blok Barat khususnya Amerika Serikat itu akan sering dijadikan sarana untuk menjajah bangsa ini.

Dalam bidang ekonomi, masa Orde Baru benar-benar maju, tetapi ideologi ekonominya lemah. Ideologi ekonominya lemah dan kepribadian bangsanya ambruk. Harusnya pembangunan itu pembangunan yang seutuhnya, bukan hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan mental bangsa. Ini belum tercapai. Dalam pengertian Sukarno itu namanya *nation and character building*. Itu yang penting, pembangunan fisik dan mental. Sayangnya, hal itu sekarang ini masih kacau.

Sekarang bangsa ini masih goyah dan silau dengan gemerlap materi, gemerlap dunia. Apalagi masalah duit. Ini terjadi karena karakter sebagai bangsa Indonesia belum terbentuk. Jadinya *ya bubrah* [bubar]. Idealnya para pemimpin yang di atas itu memberi contoh. Mereka harus berbuat seperti ksatria, berbudi luhur. Sekarang ini watak *satrio pinandito* itu masih jauh dari harapan. Lalu apakah nantinya cita-cita adil makmur itu akan tercapai? Menurut para sesepuh dibutuhkan waktu 75 tahun bagi suatu bangsa untuk menata dirinya setelah merdeka. Kalau begitu baru setelah seratus tahun kita akan bisa sama dengan Amerika Serikat dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bangsa Kita Sendiri

Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sebenarnya yang namanya kekerasan dan tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terjadi. Manusia tidak boleh berlaku sampai begitu. Situasi rukun, damai, tenang, penuh kasih sayang harus terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah sikap saling mengasihi satu negara terhadap negara lain. Sebagaimana kita ingat, salah satu cita-cita program luar negeri bangsa adalah turut memajukan perdamaian dunia. Ke dalam harusnya lebih dalam hal mengusahakan perdamaian.

Dalam ideologi Pancasila itu jelas bahwa yang ingin dicapai adalah kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah tercermin di situ. Kita *nggak* boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari situ, itu namanya menyalahi apa yang telah disepakati. Jadi, apa yang terjadi pada bangsa ini bukan merupakan hukuman dari Tuhan, melainkan hasil dari perbuatannya sendiri, dari perbuatan bangsa Indonesia sendiri. Kita perlu *ngunduh* pembelajaran supaya di masa yang akan datang tragedi seperti itu jangan terjadi lagi. Supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi, sebagai bangsa Indonesia kita harus mengikuti ideologi Pancasila. Itu pasti pas. Berke-Tuhan-anlah yang benar sesuai agama masing-masing, hiduplah rukun antar berbagai pemeluk agama, maka akan tenteram. Kalau kita saling mengejek dan saling bentrok pasti akan terjadi kekacauan.

Guna kepentingan pembelajaran dalam hal demokrasi dan etika politik di masa depan, saya berharap bahwa generasi sekarang memegang unsur-unsur kepribadian Indonesia, menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Masyarakat Jepang, misalnya, kepribadiannya jelas. Mereka memakai kimono dan sebagainya dengan rasa bangga. Kalau bangsa kita? Apa kita bangga pakai *blangkon*? Mungkin malah menertawakan. Kita malah lebih suka pakai jas. Padahal itu hanya mode berpakaian, yang bisa berubah-ubah. Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah memperkuat moral dan kejiwaannya. Kita harus merasa bangga disebut bangsa Indonesia.

Sebaliknya sekarang ini kita menjadi pembantu rumah tangga di negara-negara lain. Di zaman Bung Karno hal-hal seperti ini benar-benar diperangi. Dia katakan: kita itu bukan bangsa kuli, bukan “bangsa tempe”; ini dadaku mana dadamu!? Pada masa penjajahan dulu sikap mental semacam ini tertempa. Di zaman modern sekarang ini, di era penjajahan ekonomi ini, bangsa ini telah terseret oleh arus

Baskara T. Wardaya, SJ

modal kapitalis. Orang kita sendiri banyak yang jadi kapitalis. Sekarang Nekolimnya [Neo-Kolonialis dan Neo-Imperialisnya] adalah bangsa kita sendiri.[]

Mereka Mau Memanfaatkan Situasi

Tragedi '65 di Mata Seorang Etnis Tionghoa

Pengantar

ARIF Uun lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Maret 1934. Ayahnya bernama Kwee Goen Hok dan Ibunya bernama Oei Tau Nio, dua orangtua yang dengan kuat memengang tradisi Konghucu. Ia pernah menempuh pendidikan di Sekolah Siauuw Shiuk Chung Hoa di Kutoarjo. Pada tahun 1947 keluarganya pindah ke Yogyakarta dan ia pun belajar di Sekolah Rakyat Santo Yosef di kota itu.

Di masa mudanya Arif Uun (bukan nama asli tentu saja) aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Ia misalnya terlibat dalam kegiatan organisasi Persatuan Pemuda Kristen, organisasi Tjing Nien Hwee [TNH], sebuah organisasi pemuda Tionghoa yang merupakan bagian dari Chung Hua Tjung Hwee [CHTH]. Ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan Pemuda Pembaruan Indonesia [PPI], yang merupakan anak organisasi Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia).

Sejauh yang ia ketahui, sebelum terjadinya Tragedi '65 keadaan di Kutoarjo aman-aman saja, bahkan bisa dikatakan sangat harmonis. "Tidak ada konfrontasi terbuka antara golongan Tionghoa dan pribumi," katanya. Meskipun demikian, ia akui bahwa di bawah permukaan bisa saja ada semacam ketegangan akibat adanya kesenjangan ekonomi, sosial,

dan politik. Kesenjangan ini terutama berbentuk kesenjangan kaya-miskin antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang pribumi.

Ketika penangkapan-penangkapan terjadi pada tahun 1965, Arif Uun selamat. Waktu itu ia sedang berada di Yogyakarta karena sakit. Namun demikian, sejumlah anggota keluarganya menjadi sasaran tentara yang datang untuk menggeledah rumah mereka. Ia bercerita, “Sebagian tentara masuk ke dalam rumah, dan sebagian lagi menuju ke belakang rumah untuk mengantisipasi kemungkinan ada yang melarikan diri. Para tentara tersebut masuk tanpa permissi, tanpa surat tugas, dan tanpa sepele kata terucap. Semua kamar digeledah, termasuk isi lemari.”

Arif melihat bahwa apa yang terjadi tahun 1965 itu tidak terjadi begitu saja, melainkan sengaja dibuat. Dia katakan, “Tragedi ’65 itu merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi ajang bagi golongan Pribumi yang memiliki rasa dendam terhadap orang-orang Tionghoa.” Sebagaimana bisa kita lihat di bawah, menurutnya sebagian orang pribumi yang sebelum tahun 1965 sudah memiliki rasa dendam menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan dendamnya dengan mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa yang tidak disukainya adalah anggota Partai Komunis Indonesia. “Padahal pada waktu sebelum meletusnya tragedi tersebut tidak ada konflik fisik yang terjadi,” tambahnya.

*Wawancara dengan Arif Uun dilakukan oleh anggota Komisi Sejarah PUSdEP **Chandra Halim**, alumnus lulusan jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang sedang menempuh studi sejarah di program Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

NAMA saya Arif Uun, saya tinggal di Yogyakarta. Saya lahir dari keluarga miskin. Ayah saya bernama Kwee Goen Hok dan Ibu saya

bernama Oei Tau Nio. Saya lahir pada tanggal 24 Maret 1934 di desa Kemiri Kerep, Kutoarjo, Jawa Tengah. Pendidikan yang pernah saya lalui adalah Sekolah Siauw Shiuk Chung Hoa yang dulu beralamat di Jl. Pasar Kutoarjo. Kemudian ketika pada tahun 1947 terjadi Agresi Militer Belanda Pertama, Kutoarjo menjadi ajang pertempuran antara Belanda dan Pasukan Pejuang kemerdekaan Indonesia. Keluarga saya terpaksa pindah ke Yogyakarta. Di tempat yang baru inilah saya bersekolah di Sekolah Rakyat “Santo Yosef”. Setamat dari Sekolah Rakyat Santo Yosef Yogyakarta, saya kembali ke Kutoarjo. Pada permulaan tahun 1951 saya berangkat ke Bandung. Selain untuk mengantar kakak saya yang bernama Ping Liang, saya juga mengambil kursus fotografi selama satu tahun. Selesai dari kursus, saya bekerja di Studio Foto “Lovely” di Bandung. Kurang dari satu tahun kemudian, saya harus kembali ke Kutoarjo untuk membantu bekerja sebagai fotografer di studio foto milik Ping An, kakak saya. Tetapi kemudian studio tersebut bangkrut, disebabkan saya sering tinggal pergi untuk mengikuti kegiatan organisasi yang saya ikuti.

Memperkokoh Kesatuan

Sepengetahuan saya, kehidupan masyarakat di Kutoarjo dan Yogyakarta sebelum terjadinya Tragedi ‘65 sangatlah harmonis. Tidak ada konfrontasi terbuka antara golongan Tionghoa dan pribumi. Namun demikian, perlu ada sedikit catatan kecil. Waktu itu sudah bisa diduga bahwa harmoni itu tidak akan berlangsung lama. Apabila timbul suatu masalah tentu akan timbul ketegangan. Waktu itu ada sejumlah kesenjangan di masyarakat. Tapi apakah kesenjangan ekonomi, sosial, atau politik yang bisa menjadi sumber ketegangan itu tidak ada yang dapat menebaknya. Kalau menurut saya yang paling potensial untuk itu adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, yakni

kesenjangan antara kaya dan miskin. Waktu itu kesenjangan sosial-ekonomi antara golongan Tionghoa dan pribumi sangat terasa. Di permukaan, yang kelihatan memang adalah harmoni, tetapi di bawah permukaan ada semacam ketegangan akibat adanya berbagai macam perbedaan kepentingan.

Di Kutoarjo sendiri terdapat golongan Tionghoa yang berbeda pendapat mengenai masalah proses “asimilasi”, yang nantinya akan berpengaruh terhadap Peristiwa 1965. Beberapa orang Tionghoa dari Baperki, lebih memilih mendukung program Bung Karno, yakni proses “integrasi” bangsa. Tujuannya adalah untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan Indonesia. Kalau yang beragama Kristen atau Tionghoa Kristen biasanya lebih mendukung proses asimilasi.

Rasa Saling Membantu

Waktu meletus peristiwa berdarah tahun 1965 saya sedang berada di Yogya. Sebulan sebelumnya, saya menderita sakit dan harus berobat ke Yogyakarta. Waktu itu saya berobat ke Rumah Sakit Bethesda.

Saya itu orangnya tidak bisa diam. Dari muda hingga tua sekarang saya selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. Berhubung sekarang usia saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti banyak organisasi, saya hanya aktif di kegiatan Gereja dan olahraga, khususnya golf. Berbeda ketika saya masih muda dulu. Saya selalu aktif dalam organisasi. Misalnya, di Kutoarjo saya ikut Organisasi Pemuda Kristen. Memang agak aneh *ya, kok* saya bisa kena kasus 1965. Padahal saya ini beragama Katolik. Ini ada kaitannya dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan-kegiatan Organisasi Pemuda Kristen.

Saya berasal dari keluarga yang masih memegang teguh ajaran Khonghucu. Papa saya selalu memperlakukan anak-anaknya sesuai

aturan adat. Jika tidak menurut, kami *digebuki* [dipukul] Papa dengan rotan yang biasanya digunakan untuk *nggebuki* [memukuli] kasur itu sebagai hukuman.

Saat itu saya duduk di bangku kelas 5 di *Siauw Shiuk Chung Hoa Hwee Koan* [Sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa, Ed.]. Lahir dari keluarga Khonghucu membuat saya saat itu memandang tetangga yang beragama lain sebagai orang-orang yang berbeda. Dari sekian banyak tetangga yang kepercayaannya berbeda dari kepercayaan keluarga saya, terdapat sebuah keluarga seorang pendeta Kristen yang waktu itu bertugas di Gereja *Kie Tok Kauw Hwee*. Nama pendeta tersebut adalah Tjoa Tjien Tauw. Saya sering *banget* berkunjung ke rumah pendeta tersebut dan bermain dengan anak-anaknya. Rumah Pendeta Tjoa ini bersebelahan dengan rumah orangtua saya kala itu. Keluarga ini adalah orang-orang yang taat dalam menjalankan peraturan agama. Ketika makan bersama, mereka selalu mendahuluinya dengan doa bersama.

Dari sekian banyak hal yang saya amati, yang sangat menarik perhatian saya dari keluarga pendeta itu adalah cara bagaimana mereka minum obat. Ketika menyuruh anak-anaknya untuk minum obat, pendeta itu sama sekali tidak melakukan pemaksaan. Hal ini berbeda dengan keluarga saya.

Sebagai sebuah keluarga yang hidup di daerah yang rawan wabah malaria, semua anak di keluargaku diwajibkan untuk secara berkala minum jamu daun pepaya. Tentu itu merupakan hal yang baik. Tapi cara Papa menyuruh anak-anaknya untuk minum jamu menurut saya terlalu keras. Ia keras dalam hal mendisiplinkan anak-anaknya untuk minum jamu. Ia suka secara langsung menunggui anak-anaknya supaya meminum jamu daun pepaya pahit tersebut. Kalau ada yang

tidak mau minum, maka gagang rotan yang tadi saya bilang itu selalu siap dipukulkan olehnya ke pantat anaknya yang tidak menurut.

Pemandangan ini berbeda jauh dengan di keluarga pendeta Tjoa. Dalam keluarga itu saya menemukan hubungan yang hangat antara orangtua dan anak-anaknya. Maka di rumah itu saya selalu merasa *krasan* [betah] bermain. Dari situ pulalah saya mulai berkenalan dengan ajaran Kristiani. Lalu ajaran itu semakin meresap lebih dalam di diri saya, ketika saya bersekolah di Sekolah Rakyat “Santo Yosef” di Yogyakarta.

Selain mengikuti kegiatan di organisasi Persatuan Pemuda Kristen, saya juga ikut organisasi *Tjing Nien Hwee* [TNH], yakni organisasi pemuda Tionghoa yang merupakan bagian dari *Chung Hua Tjung Hwee* [CHTH]. Lalu saya aktif juga dalam kegiatan-kegiatan di Pemuda Pembaruan Indonesia [PPI], anak organisasi Baperki. Di PPI ini saya mewakili golongan pemuda Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) wilayah Kutoarjo untuk mengikuti penataran di Magelang, yakni penataran mengenai kewarganegaraan. Sebagai anggota dari PPI, saya juga kerap membantu kegiatan-kegiatan di organisasi lain, seperti kegiatan yang diadakan para pemuda dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia [PMKRI].

Lha, waktu kumpul-kumpul seperti itu *ya* tidak ada rasa bermusuhan, tak ada rasa perbedaan dan sebagainya. Adanya *ya* cuma rasa saling membantu. Tapi ada juga beberapa orang pemuda yang tidak suka satu sama lain, tapi malah dipendam saja. Ini yang nantinya berujung pada sikap saling menuding bahwa dia PKI atau bukan. Waktu aktif di PPI saya kenal dengan beberapa pengurus Baperki Kutoarjo, walaupun saya bukan pengurus PPI. Kalau tidak salah ingat, namanya Gwan Hien [Ketua Baperki Kutoarjo] dan Untung. Tapi ini bukan Letkol Untung yang terlibat G30S itu *lho*. Orangnya baik *kok*.

Cuma, kalau Gwan Hien itu cenderung ke kiri dalam pandangan ideologinya. Makanya, dia itu akhirnya lama dijebloskan ke dalam penjara, dan tidak kembali lagi.

Penangkapan Brutal

Waktu meletus Peristiwa Gerakan Satu Oktober [Gestok] itu sebetulnya saya yang hampir kena. Tapi karena saya sedang sakit di RS Bethesda Yogya akhirnya saya selamat dari maut. Tapi akibatnya, keluarga saya justru yang jadi sasaran. Saya dapat kabar dari *Encik* [adik laki-laki dari Ayah], bahwa [waktu itu tanggal 3 November 1965], ketika Ping Gwan sedang membaca koran di rumah, satu truk Tentara Resimen Para Komando Angkatan Darat [RPKAD] Baret Merah datang ke rumah saya. Sebagian tentara masuk ke dalam rumah, dan sebagian lagi menuju ke belakang rumah untuk mengantisipasi kemungkinan ada yang melarikan diri. Para tentara tersebut masuk tanpa permisi, tanpa surat tugas, dan tanpa sepatah kata terucap. Semua kamar digeledah, termasuk isi lemari. Setelah tidak ada barang yang dicurigai, tentara-tentara tersebut mengangkut Ayah, adik, dan adik ipar saya, untuk dibawa ke asrama Angkatan Darat [AD] di Purworejo. Di sana sudah ada sekitar 100 orang lain yang ditahan.

Setiap harinya mereka mendapat jatah makanan yang tidak layak, seperti sedikit nasi dan sayur yang ditaruh di atas piring seng tipis yang sudah berkarat. Di dalam rumah tahanan tersebut Djing Tiok—adik ipar saya—mendapat “bogem mentah” [pukulan] dari beberapa tentara karena dianggap menghina. Djing Tiok terlahir dengan penyakit gangguan syaraf. Akibatnya mata kanannya tidak bisa terbuka dengan sempurna dan selalu berkedip. Keadaan ini oleh para tentara itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap mereka. Selama dua hari, ketiga anggota keluarga saya itu tidak diperiksa. Baru pada

hari ketiga mereka dipindahkan ke Kutoarjo. Mereka ditempatkan di belakang kantor Bank Rakyat Indonesia [BRI] Kutoarjo. Di tempat baru inilah ada sedikit keleluasaan bagi para tahanan. Di situ keadaannya tidak seketat di Purworejo. Mereka masih boleh ditengok dan dikirim makanan oleh keluarga.

Selama kurang lebih sekitar 20 hari Papa, adik dan adik ipar saya ditahan, tanpa ada pemeriksaan terhadap mereka. Setelah 23 hari, mereka diangkut kembali ke Purworejo untuk diinterogasi satu-persatu. Ping Gwan ditanya kuliah di mana, mengapa pulang, dan lain sebagainya. Dia menjawab semua dengan jujur dan apa adanya. Akhirnya Ping Gwan diizinkan pulang ke rumah. Sementara Papa dan Djing Tiok juga dibebaskan selang beberapa hari setelah pembebasan Ping Gwan. Namun mereka masih punya kewajiban melapor setiap seminggu sekali. Saya sendiri yang kala itu menjalani rawat inap di RS Bethesda juga mengalami proses penangkapan paksa, tetapi keberuntungan masih berpihak pada saya.

Kala itu ada dua staf dari Komando Distrik Militer [Kodim] datang ke RS Bethesda dengan maksud mengambil saya karena ada isu yang beredar bahwa saya ini orang PKI. Awalnya mereka menemui bagian perawat depan [resepsionis] menanyakan apakah ada nama saya tercatat sebagai pasien. Lalu suster jaga meminta mereka menemui dokter Hoorweg yang merawat saya, dan mengatakan padanya bahwa saya harus ditangkap. Tetapi dokter Hoorweg menolak mentah-mentah dengan alasan bahwa saya adalah pasiennya dan berada di bawah tanggung jawab serta pengawasannya. Akhirnya dua orang dari Kodim tersebut batal menangkap saya. Yang aneh, saat itu di dalam buku daftar pasien, saya itu tercatat sebagai pasien penderita kanker otak. *Lha*, tentu saja ini adalah kesalahan suster yang menulisnya. Tetapi justru karena kesalahan inilah maka saya ikut terselamatkan

dari penangkapan paksa pihak militer, karena dianggap pasien yang menderita sakit berat dan umurnya tidak panjang.

Lalu cerita lain mengenai nasib orang-orang Tionghoa dalam Tragedi '65 adalah penangkapan brutal seorang pegawai rendahan di Pabrik Sien Hien bernama Soe Ging. Ketika peristiwa itu terjadi, Soe Ging bekerja di satu kantor dengan *Engkoh* [kakak laki-laki] saya bernama Tik Kiong, di Pabrik Sien Hien. Soe bekerja sebagai pembantu umum yang sehari-harinya bertugas membuatkan minum untuk seluruh karyawan-karyawan di pabrik dan di kantor. Waktu kejadian 1965 itu, Soe ditangkap dan dibawa ke Purworejo dengan paksa. Bahkan beberapa bulan kemudian dia dipindahkan ke Pulau Buru. Padahal dia bukan anggota PKI. Usut punya usut, ternyata ketika di kampungnya ada hajatan ulang tahun Pemuda Rakyat yang notabene merupakan organisasi pemuda di bawah payung PKI, Soe diminta untuk ikut membantu menarik kabel dan memasang lampu-lampu untuk acara itu. Oleh sebab peristiwa inilah, Soe dicap sebagai bagian dari PKI.⁴¹

Sikap Sosial

Saya pikir Tragedi '65 itu merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi ajang bagi golongan Pribumi yang memiliki rasa dendam terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka mau memanfaatkan situasi tersebut untuk menjatuhkan Tionghoa yang dibencinya, dengan cara melaporkan bahwa orang Tionghoa [yang dibencinya] itu

41 Hampir 2 bulan Arif menginap di RS Bethesda Yogyakarta karena sakitnya yang aneh. Setelah keluar dari Bethesda, dia menetap di Yogyakarta dan tidak kembali ke Kutoarjo. Meskipun dia tidak lagi masuk daftar Target Operasi (TO) dari pihak militer. Di Yogyakarta pada awal mulanya dia menumpang di rumah Pamannya bernama Sam Hok, yang tinggal di daerah Pajeksan. Namun demikian, lambat laun dia bisa memiliki rumah sendiri dan merintis usahanya di Yogyakarta.

adalah PKI. Padahal pada waktu sebelum meletusnya tragedi tersebut tidak ada konflik fisik yang terjadi. Itu semua muncul disebabkan oleh adanya dendam akibat dari ulah sebagian orang Tionghoa yang dirasa cukup mengecewakan orang-orang Pribumi. Salah satunya adalah sikap sosial yang ditunjukkan oleh Tionghoa dalam pergaulannya dengan masyarakat sekitar. Pada akhirnya semua itu melahirkan apa yang bisa disebut “*ilmu nuding*” [tindakan menunjuk dengan amarah], yang di dalamnya berisi kata-kata: *Titenana Kowe* [artinya: tunggu saja, suatu saat nanti tindakanmu itu akan kami balas].[]

Ada Skenario Besar

Tragedi '65 di Mata Seorang Katolik

Pengantar

*NARASI selanjutnya disampaikan oleh **Dra. B. Ninik S. Rahayu, M.A.**, seorang mantan dosen yang sejak masa mudanya sudah aktif dalam bidang organisasi kepemudaan. Keluarganya adalah sebuah keluarga Katolik dan Jawa tradisional yang sekaligus sangat taat beragama, dalam hal ini agama Katolik. Setelah menyelesaikan belajarnya di SD Kanisius, ia melanjutkan ke SMP dan SMA Stella Duce dan kemudian ke Universitas Gadjah Mada, semuanya di Yogyakarta.*

Dikisahkan oleh Ninik S. Rahayu (seperti yang lain, bukan nama aslinya), antara tahun 1960 dan 1965 situasi ekonomi di Indonesia pada umumnya, khususnya di Yogyakarta tempat ia tinggal, sangat sulit. "Makanan dan pakaian sangat susah diperoleh," katanya. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti itu menurutnya masyarakat menjadi mudah terprovokasi. Ia contohkan misalnya provokasi tentang adanya para "Kabir" (Kapitalis Birokrat) yang memperkaya diri dan menjadi penyebab kesengsaraan rakyat. Dengan mudah rakyat di daerah menerima provokasi macam itu, karena situasi memang sedang sulit.

Di tengah krisis sosial, ekonomi dan politik waktu itu, menurut Ninik, Gereja Katolik berada dalam posisi yang tidak mudah. Tokoh politik Katolik I.J. Kasimo menentang gagasan Presiden Sukarno tentang

Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Di mata Kasimo, ketiga unsur itu tidak dipaksakan secara politis untuk bersatu, mengingat ketiganya berbeda secara mendasar dalam hal visi masing-masing. Sementara itu di panggung politik para pemimpin Komunis terkesan menysihkan dan bersifat memaksakan kehendak terhadap kaum Agama. Pada saat yang sama, menanggapi situasi demikian, kaum Nasionalis terpecah. Untunglah, menurut Ninik, di tengah suasana sulit seperti itu Gereja Katolik tetap menjalankan misinya, yakni secara konsisten terus berusaha menanggapi krisis sosial dan ekonomi yang sedang terjadi. Misalnya, menyediakan makanan dan pakaian semampunya guna membantu masyarakat.

Di mata Ninik, salah satu pelajaran sangat berharga yang bisa ditarik dari apa yang terjadi pada tahun 1965 adalah kesadaran akan pentingnya peran media massa dalam membentuk opini publik. Orang bisa dengan gampang memandang apa yang disiarkan lewat radio, surat kabar atau televisi sebagai “kebenaran”. Berdasarkan apa yang didapat dari media massa itu masyarakat bisa dengan cepat beropini, dan dengan opini itu lantas melakukan tindakan-tindakan tertentu. Padahal, menurut Ninik, waktu itu banyak berita sengaja dibuat dengan maksud untuk menyesatkan opini rakyat tanpa rakyat menyadarinya. Ia lantas mengingatkan, “Cara-cara seperti ini berlanjut pada era Orde Baru. Akibatnya masyarakat menjadi tidak berani bersikap kritis.”

*Semula wawancara dengan Dra. B. Ninik S. Rahayu, M.A. dilakukan oleh **Tim PUSdEP** secara lisan. Namun demikian, supaya lebih jelas dan luas cakupannya, wawancara dilanjutkan dalam bentuk tertulis. Hasilnya adalah narasi menarik dan personal sebagaimana tertera di bawah ini.*

SAYA adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Keluarga saya adalah sebuah keluarga Katolik dan Jawa tradisional. Orangtua saya sangat taat kepada agama, maka kami bersaudara dipermandikan sejak berumur satu minggu. Saya dibesarkan di Kompleks Rumah Sakit Mata “Dr. Yap” Yogyakarta, karena Bapak saya adalah seorang mantri kesehatan spesialis mata, asisten Dokter Yap. Selain mendapat pendidikan di rumah dari orang tua saya—Ibu berasal dari keluarga priyayi Kraton sedang Bapak berasal dari keluarga petani—saya menghabiskan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Kanisius, Kota Baru. Pendidikan SMP dan SMA saya jalani di SMP dan SMA Stella Duce. Tahun 1962, saya lulus dari SMA Stella Duce, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi/HESP (Hukum, Ekonomi, Sosial Politik) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Saya mengambil Jurusan Ekonomi dan Sosiologi. Saya sangat berminat untuk belajar ilmu multi-disipliner. Saya lulus tahun 1968.

Selain mendapat gelar Sarjana di bidang Ekonomi dan Sosiologi saya juga mendapatkan diploma dari Akademi Kewanitaan (AKWA) Tarakanita. Saya pun mendapat beberapa diploma dari kursus-kursus singkat seperti kursus tentang Gender, Feminisme, dan Metode Pekerjaan Sosial. Di Maryknoll School of Theology, New York, Amerika Serikat, saya belajar Teologi hingga mendapatkan diploma Pastoral Konseling dan Master of Arts di bidang Justice and Peace pada tahun 1984.

Setelah lulus dari UGM itu, saya mengajar sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Jurusan Ekonomi IKIP Sanata Dharma;⁴² Fakultas Sosial Politik Universitas Widyamataram; dan di Akademi Kesejahteraan Sosial (AKS) Tarakanita, semuanya di Yogyakarta. Mengikuti

42 Sekarang Universitas Sanata Dharma.

panggilan saya untuk memperjuangkan keadilan dan pembebasan bagi perempuan, saya memilih AKS Tarakanita sebagai tempat mengajar tetap. Saya mengajar sebagai dosen tetap AKS Tarakanita sejak tahun 1968-1999. Selain mengajar, di AKS Tarakanita saya bertugas sebagai Direktur selama 15 tahun (1974-1989). Setelah pensiun dari AKS Tarakanita tahun 1999, saya mengajar Teologi Femenis pada program Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta sampai tahun 2009. Di samping pekerjaan mengajar, sebagai aktivis perempuan beragama Katolik saya diangkat oleh Presiden Habibie menjadi anggota komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ketika terjadi kerusuhan Mei 1998, bersama dengan 16 anggota komisioner lainnya. Saya bertugas di Komnas Perempuan sampai tahun 2008 (dua periode masa bakti).

Berlanjut Sampai Sekarang

Sejak belajar di Sekolah Rakyat, saya suka berkomunitas dan melakukan aktivitas bersama kawan-kawan saya. Saya mengenal organisasi ketika saya masuk SMP dan saya aktif sebagai pengurus Organisasi Siswa (semacam OSIS). Kesukaan saya berorganisasi berlanjut pula ketika saya belajar di SMA, dan makin menjadi ketika saya kuliah. Tahun 1963, saya diajak aktif dalam organisasi Pemuda Katolik, hingga saya dipilih menjadi Ketua I Pemuda Katolik Komda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang mengurus internal organisasi. Pekerjaan mendampingi anggota Pemuda Katolik membentuk saya menjadi aktivis militan. Selain mengajak anggota aktif berorganisasi saya juga mendapatkan pendidikan kader di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Kaderisasi dalam Pemuda Katolik sungguh membuat kaum muda menjadi aktivis yang militan. Semboyan “*Pro Ecclesia et Patria*” [Untuk Gereja dan Tanah Air, ed.] dan ajakan Mgr. Alb. Sugiyoprana, SJ “100 % Katolik dan 100 % Indonesia”, membuat kami aktivis Pemuda Katolik bersemangat berorganisasi dan berpolitik. Situasi sosial politik mendukung semangat kaum muda Indonesia karena Presiden Sukarno secara periodik memberikan kursus berpolitik dan berpidato kepada kaum muda. Dalam pandangan Presiden Sukarno, pemuda adalah salah satu pilar di samping perempuan, buruh, petani, dan nelayan. Menurut Bung Karno, pemuda, perempuan, buruh, petani, dan nelayan adalah pilar-pilar pendukung kokohnya negara Indonesia. Oleh karena itu, perhatian Bung Karno sangat besar terhadap kelompok-kelompok ini. Saya sendiri pernah mengikuti kursus berpidato dari Bung Karno, dan bersama Ibu saya—sebagai anggota Wanita Katolik Republik Indonesia [WKRI]—saya mengikuti kursus politik bagi perempuan dari Bung Karno.

Kegemaran saya berorganisasi berlanjut sampai sekarang. Di samping melakukan pekerjaan sebagai dosen di kampus saya juga aktif dalam organisasi masa perempuan Perkumpulan Solidaritas Perempuan [SP]. Saya menjadi Ketua Badan Eksekutif Nasional SP tahun 1998-2002. Saya selalu bergabung dengan gerakan rakyat seperti Gerakan Keadilan Konsumen. Di bidang gerakan teologi, saya bergabung dalam EATWOT (Ecumenical Association of the Third World Theologian) bertugas sebagai Koordinator Regional Asia.

Peduli Kepada Rakyat

Ketika terjadi tragedi G30S, saya berumur 22 tahun (saya lahir 21 Agustus 1943) dan masih kuliah Fakultas Ekonomi UGM. Keadaan Kampus UGM sangat kacau. Pendidikan sempat terhenti. Beberapa

mahasiswa anggota Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan dosen anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), ditangkap karena dituduh terlibat dengan G30S.

Antara tahun 1960-1965 situasi kehidupan rakyat, khususnya di Yogyakarta di mana saya tinggal, sangat susah. Makanan dan pakaian sangat susah diperoleh. Kami sekeluarga tidak mampu lagi makan nasi, tetapi harus makan jagung dan singkong, karena harga jagung dan singkong lebih murah dari harga beras. Masyarakat sering mendapatkan pembagian nasi bulgur, bantuan dari Gereja. Situasi sosial ekonomi sungguh buruk. Rakyat kecil benar-benar mengalami krisis sosial ekonomi. Saya bersama kawan-kawan dari organisasi perempuan Gerwani, bersama masyarakat kampung kami membentuk Koperasi Konsumsi (*collective buying*) dan Koperasi Simpan Pinjam. Kami membagikan minyak tanah, beras, dan gula pasir agar semua warga mendapatkan bagian bahan kebutuhan pokok tersebut. Akibat situasi krisis ini mendorong masyarakat sangat mudah kena provokasi terutama provokasi tentang kelompok Kapitalis Birokrat (KABIR). Di telinga rakyat pedesaan dan perkampungan, selalu dikampanyekan kejelekan kelompok KABIR ini. Mereka diinformasikan sebagai pembuat rakyat sengsara demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Dalam situasi krisis sosial, ekonomi, dan politik pada tahun 1960-an posisi Gereja Katolik terancam. Namun para pemimpin Gereja dan tokoh politik Katolik tanggap atas situasi ini. Seperti misalnya Bapak I.J. Kasimo sangat tidak setuju dengan konsep Bung Karno Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Beliau berpendapat tiga unsur tersebut tidak mungkin dipaksakan untuk bersatu secara politik, karena ada perbedaan visi secara prinsip. Para pemimpin Komunis, khususnya di bidang legislatif dan eksekutif nampak dan terasa memaksakan kehendak dan menyisihkan tokoh-tokoh Agama.

Tokoh-tokoh Nasionalis pecah karena berbeda pandangan. Tetapi Gereja tetap menjalankan misinya menanggapi situasi krisis sosial dan ekonomi secara konsisten. Melalui lembaga Gereja dan umat, Gereja tetap berbagi sandang dan pangan dari bantuan luar negeri (bulgur dan pakaian bekas). Organisasi Katolik seperti organisasi guru Katolik, Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) semua menanggapi situasi krisis dengan hati-hati. Partai Katolik, Pemuda Katolik, dan PMKRI tampak dan terasa sangat tanggap pada situasi politik.

Beberapa pemimpin Katolik baik di bidang politik, sosial, dan pendidikan secara aktif memberikan informasi secara rutin dan mendampingi kaum muda Katolik. Saya sebagai aktivis Pemuda Katolik merasakan situasi sosial politik rawan, tetapi sikap Gereja sangat jelas, hati-hati dan terus membantu ekonomi umat. Romo A.Sumandar, SJ dan Romo A.Jayasiswaya, Pr sebagai moderator Pemuda Katolik selalu mengingatkan agar kami berhati-hati, tidak mudah terpancing gerakan rakyat yang sedang memanas. Di pedesaan, gerakan Barisan Tani Indonesia (BTI), di perkotaan gerakan Pemuda Rakyat bertambah aktivitasnya. Mereka menunjukkan bahwa merekalah pembela rakyat. Gerakan "*show of force*" ini memancing kelompok organisasi massa kaum muda lainnya, termasuk Pemuda Katolik, Pemuda Marhaen, Pemuda Ansor, dan sebagainya. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) melakukan kegiatan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Melalui kegiatan pembelian bahan kebutuhan pokok secara bersama-sama, pendidikan untuk anak-anak, dan latihan kesenian yang sangat giat mereka menunjukkan bahwa mereka peduli kepada rakyat.

Membaca Situasi

Menjelang akhir tahun 1965 situasi sosial politik makin memanas. Konflik terjadi di mana-mana, di antara golongan apa pun, baik konflik internal golongan maupun konflik antar golongan. Konflik juga melanda umat Katolik di Yogya, khususnya terhadap para pemimpin Katolik yang tidak menunjukkan ke-Katolik-annya. Organisasi Pemuda Katolik DIY, misalnya, tidak percaya kepada wakil Katolik⁴³ yang menjabat sebagai Badan Pimpinan Harian (BPH) Propinsi DIY. Oleh karena itu, Pemuda Katolik memasang iklan di harian *Kedaulatan Rakyat*, menyatakan bahwa tidak mengakui pejabat tersebut sebagai wakil dari umat Katolik. Peristiwa ini menjadi masalah besar bagi Pemuda Katolik, khususnya Komda DIY. Untuk menyelesaikan masalah tersebut saya diutus ke Jakarta menemui Pimpinan Pusat Partai Katolik (Bapak Kasimo dan Bapak Frans Seda) untuk menjelaskan duduk persoalannya.

Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 7.00 pagi, saya berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api pagi dari Stasiun Tugu. Tetapi sebelum berangkat, Ibu saya yang mendengarkan Berita RRI berpesan agar saya hati-hati karena di Jakarta ada kudeta Dewan Jenderal. Tanpa perasaan takut, saya berangkat ke Jakarta ditemani Sulanjana, rekan Pemuda Katolik yang juga anggota Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Dalam kereta, saya duduk berdampingan dengan seorang laki-laki membawa radio transistor dan selalu mendengarkan berita radio. Setelah sampai di Cirebon, laki-laki tadi menghilang, radio dan tas pakaiannya ditinggal. Ketika itu hati saya mulai merasakan sesuatu tidak beres yang berkaitan dengan berita kudeta Dewan Jenderal di Jakarta. Kekhawatiran saya bertambah besar ketika tiba di stasiun Gambir, karena tempat itu sudah penuh dengan tentara.

43 Dari Partai Katolik.

Tujuan saya menginap di rumah paman saya di kompleks Halim saya batalkan karena daerah menuju ke sana diblokir tentara. Maka saya dan Sulanjana menuju ke Pusroh [Pusat Rohani] Katolik, di Jalan Gunung Sahari. Di sana kami disambut oleh Romo Wijoyo, SJ, Koordinator Pusroh Katolik. Kami dimarahi karena dalam situasi yang sangat genting kami pergi ke Jakarta. Kami hanya boleh menginap satu malam dan disarankan untuk segera pulang ke Yogya. Tetapi karena tujuan kami menemui Pimpinan Pusat Partai Katolik belum terlaksana, maka kami pindah menginap di rumah saudara di daerah Kemayoran. Namun sial, saya dimarahi kakak saya karena ketahuan Sulanjana membawa pistol, padahal hari itu sedang diadakan pembersihan di Kompleks Perumahan kakak. Sadar bahwa kami sedang menghadapi situasi genting, Sulanjana memisahkan diri. Sejak itu saya tidak tahu bagaimana nasibnya.

Di rumah saudara saya ini, saya menyaksikan berita tentang pembunuhan para Jenderal. Kami semua menyadari bahwa ini semua perbuatan PKI, tetapi tidak berani bicara terbuka. Bersama kakak saya, saya menyaksikan pemakaman para Jenderal bersama banyak orang yang memadati sepanjang jalan menuju makam. Setelah tiga hari saya berada di Jakarta dan tidak dapat menemui Pimpinan Pusat Partai Katolik, saya disuruh pulang ke Yogya oleh kakak saya. Ia tidak berani menanggung keselamatan saya karena saya selalu keluar dari rumah mereka untuk berusaha ketemu Pak Kasimo dan Pak Frans Seda. Akhirnya saya pulang ke Yogya, sendiri.

Sampai di Yogya, saya melihat bahwa situasi tegang melanda kawan-kawan karena hilangnya Pak [Brigjen] Katamsa dan Pak [Letkol] Sugijono, Komandan Resimen dan Komandan Kodim DIY. Suasana menjadi bertambah mencekam ketika jenazah mereka ditemukan di Kompleks tentara Kentungan, Yogyakarta, dalam

keadaan mengenaskan. Sejak itu situasi kami aktivis Pemuda Katolik sudah tidak aman lagi. Berkali-kali saya dicari anggota Pemuda Rakyat yang datang ke rumah saya. Ibu saya selalu melindungi saya dan mengatakan bahwa saya tidak di rumah. Saya dan kawan-kawan aktivis Katolik dari organisasi Katolik lainnya terpaksa sembunyi dan mengadakan pertemuan rutin untuk membaca situasi.

Ikut Terseret Arus

Situasi sosial politik makin tidak menentu. Berita yang dimuat di surat kabar Jakarta sangat mempengaruhi pikiran rakyat, walaupun sering berbeda dengan kenyataan di daerah. Berita-berita mengerikan yang dituduhkan kepada PKI sangat menakutkan. Membaca berita surat kabar, mendengar cerita pengalaman kawan-kawan dan mengalami sendiri kejadian-kejadian aneh, saya sadar bahwa pada waktu itu telah terjadi peristiwa luar biasa. Saya mengalami peristiwa sangat mengerikan ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tentara baret merah membunuh sekelompok orang di pinggir Sungai Wedi di daerah Klaten, Jawa Tengah.

Ketika itu, saya akan menjemput tunangan saya yang bekerja di sebuah bank di Bayat, Klaten. Saya sangat khawatir karena sudah dua minggu tunangan saya tidak pulang, padahal biasanya setiap Sabtu pulang. Sepanjang jalan, saya melihat pohon-pohon ditebangi untuk merintang jalan. Ketika sampai di Sungai Wedi⁴⁴, saya menyaksikan pembunuhan massal itu. Mayat para korban dibuang begitu saja di sepanjang sungai. Kejadian lain yang mengerikan dialami oleh sahabat saya mahasiswa ekonomi. Ibunya yang menjadi Lurah di suatu Desa di Pati, Jawa Tengah, dibunuh di depan dia, bapak dan saudaranya, karena Ibu Lurah tersebut adalah anggota Gerwani. Masih banyak lagi

44 Sungai yang isinya pasir dan tidak ada airnya. Kata masyarakat sekitar, airnya mengalir di bawah pasir.

kejadian mengerikan yang terjadi selama bulan Oktober-Desember 1965.

Menghadapi situasi yang menegangkan tersebut kami para aktivis Katolik makin mendalami persoalan sosial-politik melalui diskusi-diskusi dan analisis fakta. Kami berkumpul secara rutin. Agar aman, kami berpindah-pindah tempat. Pertemuan selalu dihadiri para aktivis Katolik dari organisasi massa dan organisasi politik. Walaupun kami membuat analisis sosial politik secara kritis, media massa telah berhasil membentuk opini publik sehingga kami cenderung percaya bahwa yang membuat kekacauan adalah PKI. Oleh karena itu ketika suasana politik membawa angin untuk membubarkan PKI, kami para aktivis Katolik ikut terseret arus bergabung dalam demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Keatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Kami bergabung dengan organisasi Islam dan Nasionalis. Suasana politik membawa umat Katolik mendukung pembubaran PKI dan semua organisasi di bawah payungnya, tanpa bisa berpikir jernih.

Ada Skenario Besar

Sebagai aktivis organisasi Pemuda Katolik saya juga bergabung dalam demonstrasi untuk mendukung pembubaran PKI dan organisasi-organisasi di bawah payungnya. Pada waktu itu, saya merasa ada arus politik sangat kuat yang mendorong rakyat agar semua setuju PKI dan sekutunya dibubarkan. Media massa, baik surat kabar, radio, dan televisi sangat berperan membentuk opini publik dan semua menyalahkan PKI. Tetapi sebagai seorang aktivis Katolik yang sebelumnya sangat akrab bekerja dengan para aktivis Gerwani dalam menanggapi krisis ekonomi dengan kegiatan sosial, pendidikan dan

ekonomi, saya merasakan telah terjadi kekerasan dan ketidakadilan terhadap anggota organisasi di bawah naungan PKI. Lebih-lebih ketika penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dianggap terlibat organisasi komunis menjadi membabi buta. Teman Bapak saya yang menggantikan Bapak menjadi Ketua Serikat Buruh Kesehatan DIY juga ikut ditangkap.⁴⁵ Padahal beliau beragama Protestan.

Penangkapan kawan-kawan saya sekampung yang menjadi anggota Gerwani juga merisaukan hati saya. Ada dua orang ibu anggota aktif Gerwani yang bekerja sama dengan saya dalam Koperasi Kampung juga ditangkap. Saya sangat marah dan tidak bisa menerima kejadian itu. Maka saya beranikan diri untuk membela mereka walaupun saya terpaksa menjadi bulan-bulanan petugas Polisi Militer di Makodim Yogyakarta. Melalui kesaksian Romo A. Jayasiswaya, Pr (moderator Pemuda Katolik) dan Bapak FX. Sastraharjana (polisi yang selalu menolong kami) tentang diri saya, saya berhasil membebaskan rekan kerja sekampung saya itu.

Kerisauan saya bahwa ada yang tidak beres dengan cara-cara menghadapi Tragedi '65 ini mendapat jawaban ketika saya diminta membantu Romo P. De Blot, SJ untuk mendampingi keluarga para tahanan politik yang ditampung di Wisma Realino, Yogyakarta. Dari cerita pengalaman mereka, saya makin yakin bahwa ada skenario besar di belakang Tragedi 1965.⁴⁶

45 Sebelumnya Bapak sayalah yang bertugas sebagai Ketua Serikat Buruh Kesehatan DIY. Pada tahun 1963 Bapak digantikan oleh salah seorang temannya.

46 Keyakinan saya ini terkonfirmasi ketika saya sempat membaca dokumen-dokumen tentang gejolak politik Indonesia, di Perpustakaan Cornell University, USA, Indonesia Department, ketika saya berkesempatan diundang diskusi oleh Dr. Benedict Anderson tahun 1982.

Bersikap Rasional

Sebagai seorang Katolik, ketika itu pandangan saya masih terbentuk oleh ajaran-ajaran Gereja yang memisahkan politik dan non-politik secara dikotomis. Oleh karena itu saya tidak heran kalau Gereja dan para pemimpin Gereja tampak “menjaga jarak” dari kegiatan berbau politik, seperti membuat pernyataan atau memberi dukungan tentang suatu sikap politik tertentu. Perilaku politik kami dipimpin oleh Partai Katolik, yang kami percaya mendapatkan restu dari Gereja. Karena itu ketika Partai Katolik mendukung pembubaran PKI, kami mengikutinya.⁴⁷ Secara perseorangan beberapa umat Katolik, Awam, Pastor, Bruder, Suster terlibat langsung dalam pekerjaan kemanusiaan, walaupun belum banyak yang berani secara terbuka.

Gereja Katolik baik para pemimpin maupun umatnya lebih memilih menanggapi Tragedi 1965 dengan melayani pekerjaan kemanusiaan. Saya sebagai aktivis organisasi pemuda juga mengurangi kegiatan berpolitik praktis. Lebih-lebih setelah saya ditangkap polisi, ditahan dua hari di Mapolda Yogyakarta karena harus mempertanggungjawabkan kerusuhan yang terjadi ketika kami melakukan demonstrasi bersama organisasi pemuda lainnya. Nama saya ada dalam daftar intel Makodim untuk dipantau terus di mana keberadaan saya. Karena itu, saya harus bersikap rasional agar tidak mati konyol.

Pada tahun 1965 itu menurut pengamatan saya, masyarakat Yogyakarta pada umumnya dilanda kecemasan karena peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sekitar wilayah Yogyakarta. Misalnya di Desa Manisrenggo, sebelah timur Prambanan. Desa itu terkenal sebagai tempat pembunuhan orang-orang yang dituduh

47 Ketika itu setiap organisasi massa harus berlindung di bawah Partai Politik. Istilahnya sebagai “*onderbow*”.

terlibat PKI. Masyarakat resah karena setiap hari dihadapkan pada berita tentang orang-orang yang hilang, ditangkap, dibunuh. Berita tentang sumur di desa-desa tertentu sebagai kuburan massal menjadi berita yang disajikan setiap hari. Namun demikian, kehidupan masyarakat tetap tenang dan tidak ada gejolak yang menonjol.

Kekuasaan Ekonomi Internasional

Menurut pengamatan saya memang terjadi perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia pasca-Tragedi 1965. Perubahan diawali dengan terjadinya kekerasan dan politik represif dari militer. Di bidang sosial, masyarakat yang semula kebingungan, takut kepada orang-orang komunis, mulai berproses dan percaya kepada militer, khususnya Angkatan Darat yang tampil sebagai “pelindung” rakyat. Rakyat yang pandangan sudah terbentuk bahwa PKI adalah dalang dari tragedi 1965, menjadi percaya bahwa Angkatan Darat adalah “penyelamat”. Kekuasaan birokrasi mulai diganti dari pimpinan sipil menjadi pimpinan militer. Hampir semua Gubernur dan Bupati di wilayah seluruh Indonesia dijabat oleh militer. Militerisme yang terwujud dalam bentuk kekerasan mulai dialami rakyat Indonesia. Para aktivis yang membuat gerakan di akar rumput dicurigai, diculik, atau ditangkap secara terbuka.

Situasi politik membuat orang tidak berani mengkritik, membuat analisis sosial politik, berorganisasi mandiri atau melakukan gerakan massa. Alasannya karena takut dituduh PKI. Berorganisasi harus minta izin. Bahkan segala kegiatan yang melibatkan orang banyak harus minta izin. Politik pemerintah yang represif, penyalahgunaan wewenang dari pimpinan terjadi di mana-mana, khususnya persoalan tanah. Para pejabat membeli tanah rakyat. Para aktivis organisasi masa, baik organisasi sosial dan budaya banyak yang hilang diculik.

Saya sendiri tidak berani melakukan kegiatan berorganisasi di luar pekerjaan saya sebagai dosen, karena telah terjadi kekerasan yang tidak manusiawi. Perspektif militer mulai mempengaruhi masyarakat, memandang golongan lain sebagai kawan atau lawan.

Kehidupan ekonomi mulai terasa membaik, karena pemerintah mulai mengadakan kerja sama dengan negara-negara kapitalis. Utang Luar Negeri dan investasi asing mulai mengalir. Situasi ini memicu Peristiwa MALARI sekitar tahun 1970-an. Peristiwa ini terjadi karena para aktivis mahasiswa secara kritis mulai sadar bahwa perbaikan ekonomi yang terjadi adalah perbaikan semu. Namun demikian, demonstrasi ini ditumpas dengan kekerasan militer. Oleh pemerintah Orde Baru, bangsa Indonesia mulai dilibatkan dengan kekuasaan ekonomi internasional.

Kapitalis juga Diuntungkan

Tragedi 1965 sangat merugikan masyarakat yang dituduh terlibat, padahal mereka sebagai anggota organisasi tidak tahu-menahu tentang rencana peristiwa itu. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari keluarga PKI dan organisasi di bawahnya diberi tanda “ET” yang berarti Eks-Tahanan Politik. Mereka diperlakukan diskriminatif dan disingkirkan. Para aktivis organisasi sosial kemasyarakatan juga dirugikan karena banyak organisasi yang dibekukan atau dibubarkan. Masyarakat tidak bebas untuk membentuk organisasi. Bahkan kaum perempuan juga jadi takut berorganisasi, karena bisa dituduh Gerwani. Perempuan, pemuda, petani, buruh yang semula aktif dan militan berorganisasi semakin menurun jumlahnya atau berhenti sama sekali. Dalam situasi rakyat takut berorganisasi ini, pemerintah membentuk organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita untuk perempuan. Pemerintah juga

membentuk organisasi untuk buruh, petani, dan pemuda, bahkan membentuk Koperasi versi pemerintah.

Pihak yang diuntungkan dari peristiwa tersebut adalah militer, khususnya Angkatan Darat. Kekuasaan penuh ada di tangan mereka. Pemerintah bekerja sama dengan negara-negara kapitalis. Untuk memperbaiki perekonomian dan demi pembangunan, pemerintah membuka investasi asing. Pembangunan Indonesia bersifat *developmentalist*, berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional saja, tanpa memperhatikan aspek pemerataan. Kekuasaan diktator membawa masyarakat tidak berani melawan. Situasi represif membuat masyarakat takut sehingga menjadi tidak kritis. Dalam situasi seperti ini para kapitalis juga diuntungkan.

Tetap Tidak Berani Kritis

Politik Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri saat itu memperkuat terjadinya kemiskinan struktural yang membuat banyak orang menderita. Padahal realitas menunjukkan bahwa ada sekelompok masyarakat yang hidup berkelimpahan. Masyarakat sadar bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam kehidupan. Jurang antara kaya dan miskin semakin lebar, sehingga muncul kecemburuan sosial. Dalam situasi seperti ini rakyat mudah dihasut dan dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu. Pada tahun 1960-an penderitaan rakyat semakin berat dan meluas. Cita-cita Bung Karno “berdiri di atas kaki sendiri” makin jauh dari kenyataan. Perekonomian makin terpuruk mengingat Indonesia itu sangat luas sementara situasi sosial, ekonomi, dan budayanya sangat beragam. Penderitaan rakyat ini rupanya dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk menghasut rakyat. Melalui kampanye didengung-dengungkanlah pertanyaan “*siapa*” yang membuat penderitaan, dan bukan “*apa*” yang menyebabkan.

Dengan menekankan sisi “siapa”-nya berarti terbukalah pintu untuk mengkambing-hitamkan pihak-pihak tertentu, dan pihak tertentu itu harus dilawan, dibunuh, dimusnahkan.

Pengalaman belajar Teologi Pembebasan dari Amerika Latin, membuat saya bisa merasakan bahwa situasi rakyat di negara-negara Dunia Ketiga,⁴⁸ di termasuk Indonesia, sama dengan situasi rakyat di negara-negara Amerika Latin. Kemiskinan struktural tidak dapat diselesaikan dengan sedekah yang bersifat karitatif. Di Amerika Latin juga terjadi kemiskinan struktural, di mana para pemimpin Negara dan Gereja menghadapinya secara karitatif. Tetapi perbedaan besar antara Indonesia dan Amerika Latin adalah cara penyadaran rakyat. Di Amerika Latin, khususnya di Brazil,⁴⁹ rakyat diajak memikirkan pengalaman hidup dan merefleksikan iman mereka. Mereka diajak untuk mencari *apa yang menyebabkan kemiskinan, lalu diajak untuk menyadari kemiskinan sebagai keprihatinan bersama, untuk kemudian diajak mencari penyelesaiannya secara bersama-sama*. Kalau di Indonesia, rakyat digiring untuk mencari kambing hitam *siapa yang membuat kemiskinan*. Akibatnya terjadi kemarahan rakyat yang mendorong perbuatan anarkis melawan golongan yang dituduh sebagai pembuat penderitaan rakyat. Sebagaimana kita tahu, persoalan kemiskinan dan penindasan itu sangat sarat muatan emosi yang mudah disulut dan mudah meledak.

Pada tahun 1960-an, umat Katolik termasuk saya masih memandang politik secara sempit. Secara dikotomis dibedakan dan dipisahkan antara kegiatan politik dan kegiatan beragama. Ajaran

48 Menurut Konferensi Asia Afrika di Bandung, Dunia Ketiga adalah *Dunia Alternatif*.

49 Di tingkat akar rumput masyarakat membentuk Komunitas Basis untuk membicarakan penderitaan hidup dan merefleksikannya dengan iman. Jadi refleksi inilah yang mampu mengendalikan emosi dan mampu berpikir jernih.

Gereja yang membentuk pandangan seperti itu membuat saya harus benar-benar membedakan kegiatan politik dan kegiatan beragama. Politik dipandang sebagai kekuasaan duniawi. Oleh karena itu, saya tidak heran kalau pada tahun 1965-1966 Gereja seolah-olah “diam”, sehingga umat Katolik juga ikut “diam”. Bahkan banyak umat Katolik mengecam sesama umat yang melakukan kegiatan politik di luar partai politik. Misalnya, umat mengecam Pastor yang ikut menandatangani pernyataan “40 tokoh masyarakat” tentang keprihatinan rakyat DIY, ketika Bapak Kardinal J. Darmoyuwono bergabung dengan gerakan Ratu Adil mencita-citakan keadilan dan perdamaian. Ingat misalnya kasus Sawito. Masih banyak umat Katolik yang memberi komentar sinis pada karya kenabian para imam tersebut. Ajaran Gereja yang diterima umat seperti itu membuat umat Katolik kurang berani tampil menyuarakan kebenaran, membela keadilan, dan memperjuangkan perdamaian.

Pelajaran lain yang sangat besar yang saya petik adalah peranan luar biasa media massa dalam membentuk pandangan masyarakat. Berita yang tersiar melalui surat kabar, radio, dan televisi ternyata sangat mudah dianggap sebagai kebenaran, walaupun tidak sedikit yang menyesatkan. Apalagi telah terjadi monopoli informasi. Berita yang didengar, dilihat, dan dibaca dianggap sebagai kebenaran dan akhirnya membentuk opini publik. Berita-berita dibuat dengan sengaja untuk menyesatkan rakyat tanpa rakyat mampu menyadarinya. Cara-cara seperti ini berlanjut pada era Orde Baru. Akibatnya masyarakat menjadi tidak berani bersikap kritis.

Bergabung

Belajar dari pengalaman saya berada dalam suasana Tragedi 1965, saya menjadi sadar bahwa pandangan dikotomis terhadap politik dan

agama ternyata tidak realistis. Saya sadar dan makin memahami konsep Feminis Radikal yang mengatakan, *“the personal is political”*. Artinya aspek personal-politik, domestik-publik, duniawi-ilahi, dan sebagainya harus dipandang secara utuh, tidak secara dikotomis. Oleh karena itu, pemahaman saya tentang politik telah berubah. Politik tidaklah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bagaimana kita berperan serta dalam menentukan keputusan-keputusan yang dimaksudkan untuk membuat pranata kehidupan agar manusia dan ekologi makin saling memberikan manfaat sehingga terciptalah keadilan dan perdamaian. Untuk menghilangkan pandangan dikotomis atas politik dan agama perlu disadari bahwa berpolitik dan refleksi iman merupakan suatu kesatuan utuh. Proses “Aksi–Refleksi–Aksi Lanjut” merupakan proses berpolitik untuk melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Karya Yesus Kristus *mewartakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan* belum selesai. Oleh karenanya, kita yang mengaku murid-murid Yesus wajib melanjutkan karya tersebut. Melanjutkan karya Yesus tidak mungkin terjadi kalau kita tidak berpolitik. Mewartakan Kerajaan Allah berarti menciptakan dunia baru yang adil dan damai, karena hanya Allah yang me-Raja. Cara yang dipilih Yesus untuk melaksanakan karya-Nya adalah *melakukan gerakan rakyat dengan metoda Aktif Tanpa Kekerasan*. Gerakan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, menuju dunia baru dilakukan dengan kegiatan politik.

Agar tetap setia menjadi murid Yesus, sampai sekarang saya bergabung dengan gerakan ini. Di dunia sudah bergulir gerakan rakyat yang mencita-citakan terwujudnya “dunia baru”. Gerakan dunia dilakukan oleh pribadi dan lembaga atau organisasi yang bergabung dalam World Social Forum (WSF). Gerakan dunia yang bersemboyan

another world is possible itu berawal dari Puerto Alegre, Brazil, dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia guna mengajak semua orang agar mencita-citakan dunia adil dan damai. Gerakan yang boleh diikuti oleh siapa saja tanpa diskriminasi ini selalu dibarengi dengan refleksi teologi para teolog dunia yang bergabung dalam World Forum on Theology and Liberation (WFTL).

Saya mengajak semua pengikut Yesus untuk bergabung dalam gerakan dunia ini.[]



Para korban Tragedi '65 ditangkap dan diangkut dengan truk militer (Ist.)

BAGIAN II

NARASI PARA MANTAN KORBAN

Pengantar

SEBAGAIMANA telah kita lihat, menurut narasi resmi para korban yang ditangkap dan dipenjarakan—atau dibunuh secara massal—dalam Tragedi '65 itu diperlakukan demikian karena mereka terlibat dalam aksi "pengkhianatan" (menurut istilah Orde Baru) yang dilakukan oleh Gerakan Tiga Puluh September pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta. Sementara itu, para korban perempuan ditangkap atau dipenjarakan—atau dibunuh secara massal juga—karena mereka terlibat dengan "aksi amoral" yang dilakukan oleh para anggota Gerakan Wanita Indonesia di pangkalan udara milik Angkatan Udara Republik Indonesia, Halim Perdanakusuma.

Meskipun demikian, di lapangan—sebagaimana akan kita lihat dalam narasi-narasi dalam bagian ini—realitasnya cukup berbeda. Banyak yang ditangkap, dipenjarakan atau disiksa sebenarnya tidak punya kaitan langsung dengan apa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari itu. Salah seorang korban Tragedi '65 yang ditangkap di Yogyakarta pada tahun 1965, misalnya, ternyata hanyalah seorang remaja kampung (putra seorang penjaga pasar) berusia 19 tahun. Sulit dibayangkan, dalam usia semuda itu ia telah mampu merencanakan sebuah aksi "pengkhianatan" terhadap negara, dan oleh karena itu harus ditangkap dan dipenjara. Apa boleh buat, oleh

sejumlah petugas tak dikenal, ia dipandang membahayakan negara. Ia pun ditangkap lalu dipenjarakan—tanpa surat resmi, tentu saja. Setelah beberapa saat mengalami penderitaan hidup sebagai Tahanan Politik di Pulau Nusa Kambangan, ia lantas dibuang ke Pulau Buru, jauh dari kampung Ledhok Ratmakan di Yogyakarta tempat ia menikmati hari-hari indah bersama teman-teman sekampungnya.

Korban lain yang juga bertutur pada bagian ini adalah seorang pria keturunan etnis Tionghoa, yang waktu itu merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta. Ketika terjadi konflik politik tahun 1965 sebenarnya dia tidak diapa-apakan. Namun demikian, pada tahun 1969, saat sedang bekerja sebagai wartawan, tiba-tiba saja ia ditangkap. Tidak jelas mengapa, tetapi mungkin alasannya hanya karena antara akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, ia pernah mengikuti "Kaderisasi Revolusi" di Jakarta. Padahal kaderisasi itu penggagasnya adalah Presiden Sukarno sendiri, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketegangan rasial sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1963. Kaderisasi itu sendiri sebenarnya merupakan kaderisasi terbuka, melibatkan sekitar 600 peserta, dan instrukturnya antara lain adalah Jenderal A.H. Nasution, Jenderal A. Yani, dan Ali Sastroamidjojo. Ia ditahan di Penjara Salemba, dan pada tahun 1971 dibuang ke Pulau Buru. Sembilan tahun lamanya ia ditahan dan disuruh kerja paksa di tempat pembuangan itu, dan baru dibebaskan pada tahun 1979. Tak ada permintaan maaf dalam bentuk apapun untuknya.

Sementara itu, seorang korban lain ternyata adalah korban salah tangkap. Usianya baru 14 tahun ketika itu, tetapi ia tetap ditangkap. Alasannya ternyata karena namanya mirip dengan nama orang lain yang sedang dicari petugas. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara, tanpa dijelaskan apa duduk masalahnya. Di penjara itu makanannya

tidak layak, yakni jagung dan *gaplek*⁵⁰ berlaukkan ikan asin yang sudah busuk. Semula ia ditahan di Penjara Wirogunan, Yogyakarta, tetapi ia lalu dipindahkan untuk sementara di Penjara Bulu, Semarang, sebelum akhirnya dibuang ke Penjara Plantungan di daerah Semarang bersama para Tahanan Politik perempuan yang lain. Baru pada tahun 1979 ia dibebaskan, sehingga ia harus kehilangan 14 tahun hidupnya tanpa ada kesalahan apa pun yang ia perbuat—kecuali bahwa namanya sama dengan nama orang lain yang hendak ditangkap. Sulit membayangkan anak kampung usia 14 tahun ini merupakan anggota sebuah gerakan wanita yang menari-nari secara amoral di Lubang Buaya, jauh di dekat Jakarta sana. Baginya juga tak ada permintaan maaf dalam bentuk apa pun.

Tak kalah menarik dalam bagian ini adalah kisah seorang korban yang waktu ditangkap, statusnya mahasiswi di Yogyakarta dan aktif dalam sebuah organisasi pelajar yang bernama Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia. Organisasi itu biasa disebut IPPI dan memiliki anggota kehormatan Presiden Sukarno. Semula mahasiswi tersebut ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang jelas. Empat bulan kemudian, ia dilepaskan karena ternyata dia memang tidak diketemukan kesalahan apa pun. KEPADANYA DIBERIKAN SURAT PEMBEBASAN RESMI. Namun demikian, malang baginya, tak lama kemudian ia ditangkap lagi. Kali ini surat resmi itu justru dijadikan alasan oleh para petugas untuk menangkap dan menahannya. Ia disiksa, dihina, dan dituduh anggota Gerakan Wanita Indonesia. Ia sempat ditelanjangi di hadapan petugas karena menurut para petugas itu (yang notabene semuanya laki-laki) menuduh bahwa ia menyembunyikan tato bergambar palu arit di dekat alat vitalnya. Mungkin susah dibayangkan bagaimana sebuah organisasi modern memberi identitas kepada anggotanya dalam bentuk tato mini di bagian tubuh yang tidak biasa. Namun demikian,

50 Bahan makanan dari singkong yang dikeringkan dan dimasak.

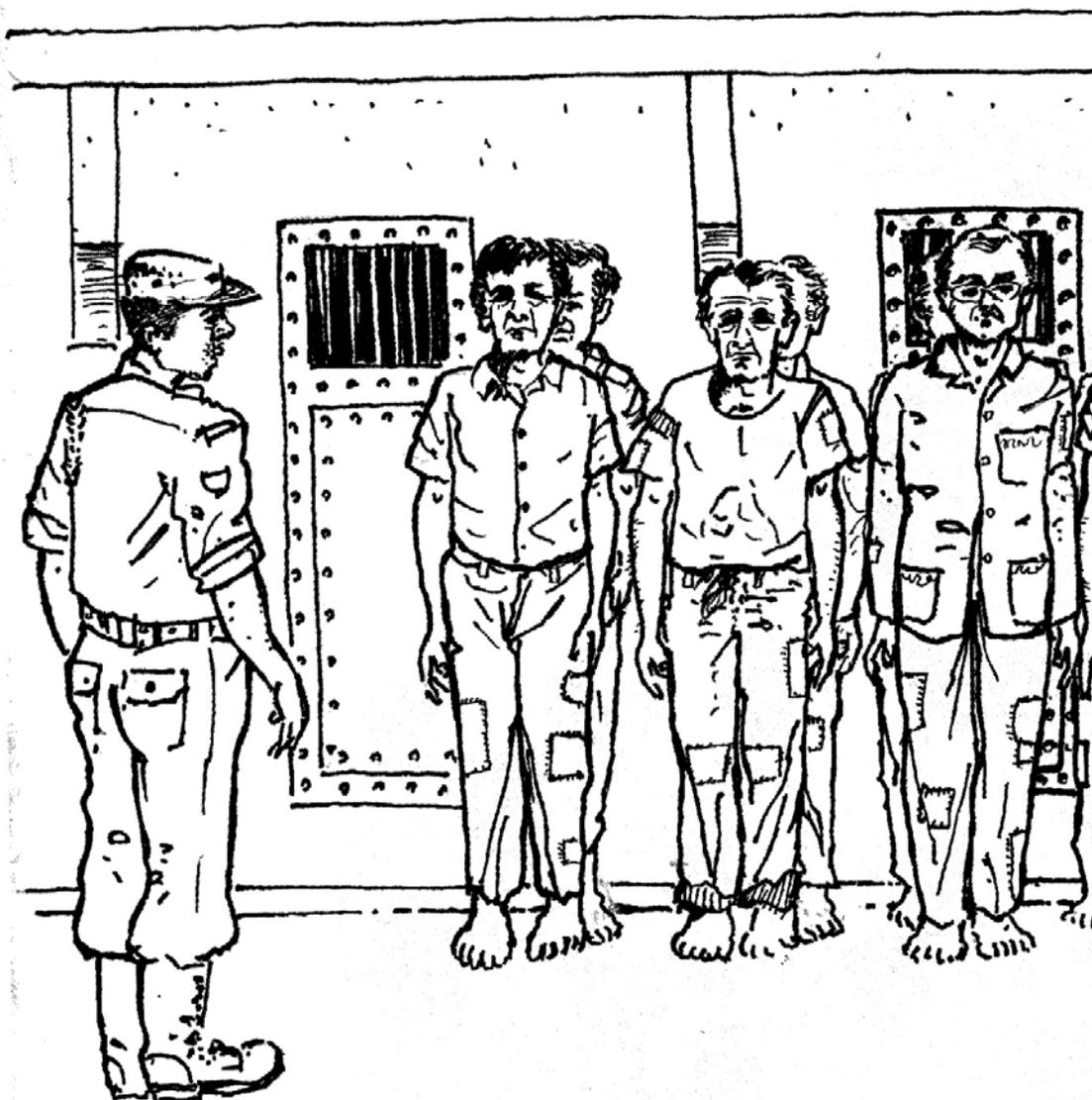
entah semua itu masuk akal atau tidak, entah ia ada kaitannya dengan para perempuan yang konon menari-nari secara erotis di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma atau tidak, ia harus mendekam selama belasan tahun dalam penjara.

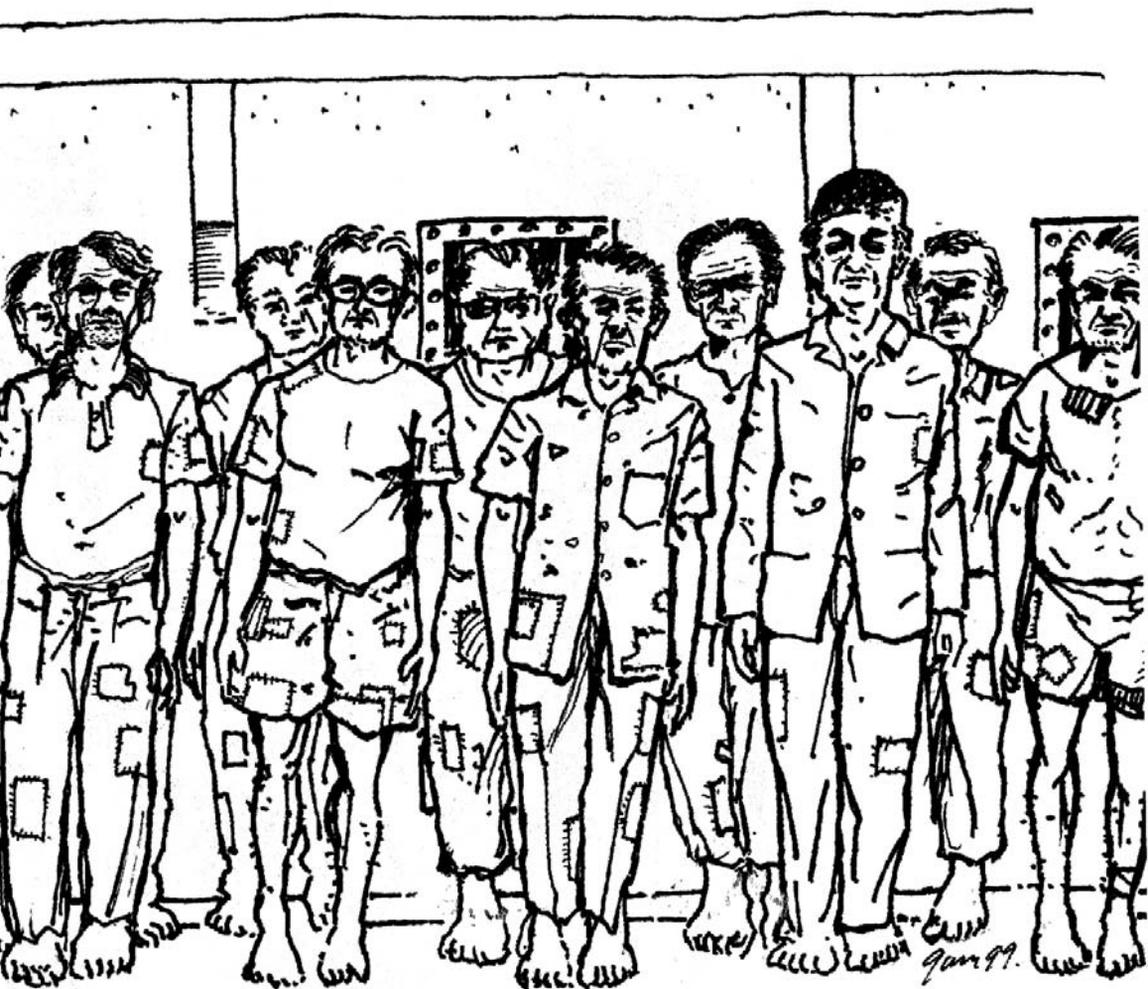
Yang juga akan kita temui dalam bagian ini adalah seorang mantan pejuang yang pada masa mudanya menghabiskan waktu untuk angkat senjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ketika perjuangan selesai, ia dengan penuh keyakinan memilih untuk membantu kelompok yang jumlahnya sangat besar di negeri yang baru merdeka dan berciri agraris itu, yakni kelompok petani. Perjuangannya untuk membela kelompok tani itu kemudian membawanya untuk menjadi pemimpin gerakan tani dan kemudian menjadi wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Apa boleh buat, pada tanggal 1 Oktober 1965 suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan pengetahuannya terjadi, dan ternyata salah satu buntut dari peristiwa itu adalah bahwa ia diburu dan ditangkap. Ia sering diinterogasi oleh petugas, dan seusai interogasi, biasanya dia harus digotong karena tubuhnya remuk dipukuli. Orang boleh saja bertanya, itukah cara orang Indonesia berterima kasih kepada mantan pejuang kemerdekaan negerinya? Namun demikian, begitulah kenyataan yang harus dialami oleh narasumber kisah ini. Tak hanya itu, ia juga lantas dibuang jauh ke Pulau Buru. Ia dibuang oleh warga bangsa yang telah ia bela dan pertahankan kemerdekaannya.

Seorang narasumber lain memiliki kisah yang sedikit berbeda. Ia sendiri tidak pernah disiksa atau dipenjara seperti yang lain-lain. Namun demikian, derita yang dia alami tidak kalah hebatnya. Gara-gara ayahnya menjadi Tahanan Politik (hanya karena dipandang membangkang terhadap permintaan seorang ketua kampung di Yogyakarta) dan suaminya (ternyata) adalah juga mantan Tahanan

Politik, ia dan anak-anaknya terus menerus distigmatisasi, disingkirkan, dan ditekan oleh masyarakat sekitar—bahkan oleh lingkungan keluarganya sendiri. Tekanan demi tekanan datang silih berganti, seakan tiada henti. Satu-satunya yang membuat dia mampu bertahan hidup adalah keyakinannya akan Tuhan yang selalu baik terhadapnya, dalam suka maupun duka, saat tidur maupun berjaga.

Kisah-kisah itu semua nyata dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Tragedi '65. Namun demikian, sebagaimana kita tahu, kisah-kisah seperti ini justru sering absen dari kisah tentang Tragedi '65 menurut versi resmi penguasa. Dalam narasi resmi produk rezim penguasa Orde Baru, misalnya, yang dipakai biasanya adalah pola berpikir "hitam-putih" sehingga dengan mudah ditentukan mana yang benar dan mana yang salah—menurut versi pencerita. Suara rakyat di tingkat masyarakat bawah lalu terabaikan. Melalui narasi-narasi di bagian berikut ini, Anda akan diajak untuk sejenak mendengarkan suara yang terabaikan itu. Dari narasi-narasi tersebut Anda mungkin akan menjadi sadar bahwa predikat yang lebih tepat untuk mereka mungkin bukan "korban" melainkan "*survivor*" atau mungkin bahkan "pemenang", mengingat mereka telah mampu untuk terus bertahan hidup. Selain telah mampu bertahan hidup mereka juga telah bersedia bertutur tentang apa yang mereka alami itu kepada Anda sekaligus memaknai pengalaman itu. Selamat menyimak.[]





Kondisi para Tapol yang menghuni Blok L Rumah Tahanan Khusus (RTC) Salemba sangat memprihatinkan. Pakaian mereka compang-camping, berselimutkan kutu, dan kulit mereka dihinggapi penyakit kudis dan panu

(Sketsa Gumelar Demokrasno).

Ini Problem Kita Sebagai Bangsa

Pengantar

*BAGIAN berikut adalah penulisan kembali atas narasi mengenai Tragedi '65 dari kacamata seorang mantan pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang sekaligus pemimpin gerakan Petani. Namanya kita sebut saja **Samsul Abmad**. Samsul adalah seorang pejuang yang gigih sejak masa mudanya, dan di masa tuanya secara konsisten membela kepentingan rakyat di lapisan bawah, khususnya kaum tani. Ia pernah menjadi Sekretaris Umum organisasi petani Serikat Kaum Tani Indonesia (SAKTI) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Ironisnya, justru karena pembelaannya itu ia ditangkap, dipenjara, dan akhirnya dibuang ke Pulau Buru.*

Bagi Samsul, apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, yakni penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal di Jakarta, berada di luar pengetahuan dan pemahamannya. Waktu itu ia sedang berada di Bandung, dan ketika mendengar tentang itu, ia segera bergegas ke Jakarta. Sebagai anggota Badan Pemimpin MPRS dan merasa tidak melakukan kesalahan apa pun, ia langsung menuju ke gedung MPRS untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sayang sekali di sana, ia tidak berhasil menemui siapa pun.

Tak lama kemudian, karena dikhianati oleh orang yang dikenalnya, Samsul ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di situ, ia segera diinterogasi. Katanya, "Saya dimintai keterangan atas berbagai aktivitas politik yang saya lakukan. Tentu saja proses interogasi ini luar biasa-lah. Saya dibentak, dihardik, dimaki, dan sebagainya." Seakan tak seorang pun peduli bahwa seumur hidupnya Samsul adalah pejuang Kemerdekaan RI yang kemudian mati-matian membela kaum tani. Konon setiap selesai interogasi ia selalu harus digotong ke luar ruangan. "Tentu saja, karena kan tidak kuat menghadapi siksaan," katanya. Ia melanjutkan, "Kalau perkara disiksa rasanya tidak ada akhirnya. Saya selalu bertanya dalam hati, kapan gua [saya] mati?"

Selanjutnya Samsul ditahan di penjara Kebon Waru, untuk kemudian dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan, dan akhirnya dibuang di Pulau Buru. "Saya berada dalam tahanan Orde Baru kira-kira hampir 15 tahun," tutur Samsul.

Terhadap apa yang ia alami berkaitan dengan Tragedi '65 itu Samsul tidak merasa dendam. Meskipun telah mempertaruhkan hidup dan nyawanya untuk kemerdekaan bangsanya tetapi lalu dikhianati, ia bahkan tak ingin melihat masalah ini sebagai masalah pribadi. "Ini bukan problem pribadi saya. Ini problem kita sebagai bangsa," ungkapnya. Ia bahkan menghimbau supaya kita berlaku adil terhadap para pelaku ketidakadilan di seputar Tragedi 1965. Rasa dendam harus dijauhkan. Tujuannya adalah supaya semakin jelas bangsa ini melangkah menuju ke rekonsiliasi. Itulah Samsul Ahmad.

*Narasi yang akan segera Anda tekuni ini merupakan hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh anggota Komisi Sejarah PUSdEP **Tri Chandra Aprianto** atas beberapa wawancara dengan Samsul Ahmad. Selain itu, diintegrasikan pula surat-surat yang telah dikirimkan Samsul kepada Chandra, maupun dokumentasi ceramah-ceramah, tulisan-*

tulisan, puisi-puisi, serta hasil wawancara orang lain dengan Samsul Ahmad. Tri Chandra Aprianto adalah dosen Sejarah di Universitas Negeri Jember, kota Jember, Jawa Timur. Kini ia sedang menempuh studi S3 di Universitas Indonesia, Jakarta.

Sayang sekali bahwa ketika proses menarasikan ingatan ini sedang berlangsung—sementara banyak hal penting belum sempat terungkap—tiba-tiba Samsul dipanggil menghadap Pencipta pada tanggal 26 Mei 2009.

SAYA lahir pada tahun 1926 dari keluarga yang memiliki tradisi dagang di Ranah Minang, Sumatera Barat. Semasa muda, aktivitas saya lebih banyak berada di wilayah pertempuran. Sebabnya saya ini *kan* dulu seorang tentara. Akan tetapi yang dimaksud dengan tentara di sini bukanlah tentara dalam arti tentara yang berangkat dari Barisan Keamanan Rakyat [BKR], yang kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia [TRI], dan yang akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia [TNI]. Bersama teman-teman, saya bergabung dengan sebuah laskar rakyat yang cita-citanya adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945. Laskar ini lebih dikenal dengan “Laskar Rakyat Jakarta Raya” yang para pendirinya adalah Chaerul Saleh, Nandar, Darwis, Johar Nur, Hasnan, Wahidin, Armansyah Hasan Dayuh, dan lain-lain. Kelompok muda ini juga ikut membidani lahirnya Proklamasi.⁵¹ Aktivitas mereka mendapat semangat dari zamannya.

51 Wawancara 12 Mei 2000.

Begitu Luar Biasa

Tahun 1926 dikenal sebagai tahun terjadinya pemberontakan kaum komunis terhadap pemerintah kolonial, sebuah pemberontakan yang sangat tidak matang diperhitungkan oleh para pelakunya. Tahun-tahun itu juga diwarnai oleh hadirnya pergerakan kaum muda terpelajar.⁵² Walaupun kehadiran mereka merupakan akibat dari adanya Politik Etis pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernuansa diskriminatif itu, namun kehadiran itu juga disertai nalar pikir yang berisi kesadaran akan pergerakan menuju kemerdekaan.⁵³ Mereka itu misalnya, Ki Hajar Dewantara, Ibrahim yang dikenal dengan nama Tan Malaka, Maroeto Nitimihardjo, Soetomo, Semaun, Musso, HOS Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, Samsi, Sukarno, Syahrir, Hatta, Amir Syarifuddin, Achmad Kapau Gani, Mohamad Yamin, dan banyak lagi. Pada tahun-tahun itu hadir pula tokoh dari kaum muda yang nantinya mendesakkan Proklamasi 1945 seperti Soekarni, Chaerul Saleh, Djohar Nur, Hasnan, Samsuddin, Sidik Kertapati, Ibnu Parna, Samsu Haryaudaya, Legiman Haryono, Bahar Razak, Winaye, dan lainnya. Mereka semua mengenyam pendidikan kolonial. Bolehlah mereka disebut sebagai “disiden” di mata [pemerintah] kolonial Belanda.⁵⁴

Awal abad ke-20 merupakan periode yang revolusioner dalam sejarah Indonesia. Kala itu semua pikiran dan energi masyarakat Indonesia tergiring mengikuti arus Revolusi. Kaum pemuda terpelajar Indonesia saat itu semakin revolusioner. Dan hal itu tertransformasi ke kaum muda lainnya dengan sangat cepat. Pada periode paruh pertama

52 Istilah kaum terpelajar ini khas selalu muncul dalam hasil wawancara, paper ceramah, termasuk surat-surat pribadi Samsul.

53 Lihat surat Samsul 12 Juli 2006.

54 Lihat surat Samsul 12 Juli 2006.

1940-an, dalam usia yang relatif muda⁵⁵ dan nyaris tanpa disadari, saya sudah terseret oleh sebuah arus yang penuh pergolakan.

Gara-gara Jepang masuk, saya tidak bisa sekolah lagi. Ketika Proklamasi lahir, tanpa ada yang menyuruh, saya langsung “nyebur” sendiri [ke dalam kancah perjuangan kemerdekaan]. Waktu itu tidak jelas betul di mana kita berada dan untuk siapa keberadaan kita ini. Tetapi intinya adalah bahwa di mana pun kita berada dan untuk siapa pun kita berada, semuanya merupakan hasil ketetapan sendiri. Itu yang saya alami. Itu pula yang dialami banyak orang lain. Misalnya saja ada seorang pemuda bernama Kartini dari Bondowoso, Jawa Timur, yang dalam suatu keadaan darurat diajak mengungsi. Dia menolak dan lebih memilih untuk bergabung dengan para pemuda guna berjuang bersama mereka. Sebenarnya proses kesadaran seperti ini terjadinya berangsur-angsur. Karena tumbuh secara berangsur-angsur, orang seperti Kartini tidak akan mundur meskipun harus menghadapi banyak hambatan. Ini adalah proses. Baja itu ditempa dengan suhu yang tinggi supaya tidak menjadi besi.⁵⁶

Saya bergabung dengan sekelompok kaum muda, muda-remaja, usia dua puluhan tahun. Saya diliputi oleh semangat muda yang menggelora dan menyala-nyala untuk merdeka dan untuk berjuang demi kemerdekaan. Saya bergabung dengan “Kelompok Menteng 31” di Jakarta yang di zaman pendudukan fasisme Jepang di tahun tahun 1942-1943 merupakan semacam ”Sekolah Politik”. Ada yang diasramakan, ada pula yang tidak. Begitulah, bersama remaja lainnya

55 Tokoh-tokoh pergerakan saat itu memang usianya masih sangat belia. Bahkan beberapa nama sudah menjadi tokoh pada usia sebelum 20 tahun.

56 Lihat juga Samsul Mohammad, Prosiding Workshop *Memahami Gerakan Sosial Masa Lalu dan Masa Kini*, Yogyakarta 28 September-1 Oktober 2005, tidak diterbitkan (Selanjutnya: Samsul Ahmad, *Memahami Gerakan Sosial*).

saya mengenal para senior pergerakan seperti Soekarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, Djohar Nur, Hasnan, dan lain-lain.⁵⁷

Selanjutnya saya aktif pada Komite Aksi yang diketuai oleh Chaerul Saleh, yang dalam perjalanannya bermetamorfosa menjadi Angkatan Muda Indonesia atau API. Selanjutnya sejak bulan September 1945, API menjelma menjadi Laskar Rakyat Jakarta dan berkembang menjadi Laskar Jawa Barat. Di situ saya menjadi lebih aktif. Untuk selanjutnya, saya hidup dalam arus pertempuran seperti saya katakan tadi.



Narasumber tuturan ini sedang serius menyimak. Beliau wafat ketika proses penelitian untuk buku ini sedang berlangsung (Ist.)

Pada tanggal 15 Agustus 1945 saya berada di Jakarta. Tepatnya di kediaman Bung Karno, Jl Pegangsaan Timur no 56. Selain saya, hadir pula di situ waktu itu, Bung Hatta dan Soebardjo. Waktu itu saya baru melihat Bung Karno marah sekali setelah mendengar desakan Bung Wik [Wikana] yang diutus oleh para pemuda.

57 Lihat surat Samsul dalam rangka hari proklamasi 17 Agustus 2005. Surat tersebut dikemas dengan gaya bertutur dan diberi judul *Menjenguk Masa Lalu, 60 tahun Merdeka, 60 tahun Bernegara*.

Bung Wik mendesak dengan kasar supaya Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus khawatir dengan pihak Jepang yang sudah kalah perang itu. Bung Karno dengan keras menolaknya. Namun demikian, sebagaimana kita tahu, atas desakan dan paksaan para pemuda akhirnya Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.⁵⁸

Peristiwa sejarah ini sangat penting, karena prosesnya begitu luar biasa. Ada banyak tokoh di sekitarnya. Sepertinya kita selama ini memperingati Proklamasi nyaris seperti mengadakan "pesta" saja. Semuanya ramai dengan berbagai lomba dan hura-hura. Tak ada uraian bagaimana Proklamasi itu terjadi. Tak disebut-sebut bagaimana dan siapa para pelakunya. Jika terus begini, bagaimana dan kapan kita akan mengetahui sejarah kita sendiri secara benar?

Risiko Situasi Revolusi

Saat itu dinamika gerakan kaum muda terus bergerak maju. Seperti saya sampaikan tadi, Komite Aksi yang diketuai oleh Chaerul Saleh menjelma menjadi API. Selanjutnya API beralih menjadi Laskar Rakyat Jakarta, hingga berujung menjadi TNI Divisi Bambu Runcing dengan Komandannya, Sutan Akbar dan Wakilnya, Sidik Kertapati.

Perlawanan untuk mewujudkan kedaulatan terus dikobarkan, kendati pemerintah, sebagai representasi golongan tua, lebih memilih jalur diplomasi. Bagi kalangan muda jalur diplomasi lebih merupakan tindakan kompromi terhadap kekuatan kolonial. Padahal saat itu beredar informasi bahwa pemerintahan sementara Belanda di Indonesia telah kehabisan dana untuk meneruskan pemerintahannya.

58 Pada konsep Proklamasi yang ditulis oleh Sukarno, Sukarno menuliskan penanggalan Jepang, yaitu 17-8-1905. Namun menurut Samsul, Sayuti Melik mengubahnya dengan "lancang" tanpa bicara pada siapa pun menjadi tahun "1945".

Ditambah lagi mereka tidak mendapat pinjaman lebih lanjut dari pemerintah Inggris dan Amerika. Akibatnya manakala pemerintahan kolonial melakukan agresi, yang dituju adalah daerah-daerah yang memiliki kemampuan untuk *quick capital* [mendatangkan modal secara cepat, ed.], yaitu wilayah perkebunan. Politik diplomasi hanya akan memberi peluang bagi Belanda untuk “menghela nafas”.⁵⁹

Oleh karena itu, pilihan kami adalah tetap menjalankan pertempuran tanpa memberi ruang bagi pihak kolonial untuk menghela nafas barang sedikit pun. Rupanya pihak Pemerintah [RI] lebih menyetujui ajakan pihak kolonial untuk melakukan perundingan. Perundingan pertama dikenal dengan istilah Perundingan Linggajati⁶⁰ yang merujuk pada tempat berlangsungnya perundingan [suatu daerah dekat Cirebon, Jawa Barat] yang dilaksanakan pada 12 November 1946. Pihak Republik Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sementara pihak kolonial Belanda diwakili oleh Schermerhorn. Perundingan Linggajati menghasilkan keputusan bahwa kekuasaan secara *de facto* Republik Indonesia hanya berkisar Jawa, Madura, dan Sumatera.

Saya katakan tadi, semangat revolusi mendorong saya untuk bergabung dengan laskar rakyat. Namun pada tahun 1946, saya sudah berbeda sikap dengan Pemerintah Republik, yang kala itu diwakili oleh Syahrir. Ketika terjadi perundingan Linggajati, kami menolak hasil dari perundingan itu karena di dalamnya ada kalimat yang menyatakan bahwa kekuasaan *de facto* RI hanya meliputi Jawa dan Sumatera. Kami menentangnya. Dan karena menentang, maka kami ”dipukul” oleh Pemerintah. Kami dilucuti dan diserbu. Bahkan Sidik Kertapati terkena tembakan pada pahanya oleh peluru tentara Indonesia. Saya sendiri menjadi buronan.⁶¹

59 Wawancara 26 April 2005.

60 Sengaja dipakai nama Linggajati, bukan Linggarjati.

61 Wawancara 12 Mei 2000.

Selama menjadi buronan, saya mengalami banyak hal termasuk perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Maklumlah saat itu situasinya adalah situasi revolusi. Kalau sudah diteriaki sebagai “pengkhianat” tentu sudah seperti dipotong atau disembelih saja nasibnya. Waktu itu kalau pada seseorang diketemukan tiga warna saja [warna merah, putih dan biru, warna bendera Belanda] sudah pasti orang itu dicap mata-mata musuh. Maka matilah dia. Padahal belum tentu dia itu mata-mata musuh. Tapi itu adalah risiko hidup dalam situasi revolusi.

Tindakan Perlawanan

Selain melancarkan aksi perlawanan dalam bentuk fisik, kami juga memiliki surat kabar yang terbit dalam bentuk koran dengan nama *Genderang* dan majalah dengan nama *Godam Djelata*.⁶² Redaksinya adalah Armoenanto atau yang biasa disebut “Kerongkongang”. Sementara itu “Keriting” adalah nama panggilan untuk Sidik Kertapati. Kalau Haroen Oemar dipanggil “Bob”, karena mukanya *bopeng*.⁶³

Apa yang menjadi kekhawatiran kami terbukti. Pihak Belanda sudah mulai menunjukkan sikap ingkar terhadap hasil Perjanjian Linggajati. Sejak sekitar bulan Mei 1947 pihak Belanda mulai mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia, dan pada 20 Juli 1947 mereka mengimplementasikan persiapan itu dengan melakukan tindakan agresi militernya ke wilayah

62 Visi dari kedua terbitan tersebut tercermin dengan jelas dalam puisi Samsul berikut:*Kemerdekaan / hak setiap bangsa / didegupkan semangat / merdeka atau mati / rakyat menebusnja / membajarnja / dengan segala / jang ada padanya // Itulah muatan / godam djelata // Itulah jang didebarkan / tiap hari oleh genderang / lalu datanglah virus kompromi / menumpas dan membungkamnja // Lihat Samsul Ahmad, Angin Burangrang: Sajak-sajak Petani Tua, (Bandung: Ultimus, 2007), hal 111-112.*

63 Lihat surat Samsul menjelang 17 Agustus 2005.

kedaulatan Indonesia. Persis seperti yang telah kami khawatirkan, yang diserang adalah wilayah-wilayah yang potensial menghasilkan modal secara cepat. Salah satunya adalah wilayah-wilayah perkebunan.

Melihat hal itu, para pemimpin kami saat itu ingin berunding dengan pemerintah guna membantu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Untuk sementara perbedaan pendapat dihindari, mengingat adanya kesamaan tujuan, yaitu perang melawan pemerintah kolonial. Inilah yang kemudian menjadikan Laskar Jakarta Rakyat Raya bergabung dengan TNI. Sejak bergabung dengan TNI, laskar ini diubah namanya menjadi Divisi Bambu Runcing, yang diketuai oleh Sutan Akbar dengan Sidik Kertapati sebagai wakilnya.

Terjadilah perundingan di Yogyakarta. Saat itu sudah ada TNI. Saya sendiri berangkat ke Yogyakarta bersama Komandan Divisi Sutan Akbar. Kami naik kereta sampai Gombang, Jawa Tengah, kemudian turun jalan kaki menuju ke tempat kedudukan Indonesia.

Kemudian saya pindah tugas di Priangan membantu Brigade Priangan dengan Komandannya Astra Wiguna. Kedudukan kami saat itu di Cidueng, Tasikmalaya. Sejak saat itu saya dan kawan-kawan melakukan serangkaian perlawanan dengan strategi gerilya di wilayah Karesidenan Priangan.

Seiring dengan berlangsungnya penerapan strategi gerilya tersebut Pemerintah [RI], karena adanya campur tangan pihak asing, ternyata mendorong dilangsungkannya perundingan kedua dengan pihak Belanda. Pada bulan Januari 1948 dilakukanlah perundingan di atas kapal USS *Renville*. Pelaksana perundingan dari Indonesia adalah Perdana Menteri kala itu, yakni Amir Syarifuddin dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibat perjanjian tersebut TNI diharuskan meninggalkan kantong-kantong gerilya. Lagi-lagi tindakan tersebut memberi ruang keleluasaan pada pihak militer kolonial Belanda.

Peristiwa meninggalkan kantong-kantong gerilya tersebut dikenal dengan sebutan peristiwa *hijrah* ke Yogyakarta. Lagi-lagi, entah karena kekokohan sikap atau karena "kebandelan", laskar kami menolak hasil Perjanjian Renville dan tidak mau menyerahkan negeri kami kepada pihak kolonial. Kami menolak untuk ikut hijrah. Kami terus melakukan perlawanan.

Akibat tidak mau ikut hijrah ke Yogyakarta kami dianggap sebagai pembangkang. Oleh karena itu kami pun kemudian digempur oleh pasukan Brigade yang dikirim pihak Pemerintah [RI] dari Jawa Tengah. Gempuran tersebut terutama terjadi di Ciwaru, Jawa Barat. Akibat gempuran tersebut beberapa pimpinan Divisi Bambu Runcing gugur. Yang gugur itu antara lain Sutan Akbar, Gatot, Suharya, Abu Bakar, dan Maulana. Sebagian besar pasukan kemudian melarikan diri. Kendati pasukan porak poranda, saya, Astra, dan lain-lain perlahan melakukan konsolidasi dalam rangka terus menjalankan kegiatan bergerilya. Selain menghadapi Belanda di medan pertempuran, pada tahun 1948 Divisi Bambu Runcing ini juga harus berhadapan dengan kekuatan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII].

Oleh pihak kolonial hasil perjanjian [Renville] tetap saja dirasa tidak menguntungkan. Oleh karena itu, lagi-lagi pihak kolonial mengingkari hasil Perundingan Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948 pihak kolonial mulai melancarkan agresi militer lagi, agresi militer yang kedua. Tentu saja hal ini menyakitkan hati kalangan laskar rakyat yang sejak semula menginginkan tidak dilakukannya langkah diplomasi dengan pihak kolonial.

Bersamaan dengan itu, pada tahun 1948 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang reorganisasi dan rasionalisasi tentara [dikenal dengan program Re-Ra,-ed.]. Ini merupakan kebijakan di mana kekuatan militer Republik haruslah merupakan tentara yang

profesional. Pada saat gerilya dulu, satu senjata boleh dipegang oleh dua, tiga atau bahkan empat orang anggota laskar secara bergantian. Dengan adanya Re-Ra dituntutlah bahwa tentara harus profesional. Satu senjata untuk satu tentara. Berkat ketentuan Re-Ra pula sebagian anggota laskar, meskipun telah bertahun-tahun ikut bergerilya dan memanggul senjata, harus ”dikembalikan ke masyarakat”.

Tentu saja tindakan ini dirasa sangat menyakitkan bagi laskar-laskar rakyat yang selama bertahun-tahun telah ikut bergerilya demi mempertahankan kemerdekaan Republik. Namun demikian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dikumpulkan dan diantar untuk kembali ke masyarakat dengan diangkut truk. Mereka juga diberi uang saku, masing-masing sebesar 5 perak (rupiah). Saya sendiri tidak tahu pasti dari mana Pemerintah mendapatkan uang guna melaksanakan kebijakan Re-Ra tersebut.

Mereka yang tidak bisa menerima kebijakan Re-Ra lantas melakukan tindakan perlawanan dengan mendirikan Barisan Sakit Hati (BSH). Hal itu misalnya dilakukan oleh Letnan Kolonel Jamil dan pasukannya yang melakukan perlawanan di daerah Tomo, Cirebon. Sebenarnya saya dan beberapa kawan lainnya juga merasa sakit hati, tetapi kami tidak melakukan tindakan seperti kelompok Jamil.

Kedaaan Begitu Mengecewakan

Kenyataan pahit ternyata juga dihadapi oleh anggota laskar yang diterima menjadi anggota TNI. Kendati mereka diterima menjadi anggota TNI, kepangkatan mereka harus turun. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki basis pendidikan formal militer. Sementara mereka yang berasal dari KNIL⁶⁴ secara otomatis mengalami

64 *het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger*, atau secara harafiah: Tentara Kerajaan Hindia-Belanda.

kenaikan satu pangkat, karena mereka memiliki basis pendidikan militer formal. Padahal KNIL ini adalah pasukan milik pemerintah kolonial Belanda yang dulu ikut menembaki pasukan dari laskar rakyat.

Ketika perlawanan rakyat terhadap Agresi Militer yang dilakukan oleh pihak kolonial sedang dilakukan, lagi-lagi Pemerintah RI meng-“interupsi”-nya dengan melakukan langkah diplomasi. Kali ini diplomasi itu dilakukan di Den Haag, Belanda, dalam bentuk Konferensi Meja Bundar [KMB] yang dilakukan pada tanggal 2 November 1949. Dalam kesepakatan yang dihasilkan oleh KMB pihak Indonesia tetap dalam posisi yang lemah. Republik Indonesia Serikat [RIS] harus menanggung utang pemerintahan Hindia Belanda, yang sebenarnya merupakan biaya yang digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda dalam menguasai Indonesia. Tindakan pemerintah kali ini telah menegaskan perang mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh kekuatan massa rakyat tani di berbagai pedesaan di Indonesia, dan yang telah menguasai sentra-sentra perusahaan perkebunan yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Dengan adanya KMB berarti penguasaan atas sentra-sentra perusahaan perkebunan tersebut harus diserahkan kembali ke pihak Belanda.⁶⁵

Ketidaksetujuan atas hasil KMB juga masih diekspresikan dalam bentuk perlawanan, misalnya seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Chaerul Saleh, Syamsuddin Chan, Leimena dan lain-lain. Namun mereka harus menghadapi gempuran dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat [APRIS], gabungan tentara Indonesia dengan tentara Belanda. Hal ini menempatkan kami dalam posisi yang sulit. Chaerul, saya, dan kawan-kawan lainnya sudah tidak bisa lagi berbuat banyak, karena Republik Indonesia Serikat [RIS] itu presidennya

65 Wawancara 26 April 2004.

tetap Sukarno. Kalau kami melawan Sukarno dapat dipastikan bahwa kami akan habis dimaki-maki oleh rakyat. Sukarno telah betul-betul mengakar di hati rakyat.

Seiring dengan berjalannya waktu, kami sebagai kelompok perlawanan yang berangkat dari semangat kaum muda, yang menginginkan kedaulatan negara Republik Indonesia secara penuh, mulai harus memilih bentuk kehidupan baru. Sebagian melanjutkan sekolah yang sebelumnya telah terhenti akibat perang, sebagian lagi ingin pulang kampung menjadi petani, dan seterusnya. Chaerul sendiri dikirim oleh Bung Karno untuk sekolah ke luar negeri.

Saya sendiri akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai anggota TNI. Saya meletakkan jabatan sebagai Komandan Brigade. Apalagi brigade kami yang diterima menjadi TNI cuma satu batalyon. Satu batalyon itu terdiri dari empat kompi. Mengenai posisi dan tanggung jawab saya, saya menyerahkannya pada wakil saya yang bernama Jaya. Berat memang. Tapi keadaan begitu mengecewakan. Saya merasa kesal. Berbagai macam perasaan menghantui saya. Di tengah itu semua, saya berpikir, *ya* sudahlah saya berhenti saja.

Sebagai “Sintesa”-nya

Berkat legitimasi KMB kekuatan modal asing menemukan jalannya kembali ke Indonesia. Tentu saja hal ini mengecewakan saya. Kekecewaan saya makin menumpuk.

Berangkat dari rasa kecewa tersebut saya dengan beberapa kawan pergi ke Jakarta menemui Mohamad Yamin. Kebetulan Mohamad Yamin adalah salah seorang yang menjadi delegasi Indonesia pada KMB. Kali ini, kami datang ke rumah Yamin bukan dalam rangka “berbeda pendapat” seperti sebelumnya, meskipun waktu itu Yamin berada pada posisi pemerintah, sedangkan kami para eks laskar

rakyat merupakan kelompok oposisi. Kali ini, kami ingin datang untuk mendiskusikan kondisi politik terakhir dan bagaimana arah ke depannya. Kebetulan juga di rumah Yamin tinggal kawan kami, Johar Nur, yang waktu itu sedang sakit.

Saya lihat, Yamin punya buku banyak sekali di rumahnya. Kalau ditumpuk mungkin satu setengah meter tingginya. Buku-buku itu disimpan dalam peti besar-besar. Rupa-rupanya selama menjadi delegasi di Belanda, Yamin menyempatkan diri untuk membeli banyak buku. Yamin berkata, “Kalau mau itu buku, buka, dan baca saja sama kamu”. Kami semua *ngangguk* [mengangguk].

Kebanyakan buku-buku yang dibawa oleh Yamin itu berisi tentang masalah-masalah petani. Misalnya buku *Peasant War*, serta buku-buku tentang perang tani di Jerman, tentang perang tani di Afrika Selatan, dan tentang masalah petani di Tiongkok. Pada masa gerilya, buku-buku seperti itu sebenarnya sudah sempat kami baca, namun baru sekilas. Lagi pula buku-buku tersebut kemudian tidak jelas rimbanya karena perang. Baru setelah ketemu Yamin, apa yang dulu kami baca secara sekilas bisa kami baca secara *beneran*.⁶⁶

Setelah melakukan diskusi panjang dengan Yamin atas situasi sosial-politik yang sedang berlangsung berikut prospek ke depannya, kami mulai membaca buku-buku tersebut. Kemudian kami melakukan *rundingan-rundingan* dengan Sidik Kertapati. Pertanyaannya, “Apa yang mau kita kerjakan sekarang? Kita *kan* sudah tersisih. Sepertinya tidak ada lagi tempat untuk kita di Republik ini.” Kendati begitu, semangat kami akan pengabdian kepada bangsa tidak pernah luntur. Semangat inilah yang mendorong kami untuk mencari strategi baru. Saya lalu katakan, “*Nah* tani itu penting. Mayoritas penduduk Indonesia itu *kan* bertani. *Nah*, bagaimana kita mau melihat hal ini?” Sidik lalu

66 Wawancara 10 Maret 2002, 26 April 2005, dan 12 Mei 2000.

berkata, "Bagaimana kalau kita bikin organisasi tani?" Langsung *aja* saya jawab, "Hayo!" Lalu kami pun mendirikan organisasi tani.⁶⁷

Menurut saya bicara pergerakan berarti bicara perjuangan. Sementara itu, bicara tentang perjuangan berarti bicara tentang kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Dalam kasus Indonesia, menurut saya, titik temu dari semua itu adalah masalah-masalah petani. Di negeri ini petani paling banyak jumlahnya. Waktu itu mencapai 80%. Artinya, kalau masalah petani dapat dipecahkan dengan baik akan terpecahkan pula persoalan seluruh bangsa Indonesia.

Akhirnya, melalui beberapa kali diskusi dicapailah sebuah kesepakatan, yaitu membentuk satu organisasi tani yang bernama Serikat Kaum Tani Indonesia, disingkat SAKTI. Ini merupakan pikiran awal untuk menjawab kebutuhan mendirikan organisasi tani. Kami sadar, selama kami berjuang melawan tentara Belanda petanilah yang memberi makan tentara kita. Teori sebab-akibat dipakai di sini. Petani merupakan kelompok mayoritas. Ini "tesa"-nya. Akan tetapi realitas nasibnya tidak baik. Ini "anti-tesa"-nya. Sebagai "sintesa"-nya, dibentuklah organisasi tani.

Dialektika

Dulu pada masa gerilya dalam rangka perang kolonial, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban adalah petani. Begitu juga dengan wilayah garap petani yang berupa lahan pertanian, baik itu sawah maupun ladang. Pada saat berlangsung perang kemerdekaan, sawah-ladang berubah menjadi medan pertempuran. Lebih dari itu petani juga yang menjadi sasaran antara dari perang tersebut. Tanpa disadari, nyawa menjadi taruhan. Tapi jangan remehkan. Ini merupakan

67 Lihat Samsul Ahmad, *Memahami Gerakan Sosial*.

kesadaran dari kaum tani Indonesia. Kaum tani Indonesia saat itu telah menyadari bahwa upaya perubahan harus dilakukan. Mereka itu mendukung pellawanan terhadap kolonialisme. Dukungan kaum tani Indonesia saat itu diwujudkan dengan memberi bekal makanan berupa nasi bungkus beserta air minumnya guna menyambung perlawanan.

Berangkat dari berbagai bacaan—atas buah tangan dari Mohamad Yamin itu tadi—serta bertolak dari berbagai pengalaman di lapangan, berikut keputusan beberapa kali rapat, SAKTI mulai menyusun anggaran dasar dan rencana-rencana kerja organisasi. Program kita berbeda dengan organisasi masyarakat [ormas] taninya PKI, yaitu Barisan Tani Indonesia [BTI] dan Rukun Tani Indonesia [RTI]. Mereka jelas berorientasi ke PKI. Mereka mempunyai program yang waktu itu adalah nasionalisasi tanah. Ini berbeda dengan kami. Kami waktu itu punya tanah untuk kaum tani. Kami belajar dari Tiongkok, Afrika Selatan, dan lain-lain. Petani tidak boleh dipisahkan dari tanah. Kami punya program tanah untuk petani. Berbagai teman seperjuangan yang sudah pulang kampung disambangi. Selain konsolidasi ulang, mereka juga mulai memperbesar organisasi tani.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, para penggagas organisasi mulai menghadapi permasalahan yang bersifat teknis. Misalnya, perlunya tempat berkumpul untuk merumuskan pikiran, alat-alat, mesin ketik, dan lain-lain. Mengingat banyaknya keterbatasan kami, kami berpikir untuk mendatangi seorang senior yang bernama Tabrani Notosudirjo. Tabrani itu orang Partai Murba. Bagi saya, Tabrani adalah salah satu tokoh pergerakan yang mau mengerti cita-cita kelompok laskar ini. Kebetulan saat itu Tabrani sedang menjabat Wakil Walikota di Jakarta. Sebagai seorang wakil walikota tentu saja rumahnya *gede* dan fasilitasnya lengkap. Kami pun *nebeng* [numpang] berkantor di sana.

Guna melancarkan proses pendirian dan pematapan organisasi, disusunlah pimpinan pengurus SAKTI. Dalam rangka memberi penghormatan, Tabrani Notosudirjo diangkat menjadi Ketua Umum. Sidik Kertapati sebagai Wakil Ketua dan saya sebagai Sekretaris Umum.⁶⁸ Pengurus Pusat lainnya adalah Burhan, Sasongko,⁶⁹ Salam, dan Zainal Simbangan.⁷⁰

Dengan menggunakan fasilitas yang diperoleh dari Tabrani itu pengurus inti SAKTI mulai membangun organisasi hingga di tingkat daerah. Tentu saja, pembangunan organisasi di daerah tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki organisasi. Cara yang ditempuh adalah mendatangi dan mengajak kawan-kawan seperjuangan saat gerilya melawan tentara kolonial Belanda. Kami mendiskusikan berbagai permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah untuk kemudian mencari solusi-solusinya. Kemampuan yang kami miliki “dikawinkan” dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Yang harus dicatat adalah bahwa yang namanya masyarakat itu tidak ada yang berdiri sendiri. Semua saling bertautan, entah itu berlawanan atau berhubungan satu sama lain. Semuanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, bila ada persoalan, kita harus melihatnya dengan kembali pada pangkal persoalan itu. Artinya, untuk melihat suatu persoalan, kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana cara berpikir kita. Semua berangkat dari situ, entah kita suka atau tidak suka. Maksudnya berangkat dari bagaimana kita ini berpikir. Apakah dalam berpikir kita ini memakai aturan atau tidak. Kalau kita menuruti setiap pikiran kita, maka tidak akan ada batasnya. Oleh

68 Wawancara 10 Maret 2002, 26 April 2005 dan 12 Mei 2000.

69 Sasongko adalah seorang keturunan ningrat. Raut mukanya mirip dengan Hamengkubuwono IX. Dan ketika Sasongko meninggal dunia, menurut Samsul, jenazahnya dijemput oleh pasukan keraton Yogyakarta.

70 Wawancara 10 Maret 2002.

karena itu, yang namanya pikiran itu harus ada aturan-aturannya. Kita perlu sadar akan pentingnya aturan atas pikiran-pikiran kita, apalagi pikiran-pikiran penting yang menyangkut orang banyak.

Untuk itu, pertama-tama kita harus berpikir untuk menggunakan pola sebab-akibat. Karena suatu sebab maka ada akibat. Tetapi pada gilirannya akibat ini akan menjadi sebab juga, demikian seterusnya. Kedua, kita perlu menggunakan logika. Apa yang kita sebut rasional itu merupakan hasil penggunaan logika. Logika berarti berpikir benar dan lurus. Kalau kita tidak pakai logika akan mustahil bagi kita untuk sampai pada titik yang rasional. Ketiga, kita perlu menggunakan aturan berpikir yang sering disebut sebagai dialektika. Artinya, kita perlu berpikir dengan bertolak dari pembacaan kita atas proses dan dinamika, dan bagaimana semua itu didialogkan. Kalau kita tidak memakai cara berpikir yang demikian, maka dalam berpikir kita bisa ke mana-mana. Di sini terletak bedanya antara seseorang yang kaya dengan pengalaman empirik [pengalaman langsung] dengan mereka yang hanya sekadar mempelajari ilmu pengetahuan.⁷¹

Berangkat dari Petani

Melalui berbagai kegiatan, kami mencoba mengurus kaum tani Indonesia. Dalam situasi tertentu bisa jadi bahwa secara sosial-ekonomi para pengurusnya yang naik ke atas, sementara petaninya tetap di bawah. Mencegah kemungkinan demikian yang kita harapkan saat itu adalah bahwa gerakan-gerakan itu datangnya dari kaum tani sendiri dan dikerjakan bersama-sama dengan petani. Ini konsep dasar kami dalam membangun SAKTI.

Ada beberapa daerah yang kemudian menjadi sasaran untuk pengembangan organisasi SAKTI. Saya sendiri lebih banyak

71 Lihat Samsul Ahmad, *Memahami Gerakan Sosial*.

mensosialisasikan keberadaan SAKTI di wilayah Priangan. Ini merupakan daerah yang sangat saya kenal. Saat gerilya perang kolonial dulu, saya lebih banyak bergerak di daerah ini. Sebagian kawan ada yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Utara. Pengembangan organisasi saat itu dilakukan dengan proses kesadaran yang tinggi. Uniknyanya tidak ada pembicaraan khusus mengenai pendanaan bagi mereka yang harus pergi ke daerah-daerah. Tapi anehnya semuanya bisa jalan. Malah Tom Anwar dan Sakti Alamsyah bisa naik KPM, kapal Belanda, ke Medan. Ternyata kapal itu melancong dulu ke Singapura baru melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Setelah mendiskusikan berbagai permasalahan petani dari berbagai daerah di Indonesia, ditambah dengan hasil dari bacaan apa yang dilakukan petani di beberapa negara itu tadi, akhirnya ditariklah satu kesimpulan bahwa petani tidak bisa dipisahkan dari tanah.⁷² Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai petani kalau ia tidak menggarap sebidang tanah. Sementara itu, sejak era feodal, tanah petani Indonesia sudah terkonsentrasi pada segelintir orang, yakni kaum bangsawan. Ditambah lagi, pada era kolonial melalui *agrarische wet* dan *agrarian besluit* tahun 1870 yang menjadi sumber formal *domeinverklaring*, negara mempunyai hak mutlak untuk menjadikan tanah di negeri jajahan sebagai objek berbagai transaksi negara dengan para pemodal yang membutuhkan tanah untuk investasi agrobisnisnya, entah itu dengan alasan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, entah untuk kepentingan kas negara.⁷³

72 Wawancara 10 Maret 2002, 26 April 2005 dan 12 Mei 2000.

73 Menurut Samsul, setelah kalahnya Diponegoro dan para pendukungnya dalam Perang Jawa (1825-1830), dari tahun 1830 hingga 1870 pihak pemerintah kolonial mempersiapkan dua hal untuk negeri jajahannya: (i) struktur birokrasi, termasuk untuk penataan tanah jajahan; dan (ii) kebijakan politik agraria. Oleh karena itu, begitu hadir *Agrarische wet* bisa langsung dioperasionalkan. Wawancara 26 April 2005.

Oleh karena itu, program SAKTI dari awal adalah tanah untuk kaum tani. Ada banyak orang yang memiliki hak istimewa dari sistem kolonial, yaitu hak *erfpacht* atas nama perusahaan perkebunan milik Belanda. Tanah-tanah tersebut sudah ditinggalkan pemiliknya dan terlantar sejak era fasisme [Jepang], dan rusak akibat perang. Oleh karena itu diperlukan upaya agar tanah-tanah itu dikonversi sehingga menjadi tanah milik dan digarap oleh kaum tani Indonesia. Terlebih lagi, harus diingat bahwa Indonesia sudah merdeka, sehingga warga negaranya berhak untuk memiliki dan mengelola tanahnya sendiri. Dulu melalui berbagai macam rekayasa atas nama peraturan-peraturan yang ada, banyak tanah-tanah rakyat dirampas oleh pemerintah kolonial.⁷⁴ Sekarang tidak bisa lagi.

Inilah yang membedakan program SAKTI dengan organisasi tani lainnya seperti BTI itu tadi, yang memang dari awal merupakan organisasi yang berafiliasi ke PKI. SAKTI berbeda juga dengan RTI yang juga memiliki orientasi ke PKI. Saat itu program politik dari kedua organisasi tersebut lebih mengarah pada nasionalisasi tanah. Arah dari tindakan nasionalisasi adalah memberikan hak kepemilikan tanah ke tangan organisasi atau negara, dengan sistem pengolahan tanah yang terpusat. Tentu saja ini berbeda dengan penataan struktur agraria yang berangkat dari petani itu sendiri.

Tidak Bisa Dibetulkan

Perlahan namun pasti, SAKTI mulai berkembang hingga ke Sumatera Utara, Lampung, dan sebagian Sulawesi. Pelaksanaan program tanah untuk kaum tani semakin gencar dilakukan hingga meletusnya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara tahun 1953. Peristiwa itu sendiri sangat kompleks. Penyelesaian terhadap lahan Perkebunan

74 Lihat Samsul Ahmad, *Memahami Gerakan Sosial*.

Senembah tidak kunjung usai oleh Pemerintah Indonesia. Pihak serikat-serikat tani yang ada mendorong untuk segera dilakukannya penyelesaian. Ini adalah konflik perebutan penguasaan sumber agraria akibat dari sistem kolonial. Akibatnya korban berjatuh, baik dari pihak petani maupun dari pihak aparat kepolisian. Awalnya petani yang mati itu diklaim sebagai anggota BTI, namun belakangan diakui oleh PKI bahwa petani itu adalah anggota SAKTI, namanya Soedarmo. Sebagai Sekretaris Umum SAKTI saya mendapat mandat dari organisasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.⁷⁵

Program “tanah untuk penggarap” mendorong SAKTI semakin berkembang ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 1953, SAKTI mengadakan suatu konferensi nasional petani. Dalam konferensi tersebut Tabrani sebagai Ketua Umum disodori satu pertanyaan yang kira-kira bunyinya begini, “Organisasi kita sudah berkembang. Sekarang sudah mulai ada aksi-aksi kegiatan dari kaum tani sendiri. *Nah* bagaimana dengan Bapak sekarang? Apakah Bapak mau tetap menjadi ketua? Kalau *iya*, konsekuensinya sebaiknya Bapak tidak lagi jadi Wakil Walikota. Sebaiknya Bapak tidak merangkap jabatan. Kalau Bapak tetap menjabat jadi Wakil Walikota, jabatan ketua harus diserahkan kepada yang lain.”

Sodoran pertanyaan tersebut dijawab oleh Tabrani dengan mengatakan bahwa ia tetap memilih menjadi Wakil Walikota Jakarta Raya. Ia juga merasa sudah tua, sehingga perlu ada regenerasi dalam SAKTI. Akhirnya diangkatlah Sidik Kertapati menjadi Ketua Umum SAKTI. Akibat tindakan tersebut Soekarni meledek bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang memang tidak bisa dibetulkan dari dulu.

75 Wawancara 10 Maret 2002, 26 April 2005 dan 12 Mei 2000.

Presiden Sukarno Menengok

Sementara itu, eksistensi organisasi rakyat semakin mendapat tempat dalam proses bernegara di Indonesia. Pada Pemilihan Umum [Pemilu] tahun 1955 saya bersama Armoenanto, Astra, dan beberapa orang lagi sebagai orang-orang non-partai dicalonkan sebagai wakil rakyat, karena memang waktu itu SAKTI belum berafiliasi ke PKI seperti BTI. Tapi tak lama kemudian PKI mengakomodasi kami untuk menjadi calon non-partai sebagai bagian dari PKI. Kami pun maju dalam Pemilu itu. Karena ternyata terpilih kami lantas menjadi wakil rakyat dari PKI.

Berangkat dari sini aktivitas politik saya di wilayah kenegaraan terus berkembang. Saya merasa semakin memiliki peran di pemerintahan, sehingga akhirnya saya menjadi salah satu anggota MUPENAS. Di saat pelantikan menjadi anggota MUPENAS, mereka yang selama itu tidak pernah beres hubungannya dengan saya, ramai-ramai menyalami saya seraya berkata, “Sudahlah akhiri saja *ekstrimis-ekstrimisan*. Sekarang waktunya untuk membangun.” Selain itu saya menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara [MPRS]. Saya diajukan oleh Chaerul Saleh. Pada saat pelantikan MUPENAS, Sukarno memberi ucapan selamat kepada para peserta, termasuk saya. Dia tidak bilang apa-apa pada saya, *wong* dia Presiden. Saya juga hanya bilang “ya”. Subandrio juga memberi ucapan selamat.” “Selamat, Mas Samsul”, katanya. “Terima kasih,” jawab saya. Selanjutnya Leimena juga memberi ucapan, “Selamat Mas Samsul.” Saya jawab, “Terima kasih.” Terakhir datang Chaerul Saleh. Dia tidak memberi ucapan selamat, melainkan mengatakan, “Terima kasih *ya* atas bergabungnya.” Tentu saja ucapan akrab dari seorang sahabat itu saya balas dengan ungkapan persahabatan pula, “*Taik lu!*” Ucapan itu tentu membuat kaget mereka yang dengar, sampai-sampai Presiden Sukarno menengok.⁷⁶

76 Wawancara 10 Maret 2002 dan 26 April 2005.

Menjadi Sekretaris Umum

Saat itu serikat tani makin berkembang. Apalagi Pemilu 1955 telah melahirkan wakil-wakil dari kaum tani. Sebenarnya telah terdapat upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan tani nasional, namun proses menuju ke arah sana selalu mengalami kegagalan. Memang tidak mudah menyatukan organisasi tani yang besar, yang sama-sama memiliki basis pendukung yang kuat.

Bagi BTI sendiri, setelah melakukan fusi dengan RTI tahun 1953, organisasi tersebut makin gencar melakukan pendekatan terhadap pihak pimpinan eksekutif SAKTI. BTI ingin supaya SAKTI mau melakukan fusi dengannya. Namun penolakan dari kebanyakan anggota SAKTI membuat fusi itu tidak segera terwujud. Alasan utamanya adalah perbedaan dalam memandang bagaimana penguasaan hak atas tanah dan pemanfaatannya nantinya mau dilaksanakan.

Rupa-rupanya, pihak BTI tidak putus asa guna terus mendorong terjadinya proses fusi antar kekuatan kaum tani nasional. Ada yang mengatakan bahwa BTI terus melakukan infiltrasi kepada kekuatan SAKTI. Serangkaian pembicaraan antara pengurus BTI dengan Sidik Kertapati sebagai Ketua Umum SAKTI terus dilaksanakan. Pada akhirnya Sidik Kertapati sebagai Ketua Umum SAKTI mulai goyah atas ajakan dari BTI guna melakukan fusi tersebut. Ditambah lagi dengan adanya pidato politik Ketua PKI Aidit tentang masa depan kaum tani Indonesia. Dalam pidato tersebut Aidit mengatakan bahwa tanah itu adalah untuk kaum tani. Begitulah, jadi sama gagasannya. Hal itu kemudian menjadi titik awal untuk dilakukannya fusi. Secara program antara BTI dan SAKTI sudah sama, tidak ada lagi perbedaan. Mulailah Sidik Kertapati, sebagai Ketua Umum, mensosialisasikan gagasan fusi. Kemudian ia mengajak pengurus inti SAKTI yang lain guna membicarakan hal tersebut secara lebih serius.

Para pengurus inti SAKTI pun berkumpul. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Sidik Kertapati, Burhan, Sasongko, dan saya sendiri. Kami berempat mendiskusikan tawaran fusi dari BTI. Burhan menolak gagasan fusi. Barangkali Burhan tidak bisa melupakan masa-masa gerilya selama perang gerilya, di mana Amir Syarifuddin [sebagai orang PKI] menandatangani Perjanjian Renville. Bagi Burhan tindakan PKI saat itu menyakitkannya. Itulah sebabnya, dia tidak lagi mau ikut SAKTI karena mau berfusi dengan BTI. Jadi keluarlah Burhan dari lingkaran kaum tani. Hal serupa juga terjadi dengan Sasongko. Ia melakukan penolakan. Namun demikian, cara yang ia tempuh lebih halus ketimbang caranya Burhan. “Sudahlah aku mau jadi guru kembali,” katanya. Sasongko adalah guru melukis di Taman Dewasa, Yogyakarta. Sebenarnya saya juga menolak tawaran fusi itu, tetapi karena adanya desakan dari Sidik Kertapati akhirnya saya menyetujuinya. Adapun nama yang dipilih setelah fusi tetaplah nama “BTI”.

Kendati sudah dilakukan fusi, hal itu tidak berarti tidak ada dinamika internal pascafusi. Terdapat banyak perbedaan pendapat dan pandangan politik secara internal. Namun demikian, hal itu justru menjadikan organisasi kaum tani semakin besar. Akan tetapi adanya cita-cita membebaskan kaum tani dari warisan feodal dan sistem kolonial sebagai sasaran utama menjadikan dinamika internal bisa mengarah pada cita-cita bersama.

Pascafusi posisi saya tidak lebih dari seorang staf penerangan dari organisasi. Padahal semasa di SAKTI saya adalah Sekretaris Umum. Sekarang saya merasa hanya sekadar menjalankan tugas teknis seperti mengetik surat atau menyiapkan kebutuhan administrasi dari Ketua BTI saat itu, yaitu Sardjono. Ini harus saya terima sebagai bagian dari konsekuensi logis proses fusi dan membantu pilihan karib sejak

masa gerilya, Sidik Kertapati. Pernah suatu ketika saya mengeluh ke Sidik atas kejadian tersebut, namun Sidik hanya menjawab, “Ya sementara. Tunggu konggres.”

Baru pada kongres BTI tahun 1962, saya dipilih menjadi Sekretaris Umum BTI. Saya tidak lagi semata-mata menjadi tukang ketik, *he...he..he...* Ketua Umumnya adalah Asmu Jati Wirosubroto.

Menimbulkan Korban

Mengenai soal agraria ini banyak kejadian yang mengundang tanda tanya bagi saya. Menurut saya, kita tidak bisa mengorbankan kepentingan kaum tani dan kaum buruh atas nama persatuan nasional. Seharusnya persoalan kaum tani dan kaum buruh justru merupakan persoalan yang harus ditangani secara bersama sebagai bangsa. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Misalnya, ketika di Subang, Jawa Barat, Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia [SARBUPRI] dan BTI mengambil-alih suatu perusahaan perkebunan, Chaerul Saleh justru memerintahkan kepada pemerintah daerah melalui radiogram untuk melakukan penangkapan terhadap para petani yang menurutnya anarkis. Karena peristiwa tersebut, beberapa anggota BTI bahkan ditangkap oleh polisi setempat.

Sebagai salah satu pimpinan BTI, saya bersama beberapa pengurus harian BTI mendatangi Chaerul Saleh yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri [Waperdam]. “Kamu itu *apa-apaan?* Kamu pakai perintah untuk menangkap petani-petani,” sergah saya. “Yang benar *aja, gak* ada *gua* kirim itu,” jawab Chaerul Saleh. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Chaerul Saleh mencabut radiogram tersebut, dan memerintahkan untuk membebaskan para petani.

Kendati para petani telah bebas, saya tetap datang lagi untuk menghadap Chaerul Saleh. “Ada apa lagi Sul?” tanya Chaerul Saleh.

”Kamu harus ganti itu kerugian petani yang telah ditangkap. Berapa lama mereka ditahan? Anak dan bini mereka makan apa itu, kalau *gak ngutang* kesana-kemari?” saya berargumen. ”Ah, kamu ini ada-ada *aja*. Di Republik ini apa bisa ada kejadian seperti ini?” jawab Chaerul Saleh. Tidak mau kalah saya langsung memotong, ”Kamu *‘kan* Waperdam. Makanya harus bisa, dan sekaranglah saatnya.” Sebagai kawan seperjuangan Chaerul Saleh hanya bisa mengumpat, ”Sialan *lu*.” Kendati begitu Chaerul mengeluarkan sejumlah uang untuk ganti rugi petani yang sempat ditahan itu. Saya kira ini peristiwa langka dalam sejarah Indonesia, *he...he...*⁷⁷

Selain itu, terdapat pula peristiwa yang terjadi di desa Jengkol, Kediri, Jawa Timur. Peristiwa itu berawal dari adanya konferensi tani di Puncak, Jawa Barat, yang merumuskan akan diadakannya “aksi sepihak”. Aksi sepihak itu bukan tindakan anarkis. Aksi sepihak itu dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria [UUPA] dan Undang-Undang Bagi Hasil [UUBH] tahun 1960. Undang-undang itu sudah lama disahkan, tetapi sepertinya birokrasi pemerintah enggan melaksanakannya. Birokrat kita saat itu masih merupakan kelanjutan dari kalangan feodal. Mereka lebih memilih bersekongkol dengan para tuan tanah daripada membela kepentingan petani. Melihat keengganan tersebut, kami pun melakukan aksi sepihak dalam rangka mendesak agar UUPA dan UUBH segera dilaksanakan secepatnya.

Sementara itu, Presiden Sukarno sendiri mentoleransi aksi tersebut dengan membentuk Pengadilan *Landreform*. Mereka yang terlibat dalam pengadilan tersebut berasal dari berbagai kader ormas tani yang ada. Ada yang berasal dari BTI, PETANI [organisasi kaum tani di bawah PNI], dan lain-lain. Mereka direkrut untuk menjadi

77 Wawancara 10 Maret 2002, 26 April 2005 dan 12 Mei 2000.

anggota Majelis Hakim Pengadilan *Landreform*. Hal ini dilakukan guna memenuhi pelaksanaan Undang-undang *Landreform*. Kebetulan saya dulu ikut dalam kepanitiaan dalam penyusunan rencana Undang-undang *Landreform*.

Akibatnya, gerakan aksi sepihak semakin meluas. Hampir di setiap desa yang merupakan basis PKI dijalankan gerakan tersebut. Kalangan tuan tanah "ramai" sekali menanggapi gerakan tersebut. Terjadi bentrok di beberapa daerah, antara yang mendukung gerakan aksi sepihak dengan kalangan tuan tanah. Bentrok yang paling "ramai" terjadi di desa Jengkol, Kediri. Kejadian tersebut sampai menimbulkan korban dari kalangan aparat kepolisian.

Menjadi Buronan

Peristiwa pagi buta yang berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1965 memang mencengangkan banyak orang. Secara pribadi, kejadian tersebut saya ketahui manakala sedang berada di Bandung. Saat itu saya sedang menjenguk mertua saya yang sedang sakit.

Saya mendengar terjadinya Peristiwa 1 Oktober itu melalui Radio Republik Indonesia [RRI]. Saya juga mendengar pengumuman tentang adanya Dewan Revolusi. Satu persatu nama yang *disebutin* [disebutkan] di berita radio itu saya dengarkan dengan cermat. Ada yang saya kenal, ada yang tidak. Semuanya terasa membingungkan bagi saya. Misalnya Hardojo yang baru saja berhenti sebagai Ketua Umum Central Gerakan Mahasiswa Indonesia [CGMI], namanya masuk menjadi salah satu anggota Dewan Revolusi.⁷⁸ Namun demikian, nama saya tidak disebut. Padahal secara hirarki, kekuasaan saya memiliki posisi politik yang lebih strategis. Saya ini Sekretaris

78 Dalam sebuah wawancara terpisah Hardojo menyatakan bahwa dia juga merasa tidak tahu- menahu tentang Dewan Revolusi. Tiba-tiba saja namanya ada dalam daftar tersebut.

Umum BTI, anggota MPRS yang sekaligus sebagai anggota Badan Pimpinan MPRS, dan juga anggota MUPENAS. Tapi *kok* nama saya tidak masuk dalam daftar anggota Dewan Revolusi? Tentu saja ini kalau yang namanya Dewan Revolusi itu memang benar adanya. Begitu juga dengan banyak elite politik yang seharusnya masuk, tapi ternyata tidak. Begitu juga dengan Amir Machmud juga masuk sebagai anggota Dewan Revolusi, dan seterusnya. Setidaknya ada proses politik yang saya rasakan tidak *nyambung* dengan proses sebelumnya. Hal itu potensial melahirkan kekacauan politik yang luar biasa. Jadi *nggak ngerti* saya.⁷⁹

Kekacauan politik yang luar biasa tersebut mendorong rasa ingin tahu saya untuk segera kembali ke Jakarta. Guna mencari tahu, saya langsung menuju ke kantor MPRS. Namun di sana saya tidak menemukan siapa-siapa. Kantor MPRS juga tiba-tiba kosong, sepi, bahkan mencekam. Padahal saya sangat berharap sesegera mungkin mendapat kejelasan atas peristiwa yang sedang terjadi itu. Tidak satu pun elite PKI yang bisa saya temui. Tiba-tiba saja saya kehilangan kontak dengan para elite PKI seperti Aidit, Njoto, Lukman, dan lain-lain. Saya merasa kehilangan dengan semua kalangan. Suasana menjadi kacau-balau dan membingungkan. *Saking* bingungnya, sampai-sampai saya lupa memarkir jeep pemberian dari Chaerul Saleh yang biasa saya kendarai.

Jadi kalau ada berita pembunuhan orang-orang komunis atau sarjana-sarjana kiri, *wah* saya *nggak* tahu itu. Pokoknya setelah tahun 1965, setelah peristiwa Gerakan Satu Oktober [Gestok] itu terputuslah semua hubungan. Putus komunikasi saya dengan kawan-kawan di MPRS. Putus pula komunikasi dengan orang-orang partai. Suasana memang dibuat sedemikian rupa, antara lain dengan fitnah

79 Wawancara 10 Maret 2002, 26 April 2005 dan 12 Mei 2000.

Soeharto. Sementara itu mahasiswa digiring sama tentara. Dalam situasi demikian, *ya*, pasti kita tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan diri masing-masing.

Soal isu Dewan Jenderal, memang ada. Isu politik ini bukan rahasia lagi. Hampir semua orang dengar tentang isu Dewan Jenderal ini. Apa dikira kita tidak tahu? Menurut informasi, Dewan Jenderal itu mungkin muncul dari rasa tidak puas sama Bung Karno. Namun mereka tidak memiliki solusi yang jelas untuk menjawab ketidakpuasan tersebut. Ketidakjelasan ini menambah kerumitan dalam Peristiwa 1965.

Jadi *gimana ya*? Kita semua jadi terseret tanpa tahu persoalannya secara jelas. Apa persoalan sesungguhnya kita tidak tahu. Mengapa *kok* tiba-tiba begini? Kita sendiri tidak mengetahui latar belakangnya. *Nah*, kalau saya ditanya soal ini tentu saya merasa kesulitan. Jangankan saya, orang partai sendiri pun tidak tahu. Mereka bahkan terserak-serak entah ke mana. Tak diketahui ke mana Aidit, ke mana Njoto, ke mana Lukman.

Pada saat seperti itu, mereka justru berpencar-pencar entah ke mana. Anehnya, tidak ada apa-apa di bawah. Dari sini saja sebenarnya sudah bisa dikatakan bahwa ada yang terlibat, tetapi ada juga yang tidak terlibat; ada yang setuju, tapi ada juga yang *nggak* setuju—atau bagaimana, *ya* saya sendiri tidak tahu merumuskannya. Tapi inilah kenyataan yang harus saya kabarkan. Kenyataan menunjukkan bahwa kita [orang-orang dari partai komunis itu] tidak monolit *ya*? Tidak ada kesatuan sikap tentang peristiwa itu sendiri. Aneh *ya*? Padahal PKI itu katanya sentralistik. Kenyataannya lain.

Tiba-tiba saja juga muncul tokoh baru yang bernama Letnan Kolonel Untung. Siapa itu Untung? Saya sendiri baru dengar nama Si Untung itu. Waktu saya sering berkunjung ke Istana Presiden, saat

saya menjadi anggota MPRS, saya *nggak* pernah dengar itu namanya Untung. Padahal saya banyak kenal sama ajudan-ajudan Presiden Sukarno, seperti Si Guritno, Jatmiko, dan lain-lain.

Di tengah permainan politik yang kacau balau tersebut, tiba-tiba PKI dan *onderbouw*-nya menjadi tertuduh sebagai dalang dari proses politik yang ada. Otomatis sebagai salah satu petingginya, saya juga jadi tertuduh. Setelah kehilangan semua kontak di Jakarta, sambil bersembunyi, saya balik ke Bandung. Saya lalu menjadi buronan. Lagi-lagi saya menjadi buronan di negeri sendiri *ya ha..ha...* Selama di Bandung saya cuma *muter-muter* tinggal di rumah kawan satu ke rumah kawan yang lain. Sampai akhirnya saya *ketangkap* [ditangkap]. Saya lupa persisnya, tapi waktu itu kira-kira akhir Desember 1965—atau malah sudah Januari 1966.

Manusia Memiliki Hati Manusia

Ada cerita yang menarik pada waktu awal-awal jadi buronan. Saya bertemu dengan Rustamadji. Rupanya dia juga menjadi buronan. Pada awalnya dia *kan* anggota Partai Komunis Belanda. Tapi dia mengingkari garis partainya. Waktu Parlemen Belanda menyetujui tindakan polisionil [Agresi Militer 1947 dan 1948] semua faksi setuju. Tapi dia *nggak* setuju [kalau Belanda melakukan serbuan militer itu]. Konsekuensinya, dia harus meletakkan jabatan sebagai anggota Parlemen Belanda. Dia pun pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, dia malah dicurigai. Ia ditangkap, tapi lalu dibebaskan. Kemudian setelah peristiwa Gestok, dia buronan lagi. Saat ketemu saya tanya dia, "Rustam, mestinya kau *kan* di Belanda? Bukan repot begini?" Dia malah menjawab dengan enteng, "Ah Gestapo tentaranya Hitler *aja* tidak berhasil menangkap aku, apalagi intel-intel Melayu bodoh ini." Nyatanya memang ia tidak tertangkap.

Sebenarnya yang berat bagi saya itu adalah keluarga. Ketika mendengar peristiwa itu dan ketika saya menjadi buronan, mertua perempuan saya meninggal dunia. Dia kena serangan jantung. Saya ini menantu yang paling disayangi, begitulah kira-kira. Ketika itu saya sempat datang ke rumah, terus dia meninggal. Ketika saya ditahan, istri saya bekerja di Kantor Berita Uni Soviet di Jakarta. Saya menikah dengan istri saya tahun 1958, setelah berpacaran selama 7 tahun, gara-gara tidak disetujui orang tuanya. Habis mereka menganggap hidup saya ini *nggak* jelas.

Selama menjadi buronan sebenarnya saya menunggu dipanggil, paling tidak sebagai saksi. Tapi saat berlangsungnya pengadilan-pengadilan, saya dianggap tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, saya tidak dipanggil. Pada saat Asmu Jati Wirosubroto dipanggil sebagai Ketua Umum BTI, kemudian Sidik Kertapati sebagai Wakil Ketua Umum, saya tidak dipanggil. Padahal saya adalah Sekretaris Umum. Secara organisatoris *kan* seharusnya saya dipanggil. Akan tetapi, *kok* tidak ada pemanggilan untuk diri saya.

Kalau melihat berbagai publikasi yang ada, saya baca memang kelihatannya Aidit memiliki agenda sendiri. Tampaknya dia mempunyai *support* lain sendiri di dalam PKI. Dia sangat dekat dengan Sjam Kamaruzaman. Saya tidak pernah tahu apa itu urusannya. Pernah suatu kali setelah rapat di Jl Kramat Raya Jakarta [Kantor CC PKI], saya diajak Bung Ketua [Aidit] ke Bandung. Saat melintas di Puncak Pass, Jawa Barat, mobil berhenti dan kami makan. Setelah *kelar* [selesai], Aidit langsung berdiri dan *ngajak* berangkat ke Bandung. Lantas saya tanya soal urusan pembayaran. Aidit langsung menunjuk dengan ibu jari ke belakang dengan mengatakan bahwa ada “Si Boss”. Saya hanya terdiam. *Eh...* belakangan baru tahu kalau “Si Boss” itu adalah Sjam Kamaruzaman. Selain itu disebut belakangan, bahwa ada

yang namanya “Biro Khusus”. Saya tahu soal Biro Khusus dari baca koran. Di koran itu saya juga melihat wajah orang saat di Puncak Pass yang *bayari* kami makan itu.

Pada saat ketangkap, saya langsung dibawa ke Komdak [Komando Daerah Kepolisian] untuk menjalani interogasi. Saya dimintai keterangan atas berbagai aktivitas politik yang saya lakukan. Tentu saja proses interogasi ini luar biasalah. Saya dibentak, dihardik, dimaki, dan sebagainya. Habis pokoknya. Polisi itu datang ke saya atas petunjuk dari seorang kader PKI. ”Merdu” sekali *kan* rasanya? *Ha-ha.....*

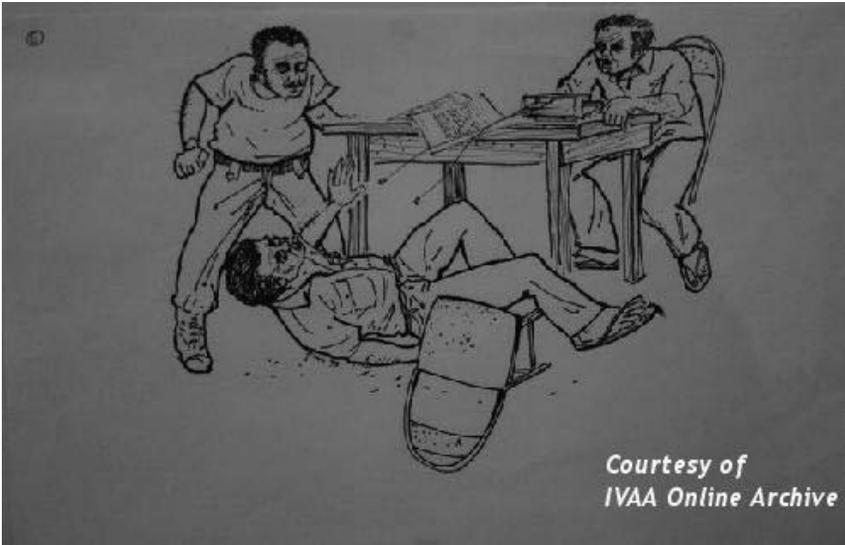
Saat itu Ketua PKI Jawa Barat datang menemui saya di suatu tempat. Dia datang bersama seorang kader lain. Kemudian dia memberi *warning* kepada saya, bahwa si anu ketangkap, si itu ketangkap. Saya agak curiga dan khawatir kalau ada yang ”nyanyi” dan melaporkan tempat pertemuan ini ke pihak polisi. Benar *aja*. Tiba-tiba polisi masuk. Saya langsung ditangkap. Tangan saya langsung diborgol, sementara kader tersebut berdiri di pintu sambil menyaksikan semuanya berlangsung. Terus *deh* saya dibawa ke Komdak. *Nah*, di Komdak itulah, kader PKI yang sama ikut polisi menginterogasi, memaki-maki. Bahkan lebih kejam! Tidak sedikit *lho* kader PKI yang melakukan seperti itu. Ini karena mereka tidak kuat dengan teror dan kekerasan yang mereka terima. Tindakan mementingkan diri sendiri dan mencari aman ini banyak sekali terjadi pada saat itu. Hal itu dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh seorang kader partai yang tidak tahan dengan teror dan kekerasan yang sedang menimpanya.⁸⁰

80 Kendati demikian, sebagai seorang pemimpin, Samsul tidak bisa lepas tangan bila menghadapi kader seperti itu. “Kalau kader jelek kita harus pula tanggung jawab sebagai pemimpin. Tidak bisa sebagai pemimpin manakala kadernya bagus, langsung menyatakan sebagai kadernya, namun kalau kadernya jelek lepas tangan,” kata Samsul. Wawancara 26 April 2005.

Saat di Komdak, penahanannya dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari ruang isolasi yang satu ke ruang isolasi yang lain. Ada satu kejadian yang barangkali saya anggap aneh. Pada saat saya mau dipindahkan dari penanganan oleh polisi ke tentara, ada seorang polisi bernama Beni. Dia itu anggota tim pemeriksa yang menahan saya. Dia bilang, "Hai *you* boleh keluar sana. Sebentar lagi kita *kan* mau pisahan. Sekarang kita makan-makan bersama dululah." Segera dia minta izin ke kepala polisinya, yang saat itu dijabat oleh Bondan Guntowaru. Kepala Polisi itu mengizinkan. Kami pun pergi ke restoran yang pemiliknya saya kenal.

Sembari makan bersama mereka ngomong, "Maafkanlah kami. Kami ini hanya menjalankan tugas." Pernyataan tersebut langsung saya balas, "Kamu tidak usah minta maaf sekarang. Karena saat ini apa yang kamu omongkan ini adalah pembangkangan. Kita sama-sama pembangkang. Saya sangat percaya kamu ini adalah manusia, dan manusia itu memiliki hati manusia." Maka nangislah mereka itu. Selanjutnya saya tanya lagi, "Nanti setelah menangkap saya, kamu akan naik pangkat?" Mereka menjawab, "Iya." Mereka bilang ada yang naik dua tingkat, ada pula yang tiga tingkat dari sebelumnya. "Baguslah kalau *gitu*," kata saya. "Saya tidak dendam pada kalian, karena kalian menjalankan tugas. Saya tahu *kok* kalau kamu itu terpaksa sekali melakukan semuanya ini. Terpaksa, walaupun senang juga karena bisa sedikit-sedikit *gebukin* orang." Kami lantas ketawa bersama.

Setiap selesai diperiksa saya selalu digotong. Tentu saja, karena *kan* tidak kuat menghadapi siksaan. Kalau perkara disiksa rasanya tidak ada akhirnya. Saya selalu bertanya dalam hati, kapan *gua* [saya] mati? Jadi *ya* buat saya, itu sudah lewat. Kita tidak berharap hidup untuk bisa hidup di hari yang lain. Inilah penderitaan.



Para tahanan sering diinterogasi dengan penuh kekerasan (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Pulau Buru

Setelah dari Komdak, saya kemudian dipindah ke tahanan Kebon Waru. Ada satu kejadian yang mengharukan dalam hidup saya di situ. Saat di penjara Kebon Waru keluarga masih bisa menjenguk, termasuk Bapak Mertua saya. Kali ini Bapak Mertua saya datang bersama istri saya. Bapak Mertua saya memberi *support* yang tinggi pada saya. Bahkan Bapak Mertua sempat berpesan kepada istri saya untuk tetap setia menunggu. “Kamu tunggu suamimu sampai keluar,” katanya. Padahal dulu pada masa pacaran yang mencapai 7 sampai 8 tahun, kami sangat susah mendapatkan restu dari dia.

Setelah ”puas” di Kebon Waru, saya dibawa ke Nusa Kambangan. Selanjutnya saya dibawa ke tempat pembuangan Pulau Buru. Saya berada dalam tahanan Orde Baru kira-kira hampir 15 tahun. Tahu sendirilah kehidupan di Pulau Buru. Informasi yang masuk tentu

saja berita-berita yang sesuai dengan kepentingan pemerintah Orde Baru. Kendati begitu mendengarkan berita tersebut hanya untuk mengetahui apa yang sedang dilaksanakan pemerintah Orde Baru kala itu, termasuk kalau ada tamu datang dari luar. Tentu saja para tahanan sudah dipersiapkan cara menyambut tamu dengan baik, cara *omong* dengan tamu, dan “tata krama” lainnya.

Beranjak ke Rekonsiliasi

Buat saya sekarang ini, itu semua sudah lewat. Ini bukan problem pribadi saya. Ini problem kita sebagai bangsa. Sekarang kita tidak hidup untuk hari yang lain. Apa yang jelek kemarin kita tinggalkan *aja*. Karena yang terpenting bagi saya adalah kebenaran yang harus diangkat. Tapi ini semua konsep saya *lho* ya?

Kebenaran yang saya bayangkan adalah kebenaran yang objektif. Kita harus mampu membaca kenyataan seperti kenyataan itu sendiri. Jangan ditambah-tambah dengan cerita lain. Jangan dikurang-kurangi. Pokoknya jangan diapa-apakan lagi. Biarlah seperti kenyataan itu sendiri. Dan itulah “kebenaran”. Memang kebenaran itu banyak versinya. Masing-masing kepala orang berbeda. Banyak filsuf yang telah merumuskan masalah kebenaran ini. Tapi menurut saya, kebenaran itu adalah peristiwa yang tidak perlu dikurangi, ditambah, dan lain-lain.

Dari kebenaran yang objektif itu baru bisa kita merumuskan apa itu keadilan. *Nah* apa itu yang dimaksud dengan keadilan? Adil terhadap korban, adil terhadap pelaku. Keadilan seperti saya katakan, semua itu milik orang. Sama seperti yang telah saya katakan tentang kebenaran. Kepada pelaku, kita juga harus adil. Kalau salahnya 10 kilo jangan diadili lebih dari itu. Tindakan itu harus dihindari. Dari kedua hal itulah baru kita bisa beranjak ke rekonsiliasi.[]



Setelah menunaikan kerja paksa, para Tapol membersihkan blok-blok tahanan (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Setiap Orang Merasa Ketakutan

Pengantar

*NARASI penuh informasi menarik di bawah ini adalah narasi yang disampaikan oleh seorang mantan Tahanan Politik di Pulau Buru, Maluku, dengan nama samaran **Al Capone**. Nama samaran ini merupakan hasil pilihannya sendiri, karena semasa di Pulau Buru, teman-temannya—entah mengapa—memang suka memanggil dia “Al Capone”. Narasinya sudah kita singgung sedikit di awal buku ini.*

Ia berasal dari keluarga penjaga-pasar yang sangat sederhana di Yogyakarta. Sebagaimana kita bicarakan di depan, usianya baru 19 (sembilan belas) tahun ketika pada tanggal 12 Desember 1965, ia ditangkap dengan tuduhan yang tidak jelas. Setelah mengalami penahanan di dua tempat yang berbeda di Yogya, ia kemudian dipindahkan ke penjara Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, untuk selanjutnya dibuang ke Pulau Buru, jauh di bagian timur Indonesia. Di Pulau Buru, ia dan teman-temannya mengalami banyak tekanan dan siksaan. Sebagian temannya bahkan tewas dibunuh oleh para petugas di depan matanya. Karena tuduhan melakukan “gerilya politik” ia dimasukkan ke dalam suatu kamp khusus (Kampsus) bersama banyak tahanan lain.

Merupakan hal yang luar biasa bahwa Al Capone tetap ingat akan banyak hal tentang Pulau Buru hingga ke detil-detilnya. Bahkan sampai nama masing-masing dari 123 Tapol penghuni Kampsus Jiko Kecil,

lengkap dengan asal-usul, alias, profesi sebelum ditangkap, serta beberapa catatan rinci tentang mereka. Dengan jelas pula ia mengingat dan menggambarkan bagaimana hari-hari terakhir sebelum pembebasannya dari Pulau Buru, berikut upacara pembebasan itu sendiri di Semarang. Semua itu ia ingat dan dengan jernih, ia gambarkan kembali lebih dari 40 (empat puluh) tahun setelah peristiwanya terjadi.

Menarik untuk mencatat bahwa meskipun telah menjadi korban ketidakadilan, Al Capone tidak sedikit pun memiliki rasa dendam. Ia lebih suka mengingat hal-hal yang menyenangkan tentang periode gelap itu. Tentang saat-saat menjelang perjalanan pembebasannya dari Pulau Buru ke Pulau Jawa, ia tulis misalnya, “Diriku sangat gembira ketika mendengar peluit kapal berbunyi nyaring, pertanda perjalanan panjang akan segera dimulai.” Di lain pihak ia merasa gundah sebab belum tahu bagaimana kalau nanti ia kembali ke realitas masyarakat padahal ia akan menyandang cap sebagai mantan Tahanan Politik. Toh, ia tidak putus asa. Imanya telah membuat dia kuat dan tetap optimis, “Kini saatnya semua itu mencair kembali. Kini saatnya untuk berkumpul lagi. Kiranya semua ini hanya kehendak-Nya. Amien...”

Aslinya naskah ini ditulis tangan dalam beberapa tahap, berdasarkan permohonan dan penjelasan dari peneliti. Semuanya ditulis murni berdasarkan ingatan. Demi menghormati dan tidak menyinggung pihak-pihak yang dibicarakan dalam narasi ini, dengan sengaja sejumlah nama disamarkan.

OLEH orangtuaku aku diberi nama “S”. Aku adalah salah satu anak dari sembilan bersaudara. Bapakku seorang penjaga pasar Beringharjo, Yogyakarta, yang sudah bekerja di sana sejak zaman Belanda dulu. Di lingkungan masyarakat, Bapak sering dipanggil dengan sebutan

“Tondho Pasar”. Sedangkan Ibuku hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Namun demikian, semenjak Bapak meninggal dunia pada tahun 1961, Ibuku bekerja sebagai buruh di pasar, karena ia harus menanggung tiga orang anak yang masih tinggal bersamanya, termasuk diriku.

Rumahku ada di pinggiran bantaran Sungai Code. Tepatnya di Kampung Ledhok Ratmakan, di wilayah Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Dulu kampung itu disebut dengan “Mantri Pamong Projo”. Pada waktu meletusnya Peristiwa G30S/1965 umurku baru 19 (sembilan belas) tahun.

Awal Perjalanan Panjang

Aku ditangkap atau “*diciduk*” pada tanggal 21 Desember 1965 di rumahku oleh aparat beserta massa. Lalu diriku dibawa atau digiring ke Keamanan Militer Kota [KMK] atau sekarang disebut “KODIM” yang terletak di Jalan P. Mangkubumi, sebelah utara pintu Stasiun Kereta Api Tugu, Yogyakarta. Di sini aku diinterogasi oleh aparat setempat. Dalam proses tersebut pukulan demi pukulan pun bersarang di wajah dan di sekujur tubuhku. Untuk selanjutnya, aku beserta teman-teman yang lain sekitar kurang lebih 25 orang jumlahnya dikirim ke Benteng Vredenburg Yogyakarta, dulu markas Batalyon 438. Di dalam rombongan yang berjumlah lebih kurang 25 orang itu terdapat dua orang wanita, yakni:

1. Mbak Suhartinah dari Prawirodirjan, yang sekarang menjadi mertua dari Bpk. Agus Gudadi⁸¹ dari Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta.

81 Pengurus LPRKROB/Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru di Yogyakarta.

2. Mbak Walbi Rahayu dari Kadipaten Wetan Kecamatan Kraton, Yogyakarta.

Yang menjadi DanKam (Komandan Kamp) dari “Kamp Benteng” waktu itu adalah Mayor Infantri Durdjani. Di situ diberlakukan aturan-aturan layaknya aturan-aturan militer. Sebagai contoh, istilah Ketua Kelompok diganti dengan istilah DanTon alias Komandan Peleton.

Pada saat itu, Kamp Benteng dihuni para tahanan korban Tragedi '65 berjumlah 41 peleton tahanan laki-laki. Sedang setiap peletonnya terdiri dari 40 orang. Tahanan laki-laki di tempatkan di sebelah barat tahanan wanita. Pembatasnya hanya berupa pagar kawat berduri dengan dilapisi *gedheg* [dinding dari anyaman bambu, ed.]. Kami para tahanan hanya diberi makan satu kali sehari. Itu pun hasil kiriman para penjaga penjara Wirogunan dan wujudnya *grontol* [rebusan jagung lepas, ed.] dengan porsi yang amat minim—bila dihitung jumlahnya lebih kurang hanya 80 butir jagung.

Pada tanggal 25 Desember 1965 kami diberitahu bahwa kami akan di-*screening* oleh Resimen Para-Komando Angkatan Darat [RPKAD] yang saat itu berada di bawah pimpinan Letkol Sarwo Edhi Wibowo. Akan tetapi dalam kenyataannya yang kami terima bukan *screening* melainkan penyiksaan yang kejam serta keji dan tak manusiawi.

Dalam waktu yang singkat selama di Benteng [Kamp Benteng Vredeburg] berat badan kami para korban Tragedi '65 banyak yang merosot sekali. Bahkan banyak di antara kami yang terjangkit penyakit *Hongerodim* alias “HO” yakni penyakit busung lapar. Semua itu terjadi karena adanya pelarangan dari DanKam, yakni bahwa para tahanan tidak boleh di-*bezoek* [dikunjungi] atau dikirim makanan oleh keluarga korban. Pada bulan Februari 1966 terjadi pemanggilan untuk pertama kalinya di Benteng. Tetapi anehnya pemanggilan tersebut dilakukan

pada waktu malam hari. Dan yang sangat mengejutkan bagi kami adalah mereka yang terpanggil diberi sebuah tanda semacam *peneng* [semacam tanda pengenalan, ed.] yang dikenakan di leher masing-masing. Menurut firasat kami, mereka yang diberi tanda itu akan dibantai, tapi entah di mana. Untunglah, kiranya Tuhan masih melindungi diriku sehingga pada saat itu aku tak dipanggil.

Pada pertengahan bulan April 1966 aku dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan [LP] Wirogunan, masih di Yogyakarta. Di sini DanKam-nya adalah Serma Sudarman, orang dari Prawirodirdjan, Gondomanan. Sebagai Direktur LP Wirogunan adalah Romli. Tugas pengawasan para sipir penjara dibantu oleh para napi [narapidana]. Selama berada di LP Wirogunan ini sedikit demi sedikit aku bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Pada saat yang sama keakraban antar teman pun mulai terjalin erat, baik itu dengan teman dari luar kota maupun dari dalam kota Yogya. Bahkan dengan teman-teman dari luar daerah pun telah terbangun baik dan persahabatan bertumbuh mekar. Di penjara itu diberlakukan apa yang disebut “hukuman kolektif” yang berarti “jika salah satu tahanan berbuat kesalahan, semua tahanan akan dikenakan hukuman”. Hal itu mendorong kami para korban saling menjaga sebab kami merasa senasib, penderitaan, dan seperjuangan. Kami para Tahanan Politik (Tapol) hanya mengenal “Tiga B” atau “3B” yaitu “Buang, Bui, dan Bunuh”. Ada sebagian kecil dari kami para korban yang dipekerjakan di Wirogunan ini, semisal di Los Sepatu, Los Kulit, dan Los Tukang Cukur dan lain-lainnya. Mereka yang dipekerjakan itu mendapatkan jatah ransum atau makan dua kali sehari. Sedangkan kami yang lain hanyalah menganggur saja, cuma menunggu makan sekali untuk setiap harinya. Waktu itu ada ketentuan dari DanKam bahwa setiap keluarga Tapol ’65 diharuskan menyetorkan beras sebanyak 10 kilogram atau

kalau mau dapat menggantinya dengan uang sebesar Rp 25,- pada tahun 1967. Keluarga yang tak bisa setor baik beras maupun uang tidak diperbolehkan *bezoek* maupun mengirim makanan.

Jadi setiap bulannya keluarga para korban ini telah dibebani beras 10 kg atau uang Rp 25,- per bulan. Dalam hati kami bertanya-tanya, adakah satu negara yang menahan para Tapol negara tersebut tanpa memberikan makan bagi yang ditahannya? Saya kira belum ada. Yang ada *ya* hanya di negara tercintaku ini, negara yang disebut-sebut sebagai Negara Pancasila—sedemikian Pancasilaisnya sehingga para penguasanya pada waktu itu, yaitu para penguasa Orde Baru, begitu kejam.

Menjelang bulan Agustus 1966, teman-temanku mempunyai inisiatif untuk menyongsong hari kemerdekaan RI yang ke-21 dengan mengisi kegiatan berupa lomba baca puisi dan menyanyi. Selain itu, juga akan diadakan sebuah pertunjukkan drama serta ketoprak. Inisiatif tersebut ternyata mendapat respon baik dari aparat setempat ketika kami melapor untuk minta izin. Dengan demikian, terlaksanalah kegiatan itu, dan hasilnya pun memuaskan. Bahkan para sipir pun berharap diadakannya malam hiburan serupa setiap bulannya. Banyak di antara sipir-sipir ini yang menyukai, menggemari kesenian ketoprak. Di antara kami para korban banyak yang dulunya merupakan pemain ketoprak “Kridomardi”. Mereka itu antara lain Bapak Sasmito, Bapak Siswadi, Bapak Tjokro Djadi, Bapak Sasto Siwi, Bapak Rachmad, dan masih banyak lagi. Tampaklah meski pelan namun pasti, kami mendapat kelonggaran-kelonggaran yang sangat berarti bagi kami. Dan meskipun setiap harinya kami hanya makan *grontol* dan sayur kobis, hati kami selalu merasa riang-gembira. Untuk menghibur kami, salah seorang dari kami yaitu Bapak Saptopriyo,

bekas dosen ASMI yang mencoba menciptakan lagu-lagu. Salah satu di antaranya adalah lagu berikut ini.

Cadong

Tempo: cha cha

*Riang hatiku kawan
Dengar pluit berbunyi
Karena makan
Nasi jagung*

*Ayo kita keluar
Kita antri teratur
Jangan sampai
Kena pukul*

*Reff: Nasi Jagung kawanku
Sayur kubis, sayurnya
Kita ganyang kawanku
Sampai habis*

*Janganlah kau termenung
Jangan berhati murung
Karena makan
Nasi Jagung*

Beliau ini berasal dari Brontokusuman di wilayah Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, tepatnya di pertigaan jalan menuju Imogiri atau Jalan Sisingamangaraja. Berikut ini saya sebutkan lagu-lagu karya beliau.

1. *Mawar Merah* (jenis: langgam kroncong)
2. *Lusi* (jenis: langgam kroncong)
3. *Susi* (jenis: langgam kroncong)
4. *Romantika* (jenis: langgam kroncong)

5. *Di Kala Sinar Bulan Purnama* (jenis: langgam kroncong)
6. *Suratku* (jenis: hiburan)
7. *Cadong* (jenis: cha-cha, seperti kusebut di atas)
8. *Bertamasya* (jenis: cha cha)
9. *Cipayung* (jenis: waltz)
10. *Berat Jalan* (jenis: hiburan)

Waktu itu Gedung Perpustakaan Jefferson atau *Jefferson Library* yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di depan Pasar Kranggan, Yogyakarta, dijadikan tempat pemeriksaan bagi kami para korban Tragedi '65. Tempat itu sekaligus dijadikan sebagai markas para interogator yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, serta aparat dari Kodim, dengan dibantu pihak Kecamatan serta Ormas (organisasi masyarakat), dan Orpol (organisasi politik) setempat. Pada waktu itu, tahun 1965, setiap orang pasti merasa ketakutan. Mereka takut sekali apabila dirinya akan *diciduk*, ditangkap, atau dituduh sebagai orang-orang PKI. Waktu itu nyawa seekor anjing lebih berharga dibanding nyawa seorang PKI. Tak mengherankan di masyarakat lalu tumbuh rasa curiga satu sama lain, di antara mereka sendiri. Dari sikap saling curiga ini lahirlah apa yang disebut dengan “fitnah”. Di sana-sini terjadi fitnah-memfitnah. Akibatnya para korban Tragedi '65 ini tidaklah mutlak terdiri dari orang-orang PKI saja. Ada yang menjadi korban hanya karena soal dendam pribadi atau rasa sentimen saja. Hal ini terbukti dari fakta bahwa di dalam Kamp ada juga orang-orang dari PNI dan lain-lainnya.

Dan memang seperti itulah yang diharapkan dari pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto. Oleh pemerintah, sengaja masyarakat dibuat tidak tenang dan tidak tentram. Di mana-mana, baik di kota maupun di daerah, muncullah para “Petruk” alias “Tukang Tunjuk”.

Menjadi “Orang Buangan”

Pada bulan Juli tahun 1969 di penjara Wirogunan telah terjadi pemindahan tahanan secara besar-besaran. Akan tetapi dari kami belum tahu persis ke mana kami akan ditempatkan atau dipindahkan.

Ternyata kami dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk itu pupuslah harapanku untuk dapat bertemu orangtua beserta keluargaku. Kami diberangkatkan dari Wirogunan saat menjelang subuh, dengan diangkut bus. Kami sampai di pelabuhan “Wijaya Kusuma” Cilacap pukul 8.00 pagi WIB, langsung diturunkan di dermaga tersebut dengan disuruh berjongkok dengan kedua tangan diletakkan di kuduk, di bawah todongan bedil para “Polsus”, yakni Polisi Khusus Nusa Kambangan. Dari pelabuhan ini kami lalu diangkut dengan kapal “Anjing”, yakni kapal pengangkut para tahanan yang akan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Di Pulau Nusa Kambangan ini ada pelabuhan, Pelabuhan “Sodong” namanya. Dari “Sodong” kami lalu dimasukkan ke dalam penjara. Aku ditempatkan di penjara “Gliger”. Di Pulau Nusa Kambangan ini ada penjara yang berjumlah 9 buah Lembaga Pemasyarakatan (LP) alias penjara. Masing-masing adalah:

1. LP Besi
2. LP Batu
3. LP Gliger
4. LP Permisan
5. LP Limus Buntu
6. LP Nirbaya
7. LP Karang Tengah
8. LP Karang Anyar
9. LP Kembang Kuning

Menurut info dari salah seorang eks-sipir penjara yang bernama N.K., teman para korban Tragedi '65, panjang Pulau Nusa Kambangan ini hanya lebih kurang 27 km, lebar kurang lebih 7 km saja. Kegiatan kami di sini hanya menerima penyuluhan atau "Santiaji" di bidang kerohanian, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Menurut penjelasan dari para petugas pemberi Santiaji, kami di Nusa Kambangan hanya bersifat sementara. Nantinya kami akan ditempatkan di suatu lahan, di mana lahan tersebut akan diberikan sebagai milik sendiri, atau semacam transmigrasi. Namun demikian, para petugas tersebut tak mau menyatakan tentang lokasi lahan itu.

Dan ternyata ucapan petugas tersebut menjadi kenyataan. Pada bulan Agustus tanggal 15 tahun 1969 telah dilaksanakan pengiriman Tapol dalam Periode I, yang jumlahnya terdiri dari kurang-lebih 2.000 orang dan diangkut dengan Kapal Motor ADRI XV.⁸² Namun demikian, kami semua tak mengetahui ke mana tujuan kapal tersebut, atau mau ditempatkan di mana teman-teman kami itu. Yang kami jadi tahu adalah bahwa penjara Nusa Kambangan tampaknya hanya merupakan sebuah tempat transit saja.

Selama berada dalam masa penantian ini salah seorang temanku yang bernama Suyanto alias "Thole" dari kampung Tukangan wilayah kecamatan Danurejan, Yogyakarta, menciptakan sebuah lagu yang berjudul *Kampung Laut Tanggo*. Demikian bunyinya.

82 Kapal Motor Angkatan Darat Republik Indonesia XV adalah kapal berbobot mati 3.500 ton, apkiran dari Perang Dunia II, yang pada bulan Agustus 1969 digunakan untuk mengangkut para tahanan politik Orde Baru korban Tragedi '65 ke pembuangan di Pulau Buru, Maluku. Lihat Hersri Setiawan, *Kamus Gestok* (Yogyakarta: Galangpress, 2003).

Kampung Laut Tanggo

*Mari kawan 'nuju Kampung Laut
Dulu jalan hutan bako-bako
Ayu dayung sampan ramai-ramai
Lalu atas air liku-liku*

*Reff: Bambu-bambu rumah perkampungannya
Terapung air indah nian nampaknya
Prahu-prahu nelayan hidup tenang
Gereh, udang, terasi hasil yang utama*

*Kampung laut, kampung nelayan
Itu hanya-itu hanya kampung laut*

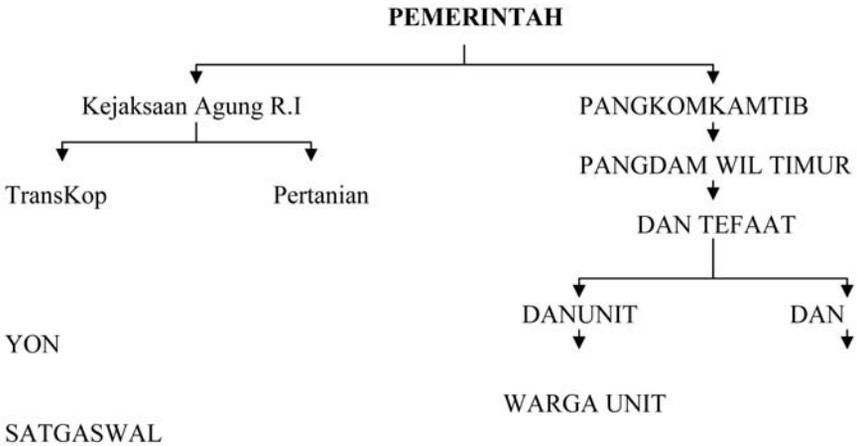
Selain itu, dia juga menciptakan sebuah tarian yang berjudul “Tari Layang-layang”. Tarian serta lagu ciptaannya sangat populer di kalangan para korban. Acap kali dipertontonkan, dipertunjukkan dalam acara kesenian. Tetapi hingga kini saya tak tahu keberadaan teman tersebut. Ketika kakaknya meninggal dunia pada tahun 2008 teman tersebut juga tak terlihat olehku. Sementara itu, aku berada di Nusa Kambangan kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya, aku dikirim ke Pulau Buru sebagai bagian dari Periode atau Gelombang Kedua. Tanggal 26 september 1969, aku sampai di Pulau Buru, Ambon, Maluku.

Lahirnya “BAPRERU”

Pulau Buru merupakan tempat terakhir yang dipilihkan oleh rezim Orde Baru untuk kami para korban Tragedi ‘65. Oleh Orde Baru, Pulau Buru dijadikan sebagai “Tempat Pembuangan Akhir” atau TPA⁸³ bagi para korban Tragedi ‘65. Mandat, kewenangan serta

83 Istilah TPA atau Tempat Pembuangan Akhir biasanya dipakai untuk mengacu tempat pembuangan akhir bagi sampah-sampah di perkotaan di Indonesia.

pelaksanaannya oleh rejim Orde Baru diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI yang Ketuanya pada waktu itu adalah Ali Said, S.H. Selanjutnya Kejaksaan RI berkoordinasi dengan Pangkoptamtib atau Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang saat itu dipegang oleh Jenderal Sudomo, serta dengan instansi yang terkait seperti Kementerian Transkop (Transmigrasi dan Koperasi) dan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, maka pada tahun 1969 terbentuklah suatu badan yang mereka sebut “BAPRERU” atau Badan Pelaksana *Resettlement* dan Rehabilitasi Buru.



Gambar Sketsa lahirnya “Bapreru”

Petugas keamanan dan pengawalan diambil dari territorial Kodam Pattimura dengan Batalyon 731, 732, dan 733. Pulau Buru dengan ibukota Namlea ini termasuk wilayah Maluku Utara. Pada tahun 1969 Komandan Tempat Pemanfaatan (Tefaaf) Pulau Buru dijabat oleh Mayor Corps Polisi Militer [CPM] Rusno. Ia menjabat dari tahun 1969 hingga tahun 1971.

Setelah formasinya tertata dan Pulau Buru sudah dinyatakan siap untuk menampung para korban Tragedi '65, secara berkala dan

berangsur-angsur para Tapol-pun dikirim ke sana. Dengan begitu, genaplah sudah pulau Buru sebagai “TPA” bagi para korban Tragedi ’65. Dengan begitu pula, nama Pulau Buru menjadi tersohor ke seluruh permukaan dunia.

Menginjak “Tanah Tak Terjanji”

Kami selalu dipindahkan dan dipindahkan bagai kotoran yang berbau busuk, menjijikkan. Kami ditendang lalu dibuang. Agar hati kami tak lagi tenang. Demikian kira-kira jalan pemikiran penguasa saat itu terhadap kami para korban Tragedi ’65.

Pada pertengahan bulan September 1969 diriku betul-betul meninggalkan Pulau Nusa Kambangan, sebagai bagian dari pengiriman tahanan Gelombang Kedua. Jumlah yang termasuk dalam Gelombang Kedua ini kira-kira 2.500 orang. Pemberangkatannya dimulai pada pukul 16.00 WIB dengan naik kapal ADRI XV seperti saya sebut tadi. Untuk pengawalannya dipimpin oleh Kapten Yoes Padaga dari Kostrad⁸⁴ RPKAD. Pada awalnya perjalanan baik-baik saja. Tetapi ketika memasuki hari yang ke-4, kami merasa adanya ketidakberesan daripada kapal ADRI XI ini. Tetapi kami semua tak dapat mengerti apa yang telah terjadi, disebabkan kami berada di dalam palka yang berada dalam keadaan terkunci. Satu-satunya yang kami ketahui hanyalah terdengarnya suara kegaduhan di atas dek saja. Tak lama kemudian barulah kami ketahui apa yang terjadi berkat adanya pemberitaan dari atas kapal tersebut. Berikut adalah lebih kurangnya bunyi pemberitaan tersebut.

Telah terjadi suatu kebakaran kecil pada ADRI XI, namun berkat kesigapan dari para petugas semuanya segera dapat diatasi. Untuk sesaat, di antara kami saling pandang, memandangi apa yang baru

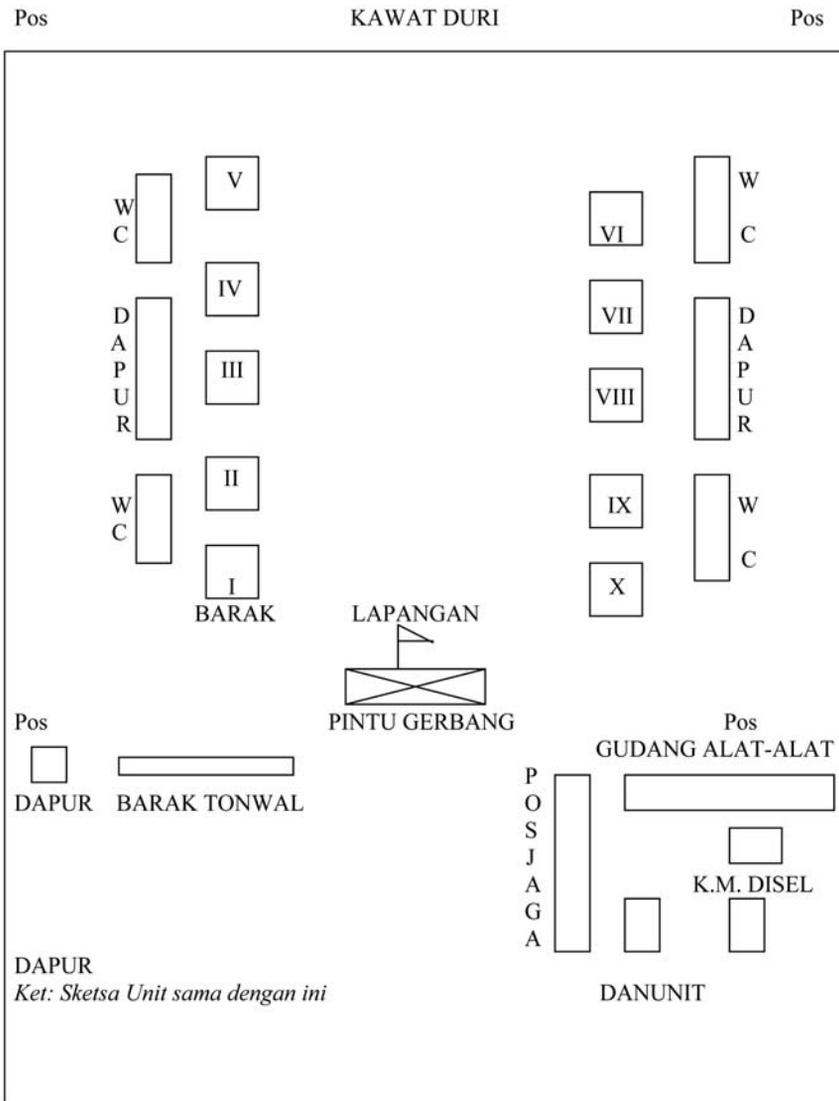
84 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat.

saja terjadi. Menjelang sore ADRI XI lalu berlabuh di Pelabuhan Makassar untuk mengisi bahan bakar. Keesokan harinya barulah kami melanjutkan perjalanan. Setelah memakan waktu 10 hari 10 malam, sampailah kami di tempat yang dituju. Namun demikian, kapal ADRI XI tidak dapat merapat di pelabuhan. Kemungkinan alasannya menyangkut masalah *security*. Kami pun lalu diangkut dengan kapal-kapal kecil jenis kapal pendarat atau *landing craft*.

Sesampainya di daratan, baru kami ketahui bahwa kami berada di Pulau Buru pada tanggal 26 September 1969. Pelabuhan itu bernama Namlea, Buru Utara, Maluku Utara, Ambon. Dari dermaga ini kami langsung dinaikkan ke truk dan menuju ke suatu lokasi bernama Transito Jiko Kecil.

Sketsa Gambar “Transito Jiko Kecil”

Berikut adalah sketsa gambar Transito Jiko Kecil sejauh aku ingat.



Di transito ini kami diberitahu bahwa nantinya di tempat yang baru itu kami akan disuruh mengerjakan tanah yaitu bertani dan berkebun, sedang hasilnya nantinya untuk kami para warga. Untuk itu di sini kami diberi petunjuk-petunjuk soal pertanian dan perkebunan secara benar. Ternyata dalam tempo kurang lebih 3 minggu kami dikirim ke unit-unit, diangkut dengan kapal *landing craft* lagi. Waktu itu transportasi darat belum ada, sehingga kami menggunakan jalur air untuk sampai ke unit-unit. Sungai Wayapo adalah satu-satunya sungai sebagai alternatif kami. Selain dalam, sungai itu juga cukup lebar. Setelah tiba di muara Sungai Wayapo, kami melihat satu perkampungan nelayan suku Bugis yang disebut perkampungan “Kaki Air” dan kami pun semakin masuk ke wilayah pedalaman. Perjalanan ini sungguh mengasyikkan sekali sebab Sungai Wayapo ini berkelok-kelok layaknya seekor naga yang sedang menggeliat. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam lamanya sampailah kami ke unit yang kami tuju.

Resmi Menjadi Warga Unit I

Setelah tiba di unit, aku ditempatkan di barak, untuk setiap baraknya dihuni kurang lebih 100 orang. Unitku ini terdiri dari 10 barak, dan di setiap barak oleh Komandan Unit [DanUnit] telah ditunjuk dua orang sebagai Kepala Barak dan Wakilnya.

Selain itu, DanUnit pun telah menunjuk dua orang lainnya untuk memimpin Kepala-kepala Barak beserta Wakilnya. Jadi, kedua orang itu bertugas sebagai Koordinator dan Wakil Koordinator atau sebagai Pembantu Utama DanUnit. Pada hari pertama kami diberi waktu untuk beristirahat.

Keesokan harinya kami disuruh apel. Kami lalu diberi tugas sesuai kelompok atau barak masing-masing. Dalam apel tersebut

DanUnit memberi instruksi pada kami semua. Isi instruksi tersebut antara lain:

1. *Kenyang dan tidaknya perut saudara-saudara ada di tangan saudara-saudara sendiri. Untuk itu, saudara-saudara dituntut untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh sebab nasib saudara-saudara ada di tangan saudara-saudara sendiri. Sedangkan Pengurus Pusat tak mau bertanggung jawab lagi bila sampai gagal.*
2. *Akan tetapi, bila usaha saudara-saudara di sini belum berhasil atau menghasilkan, Pusat akan bertanggung jawab serta memberikan waktu untuk masa konsolidasi selama 9 bulan, dengan mengirim barang dan alat-alat pertanian, juga obat-obatan, pupuk, dan sebagainya.*
3. *Hasil-hasil panen adalah milik saudara semua.*
4. *Saya selaku DANUNIT melarang saudara-saudara berhubungan dengan para penduduk asli maupun orang-orang Bugis dan lain-lain.*

Demikianlah kira-kira isi instruksi dari DanUnit yang selama ini masih kuingat. Selanjutnya kami semua bekerja menurut pembagian tugas masing-masing.

Di tahun-tahun pertama, kami di Unit kami masing-masing menanam padi gogo (di *huma* sekitar barak yang berjarak kurang-lebih 500 meter dari Unit), serta menanam palawija dan sayur-sayuran. Sedang untuk menambah pangan, kami menumbuk sagu.

Memasuki tahun kedua, kami sudah memiliki persawahan. Kami juga membuat jalan di luar Unit. Jalan itu penting misalnya untuk pergi ke ladang. Kami juga membuat bendungan dan perumahan-perumahan.

Menjelang 1971 DanUnit mengizinkan warga tidur di luar barak atau di luar unit. Tapi semula yang diizinkan hanya para penekun ladang dan sawah (mereka boleh tidur di gubug). Itu pun dengan catatan, setiap pagi harus mengikuti apel di lapangan. Bagi kami yang tidur di dalam barak (Unit) setiap harinya harus menjalani apel pagi dan malam menjelang tidur.

Kondisi Unit antara lain seperti berikut: Satu Unit terdiri 10 barak, dan setiap barak dihuni 60 orang (ini termasuk Unit kecil). Sedang Unit yang besar (seperti Unit I dan II) setiap baraknya dihuni kurang lebih 100 orang. Setiap unit dijaga petugas sebanyak satu peleton, ditambah satu regu PHB dan Zipur. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan 10 orang petugas dari Kejaksaan.

Suatu ketika aku bertanya dalam hati, apakah semua ini sudah menjadi kehendak-Nya? Sebab sementara di Unit ini aku belum dapat beradaptasi dengan lingkungan, tiba-tiba aku dipindahkan ke Unit lain. DanUnit beralasan demi pemerataan warga unit atau penghuni unit. Aku bersama teman lain yang berjumlah 50 orang dipindahkan ke Unit III Wanayasa. Sebagai catatan, masa konsolidasi yang katanya akan berlangsung kurang lebih 9 bulan, kenyataannya dalam waktu empat bulan sudah dihentikan.

Nama Masing-masing Unit

Dalam kurun waktu 1969-1970 para Tahanan Politik penghuni Pulau Buru tinggal di beberapa unit. Unit-unit itu antara lain:

Unit I Wanapura, dengan DanUnit Lettu CPM Eddy Tuswara dari Jabar [Jawa Barat].

Unit II Wanareja dengan DanUnit Lettu CPM Suparno dari Yogyakarta

Unit III Wanayasa, dengan DanUnit Kapt. CPM Daeng Masiga dari Jakarta

Unit IV Sanleko (Savana Jaya) dengan DanUnit Pelda CPM Suparman dari Jateng

Mulai akhir tahun 1970 ada tambahan unit-unit baru, yakni:

Unit V Wanakerta

Unit VI Wana Wangi

Unit VII Wana Surya

Unit VIII Wana Kencana

Unit IX Wana Mulya

Unit X Wana Dharma

Unit XI Wana Asri

Unit XII Birawa Wanajaya

Unit XIII Giri Pura

Unit XIV Bantala Reja

Unit XV Indra Pura atau Unit Ronggolawe

Unit XVI Indra Karya

Unit XVII Arga Bhakti

Unit XVIII Adhi Pura

Tambahan Unit tahun 1971 sebagai berikut:

Unit Sawunggalling

Unit Trunojoyo

Unit "R"

Unit "S"

Unit "T"

Pemberian nama untuk unit-unit dimulai dari Unit III yang waktu itu Komandannya adalah Kapten CPM Daeng Masiga. Oleh Sang Komandan Unit III diberi nama Wana Yasa atau Wanayasa.

Selanjutnya Unit I DanUnit II pun menyusul diberi nama pula. Unit I diberi nama Wana Pura oleh DanUnit Lettu CPM Eddy Tuswara, Kujang, Siliwangi. Unit II diberi nama Wana Reja dengan DanUnit-nya Lettu CPM Sumardi, dari Diponegoro. Akan tetapi, sebenarnya gagasan permemberian nama Wana Yasa untuk Unit III datang dari Bapak Pramoedya Ananta Toer dari Blora, Jawa Tengah, yang adalah sesama teman korban Tragedi '65 yang dibuang ke Pulau Buru.



Sastrawan Pramoedya Ananta Toer di ruangannya di Pulau Buru (Ist.)

Jumlah warga di Unit III Wana Yasa saat itu baru 500 orang. Tetapi kemudian Unit I Wana Pura DanUnit II Wana Rejo mengirimkan 50 warganya ke Unit III Wana Yasa. Setelah itu, masih ada tambahan-tambahan lain. Maka Unit III Wana Yasa jumlah warganya menjadi 604. Aku tinggal di Unit I Wana Pura kurang lebih 3 bulan. Di Unit III aku tinggal di Barak I dengan kepala Bapak Chris Hutabarat dari Jakarta. Dia mantan jurnalis *Harian Rakyat* disingkat *H.R.* Di barakku ini, aku bertemu dengan orang-orang yang lanjut usia seperti Bapak

Anwar Kadir, Bapak Karel Supit, Bapak Drs. Bismo, Bapak Rivai Apin, Bapak Hasjim Rachman dari koran *Bintang Timur*, Bapak Drs. Suniadi, Bapak Pramoedya Ananta Toer, Bapak Prof. Dr. Suprpto S.H., Bapak Oey Hay Djoen, Bapak Eddy Martalogawa dan Bapak Situmeang, serta masih banyak lagi.

Selama berada di Unit III, aku mendapatkan suatu kebahagiaan tersendiri sebab aku dapat menimba ilmu dari para sesepuh ini terutama, *especially*, dari Bapak Rivai Apin dan Bapak Samandjaya atau Bapak Oey Hay Djoen yang membimbingku ke khasanah kesusasteraan. Seakan-akan aku telah dilahirkan kembali. Rasa kebahagiaanku itu pernah kutuliskan seperti ini:

Kelahiranku

Setiap insan pasti tahu

Empedu itu getir

Tapi, bagiku lain

Ia lebih manis daripada gula

Warna-warna indah

Bermain dalam siksa derita

Olehnya aku lahir ditempa

Sedangkan Unit IV telah diberi nama Unit IV Sanleko atau Savana Jaya, disebabkan letak Unit tersebut di sekitar pemukiman orang-orang suku Buton. Pada tahun 1969-1970 Pulau Buru baru memiliki empat unit saja, yakni Unit I sampai IV. Akan tetapi, menjelang akhir tahun 1970, kami mendengar informasi bahwa di Buru akan didirikan lagi unit-unit yang baru. Tenaganya akan diambilkan dari unit-unit yang sudah ada, dan ketika pembangunan Unit I-IV konon kabarnya tenaganya diambilkan dari para korban Tragedi '65 yang bergolongan C, yang berada di kota Ambon. Keterangan ini didapat ketika mereka telah menyelesaikan tugasnya, di saat akan meninggalkan Pulau Buru.

Dan benar juga informasi tentang pembuatan unit-unit baru itu. Pemerintah pusat atau Jakarta mengirimkan Tim Survey-nya ke Buru lebih kurang di awal tahun 1971. Saat rombongan Tim Survey akan memulai pekerjaannya, mereka mengambil sejumlah warga dari Unit III Wana Yasa. Waktu itu diriku ikut di dalamnya untuk membawakan peralatan-peralatan mereka. Tim Survey ini terdiri dari para ahli geologi, pertanian, dan Zipur. Pengawal rombongan ini hanya terdiri dari dua orang Satuan Tugas Pengawal [Satgaswal] dari Batalyon 732 Pattimura.

Penduduk Asli Pulau Buru

Meskipun pekerjaan ini sangat berat, hatiku merasa senang sebab aku dapat menjelajah ke mana-mana serta mengetahui keadaan di luar unit.

Misal:

1. Mengetahui perkampungan-perkampungan penduduk asli Buru.
2. Mengetahui keberadaan sungai-sungai lain selain Sungai Wayapo.
3. Mengetahui adat istiadat asli, juga bahasa komunikasinya.
4. Mengetahui cara-cara mengukur tinggi dan rendahnya tanah atau theodolit dan lain-lainnya.

Penduduk asli Pulau Buru masih bersifat *nomaden* yang artinya masih berpindah-pindah tempat bermukim. Bila daerah tempat mereka bermukim itu tak lagi membuahkan hasil mereka pun lalu mencari lahan yang baru. Pada umumnya mereka bermukim selalu memilih dekat rawa-rawa, sebab mereka butuh mencari ikan sebagai lauk. Mereka bahkan juga sering berburu buaya untuk dibarterkan

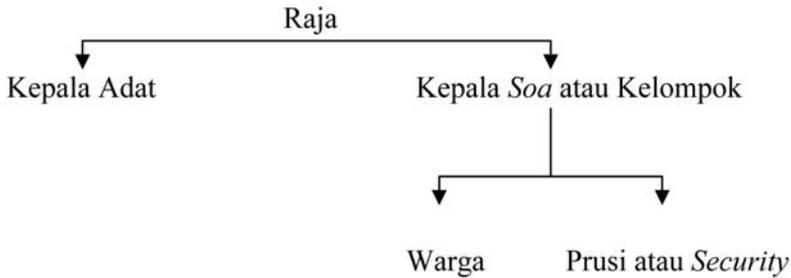
atau dijual kulitnya pada orang-orang Bugis dan lain-lainnya. Makanan pokok mereka adalah sagu dan pisang, juga kasbi atau ketela pohon, ubi rambat atau betatas. Sebagai mata pencaharian, mereka mencari sagu untuk dijual atau dibarterkan dengan barang-barang kebutuhan mereka. Selain itu, mereka suka berburu rusa hutan, selain mencari ikan dan buaya itu tadi. Dan mereka pun masih menganut kepercayaan Animisme. Mereka percaya akan adanya roh-roh halus serta roh leluhur mereka. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa “Furu”. Sementara itu, mereka yang sudah agak maju pengertiannya menggunakan Bahasa Indonesia. Beberapa contoh bahasa pribumi atau Furu adalah sebagai berikut:

Bahasa Pribumi	Bahasa Indonesia
Mistina	Hantu
Yako	Saya
Mai	Mari
Ka	Makan
Hala	Nasi atau beras
Tiput	Ayam
Niwe	Kelapa
Way	Air
Wamo	Mengerti atau tahu
Inu	Minum
Te	Tidak
Fuat	Pisang
Ngama	Bapak
Ngana atau Ina	Ibu

Persenjataan mereka terutama adalah parang atau *todo* dan tombak atau *hero*. Ke mana pun mereka pergi *todo* dan *hero* selalu dibawa, tidak pernah ketinggalan. Sampai sekarang pun mereka mengakui adanya “Raja” di antara mereka. Bagi mereka pengertian Raja ada dua. Yang

pertama adalah “Raja Gunung”. Raja ini menguasai penduduk yang tinggal di pegunungan-pegunungan dan pedalaman. Sedangkan yang kedua adalah “Raja Darat”, penguasa penduduk di sepanjang lembah Sungai Wayapo. Menariknya, Raja Darat ini bermukim di tengah kota Namlea. Dengan demikian, di antara penduduk Pulau Buru terdapat perbedaan yang jelas. Kalau boleh dikatakan, penduduk pribumi asli yang tinggal di pegunungan taraf kebudayaannya masih terbelakang sekali, sementara mereka yang tinggal di sepanjang Lembah Wayapo bisa dibilang lebih maju.

Bentuk Pemerintahan Penduduk Asli Pulau Buru:



Keterangan:

1. Raja adalah segala-galanya bagi penduduk asli; maka penduduk selalu mematuhi, menaati perintahnya.
2. Kepala Adat adalah Tetua dari Kepala *Soa* atau Ketua Kelompok. Kedudukannya di bawah Raja, dan Tetua ini sangat berpengaruh sekali di dalam adat istiadat penduduk. Dan Kepala Adat itu merupakan penentu segala-galanya dalam urusan adat istiadat, seperti pernikahan, pemakaman, perburuan, dan ritual-ritual lainnya. Kini di Pulau Buru sudah jarang terjadi peperangan antar *soa* atau kelompok. Namun demikian, ketika rombongan Angkatan Pertama korban Tragedi '65 tahun 1969 masih terdapat peperangan

antar Ketua *Soa*. Bahkan pada saat itu mereka yang terluka terkena parang ataupun tombak minta tolong untuk diobati di Unit III Wana Yasa yang DanUnit-nya adalah Kapten CPM Daeng Masiga. Bagi penduduk asli, masalah rawan yang bisa menimbulkan peperangan ialah soal perempuan, sebab perempuan di Pulau Buru ini sangat minim dan sangat mahal. Maharnya (atau dalam bahasa Jawa “Pasok Tukon”-nya) sangat tinggi. Jadi seakan-akan perempuan harus dibeli.

3. *Prusi* atau polisi untuk urusan *security*.

Di masyarakat mereka juga ada polisi atau *prusi*. Seorang prusi adalah orang yang benar-benar pilih-tanding. Dia dituntut keberaniannya, kepandaiannya dalam mengatur strategi perang, dan juga kecakapan dalam menggunakan parang maupun tombak. Dengan kata lain, dia harus pandai berperang. Oleh karena itu, sampai sekarang pun masih ada tarian perang atau yang disebut *cakalele*. Tarian ini biasanya disuguhkan bagi para tamu-tamu terhormat atau penting. Iringan musik dari tarian ini hanya berupa *tifa* atau dalam bahasa Jawa disebut *kendang*.

Demikianlah berbagai keuntungan buat diriku sewaktu aku ikut rombongan Tim Survey. Selanjutnya, kami pulang kembali ke Unit III Wana Yasa dengan membawa hasil dari *survey* tersebut.

Pembangunan Unit-unit Baru

Kira-kira pada bulan April tahun 1971 pelaksanaan pembangunan Unit baru pun dimulai. Untuk itu DanTefaat [Komandan Tempat Pemanfaatan, ed.] Mayor Rusno telah memerintahkan pada DanUnit I, II, dan III untuk mempersiapkan tenaga yang berasal dari para

warganya guna pembangunan unit-unit tersebut. Proyek pembangunan unit ini diserahkan sepenuhnya pada Yon Zipur atau Batalyon Zeni Tempur. Pembuatan unit-unit baru tersebut berjumlah 14 buah, di antaranya Unit V sampai dengan Unit XVIII untuk periode pertama pada tahun 1971. Dalam Periode Kedua tahun 1972 dibangunlah “Unit R” sampai “Unit T” atau Unit Trunojoyo. Pada tahun 1972 itu, aku sudah berada di Kamp Khusus [Kampsus]. Jadi jumlah unit-unit yang ada di Pulau Buru secara keseluruhan berjumlah 21 Unit. Dengan perincian sebagai berikut ini:

Pada tahun 1969: Unit I s/d Unit IV

Pada tahun 1971: Unit V s/d Unit XVIII

Pada tahun 1972: Unit R, S dan T

Jumlah warga unit atau “Tohpol” (Tokoh Politik) ‘65 yang berada di Pulau Buru berkisar kurang lebih 12.000 orang. Namun demikian, pemerintah menyatakan hanya ada 10.000 orang tohpol di Pulau Buru. Pemerintah selalu bersifat seperti itu.

Pertengahan bulan Februari 1970 adalah merupakan hari yang paling membahagiakan bagiku. Mengapa? Karena pada saat itulah, diriku dibaptis oleh Bapak Matatulla, pendeta dari kota Namlea. Pembaptisan itu dilaksanakan di Gereja Maranatha di Unit III Wanayasa. Dan sejak itu pula namaku menjadi Yoseph S.

Transito itu Menjadi “Kampsus”

Pada pertengahan tahun 1971, ada pergantian DanTefaaf beserta segenap DanUnit serta staf-stafnya. DanTefaaf Mayor CPM Rusno diganti oleh Kolonel Infantri Syamsi dari kesatuan militer Kujang, Siliwangi. Sedangkan untuk Unit III Wanayasa DanTefaaf Kapten CPM Daeng Masiga diganti oleh Lettu CPM Sujoso dari Pangdam

Brawijaya, Jawa Timur. Bagian intel atau OPS Kasi I dipimpin oleh Kapten CPM Imam Suwarso dari Brawijaya juga. Orang ini tampak sekali tergolong berdarah dingin. Bahkan dengan *jumawa* atau sombongnya telah berani melontarkan ucapan-ucapan, kata-kata yang menyatakan bahwa dirinya yang telah “membasmi” pergerakan Malang Selatan dan Blitar Selatan pada tahun 1967-an. Ia juga mengklaim telah meringkus Bpk Suwandi yang saat itu menjabat sebagai Central Daerah Besar [CDB] Malang, Jawa Timur, dan membunuhnya. Dengan adanya orang seperti itu suasana di unit-unit menjadi tak tenteram lagi. Bahkan dengan adanya aparat seperti itu, Si Kapten Suwarso yang penuh ambisi itu, terjadilah penangkapan-penangkapan kembali atas para tahanan yang selanjutnya dijabloskan ke dalam “Kampsus Jiko Kecil”. Penangkapan-penangkapan itu kembali terjadi kira-kira pada pertengahan bulan November tahun 1971. Karena dia, kini Transito Jiko Kecil diubah menjadi “Kampsus” atau Kamp Khusus Jiko Kecil.

**Catatan:*

Sebenarnya dari awal pemberangkatan ke Pulau Buru Pemerintah Pusat Jakarta telah menyusupkan atau menanam tiga orang sebagai “informan” ke dalam rombongan kami para korban Tragedi ’65. Ketiga informan tersebut berbaur dengan kami. Namun demikian, ada perbedaan yang sangat mencolok di antara ketiga orang itu dengan kami para korban ’65. Kami para korban ’65 semuanya telah memiliki nomor foto dan nomor baju. Sedangkan mereka tanpa nomor foto dan nomor baju. Ketiga orang tersebut adalah Dedy, Tedy, dan Tarfi Nasution. Tarfi Nasution ditugaskan atau ditempatkan di Unit III Wanayasa. Dedy dan Tedy ditempatkan di Unit I Wanapura. Saat pengiriman ke Pulau Buru ketiga orang

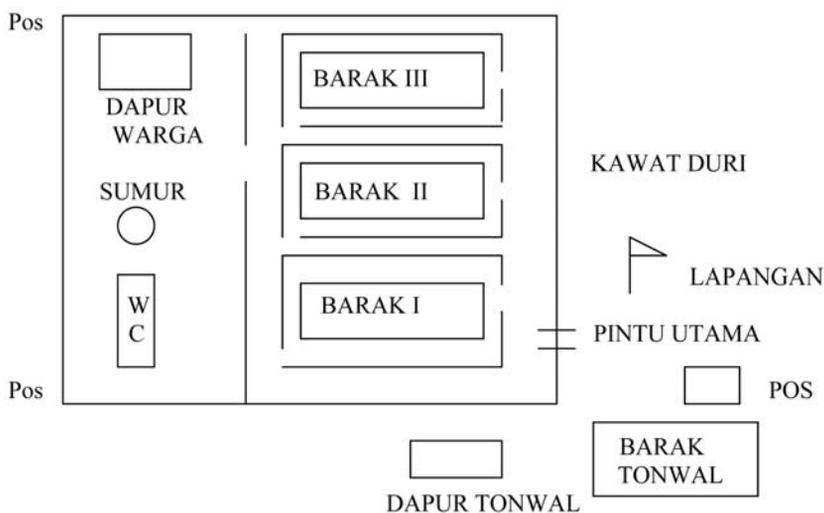
ini termasuk pada Gelombang Kedua dalam Kapal ADRI XI tahun 1969.

Korban penangkapan dan penahanan pertama ke Kampsus adalah warga Unit I dan II, bulan November tahun 1971. Diriku bersama empat teman lain, pada tanggal 1 Februari 1972 dimasukkan ke Kampsus. Kelima orang yang dimasukkan itu adalah:

1. Kudori
2. Sukardi Maryadi
3. Prof. Dr. Suprpto, S.H.
4. Pramoedya Ananta Toer
5. Diriku

Sampai di Namlea kami diinterogasi di Wisma Anggrek, yakni markas Dan Tefaaf beserta staf-nya. Sementara aku dan Saudara Sukardi Maryadi dibawa ke Kampsus, yang lainnya dipulangkan kembali ke Unit III Wanayasa. Di Kampsus ada tiga barak saja, namun saat diriku dan Sdr. Sukardi Maryadi dijebloskan ke situ baru dua barak saja yang sudah terisi. Barak-barak tersebut berada di dalam pagar kawat duri dan masih ada lagi pagar kawat duri yang mengelilingi sebagai pembatas.

Sketsa gambar “Kampsus Jiko Kecil”



Sebagai DanKampsus adalah Pelda CPM Munawar dari Brawijaya, Jawa Timur. Sebagai Wakil Komandan Kamp Khusus [WaDanKampsus] adalah Pelda Infantry Sjamsudin dari Siliwangi. Lambat-laun bertambahlah penghuni Kampsus ini. Semula kami tidak dipekerjakan, akan tetapi berkat keuletan dari DanKampsus untuk membujuk para DanTefaaf akhirnya kami dapat dipekerjakan.

Para Penghuni Kampsus Jiko Kecil

Berikut adalah nama-nama para penghuni “Kampsus Jiko Kecil” beserta unit-unit dan daerah asal mereka masing-masing sejauh aku masih ingat.

Dari Unit Wana Pura:

1. L. Supriyanto dari Yogyakarta
2. Markum Sukarno dari Yogyakarta
3. Sudiarto dari Yogyakarta

4. Rubianto B.A. dari Yogyakarta, pada tahun 1972 disusul oleh keluarganya
5. Sugiarto dari Yogyakarta
6. Sukardi alias Semplo dari Semarang
7. Harafanto dari Semarang
8. Nasoka dari Semarang
9. Dulmuri Sanyoto dari Semarang
10. Arnold Boyoh dari Magelang

11. Usman Djafar dari Jateng (Jawa Tengah)
12. Sugeng Pardan dari Jateng
13. Tan Hun Swie dari Klaten
14. Suwarno dari Yogyakarta, mati ditembak tanggal 3 Oktober 1972 oleh Satgaswal
15. Suhardjono Kijang dari Yogyakarta, mati ditembak 17 Oktober 1973
16. Alex Themo dari Semarang, mati ditembak 17 November 1973 oleh Satgaswal
17. Kusnadi Hadi dari Jateng
18. Gombig

Dari Unit II Wana Reja:

1. Djuhendi dari Jabar (Jawa Barat), tembus ditembak tapi selamat
2. Djuhandi dari Jabar
3. Piin Sudiatna dari Jabar
4. Oyok Sunaryo dari Jabar
5. Suganda dari Jabar
6. Machfud dari Jabar
7. Inan Salyan dari Jabar
8. Usman Salyan dari Jabar

9. Amsyah Romly dari Jabar
10. Suwarta dari Jabar, mati kena duri ikan beracun
11. Machruf Yoes dari Jabar
12. M. Hamid dari Jakarta
13. M. Hadil dari Jakarta
14. Supardi dari Jakarta
15. Anang Suwarno dari Jakarta
16. J.J. Juwono dari Jakarta
17. Usman Naan dari Jakarta
18. Usman Aswadi dari Jakarta
19. Kusnadi S.A. dari Jakarta
20. Asman Leman dari Jakarta
21. Sugimin “Geblek” dari Jakarta
22. Jadjid Hadi Sutanto dari Jakarta
23. Rachmad Siregar dari Jakarta
24. Sutrisno dari Yogyakarta, istrinya menyusul tahun 1972
25. Suroso dari Yogyakarta
26. Djonediono dari Yogyakarta
27. Sumaryono “Bogel” dari Yogyakarta
28. M.Suhud dari Yogyakarta
29. Reo Sunardi dari Yogyakarta
30. Sumardiono Glatik dari Yogyakarta
31. Bambang Indiadi dari Klaten, Jateng
32. Bedjo alias “Bejat” dari Jakarta
33. Subita dari Brebes, Jateng
34. AB Sunarto dari Pemalang, Jateng
35. Sarman Mamons dari Banten
36. Sutrisno B dari Purwokerto
37. Siswo Rahardjo dari Malang, Jatim (Jawa Timur)

38. Somad Sukoprayitno dari Semarang
39. Abdul Gani dari Jabar, ditembak mati 17 November 1973 di depan baraknya
40. Awang Dharmawan dari Jabar, ditembak mati 17 November 1973 di depan baraknya
41. Nono Sudiono dari Yogyakarta, ditembak mati 17 November 1973 di depan baraknya
42. Gatot Widodo dari Yogyakarta, mati ditembak 16 November 1973 di kebun kelapa di tepi pantai
43. Gatot Sugoto dari Yogyakarta
44. Heru Sutrisno

Dari Unit III Wana Yasa:⁸⁵

1. Karel Supit dari Jakarta
2. Drs. Yacob Pirry dari Jakarta
3. Drs. Slamet Mulyono dari Jakarta
4. Rudy Iskandar dari Jakarta
5. Pramoedya Ananta Toer dari Jakarta, asli Blora, Jateng
6. Prof. Dr. Suprpto SH dari Jakarta
7. Kudori dari Kediri
8. Eko Sutikno BA dari Semarang, hanya kurang lebih 3 bulan
9. Maryadi Sukardi dari Malang
10. Penulis (Al Capone) dari Yogyakarta
11. Rivai Apin dari Jakarta

Dari Unit IV Sanleko (Savana Jaya):

1. Harry Winardi dari Yogyakarta

85 Nama “Wana Yasa” sering digabung dalam penulisannya menjadi “Wanayasa”. Demikian pula nama-nama unit yang lain. Kadang dipisahkan, kadang digabung. Misalnya “Wana Reja” menjadi “Wanareja”.

2. Kabul dari Magelang
3. Supriyadi dari Yogyakarta, pernah coba melarikan diri tahun 1972

Dari Unit V Wana Kerta:

1. A. Y. Suparno dari Pemalang, Jateng
2. Paryusi dari Pati, Jateng
3. Saphiran dari Rembang, Jateng
4. Suparing dari Rembang
5. Basri dari Rembang
6. Hasan Basri dari Lasem
7. Leo Paidjan dari Yogyakarta
8. Sukadi dari Yogyakarta, tertembus peluru dan mengeram di pundak, tapi selamat

Dari Unit VII Wana Surya:

1. Sukamto dari Yogyakarta
2. Kandam Sutardjo dari Kebumen, Jateng

Dari Unit VIII Wana Kencana:

1. Siman dari Purworejo, Jateng
2. Kemiso dari Purworejo

Dari Unit IX Wana Mulya:

1. Sulfi Rachman dari Malang
2. Suwono dari Malang
3. Pamuji dari Malang
4. Sarmo dari Solo

5. Sjawal Bagong dari Purwokerto
6. Mukidi dari Brebes, bunuh diri minur racun serangga di Unit Ancol

Dari Unit X Wana Dharma:

1. Benny Chung alias Swie Chan dari Jakarta, Sastrawan
2. Supratiknyo dari Jakarta
3. Petrus Paijan dari Jakarta, hanya dua bulan
4. Udjang Umar dari Jabar
5. M. Danafia S.H. dari Surabaya

Dari Unit XI Wana Asri:

1. Karnapi, seorang pelawak dari Jombang, Jatim

Dari Unit XII Birawa Wanajaya:

1. Machmud Chairun dari Jakarta
2. Machmud dari Jakarta
3. Sri Dharmadjo dari Jakarta
4. J. Sukarno dari Jakarta
5. Masdur dari Jakarta
6. Zaenal Arifin dari Jakarta
7. Sasmon Pardede dari Jakarta
8. Thio Bhiechan dari Jakarta
9. Sumargono dari Jakarta
10. Salikun dari Jabar

Dari Unit XIV Bantalareja:

1. Heru Santoso
2. Bonar Siregar

Catatan: Keduanya berasal dari Jakarta dan pernah coba melarikan diri; saudara Heru Santoso meninggal lantaran penyakit hepatitis.

Dari Unit XV Indra Pura:

1. Suwardiono dari Jakarta

Dari Unit XVI Indra Karya:

1. Abas Usman dari Jabar
2. Dirdjo Panular dari Jakarta

Dari Unit XVII Arga Bhakti:

1. Drs. Mustadji Sangit dari Surabaya, gantung diri di Kampsus di Barak III, tak tahan atas penyiksaan yang ia alami
2. Supratikno dari Surabaya
3. Ibnu Haryanto dari Surabaya
4. Sukarman dari Surabaya
5. Paidjan dari Surabaya
6. Eddy Suroto dari Surabaya
7. Hartono dari Surabaya
8. Supaat Rachmad B.A dari Surabaya
9. Wiyono B.A. dari Surabaya
10. Sumardiono B.A. dari Surabaya
11. Rusdi dari Pemalang
12. Totok Andang Taruna, sastrawan, dari Surabaya

Catatan: Sejumlah penghuni Kampsus Jiko Kecil ini kemudian menjadi (atau lebih tepatnya dijadikan) “*coro*” atau “kecoak” alias informan bagi pihak penguasa.

Jumlah keseluruhan penghuni Kamp Khusus Jiko Kecil ada kurang-lebih 123 orang. Dikatakan “kurang-lebih” sebab ada yang hanya diinterogasi terus dipulangkan ke Unitnya. Ada juga yang tinggal di sana kurang lebih 2 bulan saja.

Pengalaman Kerja di Kota Namlea

Pengalaman pertama kali kami bekerja di luar Kampsus adalah mengerjakan pembersihan di sekitar Wisma Anggrek atau tempat tinggal DanTefaaf Pulau Buru beserta para staffnya. Kemudian kami mengerjakan perbaikan jalan dari dermaga Namlea hingga pasar Namlea yang kira-kira berjarak kurang lebih 600 meter. Materialnya berupa batu yang kami cari di tepi pantai lalu diangkut dengan truk. Setelah melihat kesungguhan kami dalam bekerja DanTefaaf pun mulai percaya kepada kami.

Suatu ketika ada permintaan dari pihak Pastoran, yakni bahwa pihak Pastoran akan membangun sebuah wisma. Untuk itu dibutuhkan tenaga tukang dan pengiriman batu-batu untuk keperluan membantu fondasi bagi wisma atau rumah tersebut. Saat itu pimpinan di Pastoran adalah Romo Roovink, SJ dari Jerman yang menggantikan Romo De Blot, SJ dari Belanda. Pembangunan wisma itu berjalan lancar. Hubungan kami dengan Romo Roving juga terjalin baik dan akrab. Wisma itu pun telah diberi nama “Wisma Kartini”. Alasannya karena yang bertempat di wisma ini lebih banyak wanitanya bila dibanding dengan penghuni prianya.

“Wisma Kartini” ini dihuni oleh anak-anak dari para korban '65 yang menyusul orangtuanya. Penghuni lain adalah anak-anak dari sekitar Kota Namlea, yakni orang bebas atau umum yang bersekolah di Namlea. Anak-anak tersebut lebih kurang berjumlah 70-an orang. Di luar kegiatan sekolah, di Pastoran anak-anak itu dididik

untuk menguasai berbagai ketrampilan, seperti menjahit, menyulam, dan lain-lainnya bagi yang wanita. Bagi yang pria pihak Pastoran memberi pendidikan keterampilan lain, seperti pertukangan dan lain sebagainya.

Pernah kami disuruh membongkar muatan dari kapal yang jumlahnya lebih kurang atau kira-kira 600 ton. Barang-barang itu kiriman dari Jakarta dan berupa pupuk urea, obat-obatan, seng, paku, gula, semen, beras, dan lain-lainnya. Barang-barang itu harus diselesaikan sesuai jadwal pemberangkatan kapal tersebut. Padahal saat itu penghuni Kampsus baru kurang lebih 60 orang jumlahnya. Akibatnya saat itu kami harus bekerja ekstra keras, alias *diforsir*. Syukurlah, kiranya Tuhan masih melindungi kami semua. Sekalipun dalam kesusahan yang bagaimanapun Dia selalu menyertai kami.

Pernah pula kami disuruh membersihkan jalan dari Namlea sampai ke Bandara yang jaraknya lebih kurang 6 km. Saat itu keadaan sedang musim panas. Seperti diketahui, panasnya wilayah timur Indonesia terasa menyengat sekali. Namun demikian, berkat hati riang dalam bekerja maka segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.

Dusun-dusun yang pernah kami datangi ialah Desa Ubung, Sawah, Jiko Morasa, Jiko Besar, juga pantai “Jembatan Australia”. Apa yang disebut “Jembatan Australia” ini adalah salah satu dermaga yang pada tahun 1942 dibangun secara tersembunyi oleh tentara Nippon atau Jepang. Waktu itu, Pulau Buru dijadikan tempat pertahanan terakhir bagi Jepang di wilayah Indonesia Timur. Di sana kami menemukan banyak bunker-bunker yang dibangun Jepang sekitar tahun 1942. Dermaga itu digunakan untuk pemberangkatan pasukan-pasukan Nippon guna penyerangan ke Australia. Itulah sebabnya oleh penduduk di sekitarnya dermaga tersebut dinamakan “Jembatan

Australia”. Demikianlah pengalamanku saat berada di Kamp Jiko Kecil, Namlea Pulau Buru.

Peristiwa Eksekusi

1. Pada tanggal 3 November 1972 Bapak Suwarno dari Prambanan, Yogyakarta, ditembak mati di depan Pos Penjagaan oleh Satgaswal. Beliau lalu dimakamkan di Namlea.

Para Eksekutor: sebagai Komandan Peleton (DanTon) adalah Pelda Mlw, sedang sebagai Komandan Penjaga (DanJaga) adalah Koptu Nlh.

Pelaku Eksekusi:

1. Koptu YK
2. Kopda Ply
3. Pratu Sml
4. Koptu Tjg

Bapak Suwarno ini dituduh hendak merebut senjata dari petugas.

2. Pada tanggal 16 November 1973 Sdr. Gatot Widodo ditembak di kebun kelapa di tepi pantai tatkala ia bertugas mencari kayu bakar. Sementara itu, teman lainnya yang berjumlah 4 orang ditembak di depan baraknya bersama kepala baraknya pada tanggal 17 November 1973. Peristiwa ini berlangsung di bawah pengawalan dari kesatuan Hsn, Batalyon An dengan DanYon Mayor JM. Sedangkan Komandan Kompi (DanKi)-nya adalah Kapten Hky. Komandan Peleton (DanTon)-nya adalah Sersan Mayor HK.

Pelaku eksekusi antara lain:

1. DanTon Serma HK
 2. Serda DB
 3. Sertu Sb
 4. Kopda AR
 5. Kopda Shb
3. Bapak Djuhendi dari Jawa Barat ditembak, namun selamat. Beliau ditembak, tetapi pelurunya menembus melalui dada kirinya. Peluru itu menyasar pada bahu kiri Sdr. Sukadi dan mengeram di tubuhnya. Sampai saat pemulangan peluru tersebut belum diambil. Bahkan sampai terbawa mati di tahun 2001. Teman ini berasal dari Yogyakarta.
- a. Teman yang pertama kali meninggal dunia di Kampsus lantaran bunuh diri adalah Bapak Drs. Mustadji Sangit dari Jawa Timur, bulan Maret 1972. Ia menggantung diri di baraknya menjelang subuh.
 - b. Yang mati karena sakit antara lain.
 1. Suwarta dari Jawa Barat. Seperti kusebut di atas, beliau terkena racun duri ikan beracun saat sedang mencari batu di pantai.
 2. Heru Santoso. Ia meninggal karena penyakit hepatitis atau liver di R.S. Mako sebagaimana kusebut di depan. Dia berasal dari Jawa Timur.
 - c. Bapak Mukidi bunuh diri dengan minum racun serangga ketika sedang menyemprot tanaman di Unit "Ancol". Ia berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan dimakamkan di Unit IV Savana Jaya atau Sanleko.⁸⁶

86 Di Unit X Wana Dharma ada peristiwa pemenggalan kepala teman korban yang dilakukan oleh penduduk asli, demi adat-istiadat sakral mereka, yakni

Pernah Jadi Aktor

Selama aku berada di Pulau Buru, terjadi sejumlah pergantian berkaitan dengan Dan Tefaaf, Satgaswal, dan istilah resmi untuk Pulau Buru itu sendiri.

1. *Dan Tefaaf*

Periode I dari tahun 1969 s/d 1971: Mayor Rusno

Periode II dari tahun 1971 s/d 1973: Kolonel Sjamsi

Periode III dari tahun 1973 s/d 1975: Letkol A.S. Rangkuti

Periode IV dari tahun 1975 s/d Saat Pembebasan 1979: Kolonel Lewerissa

Pada tahun 1969 kami mendapat kunjungan dari Jenderal Sumitro dan Kejaksaan Agung RI. Rombongan World Health Organization [WHO] dan rombongan jurnalis Bur Rasuanto berkunjung pada tahun 1973. Dalam kunjungan-kunjungan itu yang berperan sebagai “tuan rumah” adalah Pangkobkamtib Jenderal Sudomo.

2. *Satgaswal*

Pergantian Satgaswal hanya terjadi sekali. Petugas Satgaswal dari Kodam Pattimura yang bertugas sejak tahun 1969 baru digantikan oleh Satgaswal dari Kodam Hassanudin Batalyon Anoa pada akhir Desember 1972.

3. *Istilah untuk Pulau Buru*

Sebagaimana aku katakan di depan, semula (dari tahun 1969 hingga 1970) tempat pengasingan di Pulau Buru disebut

upacara minta hujan. Kejadian ini membawa korban dua orang teman Unit X Wana Dharma. (Tapi aku tak ingat tanggal dan tahunnya. Pelaku pemenggalan bernama Giling Tama). Di Unit V ada peristiwa mengenaskan juga, tapi saat itu diriku sudah berada dalam Kampsus, sehingga aku ragu untuk menuliskannya.

BAPRERU. Pada tahun 1970 namanya menjadi “Tefaaf Pulau Buru”. Istilah “tefaaf” adalah singkatan dari Tempat Pemanfaatan. Menjelang tahun 1972, nama itu diubah menjadi “Inrehab Pulau Buru”, atau Instalasi dan Rehabilitasi Pulau Buru. Waktu itu Komandan Inrehab [Dan Inrehab]-nya adalah Letkol CPM A.S. Rangkuti. Dia ini pernah jadi aktor dalam film *Sungai Ular* pada tahun 1950-an.

Liku-liku Perjalanan Pulang

Dari KampSus, pada tahun 1974 kami dipindah ke Unit Ancol yang adalah bekas unit tempat pembuatan garam dengan nama resmi Unit XIV Bantala Reja. Ketika kami berada di Unit Ancol Komandan Unitnya adalah Lettu CPM Sumantha dari Siliwangi. Dia merangkap Komandan Unit XIV Bantala Reja. Komandan Peleton Satgaswalnya adalah Lettu Giyanti dari Kodam Hassanudin, Batalyon Anoa. Ketika kami sudah memiliki sawah sendiri oleh DanTefaaf Unit Ancol secara resmi dinyatakan sebagai unit yang berdiri sendiri dan memiliki Komandan Unit sendiri. DanUnit Ancol dipimpin oleh Serma CPM Sumadi dari Kodam Diponegoro. Pada pertengahan tahun 1976 ada pembebasan besar-besaran di Pulau Buru. Hal itu merupakan pembebasan Gelombang Pertama.

Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1977, kami dipindah lagi ke Unit XIII Giri Pura. Sementara itu, Unit Ancol dinyatakan bubar. Unit XIII ini letaknya paling ujung DanUnit yang paling tinggi letaknya, karena berada di pegunungan. Kami pindah ke Unit XIII ketika para warganya sudah bebas semuanya. Sementara itu, di persawahan masih tampak padi yang sebentar lagi akan mulai menguning. Di gudang padi pun masih banyak timbunan gabah kering.

Jadi, selama di Unit XIII ini kami boleh dikata makan dan tidur sembari menunggu panggilan untuk pulang ke Jawa. Oleh koordinator, kesempatan ini digunakan untuk berlokakarya. Misalnya: menyuling minyak kayu putih, menggergaji papan dan masih banyak lagi. Dan semua hasilnya dijual guna menambah uang saku untuk pulang. Sekalipun kami masih dalam pengawasan dari Satgaswal, namun seolah-olah pengawasan mereka tak berarti lagi. Ke mana-mana kami pergi, kami tak perlu lagi surat jalan. Selain itu, tak ada lagi pengawalan. Cukup Kepala Barak atau Kepala Kelompok melapor kepada DanUnit serta DanJaga. Saat terjadi pembebasan atau pemulangan para Tapol Tragedi '65 ini satuan Satgaswal dikembalikan ke Pangdam Pattimura Batalyon 731, 732, dan 733, Ambon, Maluku.

Lalu, tibalah hari yang ditunggu-tunggu itu. Pada tanggal 11 Oktober 1979 ada pengumuman tentang pembebasan Gelombang Ketiga. Alangkah bahagianya hatiku. Pada hari yang mendebarkan itu namaku tercantum dalam daftar panggilan. Sementara itu, betapa sedihnya hati teman-temanku yang namanya belum tercantum. Tak ayal lagi tangis haru terdengar riuh, bahkan menggema ke mana-mana.

Sebelum kami saling berpisah untuk suatu saat nanti bertemu lagi, kami memotong seekor lembu untuk makan bersama. Tak lupa pula kami mengadakan selamatan ala kadarnya agar Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami semua. Selain itu, koordinator kami di Unit XIII membagikan uang saku kepada kami yang namanya terpanggil. Uang itu merupakan hasil dari lokakarya dan penjualan gabah kering di Mako atau Markas Komando. Koordinator kami itu juga membagikan baju bercorak batik dan sepatu bagi kami yang namanya terpanggil. Pada tanggal 13 Oktober 1979, kami sudah

berada di Mako guna pengecekan nama, alamat, nama orangtua, *check-up* kesehatan, dan sebagainya.

Setelah pengecekan itu selesai, keesokan harinya kami tiba di Namlea. Selanjutnya kami diangkut dengan perahu *landing craft* menuju Kapal Mesin *Gunung Jati* atau PT *Arafat*. Kapal ini dahulu milik Jerman, tapi lalu dibeli oleh Indonesia. Panjang kapal ini kira-kira 80 meter dan lebarnya kira-kira 20 meter. Kapasitas muatannya kurang lebih 3.000 orang. Kapal itu terdiri dari 7 palka, dari A sampai G. Selain itu di atas *deck* masih ada lagi tempat rekreasi, semacam gedung bioskop, dan bar.



Isak-tangis haru mengiringi kepulangan para tahanan Pulau Buru. (Ist.)

Kapal *Gunung Jati* meninggalkan Pulau Buru pada tanggal 14 Oktober 1979 kira-kira pukul 17.00 WIT. Diriku sangat gembira ketika mendengar peluit kapal berbunyi nyaring, pertanda perjalanan panjang akan segera dimulai. Pada saat yang sama, di dalam hati kecilku aku merasa bingung sekali, bagaimana nanti bila aku kembali

berada di tengah masyarakat bebas? Dapatkah aku menempatkan masa lalu ini? Atau apakah masa lalu ini hanya boleh diingat dan dirasakan sendiri? Padahal masa lalu itu bisa menjadi sebuah cerita yang indah dan memilukan. Demikianlah jalan pikiranku waktu itu. Yang jelas diriku harus mampu dan pandai menyikapi “realitas” kehidupan sehari-hari.

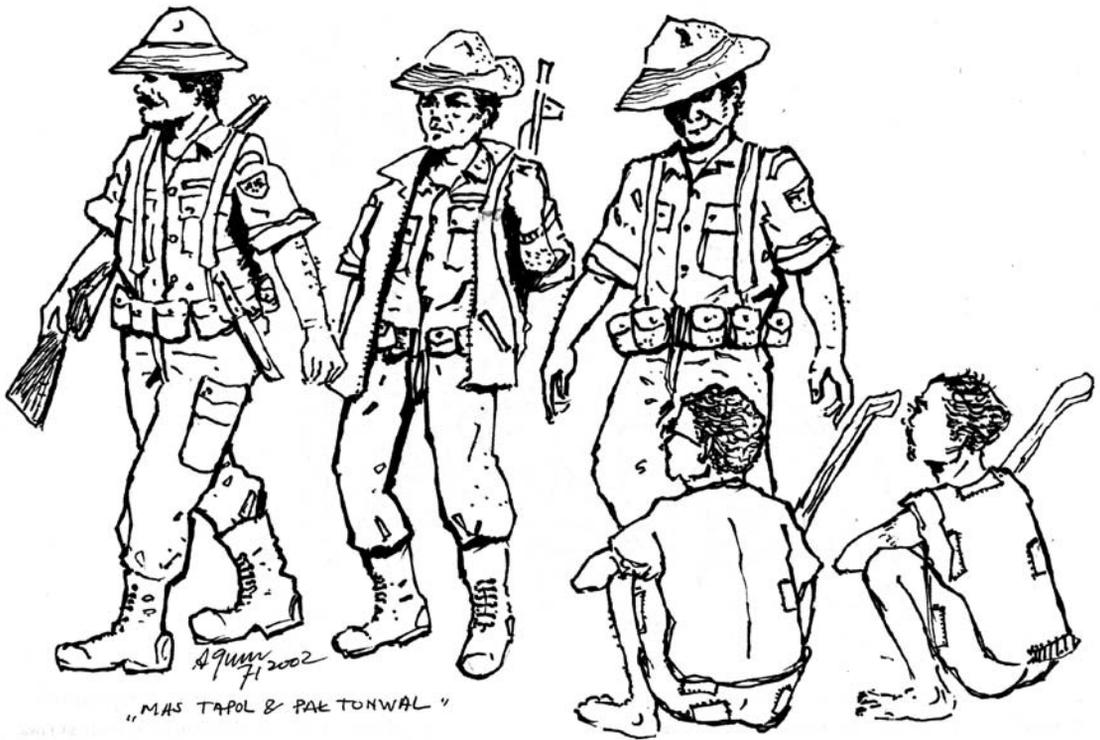
Ternyata hanya dalam tempo empat hari dan empat malam rombongan kami sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kami turun dari kapal sekitar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya, kami diangkut dengan truk menuju Stasiun Turi Surabaya dan tak kusangka sama sekali di sini kami telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang telah lebih dahulu bebas. Melihat rombongan kami mereka bersorak-sorak sambil tangannya diacung-acungkan dengan penuh rasa gembira. Namun demikian mereka tak dapat mendekati kami, sebab kami telah dikawal aparat dengan ketatnya. Kami langsung disuruh menaiki kereta api yang sudah *stand by* sejak siang tadi. Kira-kira pukul 19.00 WIB kereta api itu pun mulai bergerak pelan-pelan untuk selanjutnya meninggalkan Stasiun Turi tersebut.

Kira-kira pukul 23.00 WIB kereta sampai di Stasiun Semarang. Kembali kami diangkut dengan truk menuju salah satu gedung instansi pemerintah daerah untuk bermalam di sana. Sayang diriku tak ingat tempat tersebut.

Pagi hari tanggal 20 Oktober 1979 setelah kami sarapan, lagi-lagi kami dinaikkan ke dalam truk untuk dibawa ke Gedung Olah Raga atau GOR Semarang. Di sini sudah banyak anggota keluarga yang menunggu, termasuk keluargaku. Oleh karena itu tak mengherankan bahwa pada saat itu GOR tersebut bagai lautan manusia. Kemudian “Upacara Pembebasan” pun dimulai.

Waktu itu pukul 07.00 pagi WIB. Pertama-tama kami disuruh menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Selanjutnya, kami diminta mengucapkan “Sumpah dan Janji” para korban Tragedi ’65 yang diwakili oleh tiga orang dari kami. Setelah puncak acara itu selesai, kami semua diberi “Surat Tanda Pembebasan”. Sebagai penutup acara, kami semua diperintahkan untuk menyanyikan lagu “Padamu Negeri”. Setelah itu tuntaslah sudah upacara tersebut dan kami dapat berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Keadaan di dalam GOR pun berubah seketika oleh raung tangis haru, bahagia, dan suka cita, oleh kerinduan yang teramat mendalam dan yang telah mengental bahkan telah membatu. Kini saatnya semua itu mencair kembali. Kini saatnya untuk berkumpul lagi. Kiranya semua ini hanya kehendak-Nya. Amin...

Kemudian aku dan keluargaku cepat-cepat bergegas meninggalkan GOR tersebut. Kami pun bergegas menuju ke rumah kami, di mana Ibuku dan sanak saudaraku telah lama menungguku. *Ya*, mereka telah menunggu sejak aku baru berusia 19 tahun dulu. []



Di Pulau Buru, Peleton Pengawal (Tonwal) menyiksa para Tahanan Politik secara tidak manusiawi (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Belajarliah dari Sejarah dengan Bijak

Pengantar

*DI BAWAH ini adalah narasi yang dituturkan oleh **Budhi Kho**, seorang korban Tragedi '65 yang berlatar belakang etnis Tionghoa dan berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Gara-gara pernah mengikuti “Kaderisasi Revolusi” yang digagas oleh Bung Karno, pada tahun 1969 ia ditangkap begitu saja. Untuk sementara ia ditahan di Jakarta, tempat ia bekerja sebagai wartawan, tetapi pada tahun 1971 ia dibuang ke Pulau Buru. Ia berada di sana hingga tahun 1979.*

Menurut pengakuan Budhi Kho (nama ini bukan nama sesungguhnya) selama di Pulau Buru ini ia belajar banyak hal, tetapi sekaligus batinnya merasa tersiksa. Bersama-sama dengan sesama Tahanan Politik yang lain, ia disuruh melakukan kerja paksa.

Hingga masa penahanannya berakhir, ia tidak pernah tahu (dan memang tidak pernah diberitahu) apa kesalahannya. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Tak ada keterangan, tak ada penjelasan. Permintaan maaf juga tidak ada. Kata Budhi Kho, “Saya itu juga bingung: ditahan tiba-tiba, tanpa diperiksa dan diadili, terus dibebaskan juga tiba-tiba.” Ia melihat Jenderal Soeharto sebagai seorang pendendam dan menurutnya

apa yang terjadi pada tahun 1965 itu tidak lepas dari sikap pendendam Soeharto itu, meskipun penting juga melihat keterlibatan pihak asing. Bertolak dari pengalamannya di seputar Tragedi '65, Budhi Kho mengatakan bahwa pada berpolitik itu sendiri bukan merupakan suatu hal yang keliru. Namun demikian, menurutnya setiap orang yang terjun ke dunia politik perlu sadar akan konsekuensinya, termasuk konsekuensi dalam bentuk kekerasan fisik. Di matanya, belajar sejarah itu penting.

*Wawancara dengan Budhi Kho dilakukan oleh anggota Komisi Sejarah PUSdEP **Chandra Halim**, lulusan jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang sedang menempuh studi sejarah di Program Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

NAMA saya Budhi Kho, dan sekarang saya berdomisili di kota Magelang, Jawa Tengah. Saya adalah mantan wartawan koran *Sin Min* di Semarang, dan berasal dari daerah Blabak, tak jauh dari kota Magelang.

Tanpa Mau Berbaur

Saya lahir tahun 1940 dari marga Kho. Pada saat kelas 5 SD [Sekolah Dasar] saya pindah ke kota Magelang. Dari SD sampai SMA [Sekolah Menengah Atas] saya bersekolah di Magelang. Baru ketika tahun 1960, waktu umur saya 20 tahun, saya kuliah di Yogyakarta. Ketika tahun 1963 terjadi kerusuhan rasial di Cirebon dan sebagian besar wilayah Jawa Barat, di Yogyakarta tidak terjadi apa-apa. Saya menikah dengan salah seorang keturunan dari Tan Djin Sing dan keluarga kami mengadakan pertemuan *Trah* [Keluarga Besar] sebulan sekali. Tan Djin Sing itu bukan asli orang Tionghoa. Dia ini adalah anak seorang priyayi Jawa yang diasuh oleh orang Tionghoa. Tan Djin

Sing ini merupakan seorang tokoh Tionghoa yang membantu Sultan Hamengku Buwono III. Karena jasanya itu, HB III memberinya gelar KRT. Setjodiningrat.

Istri saya itu satu generasi dengan Werdoyo, penulis buku *Tan Djin Sing: Dari Kapiten China sampai Bupati Yogyakarta*. Kalau pas ikut pertemuan *Trah*,⁸⁷ mereka pasti ketemu, bahkan sering ngobrol. Ini lho yang namanya Werdoyo [Budhi Kho mengatakan demikian sambil menunjukkan foto anggota *Trah* Setjodiningrat, ed.]. Ini adalah bukti bahwa waktu itu hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan orang Jawa tidak ada masalah.

Memang ada orang Tionghoa yang merasa “alergi” terhadap orang-orang Jawa. Tetapi hal itu mungkin disebabkan oleh pengalaman mereka ketika bergaul dengan Jawa. Tetapi tidak semua orang Jawa itu jelek, dan tidak semua orang Tionghoa itu bagus. Murid-murid saya yang datang kemari untuk les bahasa Mandarin juga tidak semuanya berasal dari keturunan Tionghoa. Semua itu tergantung dari bagaimana kita bersikap di masyarakat.

Waktu itu kota Magelang itu warga Tionghoanya banyak yang *Singkek*,⁸⁸ sehingga mereka lebih suka memilih masuk ke dalam golongan mereka sendiri tanpa mau berbaur dengan warga masyarakat Jawa. Namun mereka yang sudah Kristen atau banyak dari golongan Peranakan akan cenderung memilih proses “asimilasi”, asalkan dengan yang sesama Kristen.

87 Pertemuan *Trah* adalah pertemuan rutin keluarga besar. *Trah* dipakai untuk menyebut identitas masih ada garis keturunan dari seorang bangsawan keraton atau seseorang yang terpandang.

88 *Singkek* atau *Singkeh* secara harfiah berarti “tamu baru”. Istilah ini biasanya digunakan untuk menyebut golongan Tionghoa Totok.

Kekerasan Selalu Terjadi

Tahun 1963 Bung Karno meminta Oei Tjoe Tat menjadi Menteri, dan membentuk penataran untuk mengantisipasi permasalahan rasial. Ketika itu saya sudah bergelar BA [Sarjana Muda]. Sekitar bulan Agustus tahun 1964 sampai awal tahun 1965, saya diajak untuk ikut masuk kaderisasi revolusi yang dibentuk Bung Karno atas anjuran dari beberapa stafnya, dan di Jakarta saya bertemu dan berkenalan dengan Prof. Dr. Tjan Tjoe Som [dosen di Fakultas Sastra UI]. Kaderisasi itu tujuannya untuk menghindari ketegangan rasial seperti yang terjadi tahun 1963. Nah, waktu itu akhirnya saya berangkat juga. Saya itu *kan* kuliah di Fakultas Sastra di IKIP Yogyakarta, dan kebetulan mendapat tawaran kaderisasi dan dapat bertemu dengan Pak Tjan Tjoe Som. *Ya*, saya berangkat saja. Prof. Dr. Tjan Tjoe Som itu kakak dari Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem, seorang ahli Javanologi. Waktu itu yang seangkatan saya ada Tan Lip Nio, S.H., ada Lay Oen Kwie dari PSMTI,⁸⁹ *trus* saya sendiri. Tokoh penting *lho* si Lay Oen Kwie itu. Dia itu kalau tidak salah pendiri PSMTI.

Nama kaderisasi itu adalah “Kaderisasi Revolusi”. Kalau lulus peserta mendapat gelar Manggala MANIPOL USDEK.⁹⁰ Waktu itu yang ikut kaderisasi bersama-sama saya di Jakarta ada 600 orang muda Tionghoa. Kaderisasi ini tidak ada kaitannya dengan organisasi Baperki. Semua diambil dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bung Karno berharap, dengan 600 orang ini, ia bisa menciptakan iklim kondusif dan memperkenalkan ideologi yang dicetuskan olehnya. Iklim kondusif di sini dimaksudkan untuk menghindari kejadian seperti tahun 1963 itu. Masa pendidikan saya di situ hanya

89 Salah satu tokoh pendiri PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia).

90 Manifesto Politik – UUD’45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

sekitar 5-6 bulan saja. *Nah*, di situ saya bisa berkenalan dengan Pak Nas [AH. Nasution], Pak Yani [A. Yani], dan Pak Ali Sastro [Ali Sastroamidjojo]. Mereka itu kebetulan adalah guru yang mengajar kami para kader revolusi. Setelah lulus dari kaderisasi tersebut, saya dan kawan-kawan seperjuangan mengajar di organisasi-organisasi massa di seluruh Indonesia. Kami disebar, dikembalikan ke daerah kami masing-masing. *Nah*, kalau di zamannya Soeharto, hal itu mirip dengan Penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila [P4].

Saya sempat kembali ke Yogyakarta waktu itu, dan ke Magelang. Waktu terjadi Peristiwa Oktober 1965 dan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI, sebenarnya saya tidak kena. Lalu saya bekerja di Jakarta sebagai wartawan. Waktu itu tahun 1967. Sampai pada akhirnya suatu sore tahun 1969—saya tidak tahu siapa yang memberi informasi tentang keberadaan saya di Jakarta—saya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian. Waktu itu saya baru pulang dari kerja. Saya lalu dimasukkan ke penjara di Salemba, Jakarta. Kekerasan selalu terjadi di dalam penahanan saya. *Nah*, tahun 1971, saya dipindah ke Pulau Buru bersama rombongan kedua. Di pulau ini saya mendapatkan pengalaman yang berharga yang sekaligus menyiksa batin. Saya dan kawan-kawan tahanan politik [Tapol] lainnya disuruh kerja paksa. Ada yang memperbaiki kursi, meja, lemari, ada yang berkebun, dan macam-macam. Tahun 1979 saya baru dibebaskan dari Pulau Buru. Saya itu juga bingung, ditahan tiba-tiba, tanpa diperiksa, dan diadili, terus dibebaskan juga tiba-tiba.

“3-B”

Oh iya, kalau saya tidak salah ingat, waktu itu tahun 1968. Sekolah-sekolah berbahasa mandarin di Yogyakarta juga ditutup. Kalau di Jakarta tahun 1971, Universitas Res Publica [Ureca] milik Baperki,

ditutup. Orang-orang seperti Hari Tjan Silalahi, Wanandi Bersaudara, Junus Yahya, yang mayoritas pendukung LPKB, merekalah yang menganjurkan pemerintahan waktu itu untuk menutup Ureca. Lalu Ureca di-nasionalisasi dan diganti nama menjadi Universitas Trisakti. Banyak teman-teman saya dari Yogyakarta yang dulu sekolah di Ureca. Di Yogyakarta pun cabang Ureca yang berkedung di Gedung KONI Yogyakarta juga menjadi korban penutupan. Gedung KONI Yogyakarta itu pertama kali dipakai sebagai gedung Societet Tionghoa pada zaman Belanda, lalu dipakai Chung Hua Tjung Hui [CHTH], bersama dengan Baperki, sementara Ureca menempati bangunan belakang. Yang mengelola gedung tersebut dulu bernama Teh Hong Oe. Di Surabaya juga sudah dibuka Ureca Fakultas Farmasi waktu itu.

Soeharto itu 'kan orang yang pendendam. Dia itu sakit hati waktu dimutasi dari Divisi Diponegoro Semarang ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat [SESKOAD] di Bandung. Kebetulan di SESKOAD itu dia mendapatkan bimbingan dosen bernama Kolonel Soewarto [dikabarkan, dia ini adalah agen CIA]. Soeharto waktu di SESKOAD itu teman satu kelas dengan D.I. Panjaitan dan Abdul Latief. Salah seorang kakak tingkatnya adalah Untung. Sewaktu Kolonel Soewarto meminta Soeharto menjadi ketua kelas, Panjaitan menolak. Tetapi Soewarto memaksa. Akhirnya Soeharto dipilih menjadi ketua kelas. Penolakan Panjaitan ini yang kelak menjadikan dia korban Gerakan 30 September 1965 [G30S]. Misi Central Intelligence Agency [CIA] untuk menggulingkan Bung Karno itu rupanya berhasil dan yang dipakai sebagai alat penggulingnya adalah Soeharto.

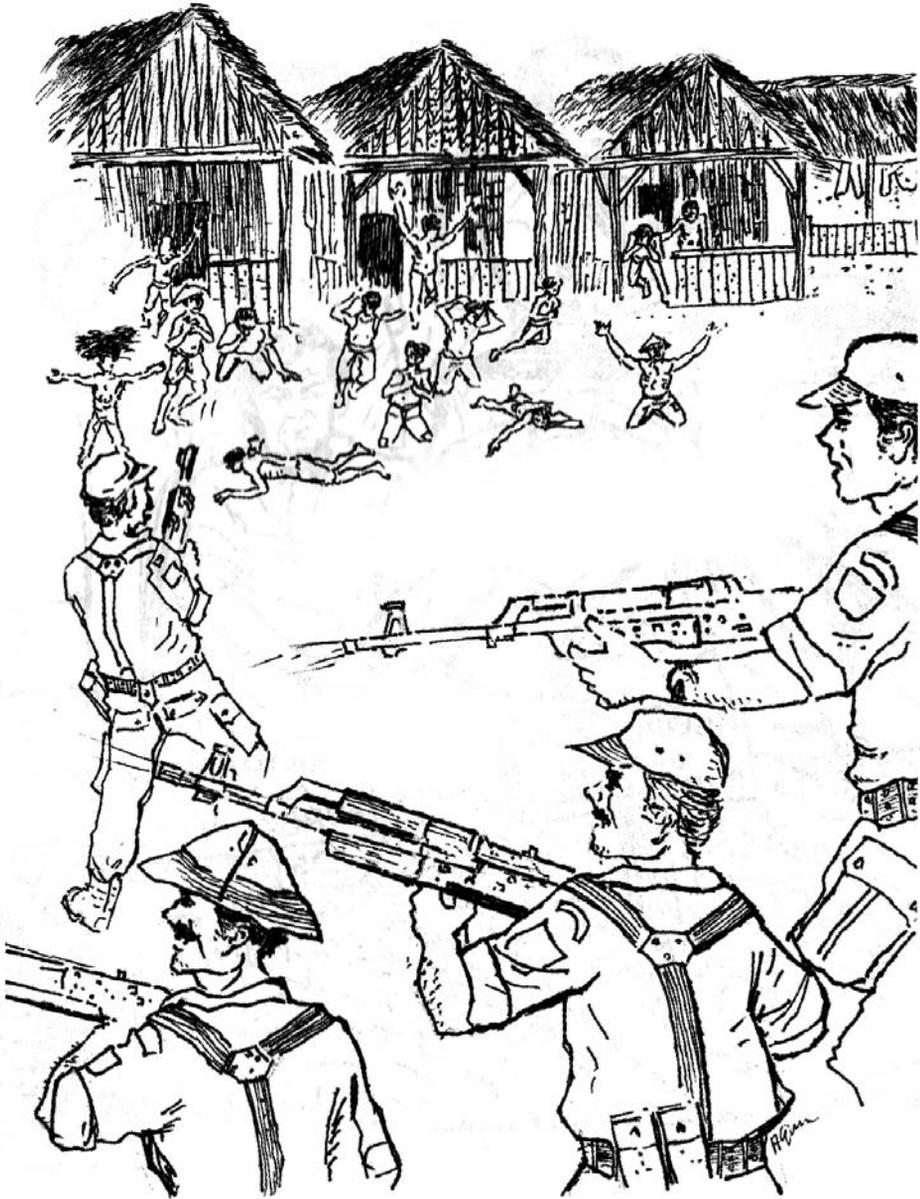
Mengenai Soeharto memaksa dan menekan golongan Tionghoa, itu bukan inisiatif dia sendiri. Di belakang dia ada banyak orang-

orang Tionghoa yang mendukung penekanan terhadap Tionghoa lain. *Kan* kala itu di kalangan Tionghoa ada dua golongan politik, yakni golongan pro-Baperki dan golongan pro-Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa [LPKB].⁹¹ Kalau Soeharto sendiri sebenarnya dekat dengan kalangan Tionghoa. *Lha wong* sewaktu di Semarang itu saja Soeharto punya beberapa sahabat kental dari golongan Tionghoa *kok*. Misalnya saja itu Liem Sioe Liong, Bob Hasan, dan Oei Tik Kiong. Nama yang terakhir ini [Oei Tik Kiong] adalah yang sangat disegani oleh Soeharto. Suaranya selalu didengar oleh Soeharto. Oei ini penghubung antara Soeharto dengan Tionghoa-tionghoa kaya dan sebaliknya. Kalau ada masalah yang menimpa para konglomerat Tionghoa yang ada kaitan dengan kebijakan pemerintah, Oei ini yang berperan penting dalam membantu mereka. Soeharto itu takut sekali sama Oei Tik Kiong. Saya kurang tahu karena apa takutnya. Mungkin Oei ini seperti ketua “Mafia dari Macao” [semacam Triad kalau di Jepang] atau mungkin ada rahasia tertentu antara mereka berdua.⁹²

Kalau harus merefleksikan tentang Tragedi '65, saya katakan bahwa berpolitik bukanlah merupakan suatu hal yang salah. Tetapi ada konsekuensi dari berpolitik itu, yakni “3 B” (Buron, Buang, Bunuh). Oleh karena itu, belajarlah dari sejarah dengan bijak.[]

91 Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa [LPKB] merupakan organisasi Tionghoa pro-asimilasi, menganjurkan dan mendorong penggantian nama-nama Tionghoa menjadi nama-nama Indonesia. LPKB berseberangan dengan Baperki yang oleh Orde Baru dianggap sebagai *underbouw* atau bawahan PKI.

92 Tentang hubungan antara Soeharto dengan Oei Tik Kiong ini lihat Baskara T. Wardaya, *Mencari Supriyadi: Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno* (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm 131-136.



Pada tahun 1972, Unit V Wanakerta Pulau Buru terjadi peristiwa berdarah. Para tentara menembaki para Tabanan Politik karena dituduh membunuh tentara, padahal tentara yang terbunuh tewas gara-gara berebut bisnis gelap sesama tentara (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Suatu Pelajaran Berharga

Pengantar

NARASUMBER kita di bagian ini bukan merupakan korban langsung dari para penguasa terkait dengan Tragedi '65. Namun demikian, ia banyak menderita karena tragedi itu. **Yong Witono**, demikian nama samarannya, berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ia berdarah campuran antara Tionghoa dan Jawa, meskipun tetap kuat perasaannya sebagai seorang keturunan "Tionghoa Babah". Ayahnya seorang pedagang garam dan hasil bumi di Karanganyar, dekat Solo. Ketika Tragedi '65 terjadi ia belum lama lulus sebagai siswa sekolah lanjutan tingkat atas.

Tanpa alasan yang dapat ia pahami, pada bulan November 1965 Ayah Yong Witono ditangkap dan dibawa ke sebuah markas militer di Karanganyar. Semula Ayahnya ditahan di tahanan Kandang Sapi, tetapi lalu dipindahkan ke tempat tahanan lain di dekat Pabrik Gula Tasikmadu. "Di sana Papa disiksa dan tidak diberi makan bersama puluhan tahanan dari Karanganyar," kata Yong Witono. Bahkan dijenguk oleh anggota keluarganya saja tidak boleh. Kadang-kadang diperbolehkan, tetapi harus dengan menyogok petugas di situ. Sebagai Tahanan Politik Ayah Yong Witono dimasukkan dalam Kategori C. Sempat akan dibuang ke Pulau Buru, tetapi karena dukungan seseorang akhirnya Ayah Yong Witono tidak jadi dibuang. Secara tidak sengaja Yong Witono pernah

menyaksikan bagaimana para tahanan dieksekusi secara keji di tempat terbuka di tepian Sungai Bengawan Solo.

Bagi Yong Witono, Tragedi 65 merupakan “pelajaran yang berharga”, khususnya bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia. Kalau tidak hati-hati, menurutnya, orang-orang Tionghoa akan selalu menjadi korban rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, menurut dia orang-orang Tionghoa perlu lebih banyak terlibat dalam kehidupan bermasyarakat supaya mereka tidak mudah dikorbankan, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1965. Ketika melihat kembali Tragedi '65, ia berucap, “Memang peristiwa itu merupakan sebuah pukulan dahsyat bagi kita, tetapi janganlah hal itu menjadi sumber dendam buat kita terhadap penguasa atau siapa pun yang membenci kita.” Tak ada sedikit pun siratan rasa dendam.

*Wawancara dengan Yong Witono dilakukan oleh anggota Komisi Sejarah PUSdEP **Chandra Halim**, seorang alumnus Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang sedang menempuh studi sejarah di program magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

NAMA saya Yong Witono, dan saya tinggal di Solo. Saya adalah seorang Ketua Rukun Tetangga [RT]. Semasa kecil sampai kelas 6 SD, saya belajar di Sekolah Rakyat. Saya menghabiskan waktu kecil saya sebagai anak seorang pedagang garam dan hasil bumi dari Karanganyar [dekat Solo]. Saya kemudian pindah ke Solo untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Solo dan melanjutkan ke SMAN 5 Solo. Tahun 1963, saya lulus dari SMA.

Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Saya ini seorang *Tionghoa Babah* [Tionghoa Peranakan].⁹³ Papa saya seorang *Tionghoa Totok* [asli] sedang Mama saya seorang Jawa. Papa suka memakai baju model Tiongkok, sedang Mama saya senang memakai *jarik* dan kebaya.⁹⁴ Saya sendiri merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Kulit saya hitam karena menuruni darah dari Mama yang Jawa. Oleh karena itu, ketika saya bersekolah di SMP dan SMA Negeri, yang rata-rata orang-orang Jawa, saya tidak merasa kaget. Sebagai seorang pedagang garam dan hasil bumi di Karanganyar, Papa saya tidak terlalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak-anaknya.

Hubungan saya dengan sesama kawan di sekolah atau di lingkungan saya tinggal biasa saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan mereka, saya sering bermain, sering berbicara akrab. Dengan anak-anak dari golongan Tionghoa Totok saya tidak banyak bergaul. Satu-satunya adik Papa saya juga menikah dengan orang Jawa, sehingga saya makin sedikit berbaur dengan orang-orang Tionghoa Totok.

Bahasa saya pun merupakan *basa Jawa campuran* [bahasa Jawa bercampur bahasa Indonesia]. Dari pihak Papa, saya hanya tahu bagaimana menjalankan ritual hari-hari raya China, seperti *Sincia*, *Cap Go Meh*, *Sembahyang Leluhur*, atau *Sembahyang Wedang Ronde*.⁹⁵ Kadangkala Papa mengajari saya bahasa aslinya dia, yakni bahasa

93 Di Indonesia etnis Tionghoa terdiri dari dua golongan, yakni Tionghoa *Totok* (masih asli dari Tiongkok) dan Tionghoa Peranakan atau *Babah* (sudah ada percampuran: Totok dengan Jawa).

94 “Jarik” adalah kain bermotif batik, yang biasanya dipakai golongan perempuan Jawa untuk menutup tubuh bagian bawah. Umumnya cukup di balut-balutkan ke badan sampai 4-5 kali. Sedangkan kebaya itu biasanya berupa baju atasan yang bermotif flora atau fauna.

95 *Sincia*: Imlek atau perayaan Tahun Baru China; *Cap Go Meh*: perayaan 15 hari setelah Imlek—*Cap Go* artinya 15; *Sembahyang Leluhur*: mendoakan leluhur yang sudah meninggal—biasanya memakai ritual atau upacara keagamaan; *Sembahyang Wedang Ronde*: biasa diadakan tanggal 22 Desember.

Hokkian [bahasa daerah Hokkian, China], tapi karena saya *wong ndablek* [orang bandel], saya tidak pernah mau mengikuti bimbingan Papa. Tahun 1970 saya menikah dengan orang Jawa.

Di Karanganyar Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia [Baperki] mampu menarik minat orang-orang Tionghoa untuk menjadi anggota ataupun simpatisannya. *Lha* organisasi ini memang sedikit mengarah ke kiri. *Deket banget* [sangat dekat] sama Partai Komunis Indonesia [PKI]. Waktu itu PKI di Karanganyar juga besar *lho*. Pengaruhnya sangat dominan. Waktu itu di Karanganyar ada banyak sekali keluarga Tionghoa. Sepanjang Jalan Lawu di Kota Karanganyar itu dulu banyak dihuni keluarga-keluarga Tionghoa, termasuk keluarga Papa saya. Papa saya itu namanya Lauw Siauk Tjwan. Dia itu *ya* hanya bisa berdagang saja. Papa ikut Baperki, tetapi itu bukan karena inisiatifnya. Ia ikut karena diajak oleh seorang temannya dari Solo.

Waktu itu di Baperki, Papa hanya merupakan simpatisan saja, bukan anggota tetap. *Lha wong* pekerjaan Papa sebagai pedagang garam dan hasil bumi saja sudah repot, *kok* mau jadi anggota, apalagi pengurus. Tentu tidak ada waktu. Alasan lain Papa ikut Baperki adalah karena Baperki dianggap Papa mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Tionghoa di Karanganyar dan Solo. Biasanya kalau ada acara yang diadakan Baperki, Papa selalu diundang. Dengan sejumlah pengurus Baperki, Papa memiliki kedekatan, tapi saya lupa nama-nama mereka.

Ditangkap Tanpa Alasan

Papa saya namanya Liauw Siauk Tjwan. Sebenarnya dia itu bukan anggota Baperki, tapi sering diundang di kegiatan Baperki. Papa itu, saya pikir *ya*, cuma simpatisan saja. Alasannya karena Baperki itu

tergolong mampu memberikan apa yang orang Tionghoa inginkan. Sekali lagi, menurut Papa, Baperki itu merupakan suatu organisasi yang bisa memperjuangkan aspirasi atau suara masyarakat Tionghoa supaya dengan mudah diterima dalam masyarakat pada umumnya.

Tahun 1963 saya lulus dari Sekolah Menengah Atas [SMA] di Solo, dan saya kembali ke Karanganyar. Saya bekerja membantu Papa, *ya jualan* garam, *ya* bumbu dapur dan hasil bumi lainnya. Waktu itu sehari sekali ada andong yang mengangkut barang kulakan dari Solo ke Karanganyar. Papa biasanya selalu memakai jasa andong untuk mengangkut barang-barang *belanjaan* dari Solo untuk dijual ke Karanganyar. Jadi komunikasi kami dengan orang-orang di Solo tidak terputus. Sejak awal September 1965, selama hampir 3,5 bulan, saya sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kandang Sapi [RS. Dr. Oen Solo]. Waktu itu banyak sakitnya. Salah satunya adalah sakit *typhus*. Jadi saya harus dirawat di rumah sakit. Biasanya yang sering menjaga saya di rumah sakit kalau tidak Mama *ya* Encik [adik laki-laki ayah] saya.

Sekitar akhir November 1965 saya mendapatkan kabar dari Encik kalau Papa ditangkap oleh orang-orang dari Kodim Karanganyar. Terus dia ditahan di tahanan milik Kodim. Dulu tempat tahananannya di belakang Gedung BNI 46 Karanganyar yang sekarang ini, depannya Foto Fujifilm “Nirwana”. Encik bilang, Papa ditangkap tanpa alasan yang jelas. Tahu-tahu, dia ditahan di Kodim. Lewat 3 bulan, waktu itu saya masih di Kandang Sapi, Papa dipindah ke tahanan model *base camp*, di daerah Pabrik Gula Tasikmadu. Sekarang tempat itu dipakai Kantor Polsek Tasikmadu. Di sana Papa disiksa dan tidak diberi makan bersama puluhan tahanan dari Karanganyar. Pada awal-awal penahanan, Papa tidak boleh dijenguk oleh keluarga, bahkan oleh Mama saya sekalipun.

Sekitar bulan Desember awal, saya keluar dari rumah sakit. Dalam perjalanan dari Solo ke rumah di Karanganyar, ketika melewati Sungai Bengawan Solo, saya melihat banyak sekali orang-orang yang diikat, *trus* dijajar di pinggiran Bengawan Solo. Saya pikir, ada apa ini. Saya sendiri waktu itu bingung. Lalu, setelah ada sedikit percakapan antara para tahanan dengan tentara-tentara yang ada—tentara Kostrad kalau tidak salah, soalnya memakai baju warna loreng hijau seperti daun dikombinasi dengan warna tahi ayam—tahu-tahu orang-orang yang merupakan tahanan itu ditembak. Begitu ditembak, tubuh mereka langsung *nyemplung* [tercebur] ke Sungai Bengawan Solo itu. Lokasinya di sekitar bawah jembatan rel kereta api. Begitu sampai di rumah, saya langsung bicara tentang apa yang saya lihat itu pada Mama dan anggota keluarga yang lain.

Sejak saya sudah keluar dari rumah sakit itu, saya diajak menjenguk Papa. Itu pun tidak setiap hari diperbolehkan, melainkan tergantung seberapa besar jumlah sogokannya. Papa ditahan di Camp Tasikmadu itu selama 1 tahun lebih 1,5 bulan. Papa masuk dalam kategori tahanan Golongan C. Sebetulnya Papa sudah mau diangkut ke Pulau Buru, tapi waktu itu saya sendiri tidak tahu, mengapa bisa bebas. Ternyata belakangan saya ketahui ada sedikit *backing-an* (bantuan) dari oknum tentara yang berpangkat waktu itu, yakni seorang saudara jauh dari Mama saya.

Tetap Bersikap Tegar

Menurut saya, Peristiwa '65 itu merupakan suatu pelajaran yang berharga buat orang-orang Tionghoa. Meskipun terkadang kita—orang-orang Tionghoa—ini tidak pernah ikut-ikutan dengan urusan politik baik di dalam ataupun di luar negeri, tetapi kerap kali kita yang selalu menjadi korban dari kebijakan rezim yang berkuasa. Boleh saja

kita ini berpolitik, boleh saja kita ini memiliki nasionalisme yang tinggi, dan boleh saja kita ini menghimpun banyak kekayaan, tapi kita harus selalu ingat, dalam hidup ini kita perlu bermasyarakat, harus mau bersikap rendah hati dan harus selalu siap menolong sesama, siapa pun orangnya, dari golongan apa pun dia. Yang sudah terjadi biarlah berlalu, dan sekarang kita mencoba bersikap lebih baik dari masa lalu. Memang peristiwa itu merupakan sebuah pukulan dahsyat bagi kita, tetapi janganlah hal itu menjadi sumber dendam buat kita terhadap penguasa atau siapa pun yang membenci kita.

Meskipun terkadang pilu rasanya jika mengingat peristiwa itu, saya tetap bersikap tegar, dan saya selalu berhati-hati dalam berkata dan bertingkah laku. Saya tidak mau peristiwa itu terulang kembali, karena dampak dari peristiwa seperti itu sangat besar. Seperti saya dan keluarga saya ini sampai sekarang dicap sebagai anak Eks-Tapol [bekas Tahanan Politik], dan dikucilkan dalam lingkungan sekitar saya tinggal. Padahal kita ini hanyalah sebagai korban permainan politik tingkat tinggi waktu itu. Orang dulu saja di Solo itu banyak guru, teknisi, dan wiraswastawan dari kalangan Tionghoa yang juga *diciduk* [ditangkap] dengan tuduhan PKI. Apakah itu bukan merupakan permainan politik tingkat tinggi dengan mengorbankan golongan lemah?[]





Tapol sering disiksa tanpa tahu apa kesalahan yang telah diperbuat (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Tiba-tiba Saya *Diciduk*⁹⁶

Pengantar

NARASUMBER yang telah menyumbangkan narasi berikut ini kita beri nama samaran Ch. Mujilah. Ia berasal dari daerah Prambanan, Yogyakarta. Seperti dikatakannya, ia berasal dari sebuah keluarga miskin yang bertahan dengan cara menjual gulai dan makanan kecil.

Sebagaimana kita singgung di bagian Pendahuluan buku ini, usia Mujilah baru 14 tahun ketika Tragedi '65 terjadi. Namun demikian, ia ditangkap dan dipenjara. Hal itu terjadi karena ada orang yang bernama-sama dengan dia yang mau ditangkap, tetapi orang yang mau ditangkap itu sedang tidak berada di tempat. Malang bagi Mujilah kita, tanpa melakukan kesalahan apa-apa, ia harus menanggung derita secara paksa dan mendekam di penjara selama 14 tahun. Ketika ia bebas, tak ada permintaan maaf resmi sedikit pun datang dari para penguasa yang telah secara keliru menangkap dan memenjarakannya.

Terhadap ketidakadilan yang ia alami itu ia hanya bersyukur bahwa akhirnya ia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Baginya hidup setelah pembebasan dari penjara ternyata tidak mudah. Ia menikah dengan sesama mantan Tahanan Politik, yang juga menjadi salah seorang narasumber kita di buku ini. Ia bertahan hidup dengan berjualan gulai

96 *Diciduk*: istilah dari bahasa Jawa yang pada tahun 1965-66 sering dipakai dan berarti penangkapan dan penahanan secara paksa.

dan makanan kecil sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunya dulu. Secara apa adanya, ia bertutur tentang penderitaannya—termasuk gempa tahun 2006 yang menimpa rumahnya—dan berharap akan ada orang yang rela membantunya.

Tuturan lebih lengkap tentang narasumber kita ini bisa dibaca dalam buku berjudul Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965 yang disusun oleh HD. Haryo Sasongko dan disunting oleh Dr. Melani Budianta. Buku itu diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Amanah-Lontar tahun 2003.

SAYA lahir di Prambanan, Yogyakarta, dengan tiga saudara kandung yang diasuh oleh kedua orangtua kami yang miskin. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami menghadapi kesulitan yang luar biasa. Satu-satunya usaha yang bisa dilakukan oleh orangtua saya hanyalah berjualan gulai kecil-kecilan. Juga dengan menitipkan makanan di warung orang supaya turut dijualkan dengan imbalan tertentu.

Tanpa saya sangka sebelumnya, pada tahun 1965 nasib buruk menimpa diri saya. Ketika itu saya baru berusia 14 tahun dan tiba-tiba saya *diciduk* (digaruk) untuk kemudian dimasukkan ke dalam Penjara Wirogunan, Yogyakarta.⁹⁷ Di penjara itu jatah makannya tidak layak. Kami diberi makan jagung sama *gereh* [ikan asin] yang sudah busuk. Setelah itu jagung diganti gaplek, tetapi lauknya tetap gereh busuk. Itu pun cuma sedikit.

97 Pada tahun 1965 itu Mujilah merupakan korban salah tangkap. Yang mau ditangkap di daerah Prambanan, Yogyakarta, sebenarnya adalah seorang guru yang namanya juga Mujilah, tetapi guru itu sedang berada di tempat lain. Lihat HD. Haryo Sasongko dan Melani Budianta, *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahan Politik 1965* (Jakarta: Amanah-Lontar, 2003).



Pada tahun 1965 banyak perempuan ditahan tanpa alasan yang jelas (Ist.)

Enam bulan kemudian saya dipindah ke Penjara Bulu, Semarang. Di Penjara Bulu, saya tinggal cukup lama. Tahun 1971 saya dipindah ke Plantungan, di dekat Semarang. Di sini aku merasa lebih longgar, bisa keluar masuk, sekalipun harus selalu diantar oleh petugas. Tiap hari ada kegiatan bercocok tanam seperti menanam singkong, sayur-sayuran dan sebagainya. Semua itu dilakukan untuk sekadar tambahan makan.

Pada bulan Oktober 1979 saya dibebaskan dari penjara Plantungan. Saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga, sekaligus menghirup udara bebas. Untuk memperpanjang sejarah hidup saya, pada tahun 1982 saya menikah dan dianugerahi 2 orang anak. Yang seorang putri, yang seorang lagi putra. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya berjualan gulai, sementara suamiku bekerja sebagai pekerja bangunan. Kemudian musibah menimpa keluarga

kami lagi. Pada tanggal 27 Mei 2006, sebuah gempa bumi yang cukup besar menimpah daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah kami hancur porak-poranda, rata dengan tanah. Berbulan-bulan kami tidur di lapangan, di bawah tenda, sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Setelah lama menunggu akhirnya datang bantuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan [P2KP]. Dengan bantuan itu kami bisa membangun rumah dengan ukuran 4x6 meter.

Begitulah nasib kami, hidup dalam kemiskinan. Segala sesuatu serba kurang. Saat ini kami tidak punya kegiatan apa-apa, kebutuhan hidup sehari-hari dibantu anak. Bila mana ada uluran tangan dari siapa saja atau dari mana saja kami akan berterima kasih sekali.[]



PERISTIWA UNIT XV
DUA TAPOL MENJADI KORBAN.
KESEWENANG-WENANGAN
PETUGAS (TOM WAL)
GARA ? SECARI KERTAS BUNGUHS.

Dua orang Tapol yang kedapatan membawa barang belanjaan dari Namlea yang dibungkus kertas koran bekas diinterogasi kemudian diamankan selanjutnya disiksa sampai tak berdaya bahkan menemui ajal (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Nasib Malang Menimpa Diriku

Pengantar

F.X. Abdul Rochim, nama pengganti untuk narasumber kita berikut ini, adalah suami dari Ibu Ch. Mujilah, yang narasi singkatnya baru saja kita baca. Abdul Rochim berasal dari sebuah keluarga miskin dengan delapan orang anak di Magelang, Jawa Tengah.

Tanpa alasan yang jelas, pada tahun 1965 ia ditangkap dan dipenjara. Setelah ditahan di Yogyakarta, ia kemudian dibawa ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, dan mendekam di sana selama 14 tahun, hingga saat pembebasannya tahun 1979.

Tidak banyak yang Abdul Rochim bisa ceritakan untuk kita di sini. Ia hanya bertutur bagaimana sulitnya ia berjuang untuk sekedar hidup dari hari ke hari bersama keluarganya yang sangat sederhana. Sebagaimana diceritakan oleh istrinya di muka, pada tahun 2006 rumahnya runtuh karena gempa dan sejak itu hidup menjadi lebih sulit. Namun demikian, ia tidak putus asa. Ia masih terus berharap sebisanya.

SAYA dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah, dan hidup bersama 8 (delapan) orang saudara kandung. Kami dibesarkan oleh Ayah dan Ibu dalam situasi rumah tangga yang miskin. Kakak pertama saya telah meninggal setahun yang lalu.⁹⁸ Saya masih ingat, sewaktu saya

98 Sekitar tahun 2009.

masih kecil, sawah Ayahku cuma sedikit. Sawah itu ditanami kapas atas perintah pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Akibatnya kebutuhan untuk sehari-hari semakin tidak cukup, bahkan makin parah.

Karena adanya tekanan ekonomi Ayah-Ibu tidak bisa menyekolahkan kami anak-anaknya. Hanya saya dan dua adik saya yang bisa tamat SD. Kemudian saya bekerja di bangunan bagian kayu.

Lalu nasib malang menimpa diriku. Pada tahun 1965 saya dimasukkan ke dalam penjara di Yogyakarta sini. Tiga bulan kemudian, saya dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Di sana jatah makan sangat tidak layak. Kadang tiga kali sehari kami diberi makan jagung, dengan jumlah 150 butir mata jagung. Ketika jagung habis makanan kami diganti *gaplek*, dan ketika *gaplek* habis makanan kami diganti bulgur. Begitulah yang terjadi selama bertahun-tahun. Guna menjaga kondisi fisik agar tetap sehat, setiap hari saya berusaha keluar dari penjara untuk bekerja dan mencari tambahan makanan, khususnya dengan bekerja sebagai tukang kayu. Setelah 1971 baru ada perubahan jatah makan yang wajar.

Empat belas tahun lamanya saya mendekam di dalam penjara. Pada tanggal 8 Desember 1979 saya dibebaskan. Waktu itu yang dibebaskan dari Nusa Kambangan bersama saya ada 220 orang, ditambah mereka yang dibebaskan dari penjara Pekalongan dan penjara-perempuan Plantungan, Jawa Tengah. Upacara pembebasan berlangsung di Gedung Kridosono, Yogyakarta.

Setelah bebas, untuk menyambung sejarah hidup, pada tahun 1982 saya menikah. Kami dikaruniai dua orang anak, satu putri dan satu putra. Demi kebutuhan hidup sehari-hari saya bekerja di proyek-proyek bangunan. Nasib malang menimpa diriku lagi. Tanggal 27 Mei 2006 di Yogyakarta terjadi gempa bumi hebat. Rumah kami

hancur, rata dengan tanah. Beberapa bulan kami tidur di lapangan, di bawah tenda. Kemudian ada bantuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan [P2KP]. Berkat bantuan dari P2KP itu kami bisa membuat rumah dengan ukuran 4x6 meter.

Begitulah nasib rumah tangga miskin. Umur terus bertambah dan keadaan fisik makin melemah. Sementara itu saya tidak mempunyai kegiatan apa-apa yang bisa mendatangkan penghasilan. Tambahan lagi, sekarang ini saya selalu sakit-sakitan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, saya dan istri saya dibantu oleh anak kami. Bantuan dari pemerintah yang kami harapkan sampai sekarang tak kunjung tiba. Oleh karena itu, kalau ada uluran tangan dari siapa saja, atau dari mana saja, yang sudi atau mau membantu keluarga kami, kami akan dengan penuh rasa terima kasih menerimanya. Kami hanya ingin agar supaya sisa-sisa kehidupan kami bisa sedikit lebih layak dan sejahtera. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.[]



*Sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan Tapol lain mencakul ladang di Unit III
Wanayasa Pulau Buru (Sketsa Gumelar Demokrasno).*

Derita Tiada Henti

Pengantar

ANAK keempat dari enam bersaudara, Rahardjo adalah narasumber kita selanjutnya. Ia lahir di desa Gatak, Yogyakarta. Waktu kecil pekerjaan sehari-harinya sebagai anak desa adalah menggembalakan kerbau milik keluarga, meskipun ia pernah mengenyam pendidikan guru hingga pada tingkat sekolah menengah.

Pada bulan November 1965 tiba-tiba saja ia mendapat panggilan ke Kelurahan. **Rahardjo** (sekadar nama samaran saja) diberitahu bahwa ia akan diberi surat keterangan dari sebuah satuan militer. Ternyata pemberitahuan itu bohong belaka. Ia justru ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan sebagai anggota Pemuda Rakyat, sebuah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Tanpa diberi kesempatan untuk menerangkan diri, Rahardjo langsung dimasukkan ke dalam truk dan diangkut ke penjara. Semula ia dipenjarakan di Yogyakarta, tetapi lalu dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, kemudian ke Ambarawa (keduanya di Jawa Tengah), dan selanjutnya kembali ke Nusa Kambangan. Akhirnya ia dibuang ke Pulau Buru, di Maluku. Sebagaimana para tahanan politik yang lain, banyak sekali duka derita yang ia alami di Pulau Buru, termasuk pengalaman kerja paksa. Tahun 1979 ia dibebaskan.

Ketika kembali dari Pulau Buru, ia merasa sedih karena kedua orangtuanya tidak menyambutnya. Mereka telah lebih dulu meninggal. Setelah itu ia tidak bisa berbuat banyak. Kesulitan dan derita hidup terus menderanya, termasuk gempa yang menghantam Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006. Ia hanya bisa menggantungkan hidupnya pada uluran tangan orang lain, termasuk pemerintah. Rahardjo mengakui bahwa hidup tidak mudah baginya. Meskipun demikian, ia berusaha untuk terus bertahan. Karena adanya sejumlah keterbatasan, narasi yang ia sampaikan pada kita di sini tidak banyak. Padahal menurutnya kalau diceritakan semuanya narasi itu bisa panjang sekali.

SAYA dilahirkan dari keluarga Kartorejo di Gatak, Yogyakarta, sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Sejak kecil saya ikut orangtua yang bekerja sebagai buruh tani. Saya membantu orangtua sejak saya masih menjadi seorang anak kecil penggembala kerbau hingga saya berumur 20 tahun.

Pada tahun 1952 saya masuk Sekolah Rakyat (SR) sekarang disebut SD atau Sekolah Dasar. Tahun 1958 saya melanjutkan ke jenjang SMP. Tahun 1962 saya masuk S.G.C. atau Sekolah Guru "C".

Pada tahun 1965 saya mendapat surat panggilan dari kantor kelurahan. Katanya untuk mendapatkan surat keterangan dari sebuah satuan militer pada tanggal 19 November 1965. Kenyataannya di kantor kelurahan, saya disuruh naik truk yang dikawal oleh tentara. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam penjara sebagai tahanan perang [*sic.*] G30S. Saya dimasukkan ke dalam penjara, tetapi saya tidak tahu masalahnya apa, *kok* saya dimasukkan penjara.

Di dalam penjara, untuk makan kami harus antri, dilayani oleh orang hukuman atau napi (narapidana) dengan makanan yang

sebetulnya tidak layak untuk dimakan. Tetapi demi mempertahankan hidup akhirnya saya mau makan juga. Waktu malam saya dipanggil untuk diperiksa, disuruh mengaku sebagai anggota Pemuda Rakyat (PR). Kalau tidak mengaku, saya akan dianiaya dengan cara yang tidak berperikemanusiaan.

Pada suatu tengah malam saya dipanggil. Saya diminta berkumpul di ruangan yang telah disediakan. Selanjutnya, saya dibuang ke Pulau Nusa Kambangan dengan naik kereta api yang jendelanya tidak bisa dibuka. Waktu itu bulan Februari 1966. Setiba di Nusa Kambangan kami dilayani *cadong* (jatah) makan jagung oleh para napi yang kejam-kejam. Mereka berlaku sangat kejam kalau menghadapi teman-teman saya. Di sana (di Nusa Kambangan) saya dan teman-teman dipekerjakan dengan jatah makan jagung yang amat sedikit. Banyak teman-teman yang di Nusa Kambangan mati kelaparan. Banyak juga yang disiksa oleh para napi lain.

Pertengahan tahun 1966 saya dipindah lagi ke penjara Ambarawa, Jawa Tengah. Jatah makan tetap jatah makan penjara seperti yang sudah-sudah. Untungnya ada tambahan makanan dari keluarga tahanan yang mampu dan bisa membesuk. Dari mereka, kami mendapatkan tambahan makanan maupun pakaian.



Atas dasar tuduhan-tuduhan tertentu yang belum terbukti, seringkali para tahanan dipukuli (Sketsa Gumelar Demokrasno)

Tahun 1969 saya dibuang lagi ke Nusa Kambangan, lalu diteruskan ke Pulau Buru. Di Pulau Buru tidak ada napi, tapi kami dikawal oleh tentara. Di Pulau Buru kami dipekerjakan untuk membuka atau memabat hutan guna ditanami padi gogo, sayuran, ketela pohon (singkong) atau palawija. Kami juga disuruh membuat bendungan, sawah, jalan, dan rumah. Di tengah itu semua, jatah makan tetap minim.

Tahun 1979 saya dibebaskan pulang ke masyarakat. Waktu saya dibebaskan, kedua orangtuaku tidak tampak menyambut. Mereka sudah tidak ada. Haru rasanya hati ini merindukan mereka. Waktu itu yang ada hanya saudara-saudaraku saja disertai sanak saudara dan tetangga. Setelah bebas saya diberi KTP yang diberi ciri “ET” yang berarti “Eks Tapol”.

Tahun 1982 saya menikah dan membentuk keluarga baru. Kami diberi dua orang *momongan* (anak). Setapak demi setapak saya menghidupi keluarga. Saya bisa bikin rumah yang *waton eyup* (asal bisa untuk berteduh). Tahun 2006 rumah itu kena gempa bumi sehingga roboh. Kami lalu dibuatkan rumah oleh Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan [P2KP], dengan prinsip yang sama yakni asal bisa untuk berteduh. Sekarang ini saya tinggal di rumah itu sambil mencari nafkah semampunya karena sudah usia lanjut alias sudah tua. Kadang-kadang, ada anggota keluarga saya yang sakit. Dalam situasi demikian, saya sering menjadi bingung bagaimana harus memeriksakan atau mencarikan obat.

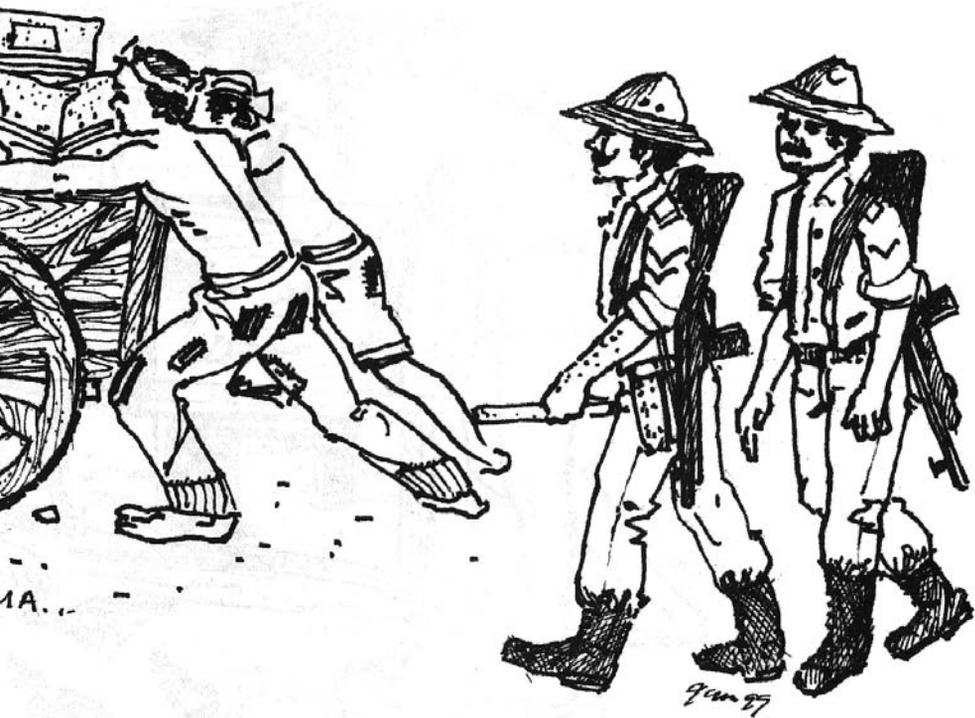
Dulu saya bisa mendapatkan “Raskin” (jatah beras untuk orang miskin dari pemerintah), “Jamkesmas” (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan “Jamkesos” (Jaminan Kesehatan Sosial), tetapi sekarang semua itu tiba-tiba dicabut oleh kader-kader masyarakat. Saya lalu bertanya-tanya, apakah hal itu mereka lakukan karena saya bekas Tapol (tahanan politik) *ya*? Atau bagaimana? Saya tidak tahu. Saya *cuma* bisa menerima. Tapi akibatnya kalau ada anggota keluarga sakit *ya* saya cuma bisa menyerah. Biaya pengobatan itu sangat mahal, sementara untuk biaya makan sehari-hari saja belum cukup.

Demikianlah kisah saya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Penderitaan yang saya alami sejak lahir sampai sekarang tidak ada hentinya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkah kepada orang-orang atau lembaga-lembaga kemanusiaan agar bisa berbaik hati memberikan bantuan bagi kehidupan saya.

Kisah ini hanya sebagian saja yang saya tulis. Sebab kalau harus saya tulis semuanya mungkin tidak akan selesai dalam waktu yang tak terhingga.[]



- "Korve BAN"



Para Tapol mengangkut hasil panen padi dan palawija sejauh satu kilometer di bawah pengawasan tentara (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Aku Anak Tapol dan Istri Tapol

Pengantar

BERBEDA dengan kebanyakan narasumber lain, penutur narasi kita kali ini bukanlah korban langsung para penguasa dalam kaitannya dengan Tragedi '65. Mirip dengan Yong Witonon di depan, ia tidak pernah dipenjarakan, diinterogasi atau disiksa karena dituduh terlibat dengan apa yang terjadi pada tahun 1965. Meskipun demikian, ia menderita banyak sebagai akibat dari peristiwa itu.

*Ketika Tragedi '65 berlangsung usianya masih terlalu muda untuk bisa memahaminya. Dengan alasan yang kurang masuk akal, Ayahnya ditangkap dan dipenjarakan selama 13 tahun. Di luar kemauannya, ia dijodohkan dengan seorang mantan Tahanan Politik '65. Karena itu semua, **M.M. Sutini**, begitu nama samaran yang kita pilihkan untuknya, harus mengalami penderitaan beruntun. Bahkan ketika ia telah membentuk keluarganya sendiri, penderitaan itu seakan tidak pernah berakhir.*

Gara-gara Ayahnya ditangkap dan dipenjarakan, hidup keluarga Sutini menjadi kacau balau penuh dengan penderitaan. Ia harus bekerja keras untuk bisa tetap bertahan hidup. Tuter Sutini, "Waktu itu usiaku 12 tahun. Aku harus ikut cari makan bersama Ibuku. Adikku yang nomor empat bertugas mengurus adik yang masih kecil di rumah. Tiap

hari aku ikut Ibu mencari daun bambu untuk dijual kepada orang-orang yang membuat tempe gembus. Setiap hari aku harus berjalan jauh.”

Sebagai anak kecil, berjalan jauh setiap hari untuk mencari makan tentu sangat melelahkan. Namun demikian, tidak kalah melelahkan adalah perjalanan hidup selanjutnya berupa cap yang ia dapatkan sebagai anak Tahanan Politik yang sekaligus istri seorang Tahanan Politik. Tekanan dari tetangga sekitar amat berat, dan hal ini tidak hanya dia yang mengalaminya, melainkan juga dua orang anaknya. Lebih dari itu, di tengah penderitaan tersebut terjadi pula konflik internal dalam keluarga yang tentu saja menambah beratnya beban hidup. “Walau aku dan anak-anakku hidup di luar penjara, tetapi siksaan lahir dan batin, siksaan jiwa dan raga yang kami alami sama rasanya dengan yang berada di dalam penjara,” ujar Sutini. Syukurlah, ia memiliki iman yang kuat, dan dengan iman itu, ia terus berusaha bertahan dari hari ke hari.

Ketika harus berefleksi atas apa yang ia alami sebagai anak dan istri mantan Tahanan Politik, Sutini mengatakan bahwa dia sering merasa gelisah dan termenung sendiri. Meskipun demikian, ia tidak putus asa. Ia tetap bersyukur karena di sekitarnya selalu saja muncul orang-orang atau kelompok yang bersedia membantunya. Berkat orang-orang ini, Sutini kembali memiliki harga dirinya. Sebagaimana bisa kita lihat dalam narasi di bawah, ia bersaksi, “Oleh mereka aku merasa masih dianggap sebagai orang seperti orang-orang lainnya. Aku pun merasa masih berguna bagi orang lain.”

Ada sedikit catatan tambahan tentang narasi Sutini. Pertama, nama-nama yang ada dalam narasinya sengaja disamarkan dengan maksud menghormati privasi para pemiliknya. Kedua, Sutini dan keluarganya menjadi salah satu narasumber untuk film “40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy.” Film karya Dr. Robert Lemelson dari University of California-Los Angeles tersebut selesai diproduksi pada tahun 2009 dan

sejak itu telah diputar di Los Angeles, Sarajevo, Yogyakarta, Jakarta, New York, serta sejumlah kota besar lain di dunia.

WAKTU itu bulan Agustus tahun 1966. Di kampungku akan diadakan perayaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI. Waktu malam hari Bapak Ketua RK yakni Rukun Kampung—kalau sekarang RW atau Rukun Warga—datang ke rumah bermaksud menyuruh Bapakku untuk menabuh gamelan sebagai iringan pertunjukan kethoprak. Bapakku menolak karena tanggal itu ia ada tugas lain ke luar kota. Lalu Pak RK marah-marah dan pergi tanpa pamit. Dua jam kemudian ia datang lagi, tapi kali ini sambil mengajak polisi yang tinggalnya di kampung sebelah.

Polisi itu bernama Pak Ilyas dan sebetulnya ia adalah juga teman Bapak saya sendiri. Anehnya, Pak Ilyas ini memaksa Bapakku supaya mematuhi perintah Pak RK dan menantang sambil mengatakan, “Kalau kamu tidak mau berarti kamu Partai Komunis Indonesia [PKI]. Lihat saja nanti.” Setelah itu, selang dua minggu kemudian Bapakku *diciduk* (ditangkap) di kantornya. Ia lalu dipenjarakan di Penjara Wirogunan, Yogyakarta, selama 4 tahun sebelum kemudian dibuang ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Ia ditahan di pulau tersebut selama 9 tahun, sehingga total ia dipenjara selama 13 tahun.

Karena Aku Miskin

Sebelum di penjara, Bapakku adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) yang bijaksana. Setiap ada pemilihan RT Bapakku selalu dipilih lagi. Waktu membuat gedung SMP Negeri 7 pengorbanan Bapakku sangat besar. Setiap bulan gaji Bapakku dari kantor disumbangkan untuk membayar tukang-tukang guna membangun sekolah tersebut. Kebun Bapakku digali untuk pembuatan batu bata yang jumlahnya mencapai

10.000 buah biji. Bapak juga membantu proses pembakarannya. Semua disumbangkan oleh Bapak, dengan perjanjian bahwa besok kalau anak-anaknya Bapak masuk sekolah di SMP Negeri 7 mereka tidak perlu bayar. Apa boleh buat, setelah Bapakku dipenjara, bahkan kakakku yang sudah sekolah di situ dan baru kelas II justru dikeluarkan. Dia tidak boleh sekolah dengan alasan ia adalah “anak PKI”.

Setelah Bapak dipenjara keluargaku menjadi sangat menderita. Ibu yang masih punya bayi berumur 6 bulan tidak bisa bekerja. Harta benda yang ada dijual untuk makan dan untuk mengirim makanan buat Bapak di penjara. Itu pun setiap kali Ibu harus setor beras sebanyak 10 kilogram ke petugas. Kalau tidak Ibu tidak boleh kirim makanan ke Bapak. Kalau Ibu mengirim nasi satu besek penuh disertai telur 10 butir, yang sampai ke Bapak biasanya hanyalah nasi sebanyak tiga suap, sedang telurnya sama sekali tidak sampai karena sudah dirampas para penghuni penjara yang lain.

Setelah Ibu tidak punya apa-apa, kakakku yang nomor satu ikut tinggal bersama seorang saudara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dekat Sumatera. Kakak nomor dua ikut tinggal bersama saudara dari Bapak di Jakarta. Sementara itu, aku sebagai anak ketiga tinggal bersama Ibu dan menjadi anak yang paling besar di rumah. Waktu itu usiaku 12 tahun. Aku harus ikut cari makan bersama Ibuku. Adikku yang nomor empat bertugas mengurus adik yang masih kecil di rumah. Tiap hari aku ikut Ibu mencari daun bambu untuk dijual kepada orang-orang yang membuat tempe gembus. Setiap hari aku harus berjalan jauh. Kalau ke arah selatan, aku berjalan sampai mencapai Pasar Bantul, Yogyakarta. Kalau haus aku hanya bisa minum air sumur. Tak sempat aku merasa kelelahan. Ketika daun bambu sudah terjual, uangnya tidak banyak. Bahkan tidak cukup untuk membeli setengah

kilogram beras. Yang bisa dibeli hanyalah setengah kilogram gaplek, untuk ditumbuk dan kemudian dibuat bubur.

Kehidupan seperti itu kami jalani bertahun-tahun hingga adikku yang nomor 6 jatuh sakit. Badannya kurus, kakinya bengkak-bengkak. Mungkin itu yang dinamakan penyakit busung lapar. Melihat keluargaku seperti itu saudara-saudara Ibu tidak mau membantu. Padahal waktu keluargaku masih makmur mereka selalu dibantu Bapak dan Ibu. Sekarang ini mereka malah menghina keluargaku. Syukurlah suatu saat ketika aku dan Ibu pagi-pagi mau berangkat mencari daun bambu, kami bertemu dengan Bu Daryo yang suaminya juga dipenjara. Bu Daryo menyuruh Ibu *sowan* atau menghadap Romo Pastor di Gereja Katolik Kumetiran, Yogyakarta, untuk menceritakan nasib kami.

Di Gereja, Ibu dan kami, anak-anaknya, diterima oleh Romo Lim. Lalu kami semua dibawa ke Poliklinik untuk diperiksa. Kami diberi obat seminggu sekali tanpa harus membayar. Kami juga diberi susu secukupnya, sampai adikku yang busung lapar akhirnya bisa sembuh. Romo Lim memberi alamat dan menganjurkan kami supaya menemui Romo De Blot di Sekolahan di Jl. Trenggono, Yogyakarta, dan menyerahkan kepadanya surat dari Romo Lim. Waktu aku dan Ibu mau mencari Romo De Blot, saudara-saudara Ibuku mengatakan bahwa kami membuat malu saudara-saudara kami, karena hal itu *kan* berarti mengemis.

Akan tetapi, setelah aku dan Ibu sudah bertemu Romo, dan mendapat bantuan dari Rumah Sakit Panti Rapih berupa dua kilogram susu per bulan, dan setiap dua minggu sekali mendapat bulgur, tepung, dan pakaian dari bruder-bruder di Sekolah Pangudi Luhur, saudara-saudara kami itu lalu berubah. Setiap kami datang dari mengambil jatah, mereka langsung berebutan minta diberi bagian dari jatah itu.

Sejak usia 14 tahun, aku sudah bekerja menjadi pembantu rumah tangga [PRT] di sebuah keluarga. Kalau besok pagi waktunya gajian, hari ini Ibu sudah mendatangi keluarga tersebut untuk minta uang guna memberi makan adik-adikku serta biaya sekolah mereka. Setelah dewasa, oleh Ibu aku dijodohkan dengan orang yang belum aku kenal. Setelah menikah aku baru tahu bahwa ternyata suamiku juga bekas Tapol (tahanan politik). Jadi Bapak dan suamiku sama-sama bekas Tapol. Hati yang sudah sakit menanggung derita menjadi semakin sakit setelah mengetahui itu semua. Belum lagi ternyata suamiku pernah menghamili adik kandungnya sendiri sampai punya anak satu laki-laki. Hatiku benar-benar hancur! Lebih dari itu, kalau suamiku punya masalah dengan saudara-saudaranya, yang menjadi sasaran amarah mereka adalah aku dan anak-anakku. Suamiku itu orangnya kejam. Kalau menyiksa aku dan anak-anak, ia seperti sedang menyiksa seekor binatang. Apa yang dipegangnya selalu digunakan untuk memukulku. Banyak teman-teman yang menyuruh supaya aku bercerai saja, tetapi aku sadar hal itu tidak mungkin karena aku menikah di Gereja. Oleh karena itu, walau sepahit apa pun aku harus tetap bertahan.

Melihat kehidupanku yang seperti itu, adik-adikku yang dulu aku carikan makan dan biaya sekolah bukannya merasa kasihan melainkan malah membenci aku. Alasan mereka karena aku miskin. Adik yang ditinggal Bapak ke penjara ketika ia berusia 6 bulan dan sekarang sudah menjadi orang berhasil tidak terlalu mau tahu tentang hidupku. Adik yang lain juga kurang bersahabat. Anaknya sering memusuhi anak-anakku.

Tak Punya Tempat Tinggal

Tahun 1988 aku mulai tinggal di daerah Kalasan, di bagian timur Yogyakarta. Anakku baru berumur 5 tahun dan aku sedang mengandung anak yang kedua yang usianya baru 4 bulan dalam kandungan. Waktu anakku yang kedua lahir dan berumur 3 bulan ada tetangga yang sengaja membuang sarang ayam (*petarangan*) yang sedang digunakan induk ayam untuk mengerami anak-anaknya dan banyak sekali kutunya. Sarang itu sengaja dibuang ke dinding rumah kami yang terbuat dari bambu sehingga semua kutunya masuk ke dalam rumah, persis di tempat kami tidur.

Kami sekeluarga pun dimakan kutu. Yang paling parah adalah tubuh anakku si kecil. Dari kepala sampai ujung kaki tubuhnya banyak dimakan kutu. Hal ini tidak hanya berlangsung sebentar, melainkan dari usia 3 bulan hingga usia 1,5 tahun. Baru setelah berusia 1,5 tahun itu dia bisa sembuh. Setiap hari anakku yang besar selalu disakiti oleh tetangga. Waktu anakku yang besar kelas 3 SD, ia ditenggelamkan di sumber air di desa itu oleh orang-orang dewasa. Semula mereka berpura-pura melatih renang. Yang seorang memegang tubuh anakku, yang seorang lagi menenggelamkan kepalanya sampai pingsan karena perutnya penuh air. Untunglah ketika terjadi, hal itu segera diketahui oleh orang yang baik sama aku meskipun dia sendiri pura-pura tak mengenalku dan tak pernah mau menyapaku. Setiap kali ada orang yang merencanakan suatu kejahatan kepada keluargaku, dia selalu memberi tahu melalui temanku di kampung sebelah.

Hampir setiap hari anakku selalu ada yang menyakiti. Suatu ketika setelah anakku yang kecil sekolah Taman Kanak-kanak, pulang sekolah dia pergi bermain dengan empat orang anak lain. Begitu datang, oleh anak-anak yang lain itu anakku ditendang. Dia pun jatuh, lalu diinjak-injak oleh empat orang anak tersebut. Ketika Ibu Gurunya

lewat dan melihat hal itu, anakku lalu disuruh pulang. Ketika anakku yang besar kelas 2 SMP dan pagi-pagi pukul 6 menunggu bus mau berangkat sekolah sambil jongkok di pinggir jalan, tiba-tiba anaknya Pak Lurah lewat naik motor mau sekolah juga. Sekonyong-konyong dia berhenti di dekat anakku dan berulang kali melayangkan kakinya di kepala anakku. Beberapa hari kemudian hal itu diulangi lagi.

Pada suatu hari Minggu pagi aku pergi ke pasar. Sepulang dari pasar, aku ketahui bahwa anakku yang besar baru saja disiksa oleh orang-orang desa. Ia dituduh telah mencuri sepeda dan dipaksa untuk mengakui bahwa sepeda, ayam, lampu neon, dan barang-barang lain yang hilang di desa itu anakku yang mencurinya. Padahal sebenarnya malingnya *ya* mereka-mereka itu sendiri. Lalu anakku ditelanjangi, disuruh jalan pakai tangan sementara kakinya di atas, sambil dicambuk, dan dipukuli. Ia harus menjalani semua itu dari pos ronda hingga ke desa sebelah, yang jaraknya kira-kira 200 meter. Setiap kali anakku jatuh, ia lalu diinjak-injak pakai sepatu tentara. Kemudian, ia disuruh jalan lagi sambil dicambuki dan diinjak-injak sampai di desa sebelah. Yang menyiksa tetangga-tetangga, tapi mereka sebenarnya adalah seorang Brimob, seorang Polisi, seorang anggota AURI, dan seorang tentara. Ada juga yang namanya Gombloh. Si Gombloh ini sebenarnya pencurinya yang asli.

Sepulang dari pasar itu, aku melihat punggung dan wajah anakku penuh luka. Hatiku benar-benar hancur. Meskipun demikian, aku tetap berusaha sabar menerima semua ini. Setelah anakku sembuh, ada pemuda yang pura-pura baik sama anakku. Ia mengajak anakku mencari pasir di sungai. Katanya nanti kalau sudah mendapat banyak pasir, pasir itu akan dijual dan uangnya akan dibagi dua. Anakku dipaksa bekerja terus sementara dia hanya tiduran di pinggir sungai. Setelah mendapat 2 rit pasir, pasir itu benar dijual. Satu rit pasir

harganya Rp 13.000,- . Dua rit pasir berarti harganya Rp 26.000,-. Anehnya, anakku hanya diberi uang Rp 2.000,-. Mengetahui hal itu, aku lalu melarang anakku untuk mencari pasir di sungai itu. Ia pun mencari pasir di sungai lain dekat rumah, dan bisa mendapatkan 2 rit pasir sendiri.

Suatu ketika, sekitar pukul 8 pagi anaknya Pak Mkr, salah seorang tetanggaku, datang membawa mobil Kijang. Dia bilang padaku mau ambil pasir karena katanya sudah ia beli. Aku mengizinkannya, karena aku mengira bahwa anakku telah menjual pasir kepadanya. Ternyata anakku tak menjualnya. Aku pun lalu mengurus masalah ini ke rumah Pak Mkr. Di rumah itu, anaknya Pak Mkr berkilah bahwa yang menjual pasir kepadanya adalah pemuda yang namanya aku sebut di atas dan uangnya sudah diberikan kepadanya. Anakku pun menangis. Aku hanya bisa menghibur anakku dan bilang, “Begini nak, sudah diterima saja. Barangkali pasir itu mau dibawa bekal mati.”

Entah kebetulan entah tidak, siang itu sekitar pukul 13.00 ketika aku mau mengantar anakku yang kecil Sekolah Minggu, aku lihat di depan rumah pemuda itu orang-orang desa pada berkumpul. Ada banyak yang menangis. Lalu aku bertanya, ada apa *kok* orang-orang pada berkumpul di situ. Orang-orang yang aku tanya menjawab bahwa pemuda yang mengambil pasir anakku itu memanjat pohon sengon guna mengambil daunnya untuk memberi makan sapinya. Di pohon itu ia kesetrum listrik, jatuh, dan mati. Sekitar pukul 8.00 pagi aku mengucapkan kata-kata di atas, sekitar pukul 13.00, kata-kata itu menjadi kenyataan.

Peristiwa itu tidak pernah kulupakan dan menjadi pelajaran. Keluargaku selalu disakiti, tetapi aku selalu sabar dan mengalah. Dan ternyata ucapanku sering menjadi kenyataan. Aku yakin kalau Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Adil. Tuhan tidak akan membiarkan

hambaNya. Tuhan menyuruhku memanggul “Salib” yang kecil, tetapi karena aku kuat, aku pun disuruh memanggul Salib yang agak besar, dan yang lebih besar lagi, dan seterusnya, dan ternyata aku kuat. Tetapi kekuatanku itu semua datang dari Tuhan. Semua masalah dan penderitaan dalam keluargaku, aku serahkan pada Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan aku kekuatan. Hinaan, fitnah, siksaan, dan caci maki, semua aku terima dengan hati sabar dan sikap mengalah.

Perlu aku jelaskan pemuda yang mati kena setrum listrik itu namanya Msd. Setelah Msd mati seharusnya kematian itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Tetapi ternyata tidak ada yang menyadari hal itu. Malah anakku tetap disiksa. Kepalanya di-*plintheng* (ditembak dengan ketapel) pakai kelereng. *Mlintheng*-nya (cara mengetapelnya) adalah dengan menempelkan ketapel itu di kepala. Akibatnya, kepala anakku “bocor” dan berdarah di tiga tempat. Setelah anakku tidak sekolah karena anakku sering sakit kepala akibat siksaan, anakku mencari pasir untuk membuat batako. Saat pasirnya sudah banyak dan mulai menggunung tiba-tiba Mbah Kaum datang membawa sapi untuk dimandikan di sungai. Sebelum dimandikan sapi itu dibawa berputar-putar di tumpukan pasir sampai pasir itu menjadi rata. Oleh anakku pasir itu dikumpulkan kembali. Tetapi oleh Mbah Kaum sapi dibawa berputar-putar lagi. akibatnya anakku marah, dan sapi dilempar batu. Mbah Kaum balik marah-marrah, tetapi waktu itu pertengkaran bisa diselesaikan. Perlu diketahui Mbah Kaum ini adalah kakek dari si anggota AURI di atas.

Seminggu setelah pertengkaran dengan Mbah Kaum, ketika anakku sedang bermain di rumah temannya di desa lain, anakku dicari si AURI-nya. Ia datang berdua dengan seorang anak tentara. Anakku diajak pergi. Karena merasa tidak punya masalah anakku tidak menaruh rasa curiga apa pun. Ternyata ia dibawa ke tengah

sawah, jauh dari penduduk. Di sana anakku disiksa oleh dua orang itu. Ia diinjak-injak. Kepalanya dihantam pakai batu besar. Setelah anakku pingsan mereka pergi. Untunglah ada orang yang lewat dan menolong.

Anakku pun pulang. Sesampai di rumah ia menceritakan kejadian itu padaku. Aku bertanya pada anakku, apakah dia bersalah atau tidak. Kukatakan bahwa kalau dia bersalah aku tidak akan membelanya; tetapi kalau dia tidak bersalah sampai di mana pun aku akan mengurus dan membelanya. Anakku mengatakan, “Kalau Mamak (Ibu) tidak percaya, lebih baik aku dibunuh saja Mak”. Berkat kata-kata itu aku yakin kalau anakku tidak bersalah. Oleh karena itu aku pergi ke kantornya AURI. Di sana aku menuju ke Penjagaan I. Dari Penjagaan I aku diberi pengantar ke Penjagaan II dari penjagaan II aku diberi pengantar ke Penjagaan III. Di Penjagaan III aku didamaikan, tetapi aku tidak mau. Masalah pun diproses sampai ke Detasemen Polisi Militer [Denpom]. Di Denpom, aku didampingi tiga orang pengacara. Di ruang sidang, aku dikeroyok orang-orang satu desa yang jenisnya laki-laki semua. Mereka datang ke Denpom. Tetapi alangkah malunya, karena mereka semua diusir dari ruang sidang. Yang tinggal *ya* hanya si AURI itu sendiri.

Esok harinya aku meninggalkan desa itu untuk pulang ke tempat orangtuaku atas perintah dari Denpom. Setelah aku naik bus, Pak Dukuh dan semua warga marah-marah. Mereka dendam padaku. Lalu rumahku dirusak. Barang-barang seisi rumah dijarah. Batakonya dicongkeli. Kayu-kayu, tiang, genteng semuanya habis. Kalau seperti itu yang terjadi, siapa sebenarnya yang maling, anakku atau warga desa? Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Anakku yang besar *stress*, sedang yang kecil jadi trauma karena sering sekali kakaknya disiksa di depan matanya dan dia sendiri juga jadi bulan-bulanan mereka.

Dalam Lindungan Tuhan

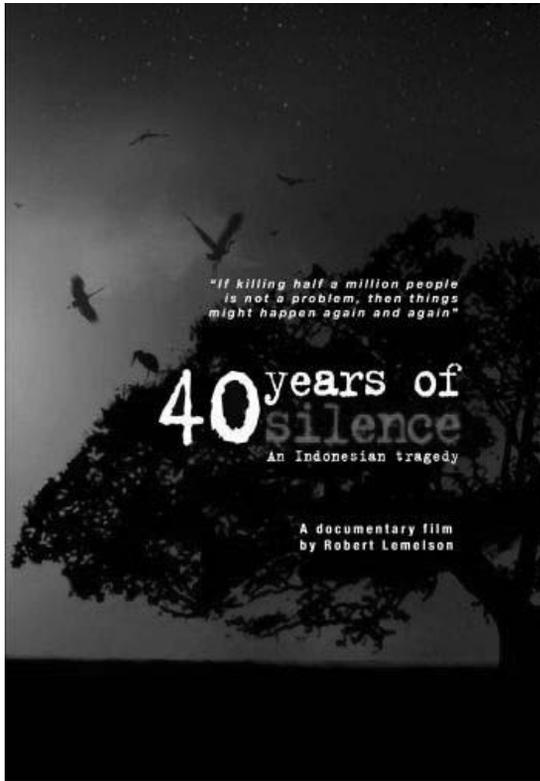
Suatu waktu, anakku disuruh Bu Dukuh untuk menggilingkan padi, tetapi lalu anakku difitnah. Ada tetangga yang namanya Arjo Mblonot mengatakan kepada Bu Dukuh bahwa ketika menggilingkan padi itu anakku mengurangi berasnya untuk dijual sendiri. Bu Dukuh percaya dan melaporkan padaku bahwa anakku disuruh menggilingkan padi tetapi malah mengurangi berasnya untuk dijual. Aku lalu bertanya kepada Bu Dukuh, berapa kilo anakku mengurangi berasnya, kepada siapa anakku menjualnya, dan apakah yang membeli beras itu yang punya gilingan ataukah seorang *bakul* (penjual). Kalau yang membeli itu seorang *bakul*, siapa nama *bakul* itu, rumahnya di mana, dan dibelinya berapa rupiah. Bu Dukuh mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan hanya diberitahu. Lalu Bu Dukuh aku tanya yang bilang siapa. Dia katakan, *ya* pokoknya ada. Lalu aku katakan, “Semua orang punya nama. Kalau Ibu tidak mau menyebutkan namanya berarti yang menuduh Ibu sendiri.” Akhirnya Bu Dukuh mengatakan bahwa yang bilang padanya itu Arjo Mblonot. Aku pun pergi mencari Arjo Mblonot dan ketemu. Ia sedang memanen cabai di sawah. Awalnya ia tidak mengaku, tetapi setelah aku tanya apakah dia berani kuperemukan dengan Ibu Dukuh, dia mengaku.

Sebenarnya anakku sudah menurut ketika disuruh oleh Bu Dukuh untuk menggilingkan padi itu tanpa diberi upah, tetapi anakku itu justru difitnah. Karena anakku tidak bersalah maka aku mengurus masalah itu ke tempat Pak Dukuh. Pak Dukuh menyuruh aku menunjukkan siapa yang memfitnah, tapi setelah aku bilang yang memfitnah Bu Dukuh, Pak Dukuh marah-marah dan mengatakan bahwa aku yang kelakuannya buruk. Lalu aku bilang, waktu Bu Dukuh bilang hal itu ada saksinya. Pak Dukuh membentak dan menanyakan siapa saksinya. Aku pun menarik orang disebelahku, namanya Minten.

Aku suruh Minten menirukan kata-kata Bu Dukuh. Setelah saksi Minten selesai bicara, Pak Dukuh mukanya menjadi merah padam. Ia pun pergi tanpa pamit.

Setelah aku meninggalkan desa Kalasan dan kembali ke kampung halamanku, aku mengontrak rumah pamanku yang ditempati Ibuku. Di rumah itu yang memasang listrik adalah Ibuku. Tiap bulan aku juga ikut membayar pajak listrik. Tetapi entah mengapa, setelah Ibuku meninggal aku disuruh pergi meskipun kontrakanku belum habis. Kontrakanku masih 6 bulan lagi, tetapi aku sudah disuruh pergi. Uang untuk pasang listrik yang sudah kami bayar tidak diganti. Lalu aku pun pindah kontrakan ke rumah *Bulik*-ku (adik perempuan orangtuaku). Kemudian salah seorang Pamanku menjual tanah yang lalu dibeli kakakku yang tinggal di Jakarta. Tanah itu kini aku tempati bersama adikku. Jadi aku sekarang numpang di atas tanah kakakku, tetapi hanya boleh tinggal di situ selama aku masih hidup. Besok kalau aku sudah meninggal anak-anakku mau tinggal di mana, aku tidak tahu. Aku tak tahu nasib mereka besok.

Sekarang anakku yang besar jadi anak jalanan karena tak tahan tinggal di rumah. Dia tidak tega melihat aku yang selalu dimusuhi oleh adik-adikku sendiri. Dia mencari uang dengan cara *ngamen* untuk bertahan hidup. Aku tidak malu punya anak *ngamen*. Yang penting dia tidak berbuat kriminal. Walaupun jadi anak jalanan, dia itu setia kawan. Teman-temannya menjadi saudaranya dalam susah dan senang. Aku hanya bisa mendoakan mereka supaya mereka selalu dalam lindungan Tuhan.



Poster film 40 Years of Silence, sebuah film dokumenter tentang para mantan korban Tragedi '65 (Elemental Productions, USA).

Tidak Lagi Minder

Memikirkan semua itu kadang aku sering merasa gelisah dan termenung sendiri. Namun demikian, setelah aku bergabung dalam kelompok Kerabat Kerja Ibu Teresa (KKIT) aku jadi punya semangat lagi. Semua masalah yang aku alami dalam keluargaku bisa aku *sharing*-kan dengan Romo, Frater, dan teman-teman sesama anggota KKIT. Oleh mereka, aku merasa masih dianggap sebagai orang seperti orang-orang lainnya. Aku pun merasa masih berguna bagi orang lain.

Karena anakku yang besar *stress*, anakku yang kecil dibawa ke panti asuhan di Ganjuran, Yogyakarta, oleh Romo supaya aku bisa bekerja dan memperhatikan anakku yang besar.

Setelah anakku yang kecil ikut seorang Suster [Biarawati] di Ganjuran, Suster mempertemukan aku dengan seorang dokter ahli jiwa dari Rumah Sakit Sardjito [Yogyakarta] bernama Dr. Mahar Agusno. Setelah memeriksa anakku dan menanyakan nama orangtuanya dan rumahnya di mana, beliau dan istrinya datang ke tempat tinggalku dan seterusnya mempertemukan aku dengan Dr. Robert Lemelson beserta kru-nya.⁹⁹ Akhirnya, aku juga bisa bertemu dengan Dr. Diah Larasati.¹⁰⁰ Aku juga diperkenalkan dengan Romo Baskara T. Wardaya, SJ,¹⁰¹ serta teman-teman anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Syarikat Indonesia*. Kini, aku merasa mempunyai tempat untuk mengadu. Anak-anakku juga mulai merasa aman dan tidak lagi minder.

Menuai “Hasil”

Aku adalah anak dan istri Tapol. Bapakku adalah seorang tahanan politik “lulusan” Pulau Nusa Kambangan. Aku dijodohkan dengan laki-laki yang belum aku kenal, yang beberapa bulan setelah menikah baru kuketahui bahwa dia adalah eks-tahanan politik “lulusan” Pulau Buru. Walau aku dan anak-anakku hidup di luar penjara, tetapi siksaan

99 Dr. Robert Lemelson adalah dosen antropologi di University of California, Los Angeles, A.S. Ia banyak meneliti tentang Indonesia. Pada tahun 2009, ia meluncurkan film dokumenter berjudul *40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy*. Film itu berkisah tentang empat keluarga Indonesia yang setelah bertahun lamanya masih dipengaruhi oleh Tragedi ‘65.

100 Dosen antropologi di University of Minnesota, A.S.

101 Dosen sejarah dan direktur PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

lahir dan batin, siksaan jiwa dan raga yang kami alami sama rasanya dengan yang berada di dalam penjara.

Seperti kukatakan tadi, anakku yang besar mengalami stress akibat siksaan badan yang dia alami. Anakku yang kecil trauma seumur hidup. Di mana-mana ia selalu diperlakukan seperti binatang yang menjijikkan. Mereka yang memperlakukan demikian, merasa seolah-olah mereka itu orang suci tanpa dosa. Meskipun demikian, saya percaya dengan pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang membikin tentu akan memakai, dan siapa yang menanam pasti suatu saat nanti akan menuai.

Dengan kata lain, apa yang kita perbuat suatu saat nanti akan kembali kepada kita. Seperti tadi aku ceritakan, orang-orang yang memfitnah aku dan menyiksa anakku sudah banyak yang menuai “hasil” dari berbagai macam perbuatan mereka.

Orang yang menyebar fitnah dan mengatakan bahwa aku melacur, sekarang anaknya sendiri jadi pelacur atau menjadi germo di tempat pelacuran. Ada juga yang matanya buta. Orang yang pernah menyiksa anakku tertangkap saat mencuri, lalu dihajar massa. Yang satu mati, yang satu kakinya patah dan cacat seumur hidup. Orang yang mengatakan bahwa ketika aku melahirkan anakku yang kecil, aku tidak punya apa-apa dan mengklaim dia yang membiayai, akhirnya ketabrak mobil, gegar otak, dan jadi orang *kenthir* (setengah gila). Sementara itu, anaknya yang laki-laki matanya buta dan menjadi setengah gila seperti bapaknya. Masih banyak lagi yang sudah mendapat “imbalan” atas perbuatan jahat mereka terhadap keluargaku.

Tanda dari Tuhan

Beberapa waktu lalu aku bermimpi. Aku menyeberangi sungai besar sambil menggendong anakku yang kecil, air sungai berwarna coklat

dan dalamnya air sebatas dadaku, tapi anehnya aku tidak terbawa arus. Aku dan anakku selamat sampai di seberang sungai. Dua minggu setelah mimpi, anakku mengalami kecelakaan. Waktu dia sedang berjalan sendirian di tepi jalan ia jatuh dan tulang pundak kirinya patah. Ia pun menjalani operasi dan dipasang pen. Operasi itu menghabiskan biaya puluhan juta rupiah. Aku bingung, mau bayar pakai apa. Adik-adikku yang dulu aku carikan makan tidak mau tahu. Selama 12 hari anakku berada di rumah sakit, tidak ada adikku yang menengok. Tetapi Tuhan Maha adil. Aku mendapat bantuan dari teman-teman dan orang-orang yang simpati padaku, sehingga jadi lebih ringanlah bebanku.

Sebelum itu, aku juga pernah bermimpi lain. Dalam mimpi itu kemanapun aku pergi jalan yang aku lewati selalu sampai di kuburan yang luas sekali dan *singup* (sepi mencekam). Tidak ada orang lewat di situ. Lalu aku berbalik arah melalui jalan lain. Di situ terdapat kuburan lagi, dan terus seperti itu sampai aku terbangun. Setelah aku pikir apa artinya mimpiku itu, aku menguatkan hati untuk menghadapi semua masalah yang ada. Jadi, semua masalah harus aku hadapi bukan aku hindari. Kalau aku menghadapi masalah-masalah yang ada dengan tabah dan berserah kepada Tuhan, aku yakin Tuhan pasti akan memberi kekuatan padaku. Ternyata keyakinanku itu benar: semuanya dapat aku lalui dengan sabar.

Dalam mimpi yang berbeda, aku bersama kedua anakku pergi ke sawah untuk menanam kacang tanah. Anak-anakku dan aku berjalan melewati sungai kecil di tengah sawah yang airnya jernih sekali. Di kiri-kanan jalan setapak yang kami lewati tanaman padinya subur, hijau. Tiba-tiba aku dan anak-anakku sudah berada di tengah-tengah sebuah kuburan yang luas sekali dan tidak ada jalan keluar. Saat itu, tiba-tiba aku terbangun.

Dan di suatu malam lain aku bermimpi lagi. Aku sedang berjalan ke arah utara. Tiba-tiba saja jalan yang aku lalui itu banjir sampai setinggi lutut. Tapi, banjirnya lumpur, dan lumpurnya itu kotoran sapi dan kerbau bercampur dengan air. Anehnya di kiri-kanan jalan semuanya kering. Setiap aku mau naik ke tempat yang kering, lumpur itu ikut mengalir ke tempat yang aku lalui. Aku terbangun dan aku mencari apa arti mimpiku. Kata almarhum Ibuku, kalau aku bermimpi mendapatkan barang yang busuk artinya aku akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan ternyata memang benar. Sejak saat itu aku mulai mendapatkan sinar terang. Keluargaku mulai mendapat pertolongan dari mana-mana dan dukungan datang dari berbagai pihak. Walau masalah yang aku hadapi semakin berat, aku sudah kebal dengan penderitaan dan aku bisa menghadapinya dengan tersenyum.

Suatu ketika aku bermimpi anakku yang besar diajak *nyebur* (masuk) ke sungai oleh anak tetangga, yakni ke sungai Opak di dekat Candi Prambanan, Yogyakarta. Sungai itu tampak luas, dalam, dan airnya yang berwarna coklat penuh sampai meluap. Anak tetangga itu lalu naik ke daratan sedangkan anakku hanyut. Tubuhnya timbul-tenggelam, sebelum akhirnya hilang.

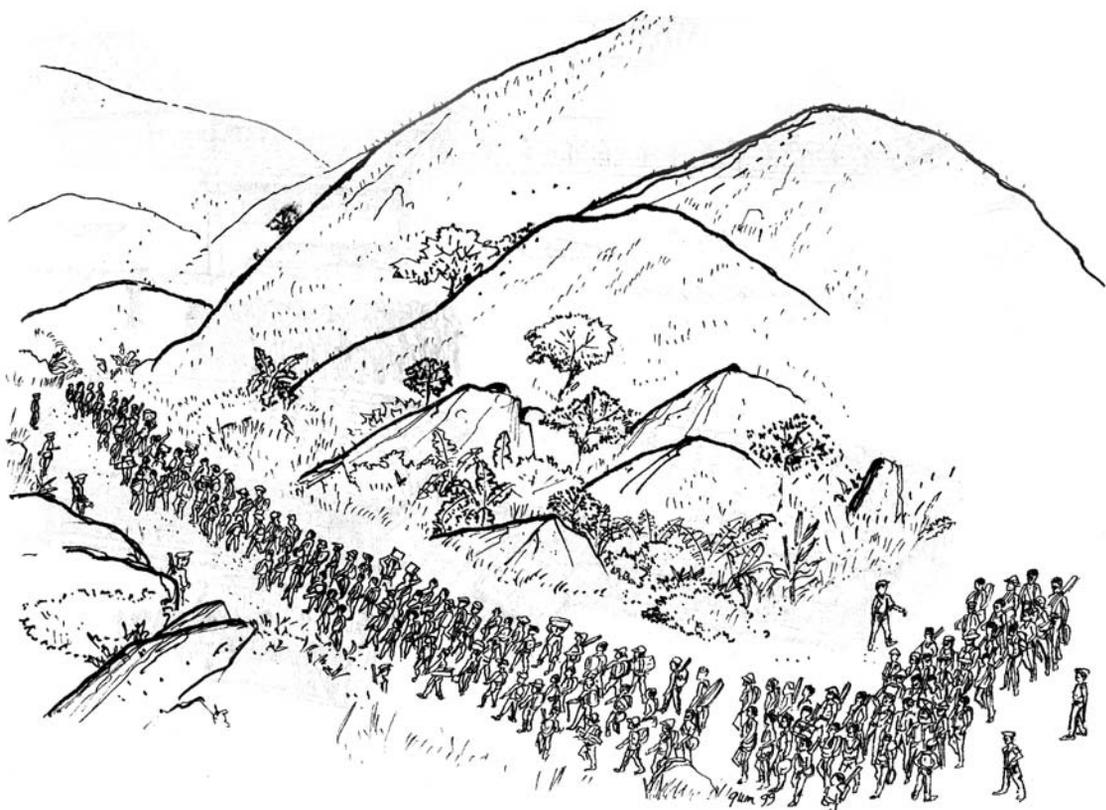
Beberapa hari kemudian ada kejadian menyedihkan. Ada anak tetangga yang pendiam (dia juga pendatang seperti aku) disuruh mengajak anakku mencuri sepeda yang sudah diletakkan di tengah sawah. Anak itu diancam, kalau tidak mau melakukan dia akan dibunuh. Oleh karena itu, anak tersebut mau mengajak anakku mengambil sepeda tadi. Setelah sepeda diambil anakku yang masih di bawah umur itu disiksa sampai hampir mati oleh orang-orang desa. Sementara anak yang mengajaknya umurnya 18 tahun dan tidak diapa-apakan. Setelah kejadian itu aku baru ingat akan mimpiku dan

aku baru menyadari bahwa sebenarnya mimpiku itu merupakan suatu tanda bahwa akan terjadi sesuatu di dalam keluargaku. Tujuannya supaya aku siap mental.

Seingatku, atas semua peristiwa yang akan terjadi di dalam keluargaku, sebelumnya aku selalu bermimpi menjelang pagi. Waktu aku belum lama tinggal di Kalasan, aku bermimpi bahwa aku berada di dalam suatu jurang yang sangat dalam. Di situ tidak ada rumput sama sekali. Yang ada, di mana-mana hanyalah sarang cacing dan binatang-binatang yang menjijikkan seperti lintah dan kaki-seribu (*luwing*). Tanahnya lembab dan kumuh. Aku mau naik ke atas, tetapi tidak ada pegangan. Di atas jurang itu ada pohon bambu yang sangat rimbun. Rantingnya banyak sekali dan masih muda sehingga *lugut* atau bulu-nya yang bikin gatal itu banyak sekali. Karena aku ingin bisa sampai ke atas, aku nekat memegang ranting bambu yang banyak bulu gatalnya itu. Walau akhirnya badanku gatal sekali dan penuh luka, aku berhasil sampai di atas dan persis saat itu aku terjaga dari tidurku.

Selang beberapa hari kemudian aku menerima berbagai fitnah yang menjijikkan dan sangat menyakitkan hati. Antara lain dikatakan bahwa aku ini melacur, bahwa aku diajak selingkuh dengan siapa saja mau. Fitnah itu terjadi awalnya karena ada tetangga yang mau kurang ajar denganku, tapi aku tolak. Ada lagi fitnah-fitnah yang lain. Katanya, setelah aku tinggal di desa itu ayamnya sering hilang. Padahal istrinya bilang padaku bahwa ayamnya sering dijual suaminya untuk berjudi. Seperti kusebut di atas, anak-anakku juga tidak luput dari berbagai fitnah. Setelah banyak kejadian seperti itu, aku baru bisa memahami bahwa mimpiku merupakan tanda-tanda akan terjadi sesuatu terhadap keluargaku dan supaya aku siap mental.

Tentang mimpi-mimpiku itu, menurutku semuanya merupakan tanda atau pemberitahuan dari Tuhan. Aku membiasakan diri tidur setelah lewat pukul 12 malam. Dengan demikian, mimpi-mimpiku itu adalah mimpi yang sesungguhnya dan bukan mimpi karena kebanyakan tidur.[]



Para Tapol menuju tempat pembuangan Pulau Nusakambangan yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan Belanda (Sketsa Gumelar Demokrasno).

Cukup Sudah Potret Buram Bangsa Ini

Pengantar

AGATHA Sumarni berasal dari Yogyakarta. Setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ia melanjutkan kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta. Di luar kampus, ia aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan, seperti Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia (IPPI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Suatu ketika, ia ditangkap begitu saja. Setelah ditahan selama 4 (empat) bulan terbukti bahwa ia tidak bersalah. Ia pun dibebaskan. Namun demikian, seperti telah kita singgung di bagian Pendahuluan buku ini, Agatha Sumarni (nama samaran untuk narasumber kita berikut) ditangkap lagi meskipun juga tidak jelas alasannya. Oleh para penangkapnya, ia dihina dan disiksa dengan cara-cara yang sangat amoral dan di luar batas-batas kemanusiaan. Dengan sekuat tenaga Sumarni bertahan hidup.

Meskipun tidak terbukti bersalah, ia tetap ditahan bahkan dipindah dari satu penjara ke penjara lain. Ia harus berpindah-pindah selama lima kali, sebelum akhirnya selama bertahun-tahun dimasukkan ke penjara-perempuan Plantungan, Jawa Tengah. Di penjara Plantungan ini ia

menyaksikan bagaimana para Tahanan Politik perempuan diperlakukan oleh para penjaga. Ia juga melihat bagaimana di Plantungan banyak bayi tak ber-ayah, akibat perbuatan para petugas.

Ketika berefleksi tentang Tragedi '65 Sumarni ingin supaya penderitaan para korban tragedi tersebut tidak dibiarkan “mandeg” atau berhenti begitu saja. Ia ingin supaya mereka itu terus didorong biar selalu bergerak, biar terus mengalir bagaikan air, biar bisa menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik dan lebih saling menghormati. Dalam kaitan dengan ini, kiranya salah satu ungkapan Sumarni, yakni “Biarkan air tetap mengalir”, perlu digarisbawahi. Dengan ungkapan seperti itu, tampaknya ia berharap bahwa bangsa ini tidak bersikap anti-perbedaan—mungkin karena dia sadar, ini bangsa yang majemuk—melainkan bersikap hormat terhadap setiap perbedaan dan keragaman. Lebih jauh ia berharap supaya perbedaan yang ada tidak disikapi dengan kekerasan fisik, apalagi model kekerasan seperti Tragedi '65.

Sumarni adalah salah satu tokoh dalam film dokumenter berjudul “Perempuan Yang Tertuduh” karya Putu Oka Sukanta. Dalam film itu ia secara apa adanya menceritakan berbagai hal yang ia alami berkaitan dengan Tragedi '65. Ia kemudian melakukan analisis dan pemaknaan atas apa yang ia alami itu, untuk selanjutnya melontarkan sejumlah harapan atas pengalaman pahitnya menjadi korban ketidak-adilan bangsanya.

SEBELUM terjadinya Tragedi '65, saya adalah anggota IPPI, yakni Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan. Setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG), saya melanjutkan kuliah di IKIP Yogyakarta. Setelah kuliah, saya bergabung dengan

PMKRI. Bulan Desember 1965, saya diambil secara paksa dan saya dibawa ke Camp [militer] Cebongan, Yogyakarta. Saya ditahan di sana kurang lebih selama 4 bulan, dengan tuduhan saya adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Dikatakan bahwa di tubuh setiap anggota Gerwani, khususnya di pahanya, termasuk saya, ada cap Gerwani-nya. Tetapi ternyata tuduhan itu sama sekali tidak terbukti. Saya lalu dibebaskan. Saya pun diberi surat pembebasan.

Hanya Boleh Bermimpi

Setelah bebas, saya kembali melanjutkan studi di bangku kuliah dan mencari kerja. Puji Tuhan, saya diterima menjadi Guru Sekolah Dasar (SD). Waktu itu saya merasa bahagia karena biarpun capai atau lelah saya tetap bisa membagi waktu dengan baik antara studi dan kerja. Hal ini bisa terjadi antara lain karena adanya saling pengertian antara teman-teman guru dan teman-teman kuliah saya. Dengan rela hati, mereka membantu saya. Kalau kebetulan ada jadwal kuliah dan jadwal mengajar dalam waktu bersamaan, mereka membantu mencari jalan keluarnya.

Apa boleh buat, dalam tempo kurang lebih dua tahun semua yang baik itu tiba-tiba berubah. Pada tahun 1968, saya kembali diambil paksa untuk kedua kalinya. Saya dijemput di luar kemauan saya di rumah kost saya pada kurang lebih pukul 02.00 dini hari. Tentu saja saya merasa kaget dan bingung. Saya ditanya tentang nama seseorang yang tidak saya kenal. Karena saya mengatakan bahwa saya tidak tahu, dan saya memang tidak kenal, saya lalu disiksa. Anehnya, alasan yang digunakan untuk menangkap saya kali ini adalah justru karena adanya surat pembebasan saya setelah saya ditahan secara keliru dulu itu.

Saya dipukuli dan ditelanjangi. Bulu kemaluan dan rambut kepala saya dibakar. Saya hanya bisa menjerit dan menyebut nama

Tuhan. Kemudian saya dibawa ke kantor Corps Polisi Militer [CPM]. Di sana, saya dimasukkan ke dalam sebuah sel. Tangan saya diborgol. Saya dicampur dengan tahanan laki-laki yang sudah terlebih dahulu berada di situ. Setiap saya diperiksa saya selalu dipertemukan dengan orang-orang tangkapan baru. Saya selalu ditanya apakah saya kenal dengan mereka. Tentu saja saya katakan saya tidak tahu, karena memang tidak mengenal mereka.

Bagaimana mungkin saya bisa mengenal mereka, mengingat saya sama sekali tidak tahu-menahu tentang gerakan politik, apalagi yang disebut sebagai “gerilya politik”? Waktu itu kegiatan mengajar dan kuliah sambil mengurus adik-adik saja sudah membuat saya repot. Bagaimana bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Apalagi waktu itu saya juga masih harus selalu mengirim makanan untuk Bapak saya, karena Bapak saya sedang ditahan. Semua kegiatan itu sudah benar-benar menguras energi saya.

Saya sering diperiksa dan sering ditelanjangi. Pernah saya diposisikan berpangkuan dengan seorang Tahanan Politik (Tapol) laki-laki. Dalam keadaan telanjang, saya dipegangi dan disuruh menciumi kemaluan semua petugas yang memeriksa pada waktu itu. Terakhir saya ditelanjangi lalu ditengkurapkan untuk diinjak-injak sambil rambut saya digunduli. Saya sering tidak sadarkan diri. Tahu-tahu sudah berada di kamar tahanan. Selama 8 bulan saya mengalami *stress* berat. Namun demikian, berkat nasihat dan perawatan ibu-ibu tapol yang lain saya bisa bertahan hidup.

Saya menyadari, memang beginilah nasib seorang Tapol. Hanya berkat belas kasihan Tuhanlah, saya bisa kuat menjalani kehidupan yang luar biasa keji dan tak mengenal peri kemanusiaan ini. Padahal para pelaku kekejian di luar kemanusiaan itu sering gembur-gembor, sering berteriak-teriak untuk menyatakan diri sebagai “insan Pancasila”

atau sebagai orang-orang religius dan moralis. Pada kenyataannya, benarkah mereka itu memegang nilai-nilai moral-keagamaan? Kalau benar demikian, mengapa para aparat kekuasaan itu justru bejat moralnya? Mengapa mereka bersifat serakah dan haus akan darah orang-orang yang tak berdosa? Aku sulit mengerti kenapa bangsaku bisa menjadi seperti ini.

Dulu aku selalu merasa bangga atas bangsa dan negaraku ini yang rukun, yang damai, yang cinta kemerdekaan. Karena aku lahir di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dalam diriku tertanam erat dan kuat rasa bela-negara. Aku adalah seorang pengagum Bung Karno yang selalu mencanangkan kepada segenap pemuda, “Jadilah kader bangsa!”; “Jangan jadi pemuda tempel!”; “Gantungkan cita-citamu setinggi langit!”; atau, “Di tanganmulah terletak jayanya negerimu yang *gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku!*”¹⁰². Waktu itu bangsa kita tidak pernah menjadi bangsa pengemis. Kita adalah bangsa yang berdikari [berdiri di atas kaki sendiri], yang anti terhadap penjajahan dan anti terhadap segala bentuk eksploitasi, baik eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis, oleh para imperialis maupun oleh para neo-kolonialis beserta antek-antek mereka.

Sayang sekali cita-citaku itu hanya menjadi kenangan sejarah. Itu pun sejarah yang telah dibelokkan. Sementara itu, bangsaku mengalami kemunduran dalam berbagai macam hal. Kemerdekaan menjadi jauh dari kehidupan rakyat kecil. Mungkin para penguasa masih bisa berbicara tentang apa itu kemerdekaan. Tetapi orang kecil seperti aku hanya boleh bermimpi saja. Dan mungkin mimpi akan kemerdekaan itu hanya akan terwujud di bumi pertiwi ini kalau aku bisa hidup 100 tahun lagi.

102 Subur makmur, tumbuh subur semua yang ditanam dan murahlah semua yang dibeli.

Ingin Tertawa

Selama ditahan aku mengalami 5 kali pemindahan. Pada tahun 1971, aku dipindahkan ke Semarang. Tak lama kemudian, aku dipindahkan ke penjara Plantungan, Jawa Tengah.¹⁰³ Di sana, saya ditahan selama satu tahun. Dari Plantungan aku dipindahkan lagi ke Penjara Bulu, Semarang. Seperti Plantungan, penjara ini merupakan penjara khusus untuk perempuan. Ada 44 orang lain yang bersama saya dipindahkan dari penjara Plantungan ke Penjara Bulu. Menurut para penguasa, alasan kami dipindahkan adalah karena kami 45 orang ini “sudah tidak bisa dibina lagi”.

Berbicara masalah bina-membina, siapa sebenarnya yang perlu membina dan siapa yang perlu dibina kalau petugas-petugas militer itu kerjanya cuma melakukan pelanggaran seks terselubung sehingga lahir bayi-bayi tak ber-ayah di Plantungan. Di Plantungan memang tidak terjadi pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau siksaan fisik, tetapi hal itu bukan berarti tidak ada pelanggaran-pelanggaran berupa pelanggaran-pelanggaran psikis. Misalnya saja, kami harus mengakui sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Atau, hanya demi kepentingan aparat kami harus mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kami lihat. *Ya* wajarlah kiranya kalau Plantungan dikatakan sebagai “Pulau Buru”-nya para Tapol perempuan. Kapan dan di mana ada penjara yang membuat tentram, nyaman, damai bagi mereka yang terpenjara? Mungkin hanya di film-film sinetron.

Penjara Bulu, Semarang, merupakan tempat penjara khusus perempuan dan mayoritas penjaganya adalah perempuan. Hal ini tentu saja ada segi positifnya. Di sana tidak ada lagi pemerkosaan

103 Tentang penjara wanita Plantungan yang terletak di Jawa Tengah ini, lihat dr. Hj. Sumiyarsi Siwirini, *Plantungan: Pembuangan Tapol Perempuan* (Yogyakarta: PUSdEP dan IHJR, 2010).

yang dilakukan oleh oknum-oknum militer laki-laki, sehingga kami bisa merasa lega. Kami terlepas dari rasa takut dihamili. Tinggal satu kebiasaan yang masih diwajibkan di Penjara Bulu, yakni “Santiaji”. Ini merupakan kegiatan indoktrinasi. Kami disuruh mendengarkan ceramah yang variatif dan kreatif, tetapi yang intinya semacam seruan “bertobatlah dari hidup sebagai seorang pemberontak, pelacur, atheis dan perusak rumah tangga orang.” Kalau sudah seperti itu rasanya jadi geli, dan hati ini ingin tertawa sepuas-puasnya. Tetapi mana mungkin bisa tertawa seperti itu? Paling-paling *ya* hanya bisa tertawa dalam hati. Dasar penguasa! Mereka bisa omong apa saja. Tak usah mereka repot-repot keluar uang untuk bisa omong seperti itu. Mereka justru dibayar untuk *ngomong*.

Mulai Dibebaskan

Untunglah, suatu ketika datang Tim *Amnesty International*. Kebanyakan anggota tim itu bertanya dalam bahasa asing, dan dari ibu-ibu yang bisa berbahasa asing diperbolehkan menjawab sesuai dengan bahasa yang mereka kuasai. Ada yang menggunakan bahasa Jerman, ada yang bahasa Belanda, bahasa Inggris, Prancis, dan sebagainya. Bahkan dari ibu-ibu Tapol ada yang bisa berbahasa Jepang dan bahasa Rusia. Sementara itu, dari antara para petugas tidak ada satu pun yang bisa berbahasa asing. Akibatnya, mereka tidak tahu ketika kepada Tim Amnesty International itu kami membuka rahasia bagaimana para penguasa memperlakukan kami para Tapol di Penjara Plantungan. Kami katakan baik Tapol perempuan yang sudah tua maupun yang masih muda semua mendapat porsi penderitaan masing-masing.

Dari hasil pembicaraan dengan tim itu, kini diketahui bahwa kami ibu-ibu diperlakukan secara tidak manusiawi. Di mata para penguasa seakan-akan kami ini jauh lebih tidak berharga daripada

sampah yang masih bisa didaur ulang ataupun dijadikan pupuk ketika sudah membusuk. Kami dipandang sebagai penyakit yang mematikan, yang menular seperti virus yang sangat membahayakan buat bangsa dan negara. Alasan kami diperlakukan demikian adalah karena kami ibu-ibu ini dituduh “komunis”. Padahal sesungguhnya, kami ini tidak mengerti bagaimana kami bisa dinyatakan sebagai komunis, mengingat sebagian besar dari kami sama sekali tidak tahu-menahu tentang “A-B-C”-nya politik. Kami dituduh komunis, tetapi membaca teorinya Marx-pun kami, setidaknya saya, belum pernah. Tetapi memang [Presiden] Soeharto telah berhasil dengan gemilang menancapkan kuku-kuku macan-nya dan mencuci otak bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penakut, bangsa pengemis, pengecut, munafik dan tak bermartabat. Prinsipnya silakan melakukan semuanya saja, asal bapak senang. Soeharto takut kalau rakyat menjadi pandai, cerdas, dan kritis. Mengapa, karena kalau rakyat menjadi pandai, cerdas dan kritis, apalagi menjadi berani, hal itu akan berbahaya bagi kekuasaan yang sedang dibangunnya. Tak lama setelah kedatangan Tim *Amnesty International* itu ibu-ibu Tapol mulai dibebaskan. Aku sendiri dibebaskan pada tanggal 27 September 1978.



Drama “Cap Merah”, visualisasi generasi muda tentang perempuan korban Tragedi ’65 (Ist.)

Mudah Diperbudak

Setelah bebas, aku menikah dan punya anak 2 orang. Yang besar perempuan dan yang kecil laki-laki. Aku menjalani kehidupan yang wajar sebagai mantan Tapol dengan kondisi sosial yang menantang. Bagaimana tidak. Saya harus menyanggah stigma yang begitu gelap, yang begitu lekat-erat dalam pikiran masyarakat, yakni stigma sebagai eks-Tapol.

Inilah jalan hidupku. Aku harus hidup dalam kondisi masyarakat yang secara struktural tidak memberi ruang buat para mantan Tapol. Meskipun demikian, aku tetap optimis. Tuhan itu Maha Kasih kepada setiap ciptaan-Nya. Oleh karena itu, aku pasti akan diberi solusi dalam keadaan bagaimanapun.

Kini aku tak perlu menangisi hidup. Sekarang ini bukan waktunya untuk berpangku tangan, melainkan untuk kerja dan kerja. Aku

mulai membuka warung dengan modal semua perhiasan hadiah dari adik-adikku. Bahkan cincin kawin pun aku lepas untuk modal usaha. Berkat Tuhan, usahaku sukses dan suami pun juga demikian. Apa pun aku lakukan demi merebut kembali kehidupan.

Anak-anak kupersiapkan sejak dini. Kepada mereka, aku ajarkan bagaimana kita harus menyikapi kehidupan. Aku berjualan kue dan makanan gorengan. Setelah ada tambahan modal, aku juga mulai menerima pesanan jamu. Di samping warung sembilan bahan pokok rumah-tangga [sembako] yang siap-antar, aku mencoba membuka pangkalan minyak tanah. Aku merangkap beberapa pekerjaan sambil mengajari anakku yang relatif masih begitu kecil agar tak segan bekerja keras. Kuajarkan, kerja keras merupakan suatu keharusan untuk mempersiapkan biaya pendidikan mereka. Mereka aku gaji, dan dengan gaji itu mereka aku suruh ambil les bahasa Inggris biar nanti tidak menjadi orang bodoh seperti Bapak-Ibu mereka.

Ada bermacam suara komentar yang datang dari tetangga. Saya dibilang *ngangsa* [memaksa diri terlalu keras], tidak merasa kasihan terhadap anak, dan sebagainya. Tetapi bodoh amat. Semua itu tidak saya pikirkan.

Kebetulan anak-anak memang sadar akan posisi mereka sebagai anggota keluarga mantan Tapol. Mereka harus berjuang untuk menata hari depan. Bagi mereka, semua pekerjaan adalah mulia di hadapan Tuhan. Mereka tidak malu menjadi loper-loper kecil membawa minyak, gula, dan seterusnya, guna membantu orangtua.

Tentu saja, aku harus terlebih dulu membanting tulang siang malam. Entah itu sedang hujan, atau petir sedang beryala-nyala, atau apa pun, minyak pasti sampai ke pelanggan. Puji Tuhan seiring dengan berjalannya waktu semuanya dapat dikatakan lancar. Aku pun lalu ingat kata pepatah, *berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke*

tepiannya; bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Dulu terasa berat, tapi semuanya kini berjalan dengan baik.

Nah, ketika anak-anakku sudah mulai bisa mandiri dengan dunia masing-masing, aku pun mulai berpikir, kenapa aku harus tetap membisu. Aku mulai kembali merenungkan nasib sesamaku, yakni orang-orang yang sama-sama disingkirkan seperti diriku. Aku putuskan untuk mulai bicara tentang kebohongan-kebohongan yang telah menyesatkan bangsa ini. Hal itu ingin kulakukan supaya kejahatan bangsaku terhadap bangsanya sendiri tidak akan terulang lagi di waktu-waktu mendatang.

Cukup sudah potret buram bangsa dan negara tercinta ini di masa silam. Aku ingin melihat bumi tercinta damai dan sejahtera, di mana hukum ditegakkan dan keadilan diwujudkan. Aku ingin melihat bahwa semua anak bangsa bisa menjadi cerdas dan bermartabat. Aku sadar, hal ini memang tidak akan mudah untuk diwujudkan, tetapi menurutku hal itu merupakan suatu keharusan.

Jeritan kaumku yang terbelenggu selalu terngiang di telinga. Sikap dan keinginanku yang demikian itu tentu banyak menuai sikap pro dan kontra, tetapi menurutku itu merupakan hal yang biasa. Perbedaan itu diperlukan. Semua perlu waktu dan tak usah dipaksakan. Biarkan air tetap mengalir.

Kini secara realistis dan jujur, bangsaku belum mau mengakui bahwa dulu pernah keliru. Apalagi berpikir untuk minta maaf dan memberikan kembali kepada korban hak-haknya yang selama puluhan tahun sudah dirampas. Tak mungkin para penguasa menanggalkan keangkuhannya. Apalagi secara sukarela. Hanya Yesus yang rela menghampakan diri-Nya demi orang-orang yang berdosa. Tapi itu Yesus, Tuhan. Para pemimpin negara dan aparat pemerintah adalah

manusia yang lemah yang mudah diperbudak oleh setan-setan yang menyatakan kehadiran dengan keserakahan dan kerakusan.

Tak Lelah Berharap

Aku mengharapkan dunia internasional bisa meringankan beban para korban Tragedi '65 baik secara finansial maupun spiritual. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas tolong beri kami bantuan biaya hidup. Biar saja orang menilai aku sebagai orang yang berjiwa pengemis. Aku tidak malu demi saudara-saudaraku yang selama hidupnya telah disengsarakan oleh para pemimpin negaranya.

Demikian juga bagi anak-cucu korban, tolong bantu mereka dengan lapangan kerja dan pendidikan. Nah, nanti kalau kondisi dan situasi bangsa sudah membaik dan kami mengalami perlakuan yang manusiawi, tentu semuanya akan mengetahui kalau kami sudah dimanusiakan kembali. Apalagi yang kami cari selain amal dan bakti sebagai bekal di kehidupan abadi nanti. Demikian nasihat atau fatwa dari para ulama, para rohaniwan yang begitu syahdu di telinga, tetapi begitu sulit dihadap-tampakkan oleh siapa pun. Di usia senja ini kami para korban Tragedi '65 tak pernah lelah berharap dan mengandalkan kemurahan Tuhan. Mari, silakan menjadi tangan-tangan kepanjangan tangan Tuhan yang penuh kasih. []



Menuntut keadilan bagi para korban Tragedi '65 di depan Istana Merdeka (Ist.)

BAGIAN III

GENERASI MUDA, LEMBAGA KEAGAMAAN, DAN TRAGEDI '65

Pengantar

Sebagaimana tampak dalam narasi-narasi para saksi maupun korban dalam dua bagian di depan, salah satu dimensi penting dalam Tragedi '65 adalah dimensi keagamaan. Selain bahwa banyak saksi dan korban tragedi tersebut melihat apa yang mereka saksikan atau alami itu dari perspektif religius, tampak juga bahwa terdapat kaitan antara kemelut tahun 1965 itu dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Sebagaimana kita tahu, salah satu unsur yang mendorong histeria pembunuhan dan penangkapan massal waktu itu adalah tuduhan bahwa para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia itu atheis. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur maupun beberapa tempat lain unsur itu kuat terasa.

Berkaitan dengan apa yang terjadi pada tahun 1965-1966 itu pula lembaga-lembaga keagamaan memiliki pandangan dan sikap yang beragam. Ada yang sepenuhnya mendukung tindakan militer dan sosial yang ada waktu itu, ada yang menentang, tetapi ada juga yang pandangan dan sikapnya merupakan kombinasi antara keduanya. Dalam banyak kasus, terdapat keberagaman juga dalam hal sikap resmi dan tindakan konkret di lapangan berhadapan dengan gelombang kekerasan yang massif waktu itu.

Dalam bagian berikut ini Anda akan diajak mengikuti hasil penelitian atas sikap sebuah lembaga keagamaan, dalam hal ini agama Katolik, berkaitan dengan tragedi kemanusiaan tersebut. Yang ingin dilihat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana sikap resmi kepemimpinan agama Katolik, khususnya di wilayah Yogyakarta, terhadap dinamika politik dan berbagai kekerasan yang berlangsung, serta bagaimana sikap dan tindakan orang-orang Katolik di luar kepemimpinan resmi Gereja.

Penelitian beserta laporan itu dilakukan oleh dua orang peneliti dari generasi yang tumbuh setelah Tragedi '65. Keduanya bukan merupakan saksi tetapi juga bukan merupakan korban dari tragedi tersebut. Dengan posisi itu diharapkan bahwa apa yang mereka sampaikan dapat menambah perspektif dan wawasan dalam memandang Tragedi '65 selain yang telah diberikan oleh para saksi maupun korban.[]

Ketegangan Antara Lembaga Keagamaan dan Praktik Sosial

*Studi Kasus Hirarki Gereja dan Umat Katolik di
Yogyakarta*

Pengantar

Ketika mulai pada paruh kedua tahun 1965 terjadi kekerasan massal terhadap para anggota Partai Komunis Indonesia banyak pemimpin agama mengalami dilema moral. Mereka sadar, pada satu sisi, mereka yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang diyakini bertentangan dengan keyakinan dan kaidah agama. Di lain pihak, bagaimanapun juga para korban itu (beserta sanak keluarganya) adalah manusia-manusia biasa, yang seperti kita semua perlu diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Mereka tidak boleh menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan secara semena-mena dan massif sebagaimana yang terjadi waktu itu.

Setidaknya itulah salah satu pergulatan yang, menurut laporan penelitian berikut, muncul dalam Gereja Katolik sebagai salah satu lembaga keagamaan, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Penelitian ini melihat bahwa memang berkaitan dengan Tragedi '65 Gereja Katolik (setidaknya dalam wilayah Keuskupan Agung Semarang) telah memiliki kebijakan umum untuk melawan tindakan kekerasan. Namun demikian, belum banyak studi atau penelitian dilakukan untuk melihat

bagaimana kebijakan itu diimplementasikan di tingkat masyarakat, baik ketika tragedi itu sedang berlangsung maupun setelah tragedi itu mereda pada tahun-tahun setelahnya. Sebagaimana dikatakan oleh dua peneliti yang sekaligus penulisnya, ”studi ini bermaksud mendalami tataran proses sosial dari pengalaman, sikap dan tindakan orang-orang Katolik dalam melewati tragedi tersebut, baik yang dilakukan oleh pejabat Gereja maupun oleh umatnya.”

*Penelitian dan penulisan dilakukan oleh dua orang anggota Komisi Sejarah PUSdEP, yakni **Y. Tri Subagya, M.A.** dan **Dr. G. Budi Subanar, SJ**. Selain merupakan anggota Komisi Sejarah Y. Tri Subagya adalah juga staff PUSdEP dan mahasiswa program doktor Universitas Radbod, Nijmegen, Belanda. G. Budi Subanar adalah Ketua Program Magister Ilmu Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.*

SEBAGAIMANA kita tahu, wacana Tragedi '65 masih menjadi perdebatan dan selalu memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Usaha-usaha membuka jalan untuk berdialog atau menyelesaikan berbagai persoalan di sekitar tragedi itu sering berbenturan dengan kecurigaan dan prasangka dari kelompok yang meyakini narasi versi resmi dari penguasa Orde Baru.¹⁰⁴ Kendati demikian, wacana itu tidak berarti terkunci di dalamnya, dan bukannya tidak bisa ditinjau kembali untuk memperoleh penjelasan yang lebih

104 Versi Orde Baru mengenai Tragedi '65 dapat dilihat dalam beberapa buku pendidikan sejarah maupun film produksi Orde Baru yang berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI*. Di antara buku-buku tersebut terdapat buku yang disebut buku putih atau dokumen resmi, dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. 1994.

mendalam dan menyeluruh. Bukti-bukti baru baik berupa dokumen maupun pengalaman para korban memberi landasan penting bagi pengungkapan kebenaran serta penulisan ulang sejarah mengenai tragedi tersebut.¹⁰⁵

Tidak terkecuali, sejarah hubungan antar lembaga atau organisasi agama di tengah pusaran kemelut itu perlu diperiksa kembali karena stigma dan dendam yang diwariskan masa lalu terhadap para korban yang dituduh sebagai anggota dari Partai Komunis Indonesia atau simpatisannya juga membelenggu warga masyarakat secara luas. Pada satu sisi lembaga agama bersitegang dengan PKI dan organisasi massanya yang diasosiasikan dengan atheisme. Ancaman hingga tindak kekerasan para pengikutnya sering tidak terhindarkan dan bahkan besar kemungkinan banyak di antara mereka ikut ambil bagian dalam pembantaian pada masa itu. Namun demikian, pada sisi lain, lembaga agama juga menjadi tempat perlindungan orang-orang yang teraniaya dan mencari suaka politik akibat kebijakan negara yang mewajibkan warganya memilih satu di antara lima agama. Salah satu indikatornya adalah kenaikan jumlah pengikut pada masa-masa itu.¹⁰⁶

Lebih jauh, Tragedi '65 juga menjadi titik balik hubungan antar-lembaga agama di Indonesia. Hingga kini masih ada lembaga dan organisasi keagamaan yang bersikap saling curiga dan bersitegang satu sama lain dalam mengelola pengikut serta mendudukkan posisinya dalam kehidupan bernegara. Kelompok Kristen misalnya menaruh

105 Pasca tumbangny rezim otoritarian Orde Baru 1998 bermunculan memoar dan narasi-narasi para korban Tragedi '65 serta sejumlah kajian yang memperlihatkan dokumen serta perspektif baru yang mengungkapkan peristiwa kekerasan dan kekejaman itu. Beberapa di antaranya seperti *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (I.G. Krisnadi, 2001); *Menembus Tirai Asap, Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Sasongko dan Budianta, 2003); *Aku Eks Tapol* (Setiawan, 2003); *Dalih Pembunuhan Massal* (Roosa, 2008), dll.

106 Subanar, 2005; Nugroho, 2008.

kekawatiran terhadap kelompok Islam yang menginginkan hukum-hukum syariah menjadi landasan negara hingga menciptakan marginalisasi dan perlakuan diskriminatif di kalangan mereka. Sementara di sisi lain, isu Kristenisasi selalu dipandang oleh kelompok Islam (radikal) sebagai ancaman yang terus menerus terjadi, di antaranya seperti yang dituduhkan bahwa pasca tahun 1965 banyak eks-Tahanan Politik dan pengikut aliran kepercayaan ditengarai masuk menjadi Kristen Protestan dan Katolik.¹⁰⁷

Pendekatan Kualitatif

Hingga saat ini, kajian yang memfokuskan perhatian pada peran dan kedudukan lembaga dan kelompok agama di dalam kemelut Tragedi '65 relatif terbatas. Satu di antaranya adalah anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi "Syarikat Indonesia" yang berpusat di Yogyakarta. Mereka secara intensif mendalami dan mengusahakan rekonsiliasi dengan para korban meski tidak sedikit dari orangtua mereka atau generasi sebelumnya menjadi pelaku atau bahkan algojo pembantaian.¹⁰⁸ Namun demikian, apa yang mereka lakukan pun belum sepenuhnya memperoleh dukungan formal dan serius secara kelembagaan oleh organisasi agama tersebut. Karena belum ada pernyataan resmi secara kelembagaan oleh organisasi keagamaan di luar Nahdlatul Ulama terkait Tragedi '65, ada pendapat bahwa organisasi keagamaan selain NU abai dan tidak berniat melakukan rekonsiliasi dari keterlibatannya dalam tragedi kekerasan 1965.¹⁰⁹ Di kalangan agama Katolik, usaha serupa kurang memperoleh

107 Lihat Mujiburrahman, 2006; Hasan, 2007.

108 Lihat Budiawan, 2004.

109 Benedict R.O'G Anderson, seorang peneliti, mengutarakan bahwa NU lebih jujur ketimbang lembaga keagamaan lain seperti Kristen, Katolik, dan Muhammadiyah yang dipandang ikut terlibat dalam pembantaian dan menutup-nutupinya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara

perhatian secara khusus. Kalaupun ada, biasanya masih sebatas pada wacana ataupun kegiatan-kegiatan karitatif yang berkaitan dengan pendampingan atau penyantunan korban.

Berangkat dari persoalan serta kajian-kajian yang sudah dikemukakan di atas, tulisan yang berdasarkan penelitian kami ini ingin berusaha menengahkan peran (lembaga) Gereja serta orang Katolik di dalam Tragedi '65. Secara umum memang sudah ada uraian mengenai garis besar kebijakan yang dilakukan Gereja di Keuskupan Agung Semarang dalam melewati tragedi itu,¹¹⁰ tetapi belum dijelaskan praktik yang berlangsung dalam proses sosialnya. Melalui studi ini, diperiksa dan ditelusuri kedudukan serta aktivitas Gereja dan orang-orang Katolik manakala berada di tengah pusaran kemelut itu.

Secara khusus, tulisan ini mau mendeskripsikan berbagai peristiwa yang menyangkut pengalaman mereka ketika dihadapkan pada situasi traumatis dan memilukan dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, studi ini bermaksud mendalami tataran proses sosial dari pengalaman, sikap dan tindakan orang-orang Katolik dalam melewati tragedi tersebut, baik yang dilakukan oleh pejabat Gereja maupun oleh umatnya. Oleh karenanya, akan ditinjau pula peran lembaga (Gereja) di tengah kemelut Tragedi '65 melalui peran pejabat (hirarki) Gereja dalam mengambil keputusan di tengah ketegangan dan pembasmian atas

Radio Nederland. Transkrip wawancara bisa diunduh dari <http://analisa kebudayaan.blogspot.com>. Besar kemungkinan pendapat ini didasarkan pada pernyataan K.H. Abdurrahman Wahid seorang ulama terhormat NU yang menyerukan dilakukannya rekonsiliasi terhadap eks Tahanan Politik 1965 serta menghilangkan sikap diskriminatif terhadap mereka. Seruan itu diikuti aktivitas sebagian kelompok pemudanya yang melakukan usaha-usaha membuka jalan rekonsiliasi sosial di berbagai daerah. Namun demikian, sikap Abdurrahman Wahid dan kelompok pemuda NU juga memperoleh tentangan dari sebagian ulama dan warga nahdliyin yang tidak menyetujuinya.

110 Lihat G. Budi Subanar, 2005.

mereka yang dituduh sebagai anggota PKI. Kajian ini merupakan usaha menelaah kedudukan lembaga (Gereja) Katolik baik secara kolektif maupun individual di tengah Tragedi '65. Pengetahuan yang diperoleh dari kajian ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam mencari jalan bagi rekonsiliasi atau penyelesaian atas pengalaman pahit dari tragedi kebangsaan tersebut.

Ruang lingkup studi ini dibatasi pada lembaga (Gereja) Katolik di wilayah Keuskupan Agung Semarang, khususnya di Yogyakarta. Namun demikian, bukan berarti studi ini hanya menjangkau sumber-sumber yang ada di wilayah tersebut. Studi ini juga mencakup wilayah lain yang dipandang dapat mempertajam analisis maupun sebagai bahan perbandingan. Penelitian ini berlangsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data digali terutama melalui metode sejarah lisan dengan teknik wawancara mendalam. Beberapa informan kunci diajak menceritakan kembali pengalaman mereka di masa lalu dan merefleksikan dengan situasi dan konteks yang terjadi pada waktu itu. Data-data yang terkumpul ditriangulasikan dengan wacana, dokumen serta arsip-arsip yang bisa diakses oleh peneliti. Informan penelitian ini diperoleh dengan teknik *snowball*, dengan kriteria bahwa mereka ikut mengalami dan cukup mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Gereja Katolik pada waktu itu. Misalnya apakah sebagai perwakilan dari lembaga Gereja atau individu yang ikut dalam pengambilan keputusan. Seluruh informan terutama diprioritaskan berasal dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal ini dilakukan berkenaan dengan fokus kajian serta mengingat terbatasnya energi dan dana penelitian yang kami miliki. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data kepustakaan. Sebelum menulis laporan akhir, kami juga melakukan rangkaian diskusi terbatas dengan para anggota Komisi Sejarah PUSdEP yang lain. Dalam diskusi-diskusi itu kami

saling mengkritisi dan tukar pengetahuan mengenai persoalan yang menjadi fokus kajian kami masing-masing, termasuk kajian ini.

Perseteraan (Lembaga) Gereja Katolik dengan PKI

Salah satu kajian yang membahas kedudukan dan sikap Gereja Katolik dalam menghadapi Tragedi '65 dilakukan dengan memeriksa naskah dan arsip di Keuskupan Agung Semarang dari tahun 1940 hingga 1981.¹¹¹ Meski kajian tersebut lebih menekankan sejarah kemandirian Gereja Katolik di wilayah itu, kedudukan Gereja dan sikap yang diambil pejabatnya berkenaan dengan Tragedi '65 juga memperoleh perhatian khusus. Secara umum ditegaskan dalam uraian itu bahwa Gereja mengedepankan persoalan kemanusiaan di tengah kemelut tragedi berdarah tersebut. Dengan kata lain, meski Gereja Katolik melawan komunisme dan PKI, ketika tragedi kekerasan itu berlangsung Gereja menyerukan perlindungan dan memberikan bantuan kepada korban-korban yang berjatuh tanpa melihat afiliasi mereka terhadap PKI.

Jamak diketahui bahwa di seluruh dunia, Gereja Katolik menentang Komunisme. Tidak terkecuali di Indonesia. Jauh sebelum Tragedi '65 terjadi, pejabat Gereja Katolik di Indonesia menyatakan bahwa secara kelembagaan Gereja berseberangan dengan PKI, meskipun ada pula orang Katolik yang menjadi anggota atau simpatisan PKI.¹¹² Sikap perlawanan tersebut ditunjukkan manakala pertarungan ideologi di antara kelompok-kelompok masyarakat memanas. Keluarnya Manifesto Katolik dari sidang Komisi Wali-Gereja Indonesia bulan Desember 1955 menegaskan posisi itu. Para tokoh Partai Katolik Indonesia yang diundang Presiden Sukarno bulan Februari dan April 1957 untuk memberi tanggapan atas konsepsinya

111 Lihat G. Budi Subanar (2005).

112 Webb dan Farram, 2005; Mujiburrahman, 2006.

mengenai pembentukan Dewan Nasional dan "Kabinet Kaki Empat" dengan memasukkan PKI juga menentang mentah-mentah gagasan itu. Dicatat misalnya:

Kasimo mengemukakan bahwa menurut pengalaman sejarah, pengikutser-taan orang-orang komunis di dalam kabinet di negara-negara Eropa Timur, lama kelamaan menyebabkan negara-negara itu menjadi komunis. Oleh karena itu, ia tidak setuju kalau di dalam kabinet dimasukkan unsur komunis. Dan oleh karena itu pula ia tidak dapat menyetujui Konsepsi Presiden.¹¹³

Sejalan dengan sikap penolakan Gereja terhadap komunisme, Uskup Agung Semarang Mgr. A. Soegijapranata, memainkan peran sangat besar dalam menanamkan perlawanan itu di dalam komunitas umat Katolik. Perlawanan terhadap komunisme dan pengaruh organisasi-organisasi massa PKI dilakukan melalui berbagai diskusi, misalnya lewat kontaknya dengan para politisi Katolik dan dengan organisasi-organisasi kaum awam di tingkat akar rumput.¹¹⁴

Para politisi dari Partai Katolik rupanya juga berusaha keras menggagalkan PKI untuk mendapatkan akses atas posisi strategis di dalam kekuasaan. Bahkan dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya posisi PKI berada dalam jabatan kabinet di pemerintahan, Frans Seda yang semula menolak duduk di dalam Kabinet 100 menteri kemudian menerima jabatan sebagai Menteri Perkebunan dengan dukungan Angkatan Darat. Tentang hal ini disebutkan bahwa:

Sementara berunding (dengan tokoh-tokoh partai Katolik), Jenderal A. Yani menelpon, dan menganjurkan agar Partai dan Frans Seda menerima untuk duduk dalam Kabinet, supaya memperkuat front antikomunis di dalam pemerintahan. Menurut desas-desus di Istana, jabatan menteri yang direncanakan untuk Frans Seda adalah Menteri Perikanan (Menteri Lele). Tetapi Pak Yani berkata, "Tidak..., akan diperjuangkan dan sedang di lobby-kan pada Bung Karno lewat Pak Leimena, untuk jabatan Menteri

113 Panitia Penulisan *Kompas*-Gramedia, 1980:83-84.

114 Subanar, 2005: 149.

Perkebunan, karena sektor itulah sektor modal, dan harus diamankan dari pengaruh PKI/kiri.¹¹⁵

Sikap para tokoh Partai Katolik itu rupanya bersambut dengan keinginan pejabat militer yang sama-sama menunjukkan permusuhannya dengan PKI. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa situasi menjelang Tragedi '65, kalangan tokoh-tokoh agama baik dari Islam, Kristen, dan Katolik bersatu-padu memusuhi PKI dengan menyebarkan kewaspadaan tinggi atas ideologi atau partai itu kepada umat atau jemaat mereka.

Menarik untuk dicatat bahwa kendati hubungan lembaga Gereja dan PKI berseberangan, Gereja Katolik secara konsisten menolak dipakainya cara-cara kekerasan ketika pihak militer memobilisasi rakyat untuk membasmi anggota dan simpatisan PKI. Sikap tersebut tertuang dalam tiga surat yang dikeluarkan pejabat Gereja di Keuskupan Agung Semarang selama tahun-tahun itu. Di antara surat-surat itu ada yang mendesak pemerintah untuk menghindari kekerasan dalam menanganinya. Dilaporkan bahwa:

Surat pertama ditulis oleh Pater Carri, SJ, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, yang berisi ajakan kepada seluruh umat beriman untuk menunjukkan semangat kekatolikan yang *pro ecclesia et patria* di dalam negara Indonesia yang didasarkan Pancasila yang menghargai adanya pluralisme di dalam masyarakat dan mengakui kepercayaan kepada Tuhan. Surat kedua ditujukan kepada para imam dan anggota kelompok religius di wilayah Keuskupan Agung Semarang yang isinya melarang mereka untuk ikut serta di dalam aksi militer yang menjaring atau mengejar para anggota PKI. Sedangkan surat ketiga dialamatkan kepada kaum awam Katolik yang isinya menghimbau mereka untuk mendukung tindakan penyaringan anggota PKI yang dikomando oleh tentara, tetapi tetap tidak melibatkan diri di dalam tindakan kekerasan.¹¹⁶

115 Panitia Penulisan *Kompas*-Gramedia, 1980:85.

116 Subanar, 2005: 149. Ketika tragedi kekerasan berlangsung Uskup Agung Semarang sedang menghadiri Konsili Vatikan II di Italia. Oleh karena itu, surat dikeluarkan oleh pejabat yang mewakilinya. Sepulang dari Vatikan, Mgr. Darmojuwono menegaskan kembali sikap Gereja dengan meminta kepada

Sikap yang diambil Gereja dengan mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan rupanya tidak terlepas dari situasi kalut pada masa itu, di samping ajaran-ajaran moral Gereja yang memang bertumpu pada persoalan kemanusiaan. Kekalutan situasi terutama berkaitan dengan kedudukan dan latar belakang umat Katolik yang beraneka-ragam dalam gelanggang politik nasional. Banyak di antara umat Katolik terutama mereka yang baru dibaptis diliputi kecemasan akibat kecurigaan dan tuduhan sebagai pelarian anggota PKI yang dianggap atheis. Padahal, tidak semua umat Katolik yang baru memperoleh pembaptisan memiliki hubungan dengan PKI. Di antara mereka juga berasal dari kelompok kepercayaan atau yang sebelumnya mengikuti praktik agama lokal. Walaupun di antara anggota PKI juga ada yang beragama Katolik dan mantan tahanan politik yang kemudian mengikuti ajaran Katolik. Pada masa itu, kenaikan jumlah pemeluk agama Katolik memang cukup signifikan. Sejumlah Paroki mencatat pertumbuhan umat sepanjang tahun 1965 hingga tahun 1970-an. Gelombang perpindahan agama terutama didorong oleh keputusan pemerintah melalui ketetapan MPRS tahun 1966 yang mewajibkan setiap warga negara memilih satu di antara lima agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, dan Budha.

Sambutan Orang terhadap Usaha Gereja Katolik

Dalam situasi yang menegangkan itu, Gereja menolak usulan untuk membuat kartu tanda umat Katolik dengan alasan agar tidak memperuncing konflik serta menghindarkan tuduhan bagi umat yang baru dipermandikan semata-mata sebagai pelarian anggota PKI. Lebih jauh, Konferensi Wali-Gereja Indonesia juga mengeluarkan surat

penguasa militer untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada orang-orang berdasarkan komitmen cinta kasih.

kepada para pastor paroki untuk mencatat para korban di wilayah mereka. Disamping usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan, para pejabat Gereja ikut secara aktif melakukan pendampingan dan memberi santunan kepada para tahanan politik yang menjadi anggota dan simpatisan PKI beserta keluarga mereka. Di Keuskupan Agung Semarang tahun 1969 dibuat Program Sosial Kardinal (PSK) yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan tersebut. Di Yogyakarta didirikan pula Yayasan Realino dengan tujuan yang sama. Program dan aktivitas kemanusiaan tersebut tahun 1981 menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, Purwokerto, Malang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Medan, Pangkal Pinang, Padang, Palembang, dan Tanjung Karang.

Sementara itu, di bawah koordinasi Pater De Blot, SJ para biarawan dan warga Gereja tidak hanya memberikan pelayanan pastoral, tetapi ikut memberi bantuan material dan kesehatan di beberapa penjara dan kamp penahanan, termasuk di Pulau Buru. Yang dibantu tidak terbatas pada mereka yang ditahan saja, melainkan juga anggota keluarga mereka. Tentang hal ini diungkapkan antara lain:

Romo De Blot telah banyak berjasa terhadap para Tahanan Politik. Beliau mendatangi kamp-kamp tawanan, memberi hiburan, kemudian juga diusahakan bantuan makanan seperti bulgur dan *Corn Sugar Milk* (CSM). Semua bantuan itu dari gabungan gereja-gereja Katolik dan Protestan. Terpaksa harus kucatat, namun tanpa dendam, bahwa dari pihak Islam tidak pernah ada bantuan. Mungkin mereka berpendapat, PKI itu *kan kafir*, jadi biar saja mati sendiri. Ini pun tidak lepas dari propaganda dan hasutan penguasa. Diisukan, bahwa pihak Kristen memberi bantuan itu dengan tujuan meng-kristen-kan para Tahanan Politik. Kami bisa memastikan bahwa hal itu tidak benar. Gereja-gereja memberi bantuan-bantuan itu atas dasar panggilan kemanusiaan.¹¹⁷

Diungkapkan pula:

Berkat seorang Pastor Belanda, Romo De Bleg [De Blot. ed.] begitu kami

117 Mia Bustam 2008: 123.

sering memanggilnya, aku bersama adik-adik berhasil keluar dari penjara. Aku baru beberapa bulan di penjara saat Romo itu datang ke penjara dan mengajak kami keluar dari penjara.¹¹⁸

Pelayanan pastoral memang merupakan program yang memperoleh dukungan dari pemerintah melalui Pusat Pembinaan Rohani Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bekerja sama Departemen Agama. Hal ini ditujukan untuk program rehabilitasi mental melalui Santiaji untuk membina Tahanan Politik yang dituduh atheis. Alih-alih, pelaksanaan program ini menurut beberapa Tahanan Politik lebih merupakan indoktrinasi dan pendisiplinan untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang mereka anut karena mereka yang sebelumnya tercatat beragama lain sebelum ditahan tidak serta merta bisa mengikuti kegiatan peribadatan agama yang berbeda.¹¹⁹

Para biarawan dan biarawati yang tercatat dalam ingatan eks-Tahanan Politik melakukan pelayanan keagamaan dan kegiatan kemanusiaan di Pulau Buru adalah Mgr. Andreas Sol MSC, Romo Roovink, Romo Mangunwijaya, Suster Cecilia, dan Suster Fransisca. Di Flores, seorang pastor di Paroki Bola, Yosef Frederikus da Lopez berusaha membebaskan 45 orang yang ditahan di markas tentara karena dicurigai sebagai anggota PKI. Pastor itu berusaha menemui komandannya dan menjaminkan dirinya untuk pembebasan mereka, tetapi hanya 10 orang yang berhasil diselamatkan.¹²⁰ Aktivitas kemanusiaan beberapa organisasi sosial Katolik bagi eks-Tahanan Politik 65 kemudian menyebar hingga di tingkat lingkungan paroki atau struktur terendah dalam hirarki Gereja.¹²¹

Pelayanan rohani dan aktivitas kemanusiaan oleh biarawan dan umat Katolik terhadap para Tahanan Politik dan keluarganya tidak

118 Abdullah Saleh, dkk. 2003: 77.

119 Sumarwan, 2007: 159-199; Nugroho: 2008:113-114.

120 Mujiburrahman, 2006:25.

121 Subanar, 2005:153.

serta merta berjalan tanpa kesulitan. Sejumlah Pastor konon ditahan oleh pihak militer karena aktivitas tersebut. Di Purwodadi (Jawa Tengah) misalnya, beberapa pengurus Paroki ditangkap, disiksa dan ditahan aparat setelah salah seorang pemuda dan pastor parokinya memberikan kesaksian kepada H.J.C. Princen, seorang penggiat Hak Azasi Manusia mengenai terjadinya pembantaian massal di daerah itu. Mereka ditangkap setelah hasil wawancara tersebut tersebar di media massa dan membuat pemerintah serta aparat setempat merasa disudutkan. Penangkapan tersebut rupanya merupakan usaha membungkam warga masyarakat agar tidak bercerita atas tindakan keji yang mereka saksikan. Hal itu terjadi bersamaan dengan undangan aparat pemerintah kepada para wartawan media cetak untuk berkeliling ke daerah itu demi menepis dan menghilangkan jejak kekejian seperti yang telah diceritakan oleh H.J.C. Princen. Konon, perjalanan rombongan wartawan yang disponsori oleh aparat ini lebih menyerupai perjalanan wisata karena orang dan tempat-tempat yang dikunjungi terkesan sudah dipersiapkan dengan baik untuk menjamu mereka, jauh dari cerita yang mereka dapatkan sebelumnya.¹²²

Sikap dan Tindakan Orang Katolik terhadap Tragedi '65

Ketegangan hubungan antar partai juga berpengaruh dalam kehidupan warga masyarakat, termasuk di kalangan umat Katolik. Situasi tersebut mengalami eskalasi pada tahun 1965. Antara lain, hari-hari

122 Mengenai usaha pembungkaman atas tragedi ini dan kegiatan para wartawan yang diajak melakukan perjalanan ke Purwodadi (Jawa Tengah) diuraikan oleh Maskun Iskandar dan Yoppie Lasut, "Peristiwa Pembantaian di Purwodadi" dalam *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Cribb ed.,2004). Terima kasih kepada Romo Baskara T. Wardaya, SJ yang memperbolehkan kami ikut mendengarkan hasil wawancara dengan sumber terpercaya menyangkut persoalan ini.

yang diwarnai berita akan adanya penyerangan di berbagai tempat.¹²³ Kendati sampai pada peristiwa tanggal 30 September 1965 situasi tegang tidak menentu, hal itu tidak dipahami sebagai saat yang sangat genting.¹²⁴

Sikap Gereja Katolik yang anti terhadap Komunis memberi pengaruh yang cukup kuat bagi para umatnya, baik secara individual maupun kelompok. Salah satu kelompok di kalangan orang Katolik yang sangat gencar menelanjangi dan melawan komunisme serta gerakannya adalah Biro Dokumentasi yang dipimpin oleh Pater Beek, SJ.¹²⁵ Biro Dokumentasi meski digagas dan direstui oleh pejabat Gereja, tetapi kedudukannya tidak berada di bawah hirarki Gereja secara langsung. Biro ini mengumpulkan berbagai dokumen sosial politik dan menganalisisnya yang kemudian didistribusikan dalam bentuk *newsletter*. Bahan-bahan tersebut ditujukan untuk memberikan informasi setidaknya kepada orang-orang Katolik yang menjadi politisi mengenai situasi sosial politik yang sedang panas dan tidak jelas arahnya pada waktu itu.

123 Djoko Pranoto: 2010.

124 Dalam catatan hariannya, Soe Hok Gie juga menggambarkan tentang situasi ketegangan pada masa-masa tersebut.

Berkali-kali anggota Pemuda Katolik harus berjaga-jaga menjaga sekretariat organisasinya, atau terlibat dalam penjagaan bangunan gereja. Tanggal 1 Oktober 1965, seorang anggota Pemuda Katolik dari Yogyakarta datang ke Jakarta dan terpaksa mengungsi ke mana-mana. Lihat narasi berjudul “Ada Skenario Besar” di bagian depan buku ini.

125 Sudarmanto, 2008:135-173. Biro dokumentasi adalah lembaga yang menyediakan bahan-bahan studi dan analisis berdasarkan tolok ukur ajaran dan moralitas Katolik agar dapat digunakan bagi para aktivis yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan maupun pengkajian di perguruan tinggi. Ide pembentukannya berasal dari provincial Serikat Yesus yang mempertimbangkan perlunya pusat pemikiran yang menyiarkan dokumen mengenai kebijakan pemerintah dan evaluasi mengenai kejadian-kejadian penting di Indonesia. Apalagi, pada tahun-tahun 1960-an, situasi sosial politik memanas akibat pertarungan haluan politik, nasionalis, agama, dan komunis.

Di antara analisis dan persoalan yang menjadi sorotan Biro Dokumentasi pada waktu itu terutama menyangkut persetujuan kelompok agama, nasionalis, dan PKI. Dalam hal ini Biro Dokumentasi menyediakan bahan-bahan analisis sebagai dukungan kepada para aktivis di Front Pancasila dan di Sekber Golkar yang bersitegang melawan Front Nasional dukungan PKI.¹²⁶ Meskipun Biro Dokumentasi ini hanya menyebarkan artikel dan analisis yang keputusannya diserahkan kepada pembaca, tetapi rupa-rupanya juga memiliki andil dalam membentuk opini serta memberi masukan bagi beberapa tokoh masyarakat dalam bersikap terhadap PKI. Cosmas Batubara dalam otobiografinya memberi catatan mengenai pentingnya Biro Dokumentasi dalam menghadang komunisme yang memungkinkan para mahasiswa Katolik melakukan persiapan di tengah ketegangan politik saat itu. Menurut Cosmas,

... Jasa Pater Beek, SJ sangat besar dalam mengembangkan sistem dokumentasi mengenai kegiatan komunis dan kegiatan kelompok nonkomunis dalam rangka melawan komunis itu. Dengan sistem dokumentasi yang dikembangkan Pater Beek kita mengetahui dengan jelas tema apa yang digunakan kelompok komunis untuk menggalang kekuatan. Dengan semakin siapnya kader-kader mahasiswa, kami juga mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Pertemuan kelompok Katolik dan kelompok Islam makin sering dilakukan menjelang peristiwa G30S/PKI.¹²⁷

Gerakan perlawanan yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis Katolik terhadap PKI berupa desakan moral untuk membubarkan partai itu dengan ikut membuat "Deklarasi Pendukung Pancasila, Piagam Kebulatan Tekad" pada 31 Desember 1965. Deklarasi ini dilakukan bersama dengan berbagai kelompok masyarakat, ormas

126 Contoh analisis Biro Dokumentasi terhadap gerakan komunisme dan pembunuhan para Jenderal AD dapat dilihat dalam Soedarmanto (2008:163-170).

127 *Via* Soedarmanto, 2008:161.

keagamaan dan partai politik yang bermusuhan dengan PKI. Embrio gerakan ini berawal dari sekelompok pelajar dan mahasiswa Muslim bersama Katolik yang dengan dukungan Pangdam Jaya Umar Wirahadikusuma mendirikan Kesatuan Aksi Pengganyangan (KAP) Kontra Revolusi Gestapu. Mereka menuntut pembubaran PKI serta menutup media yang mendukung Gestapu. Dalam aksinya, mereka menyerang kantor dan bangunan-bangunan PKI. Tanggal 25 Oktober 1965 pertemuan pimpinan KAP Gestapu sepakat membuat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang mewadahi mahasiswa Islam, Kristen, dan Katolik dalam demonstrasi massa. Pada bulan Januari 1966 KAP Gestapu berubah menjadi Garda Pancasila yang aktivitasnya lebih pada politik tingkat tinggi. Sementara itu, di berbagai daerah pembasmian PKI dan pengikutnya dilakukan oleh organisasi massa keagamaan dengan dukungan militer.

Tidak diketahui seberapa jauh para pemuda Katolik terlibat dalam kekerasan dan pengganyangan terhadap orang-orang yang dituduh PKI karena secara kelembagaan PMKRI dan Pemuda Katolik juga menyerukan pencegahan terhadap rasialisme dan provokasi dalam operasi pemulihan keamanan oleh pemerintah dan ABRI. Kendati demikian, sejumlah sumber yang tersebar menyebutkan bahwa ada orang-orang Katolik yang ambil bagian dalam pembantaian itu, terutama mereka yang tergabung dalam Garda Pancasila yang memperoleh latihan kemiliteran.

Di Tingkat Akar Rumput

Di saat saat genting itu, ada di antara orang-orang Katolik yang tidak menjadi anggota PKI ikut dijebloskan ke penjara karena memberi perlindungan kepada keluarga atau orang-orang yang sedang dikejar-kejar maupun salah tangkap. Beberapa dokumen mencatat

bahwa PKI memang tidak membatasi anggotanya secara eksklusif karena merupakan partai terbuka yang anggotanya juga berasal dari kalangan agama mana pun. Namun demikian, lawan-lawan politik PKI selalu berusaha menghubungkan partai itu dengan isu *atheisme* dan anti-agama. Paul Webb dan Steven Farram (2005) menguraikan mengenai pemeluk agama Katolik dan Kristen di Flores, Sumba, dan Timor yang tidak luput dari pengejaran dan kekerasan karena menjadi anggota PKI. Sementara itu, Hasan Raid (2001) dan Ahmadi Moestahal (2002) menceritakan pengalamannya sebagai orang Islam dan teman-temannya di dalam penjara yang menjadi anggota PKI karena persinggungan keberpihakannya pada kepentingan rakyat. Kedudukan PKI yang dicitrakan bertolak belakang dengan kelompok agama, bahkan anti agama cenderung dipolitisasi oleh kelompok agama dan militer untuk menghancurkan partai itu dan menghabisi pengikutnya.

Seperti telah disinggung di muka, meskipun di satu sisi Gereja Katolik melawan komunisme, di sisi lain lembaga Gereja ikut melancarkan kegiatan kemanusiaan bagi para korban dan keluarganya dengan mengutus tokoh umat dan pastor. Mereka tidak hanya mencegah atau menghindari kekerasan, melainkan juga menyantuni dan membantu mereka yang dipenjarakan serta keluarga mereka yang ditinggalkan. Peran dan sikap tokoh Gereja Katolik dalam aksi kemanusiaan ditengarai memperoleh simpati dari para korban dan mereka yang terpinggirkan. Sejumlah peneliti melihat implikasi hal tersebut dengan kecenderungan naiknya jumlah umat yang tercatat menerima pembaptisan pasca Tragedi '65.¹²⁸ Kendati demikian, ada indikasi bahwa pertumbuhan jumlah umat Katolik tidak serta merta berasal dari mereka yang menjadi korban Tragedi '65, melainkan

128 Spyer, 1995: 171 ; Nugroho, 2008.

juga berasal dari orang-orang yang sebelumnya mengikuti aliran kepercayaan lokal.¹²⁹ Mereka dipaksa memilih salah satu dari lima agama resmi yang ditentukan pemerintah melalui ketetapan MPRS 1966.

Kisah di berbagai daerah memperlihatkan keragaman orang untuk sampai pada pilihan menjadi Katolik yang berlangsung pada masa itu. Kerja keras dan ketekunan pastor dan para pengajar agama dalam melayani kebutuhan mereka berlangsung dalam perjumpaan yang manusiawi. Juga memberi harapan baru untuk perbaikan keadaan ekonomi keluarga. Dengarlah kesaksian berikut.

Delapan tahun setelah baprisanku, akhirnya doaku terkabul juga. Ya, pada tahun 1967 Bapak Yohanes Suhardi, putera daerah Gawan, dibaptis menjadi Katolik. Suatu hari Pak Hardi, panggilan akarabnya bercerita padaku tentang ketertarikan awalnya menjadi orang Katolik. Selain karena pernah mengenyam pendidikan di SMP Saverius Gawan, yang waktu itu memang sedang dalam masa keemasan, ia juga tertarik dengan pribadi Romo Wakkers, SJ. Kefasihannya Romo Wakkers berbahasa Jawa, bahkan yang krama inggil mencerminkan pandangan hidup Kristiani yang luar biasa. Tak ada sekat-sekat budaya, tak juga ke-landa-annya [ke-belanda-annya], yang mampu menghalanginya memperkenalkan kasih Kristus. Dan yang menarik, Pak Hardi juga bercerita tentang ballpoint Romo Wakers yang masih langka waktu itu. Dalam senda gurauannya Pak Hardi tak menolak kalau ada yang mengatakan imannya tumbuh dari ujung pena Rama Wakkers.¹³⁰

Atau kesaksian ini.

Ruslan Kocoatmojo tidak sekadar mengajar agama. Ia pun mengajak warga yang mulai mengenal Kristus itu membuat kolam ikan, koperasi, ternak ayam dan membuka poliklinik. Karena karya nyata tersebut memberi hasil konkret, warga yang semula pasif, pelan-pelan ikut menjadi Katekumen [calon baptis]. Ketika jumlah Katekumen sudah lebih dari 10 orang, Pak Lurah justru gelisah. Ia tidak mau menanggung segala akibat yang terjadi, jika jumlahnya semakin membengkak. Untunglah bahwa Dansek [Komandan Sektor-Militer, ed.] tetap mengizinkan. Pelajaran agama yang

129 Budi Subanar (2005: 150).

130 Lilik Andoko, dkk., 2007: 247.

biasa dilakukan pada hari Selasa malam Rabu itu pun semakin diminati warga masyarakat Ngaliyan.¹³¹

Beberapa kajian dan dokumen di atas memperlihatkan bahwa Tragedi '65 ikut menyeret orang-orang Katolik di dalam pusaran arus kekerasan yang didukung oleh aparat militer dan negara, baik sebagai korban maupun pelaku. Walaupun sikap Gereja di dalam hirarkinya lebih mengutamakan kemanusiaan yang memberikan perlindungan dan santunan kepada para korban, bukan berarti tidak ada orang-orang Katolik yang tidak ikut di dalam aksi kekerasan tersebut.

Penutup

Dari uraian di atas, secara jelas tampak bahwa kedudukan Gereja pada masa-masa itu berseberangan dengan ideologi Komunisme dan PKI dalam gelanggang politik nasional. Namun demikian, ketika pembantaian massal dan pengejaran terhadap anggota dan simpatisan partai itu berlangsung, Gereja melalui para pejabatnya berusaha mencegah jatuhnya korban jiwa, dan setidaknya keterlibatan orang Katolik di dalam kekerasan. Bahkan kemudian Gereja juga mendirikan yayasan-yayasan sosial yang menyantuni dan memberi pendampingan bagi para korbannya. Memang tidak dimungkiri bahwa terdapat orang-orang Katolik yang menjadi simpatisan PKI ikut terseret menjadi korban, tetapi sikap yang diambil Gereja bukan semata-mata karena alasan itu melainkan karena landasan atas prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih diutamakan. Sikap Gereja tersebut ditengarai membuat banyak para mantan Tahanan Politik minta dibaptis menjadi umat Katolik, baik sebagai bagian dari upaya mencari suaka politik maupun karena alasan spiritual.[]

131 Budi Sarjono, Daniel Tatag, 1997: 26.





*Generasi muda Indonesia siap memperjuangkan hari-hari
depan yang lebih jernih dan cemerlang (Ist.)*

Menyegarkan Ingatan

Sebuah Penutup

NARASI demi narasi telah kita ikuti dan simak bersama. Ada narasi yang berasal dari tuturan mereka yang menjadi *saksi* Tragedi '65, ada pula narasi yang bersumber dari mereka yang telah menjadi *korban* dari peristiwa dahsyat bersejarah tersebut. Telah kita simak pula laporan hasil penelitian dan ulasan mengenai sikap sebuah lembaga agama terhadap Tragedi '65. Sekarang tibalah kita pada penghujung buku ini.

Tetap Berpengaruh

Sebagaimana telah kita lihat di awal buku, biasanya suatu narasi sejarah tidak dibuat hanya demi dirinya sendiri, melainkan demi tujuan-tujuan tertentu. Termasuk di antara tujuan-tujuan itu adalah tujuan-tujuan sosial, politis, atau mungkin tujuan yang lain. Tidak mengherankan jika di mana pun di dunia ini hampir setiap kelompok masyarakat merasa terdorong untuk menyampaikan narasi sejarah masing-masing, dengan cara menceritakannya dari satu generasi ke generasi. Ada yang menceritakannya secara lisan, ada pula yang menyampaikannya secara tertulis.

Dengan menyimak apa yang dikatakan Paul Thompson kita juga telah melihat bagaimana sejarah itu penting karena sejarah dapat

menjadi salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memahami (*making sense*) apa yang bergerak di lingkungannya, baik itu yang bergerak secara sosial, ekonomi, politik maupun yang lain. Sekaligus kita melihat bahwa melalui sejarah masyarakat menjadi sadar bahwa terdapat kesinambungan antara apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang dan di masa-masa selanjutnya. Sebuah peristiwa sebagai sebuah peristiwa boleh saja “selesai” di masa lalu, namun dampak dan pengaruhnya akan terus mengalir ke masa-masa selanjutnya. Jika di balik, apa yang berlangsung sekarang ini (dan di masa depan) sangat erat kaitannya dengan apa yang telah terjadi di masa silam. Dengan kata lain, dengan memahami sejarah masyarakat menjadi terbantu untuk melihat realitas kehidupan sebagai suatu *continuum* atau kesinambungan tiada henti, bagaikan air yang terus mengalir. “*Ta panta rhei,*” dalam ungkapan Herakletos, filsuf Yunani asal Efesus itu. Semuanya mengalir...

Belajar Banyak

Berkaitan dengan Tragedi '65, dari narasi mereka yang telah menjadi *saksi* tetapi tidak menjadi korban atas peristiwa itu kita melihat bahwa peristiwa itu bisa dilihat dari berbagai perspektif dan kaya akan dimensi-dimensi kehidupan. Ada dimensi pertarungan di tingkat elite antara kelompok militer dan sipil; ada dimensi ketegangan sosial-ekonomi-religius; ada dimensi rekayasa dari atas yang mengubah relasi sosial yang relatif harmonis di tingkat bawah; ada dimensi keyakinan spiritual; tetapi ada pula dimensi persaingan ideologi-politik-ekonomi di tingkat internasional. Narasi-narasi itu membuat kita menjadi lebih kaya wawasan, kaya akan perspektif, sekaligus terdorong terus untuk semakin rajin melihat kehidupan dengan segala dimensinya. Belum lagi kalau narasi itu menyadarkan kita bahwa sebagai sebuah peristiwa

masa lalu Tragedi '65 boleh saja sudah “selesai”, tetapi dampak dan pola-polanya tetap berpengaruh pada kita hingga hari ini, baik pada tataran sosial maupun pada tataran individual.

Bagaimana Tragedi '65 itu dialami secara individual dan personal bisa kita simak dari narasi-narasi mereka yang waktu itu menjadi *korban* dari tragedi tersebut. Ada korban yang ditangkap dengan tuduhan berat padahal ia hanya seorang pemuda kampung usia 19 tahun; ada mahasiswi yang menjadi korban salah tangkap, dibebaskan secara resmi, namun kemudian ditangkap lagi; ada korban yang usianya baru 14 tahun tetapi hanya karena namanya sama ia ditangkap dan dipenjara selama 14 tahun; ada yang semasa mudanya berjuang demi kemerdekaan Indonesia, tetapi ditangkap dan disiksa habis-habisan sebelum akhirnya dibuang ke Pulau Buru; ada pula yang tidak dipenjara tetapi menderita seumur hidup hanya karena ayah dan suaminya adalah mantan Tahanan Politik. Narasi-narasi para korban ini menyadarkan kita bahwa dalam setiap narasi besar atau narasi resmi atas suatu peristiwa sejarah, ada banyak dimensi *real* dan personal yang tidak tertampung di dalamnya. Padahal dengan menekuni dimensi-dimensi *real* dan personal itu kita justru bisa belajar banyak tentang sejarah dan tentang kehidupan manusia itu sendiri.

Menyegarkan Kita

Bertolak dari dua kelompok narasi yang telah dibagikan dalam buku ini, berikut laporan penelitian atas sikap sebuah lembaga agama terhadap Tragedi '65, diharapkan bahwa kita akan menjadi lebih terbuka dan lebih diperkaya ketika melihat apa yang telah dilalui, dilakukan, dan dialami (bahkan diderita) oleh para warga bangsa ini pada pertengahan dekade 1960-an dan setelahnya. Tak cukup kiranya jika kita hanya mencoba melihat semua itu dari perspektif

narasi resmi para penguasa. Kita perlu melihat sejarah dari sebanyak mungkin perspektif, termasuk dari perspektif mereka yang selama ini telah dibungkam suaranya—atau memilih untuk bungkam seribu bahasa. Dikatakan oleh Ronnie Hatley pada pengantar buku ini, “suatu pemahaman sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan suatu masyarakat atau bangsa.”

Lebih dari itu, apa yang telah kita ikuti tadi adalah narasi-narasi yang berasal dari “orang lain”, yakni dari para narasumber kita. Yang tidak kalah penting sekarang ini adalah narasi yang datang *dari kita sendiri*. Jika di muka para narasumber telah menyampaikan narasi mereka dengan berbagai perspektif masing-masing, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan narasi kita sendiri, menurut perspektif kita sendiri-sendiri. Jika di muka para narasumber telah menunjukkan diri di mana mereka “berdiri” ketika Tragedi ‘65 itu berlangsung, kini tiba pula saatnya bagi kita untuk menunjukkan diri di mana *kita sendiri* “berdiri” ketika harus melihat kembali tragedi tersebut. Selanjutnya kita juga perlu bertanya pada diri sendiri: di tengah arus sejarah Indonesia yang terus bergerak selama ini sebenarnya di mana kita berdiri? Di mana Anda berdiri?

Apa pun jawabnya, biarlah suara dan narasi-narasi di balik prahara politik-kemanusiaan Tragedi ‘65 yang datang dari berbagai perspektif itu menyegarkan ingatan kita akan apa yang terjadi pada waktu itu dan setelahnya. Dengan begitu, sekali lagi semoga kita akan menjadi lebih bersemangat dan lebih dewasa dalam memperjuangkan hari-hari depan bersama yang lebih cemerlang. []

DAFTAR ACUAN

- Anderson, Benedict R'OG and Ruth McVey. 1971. *A Preliminary Analysis of the October 1,1965, Coup in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University.
- Andoko, Lilik dkk. 2007. *Pesta Emas Paroki Sragen. Angupados Toya. Menelusuri Peziarahan Iman Umat Paroki Sragen*. Sragen: Panitia Pesta Emas Paroki Sragen.
- Bustam, Mia. 2008. *Dari Kamp ke Kamp. Cerita Seorang Perempuan*. Jakarta: Spasi &VHRBook.
- Chapman, Audrey. 2001. "Conceptions of National or Political Reconciliation" dalam Raymond G. Helmick, SJ and Rodney L Petersen. *Forgiveness and Reconciliation: Religion, Public Policy and Conflict Transformation*.
- Cribb, Robert (Ed.). 2004. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Terj. Yogyakarta: Matabangsa.
- Fic, Victor M. 2005. *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan. 2007. *Kejahatan Berbasis Jender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Krisnadi, I.G. 2001. *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979*. Jakarta: LP3ES.

- LaCapra, Dominick. 2001. *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Latief, A. 2000. *Pledoi A. Latief: Soeharto Terlibat G30S*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Passerini, Luisa (Ed.). 1992. *Memory and Totalitarianism*. Oxford: Oxford University Press.
- Maskun Iskandar dan Yoppie Lasut. 2004. "Peristiwa Pembantaian di Purwodadi" dalam Robert Cribb (Ed.). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Terj. Yogyakarta: Matabangsa.
- McGregor, Katharine. 2007. *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Mohammad, Samsir. 2005. "Memahami Gerakan Sosial Masa Lalu dan Masa Kini" (Prosiding Workshop Yogyakarta 28 September-1 Oktober 2005), tidak diterbitkan.
- _____. 2007. *Angin Burangrang: Sajak-sajak Petani Tua*. Bandung: Ultimus.
- Mujiburrahman. 2006. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Nadia, Ita F. 2009. *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*. Yogyakarta: Galangpress.
- Nugroho, Singgih. 2008. *Menyintas dan Menyeberang: Perpindahan Massal Keagamaan Pasca 1965 di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Syarikat.
- Panitia Penulisan. 1980. *I.J. Kasimo*. Jakarta: Kompas dan Gramedia.
- Pranoto, Richardus Djoko; Rufinus Lahur; F.X. Soedjoed. 2010. *Memoar Alumni Pemuda Katolik*. Jakarta: Obor.

- Robinson, Geoffrey. 1995. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- _____. Ayu Ratih dan Hilmar Farid (Ed.). 2004. *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban '65, Esai-esai Sejarah Lisan*. Jakarta: Elsam.
- Saleh, Abdullah, dkk. 2003. *Usaha untuk Tetap Mengenang. Kisah-kisah Anak-anak Korban Peristiwa '65*. Yogyakarta: Jendela Budaya.
- Sarjono, Budi dan Daniel Tatag (Ed.). 1997. *Pesta Air di Kaki Pelangi. Refleksi Karya Pastoral Paroki*. Yogyakarta: Panitia HUT-70 Gereja Sukorejo.
- Sasongko, HD. Haryo dan Melani Budianta. 2003. *Menembus Tirai Asap Kesaksian Tabanan Politik 1965*. Jakarta: Amanah-Lontar.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setiawan, Hersri. 2003. *Aku Eks Tabanan Politik*. Yogyakarta: Galangpress.
- _____. 2006. *Kidung Para Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol*. Yogyakarta: Pakorba and Pustaka Pelajar.
- Siwirini, Sumiyarsi. 2010. *Plantungan: Pembuangan Tapol Perempuan*. Yogyakarta: PUSdEP dan IHJR.
- Soedarmanto, J.B. 2008. *Pater Beek SJ: Larut Tetapi tidak Hanyut*. Jakarta: Obor.

- Subanar, G. Budi. 2005. *Menuju Gereja Mandiri. Sejarah Keuskupan Agung Semarang di Bawah Dua Uskup (1940-1981)*. Yogyakarta: Penerbit USD.
- Suryawan, I Ngruh. 2007. *Ladang Hitam di Pulau Dewa*. Yogyakarta: PUSDEP dan Galangpress.
- Suwarno SH, P.J. 2009. *Rajawali Kemusuk Menjelajah Nusantara* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press.
- Sumarwan. 2007. *Menyeberangi Sungai Airmata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Swantoro, P. 2007. *Masa Lalu Selalu Aktual*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Thompson, Paul. 2000. *The Voice of the Past: Oral History*. New York: Oxford University Press.
- Turner, Graeme. 1992. *British Cultural Studies: An Introduction*. London and New York: Routledge.
- Wardaya, Baskara T. 2007. *Cold War Shadow: United States Policy Toward Indoensia, 1953-1963*. Yogyakarta: Galangpress.
- _____. 2009. *Bung Karno Menggugat: Dari CIA, Pembantaian Masal, hingga G30S*. Cet. Ketujuh. Yogyakarta: Galangpress.
- _____. 2008. *Mencari Supriyadi: Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno*. Yogyakarta: Galangpress.
- Webb, Paul R.A.F. dan Steven Farram. 2005. *Di-PKI-kan: Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Weiringa, Saskia E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress.

Film Dokumenter:

Lemelson, Robert. *40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy*. (film dokumenter, Elemental Productions, USA, 2009). Lihat <http://www.40yearsofsilence.com/>

Sukanta, Putu Oka. *Perempuan Yang Tertuduh* (Jakarta: 2007, film dokumenter).

Narasumber (Nama Samaran):

Agatha Sumarni

Agung Priyambodo

Al Capone

Arif Uun

Asnawi

B. Ninik S. Rahayu

Budhi Kho

Ch. Mujilah

F.X. Abdul Rochim

M.M. Sutini

Rahardjo

Samsul Ahmad

Sofyan Djaenuri

Suherjanto

Yong Witono

DAFTAR SINGKATAN

ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

AD: Angkatan Darat

AKABRI: Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

APRIS: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

Baperki: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia

BAPRERU: Badan Pelaksana *Resettlement* dan Rehabilitasi Buru

Berdikari: Berdiri di Atas Kaki Sendiri

BMT: Baitul Mal wa Tamwil

BKR: Badan Keamanan Rakyat

BTI: Barisan Tani Indonesia

CGMI: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia

CHTH: Cung Hua Tjung Hwee

CIA: Central Intelligence Agency (AS)

Conefo: *Conference of the New Emerging Forces*

CPM: Corps Polisi Militer

DanJaga: Komandan Penjaga

DanKam: Komandan Kamp

DanTon: Komandan Peleton

DanUnit: Komandan Unit

Dekon : Demokrasi Ekonomi

Baskara T. Wardaya, SJ

DI/TII: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

DIY: Daerah Istimewa Yogyakarta

EATWOT: Ecumenical Association of the Third World Theologian

ET: Eks Tahanan Politik

Ganefo: *Games of the New Emerging Forces*

GERMINDO: Gerakan Mahasiswa Indonesia

Gerwani: Gerakan Wanita Indonesia

Gestapu: Gerakan September Tiga Puluh

Gestok: Gerakan Satu Oktober

GMKI: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

GMNI: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

GSNI: Gerakan Siswa Nasional Indonesia

G30S: Gerakan 30 September

HMI: Himpunan Mahasiswa Islam

HSI: Himpunan Sarjana Indonesia

IKIP: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

IPPI: Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia

KampSus: Kamp Khusus

KAMI: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia

KAP Gestapu: Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu

KAPPI: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia

KASREM: Kepala Staf Resort Militer

KKIT: Kerabat Kerja Ibu Teresa

KKPI: Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia

KMB: Konferensi Meja Bundar

KMK: Keamanan Militer Kota

KNIL: Het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger/Tentara Kerajaan Hindia-Belanda.

KODAM: Komando Daerah Militer

Kodim: Komando Distrik Militer

KOGAM: Komando Ganyang Malaysia

Komdak: Komando Daerah Kepolisian

Komnas: Komisi Nasional

KONI: Komite Olahraga Nasional Indonesia

KOPKAMTIB: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Koramil: Komando Rayon Militer

KOREM: Komando Resort Militer

KOSTRAD: Komando Strategis Angkatan Darat

KOTI : Komando Operasi Tertinggi

KTP: Kartu Tanda Penduduk

Lekra: Lembaga Kebudayaan Rakyat

Letkol: Letnan Kolonel

LPKB: Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

Madilog : Materialisme, Dialektika, Logika

Manikebu : Manifes/Manifesto Kebudayaan

MANIPOL / USDEK: Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia

MDH: Materialisme, Dialektika, Histori

Monas: Monumen Nasional MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPRS: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Murba: Musyawarah Rakyat Banyak

NA: Nasyyiatul Aisyiyah

Nasakom: Nasionalis, Agama, Komunis

Nekolim: Neo-Kolonialisme dan Neo- Imperialisme

NRP: Nomor Registrasi Personil

Ormas: Organisasi Masyarakat

Orpol: Organisasi Politik

PANGAD: Panglima Angkatan Darat

PANGDAM: Panglima Komando Daerah Militer

PANGKOSTRAD: Panglima Komando Strategis Angkatan Darat

Pangkopkamtib: Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pangti: Panglima Tertinggi

Partindo: Partai Indonesia

PBB: Perserikatan Bangsa-bangsa

PEPERTI: Penguasa Perang Tertinggi

PERHIMI: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Tionghoa)

PETA: Pasukan Pembela Tanah Air

PKC: Partai Komunis China

PKI: Partai Komunis Indonesia

PKU: Pusat Kesehatan Umat (milik Muhammadiyah)

PMII: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

PMKRI: Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia

PNI: Partai Nasional Indonesia

PNS: Pegawai Negeri Sipil

PSI: Partai Sosialis Indonesia

PUSdEP: Pusat Sejarah dan Etika Politik

Pusroh: Pusat Rohani

P2KP: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Re-Ra: Reorganisasi dan Rasionalisasi (tentara)

RI: Republik Indonesia

RIS: Republik Indonesia Serikat

RPKAD: Resimen Para-Komando Angkatan Darat

RRI: Radio Republik Indonesia

RTI: Rukun Tani Indonesia

SAKTI: Serikat Kaum Tani Indonesia

SARBUPRI: Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia

Satgaswal: Satuan Tugas Pengawal

SIT: Surat Izin Terbit

Supersemar: Surat Perintah Sebelas Maret

Tapol: Tahanan Politik

Tefaaf: Tempat Pemanfaatan

TNH: Tjing Nien Hwee

TNI: Tentara Nasional Indonesia

Tohpol: Tokoh Politik

TRI: Tentara Republik Indonesia

UGM: Universitas Gadjah Mada

UI: Universitas Indonesia

UUBH: Undang-undang Bagi Hasil

UUPA: Undang-undang Pokok Agraria

USD: Universitas Sanata Dharma

WaDanKampus: Wakil Komandan Kamp Khusus

Waperdam: Wakil Perdana Menteri

WFTL: World Forum on Theology and Liberation

WKRI: Wanita Katolik Republik Indonesia

WSF: World Social Forum

INDEKS

A

Abangan 137

Abdoel Moeis 186

Abdul Latief, Kolonel 31, 32,
274

Abdul Rochim, F.X. 295, 377

ABRI 97, 126, 127, 130, 358,
362, 379

Adam Malik 188

Agatha Sumarni 40, 331, 377

Agung Priyambodo 121, 123,
377

Aidit, DN 93, 206, 211, 212,
214

Aisyiah 108, 114

Aksi Sepihak 93

Al Capone 1, 41, 221, 222, 252,
377

Ali Sastroamidjojo 131, 176, 273

Amerika Serikat 7, 61, 78, 138,
139, 140, 155

Amir Machmud 89, 211

Amnesty International 337, 338

Anderson, Benedict 77, 373

Angkatan Bersenjata 32, 82, 126,
358, 379, 385

Angkatan Darat 64, 65, 77, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 149, 166, 168, 224, 230,
233, 274, 354, 379, 381,
382, 383

Angkatan Laut 82, 160

Angkatan Udara 82, 83, 91, 175

Arif Uun 143, 144, 377

Asia Tenggara 92

Asnawi 102, 111, 112, 377

Austria 44, 51

B

Bandung 145, 169, 183, 191,
210, 213, 214, 274, 357,
374

Banteng Raiders 76, 83

- Bali 33, 34, 345, 359, 373, 374, 375
- BAPRERU 231, 232, 261, 379
- Basuki Rachmat 89
- Batubara, Cosmas 361
- Beek SJ, Pater 360, 361, 375
- BKR 77, 78, 185, 379
- Belanda 44, 66, 77, 82, 145, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 202, 203, 213, 222, 256, 274, 329, 337, 348, 357, 381
- Bengawan Solo 280, 284
- Berdikari 74, 379
- Berita Indonesia* 70
- Bethesda, (Rumah Sakit) 146, 149, 150, 151
- Bintang Timoer* 70
- Biro Dokumentasi 360, 361
- Bogor 89, 90, 357
- BTI 73, 159, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 379
- Budha 136, 137, 356
- Budhi Kho 269, 270, 271, 377
- Budianta, Melani 36, 40, 290, 375
- Bung Karno (lihat *Sukarno*) 61, 64, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 105, 122, 124, 125, 126, 132, 134, 135, 138, 139, 141, 146, 157, 158, 168, 188, 189, 196, 212, 269, 272, 274, 275, 335, 354, 376
- Buru, Pulau 4, 41, 59, 64, 82, 86, 100, 106, 129, 151, 176, 178, 183, 184, 217, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 241, 242, 221, 242, 241, 244, 245, 246, 247, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 267, 269, 273, 277, 279, 284, 299, 301, 302, 304, 323, 336, 349, 357, 358, 371, 373, 379
- Bustam, Mia 357, 373
- C**
- Carri SJ, Pater 355, 357, 360, 361, 375
- Chaerul Saleh 185, 186, 188, 189, 195, 205, 208, 209, 211

- Chapman, Audrey 10, 11, 12, 373
- China 69, 78, 93, 94, 271, 281, 282, 382
- CGMI 67, 68, 69, 158, 210, 379
- CHTH 130, 143, 148, 274, 379
- CIA 274, 376, 379
- Conefo 139, 379
- Coup d'etat* 84
- Cribb, Robert 33, 359, 373, 374
- D**
- Dalang 41, 166, 213
- da Lopez, Yosef Frederikus 358
- De Blot, Romo 164, 256, 313, 357
- Den Haag 44, 195
- Dewan Jenderal 100, 104, 160, 212
- Dharma Wanita 167
- DI/TII 193, 380
- Demokrasi Ekonomi 71, 379
- Demokrasi Liberal 72
- Duta Masyarakat* 30
- E**
- ET (Eks-Tapol) 31, 60, 101, 106, 112, 167, 304, 349, 380
- Etika Politik 43, 51, 141, 323, 382
- Etika Publik 44
- F**
- Fachruddin, AR 118
- Farram, Steven 353, 363, 376
- Fasisme 187, 203
- Front Nasional 361
- Fulbright 51
- G**
- Ganefo 139, 380
- Ganyang Malaysia 87
- Gerakan Wanita Indonesia 29, 47, 100, 114, 159, 175, 177, 333, 380
- Gerakan 30 September 74, 82, 87, 91, 92, 138, 274, 348, 375, 380
- Gereja Katolik 46, 153, 154, 158, 165, 313, 347, 352, 353, 355, 356, 357, 360, 363
- Gerilya Politik 64, 85, 86, 221, 334

GERMINDO 69, 380

Gestapu 105, 113, 115, 362,
380

Gestok 126, 149, 211, 213, 230,
380

Gerwani 30, 31, 105, 106,
114, 158, 159, 162, 163,
164, 167, 333, 380

Globalisasi 43

GMKI 67, 69, 380

GMNI 67, 68, 69, 380

GSNI 121, 123, 380

Gus Dur 13

G30S 32, 74, 75, 94, 101, 102,
105, 106, 115, 126, 148,
157, 158, 223, 274, 302,
348, 361, 374, 376, 380

H

Halim Perdanakusuma 29, 34,
84, 175, 178, 388

HAM 13, 14, 16, 23, 24, 25,
117

Hamka 70

Harian Rakyat 70, 72, 73, 240

Hatley, Ronnie 7, 24, 53, 372

Hatta, Mohammad 106, 188

Herakletos 370

Hitler, Adolf 124, 129, 213

Hizbullah 99, 101, 102

HMI 67, 68, 69, 380

HSI 158, 380

I

IHJR Israel-Palestina 44, 45, 51,
336, 375

Imperialis 335, 382

India 15, 78

Ingatan 21, 23, 26, 56, 222, 358,
369, 372

Inggris 190, 337, 340

Istana Bogor 89, 90

J

Jakarta 4, 14, 17, 30, 32, 33, 34,
36, 43, 63, 64, 65, 66, 68,
69, 73, 75, 83, 94, 113, 116,
122, 125, 127, 138, 160,
161, 162, 175, 176, 177,
178, 183, 185, 187, 188,
189, 192, 196, 199, 202,
204, 211, 213, 214, 239,
240, 242, 247, 251, 252,
254, 255, 257, 269, 272,
273, 290, 311, 312, 321,

- 357, 360, 373, 374, 375, 376, 377
- Jawa Tengah 33, 34, 40, 41, 82, 112, 143, 145, 162, 192, 193, 202, 221, 229, 240, 250, 259, 269, 270, 279, 295, 296, 301, 303, 311, 331, 336, 345, 352, 359
- Jawa Timur 33, 34, 63, 66, 94, 96, 185, 187, 202, 209, 247, 249, 251, 259, 345
- Jepang 33, 34, 63, 66, 94, 96, 185, 187, 202, 203, 209, 247, 249, 251, 257, 259, 275, 337, 345
- Jerman 197, 256, 263, 33
- Jombang 66, 254
- K**
- Kabir 153, 158
- Kabinet Kaki Empat 354
- KAMI 131, 163, 362, 380
- KAP Gestapu 362, 380
- KAPPI 131, 163, 380
- Kapitalisme 119
- Kasimo, I.J. 153, 154, 158, 160, 161, 354, 374
- Katamso, Kol. 77, 83, 161
- Katolik 38, 45, 46, 52, 56, 67, 137, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 313, 331, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 374, 383, 387, 389
- Keadilan 12, 72, 156, 157, 171, 218
- Kebenaran 10, 12, 218, 349
- Kejawen 38, 45, 52, 55, 121, 122, 123, 133, 13
- Kentungan 83, 127, 16
- Keuskupan Agung Semarang 347, 351, 352, 353, 355, 357, 376
- Ki Hajar Dewantara 186
- Klaten 125, 162, 250, 251
- KMB 72, 195, 196, 380
- KNIL 82, 194, 195, 381
- KODIM 223, 228, 283, 381
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 10
- Komnas Perempuan 14, 30, 36, 156, 373

- Komunis 29, 34, 47, 59, 60, 64, 65, 70, 72, 73, 91, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 121, 122, 124, 125, 130, 144, 154, 158, 192, 213, 282, 301, 311, 345, 347, 348, 349, 360, 375, 382
- Konferensi Colombo 75
- Konfrontasi 74, 111, 143, 145
- Konghucu 143
- KOPKAMTIB 87, 88, 381
- Korban 1, 14, 30, 36, 162, 175, 176, 177, 179, 208, 223, 248, 373, 374, 375
- KOSTRAD 82, 83, 126, 233, 284, 381
- Kotagede 39, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 117
- KOTI 87, 88, 381
- Kristiani 45, 52, 136, 148, 364
- L**
- Lekra 70, 73, 114, 116, 128, 129, 381
- Lembaga Kebudayaan Rakyat 70, 114, 128, 381
- Lemelson, Robert 310, 323, 377
- Linggajati 190, 191
- Lubang Buaya 30, 177
- LPKB 274, 275, 381
- M**
- Madiun 76, 102, 103, 389
- Malang 56, 63, 66, 94, 247, 251, 252, 253, 289, 295, 357
- Malari 167
- Malaysia 74, 78, 87, 88, 381, 387
- Mangunwijaya, YB 358
- MANIPOL USDEK 272
- Mao Tze-tung 73, 93
- Maulwi Saelan 90
- Marhaenis 70, 135
- Marhaenisme 70
- Marxis 71
- Masjid Mataram 117
- McGregor, Katharine 77, 374
- Merdeka* (koran) 70, 73, 188, 343
- Militerisme 166
- Monas 63, 66, 381
- Monotheis 112, 119

MPRS 90, 91, 178, 183, 205,
211, 213, 356, 364, 381

Muhammadiyah 52, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118,
382

Muijsenbergh, Catherine 51

Mujilah 40, 289, 290, 295, 377

Murba 70, 73, 74, 199, 381

Muslim 38, 45, 52, 55, 67, 99,
109, 111, 123, 362, 374

Musso 186

M. Jusuf 89

N

Nasakom 60, 64, 71, 72, 84, 154,
382

Nasionalis 72, 85, 121, 123, 124,
154, 158, 159, 163, 382

Nekolim 382

Neo-kolonialis 142, 335, 382

New York 20, 155, 311, 376

Nietzsche 72

Ninik S. Rahayu 153, 154, 377

Njoto 73, 211, 212

Nugroho Notosusanto 96

Nusa Kambangan 41, 129, 130,
176, 184, 217, 221, 229,
230, 231, 233, 295, 296,
301, 303, 304, 311, 323

O

Oei Tjoe Tat 272

Orde Baru 6, 26, 27, 29, 31, 35,
39, 43, 96, 117, 122, 125,
140, 154, 167, 170, 175,
179, 184, 217, 218, 223,
226, 228, 230, 231, 275,
348, 349

Organisasi Pemuda Kristen 146

Omar Dhani 84, 91, 92

Onghokham 96

P

Pancasila 84, 124, 135, 141, 273,
355, 361, 362

Pandjaitan, D.I. 274

PANGAD 83, 382

PANGDAM 83, 246, 262, 362,
382

Pangkopkamtib 232, 382

PANGKOSTRAD 32, 83, 382

Pak Karno 71, 72, 75, 77, 84, 85,
86, 87, 89, 90, 97

- Pakistan 78
- Pangestu 137
- Panti Rapih, RS 313
- Paris 44, 51
- Partindo 70, 382
- Passerini, Luisa 25, 26, 27, 374,
- Patriotisme 135
- PBB 14, 139, 382
- Pemilu 205, 206
- Pemuda Ansor 159
- Pemuda Katolik 156, 157, 159,
160, 162, 163, 164, 360,
362, 374
- Pemuda Muhammadiyah 99,
100, 103, 111, 113, 114
- Pemuda Rakyat 60, 99, 100, 103,
105, 106, 111, 114, 121,
123, 124, 128, 130, 131,
151, 159, 162, 301, 303
- Penataran P4 273
- Pengakuan 9, 10, 11, 13, 14,
269
- Prancis 71, 337
- Perang Dingin 33, 61
- PERHIMI 67, 69, 382
- Peristiwa Madiun 1948 76
- PETA 76, 382
- PETANI 209
- PKC 93, 382
- PKI 29, 30, 31, 33, 64, 70, 71,
72, 73, 74, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 89, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 102, 103, 104,
105, 106, 108, 109, 114,
115, 116, 117, 123, 125,
127, 128, 130, 136, 137,
148, 150, 151, 152, 161,
162, 163, 164, 165, 166,
167, 192, 199, 203, 204,
205, 206, 207, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 228,
273, 275, 282, 285, 311,
312, 348, 349, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358,
359, 361, 362, 363, 365,
373, 374, 376, 382
- PKK 167
- Plantungan 177, 291, 296, 331,
332, 336, 337, 375
- Poros Jakarta-Pnompenh-Peking
122, 138
- PPI 143, 148
- Prambanan 40, 125, 165, 258,
289, 290, 326

- Pramoedya Ananta Toer 70, 240, 241, 248, 252, 299
- Princen, HJC Purwodadi 359
- Progresif Revolusioner 65, 94, 95
- Proletar 91, 92, 94
- PSMTI 272
- Pulau Buru 4, 41, 59, 64, 82, 86, 100, 106, 129, 151, 176, 178, 183, 184, 217, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 241, 242, 244, 221, 244, 242, 244, 245, 246, 247, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 267, 269, 273, 277, 279, 284, 299, 301, 302, 304, 323, 336, 349, 357, 358, 371, 373, 386
- PUSdEP 4, 7, 16, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 123, 144, 154, 184, 270, 280, 323, 336, 348, 352, 375, 382
- Putu Oka Sukanta 332
- P2KP 292, 297, 305, 382
- R**
- Rahmawati Soekarnoputri 135
- Ranah Minang 185
- Rekonsiliasi 9, 10, 11, 12, 13, 43, 218, 350, 351, 352, 389
- Renville 192, 193, 207
- Re-Ra 193, 194, 383
- Restorative Justice 12
- RIS 195, 383
- Roosa, John 33, 36, 37, 91, 349, 375
- Roovink, Romo 256, 358
- RPKAD 84, 149, 224, 233, 383
- RRI 82, 160, 210, 383
- Rusia 119, 337
- Ryback, Timothy 51
- Ryback, Marie-Louise 51
- S**
- Sajuti Melik 70, 73
- Saksi 1, 5
- SAKTI 183, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 383
- Salzburg 44, 51
- Samsul Ahmad 183, 184, 185, 187, 191, 198, 201, 203, 377
- Sarajevo 311

- Sarwo Edhi Wibowo, Kol. 126, 224
- Sasongko, Haryo HD 36, 40, 290, 349, 375
- Sasono Hinggil 128
- Satgaswal 242, 250, 258, 260, 261, 262, 383
- Seda, Frans 160, 161, 354
- Sejarah Lisan 18, 19, 20, 21, 22, 28, 36, 352, 375
- Sekber Golkar 361
- Semaun 186
- Serbia-Bosnia 45
- Serikat Buruh Kesehatan 164
- Shared Narratives 43, 44, 46
- SIT 74, 383
- Slamet Riyadi, Brigjen 76
- Soegijapranata, Mgr. 354
- Sukarno, Presiden (lihat Bung Karno) 34, 47, 54, 59, 64, 71, 72, 73, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 121, 127, 132, 135, 139, 140, 153, 157, 176, 177, 186, 189, 196, 205, 209, 213, 249, 254, 353
- Sukarnoisme 70, 73, 74
- Sukarno 71, 89, 92
- Soepardjo, Brigadir Jenderal 31
- Sofyan Djaenuri 1, 63, 65, 66, 377
- Sol MSC, Andreas 358
- Sosialisme 72, 272, 381
- Sudisman 93
- Sugijono, Kol. 76, 77, 161
- Suherjanto 99, 100, 101, 111, 377
- Suluh Indonesia 70, 73, 74
- Sultan Hamengku Buwono IX 131
- Sungai Brantas 96
- Supersemar 88, 89, 90, 92, 383
- Surabaya 254, 255, 264, 274, 357
- Survivors 5, 11, 13, 14, 15, 16, 39, 123, 179
- Sutini, M.M. 309, 310, 377
- Syahrir 186, 190
- T**
- Tahanan Politik 31, 36, 37, 59, 60, 64, 101, 112, 167, 176, 177, 178, 221, 222, 225, 238, 267, 269, 277, 279,

- 285, 289, 290, 309, 310, 332, 334, 349, 350, 351, 357, 358, 365, 371, 373, 375, 380, 383
- Tan Malaka 31, 36, 56, 109, 181, 219, 221, 225, 226, 230, 233, 262, 273, 285, 287, 293, 299, 304, 305, 307, 309, 314, 323, 329, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 349, 375, 383, 387
- Tapol 31, 36, 56, 109, 181, 219, 221, 225, 226, 230, 233, 262, 273, 285, 287, 293, 299, 304, 305, 307, 309, 314, 323, 329, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 349, 375, 383, 387
- Tentara Revolusi 64, 77, 78, 96, 97, 98
- Thompson, Paul 17, 19, 369, 376
- Tionghoa 38, 45, 52, 55, 67, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 176, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 382
- TNI 77, 97, 185, 189, 192, 194, 196, 233, 383
- Totaliter 19, 20, 26, 27
- Tragedi '65 1, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 61, 63, 99, 112, 121, 125, 131, 138, 143, 145, 151, 153, 173, 183, 231, 309, 322, 323, 332, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 359, 363, 365, 371, 372
- TRI 185, 383
- Turki-Armenia 45
- Tefaat 232, 260, 261, 283
- Tragedi Kemanusiaan 15, 29, 36, 38, 47, 132, 346
- U**
- UGM 66, 67, 111, 113, 123, 144, 155, 157, 383
- UI 69, 272, 383
- Umar Wirahadikusumah 89
- Uni Soviet 78, 79, 214
- Universitas Gadjah Mada 63, 66, 75, 111, 113, 123, 144, 153, 155, 270, 280, 383

Universitas Indonesia 33, 63, 69,

74, 96, 185, 383

Universitas Radbod 348

Universitas Sanata Dharma 4, 43,

51, 53, 75, 101, 112, 144,

155, 156, 270, 280, 323,

348, 383

University of California 310, 323

Untung, Letkol 64, 65, 76, 77,

79, 81, 82, 83, 84, 96, 100,

105, 148, 212, 213, 274

USD 156, 376, 383, 395

UUBH 72, 209, 383

UUPA 72, 209, 383

V

Vredeburg, Benteng 127, 223,

224

W

Waperdam 208, 209, 383

Wakers, Romo 364

Webb, Paul 353, 363, 376

Wirogunan 40, 177, 224, 225,

229, 290, 311

WKRI 157, 159, 383

Wonosari 129

Y

Yesus Kristus 171

Yogyakarta 4, 7, 30, 33, 36, 39,

40, 43, 51, 56, 60, 63, 66,

67, 68, 75, 77, 83, 99, 101,

102, 111, 112, 113, 114,

121, 123, 125, 126, 127,

128, 130, 135, 143, 144,

145, 146, 148, 151, 153,

155, 156, 158, 161, 164,

165, 175, 176, 177, 178,

187, 192, 193, 200, 207,

221, 222, 223, 224, 225,

227, 228, 230, 239, 249,

250, 251, 252, 253, 258,

259, 270, 271, 272, 273,

274, 275, 280, 289, 290,

292, 295, 296, 301, 302,

311, 312, 313, 315, 323,

326, 331, 332, 333, 336,

346, 347, 348, 350, 352,

357, 360, 373, 374, 375,

376, 380, 397

Yong Witono 279, 280, 309,

377

Yunani 370

TENTANG PENULIS



Menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara tahun 1986, **Dr. Baskara T. Wardaya, SJ** melanjutkan belajarnya di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, AS dari tahun 1993 hingga 2001. Dari universitas tersebut, ia memperoleh gelar Master (1995) dan Doktor (2001), keduanya di bidang Sejarah. Tahun 2004-2005, ia menerima beasiswa Fulbright untuk melakukan penelitian post-doctoral di University of

Wisconsin-Madison dan di Lyndon B. Johnson Library di Austin, Texas, Amerika Serikat.

Kini ia mengajar di Universitas Sanata Dharma (USD), di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, serta menjadi konsultan untuk Jesuit Refugee Service (JRS) Asia-Pasifik di Bangkok, Thailand. Ia juga bekerja sebagai Direktur PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) USD, tahun 2004-2011. Pada tahun 2011-2012 ia menerima beasiswa sebagai Fulbright Scholar in Residence untuk mengajar Sejarah di University of California, Riverside, AS.

Karya-karya publikasinya antara lain: *Indonesia dan Masalah-masalah Pembangunan* (1986, co-editor); *Spiritualitas Pembebasan* (1995); *Mencari Demokrasi* (1999, editor); *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (2001, editor); *Marx Muda: Marxisme Berwajah Manusiawi* (2003); *Pembebasan Manusia: Sebuah Refleksi Multidimensional* (2004, editor); *Bung Karno Menggugat: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S* (2006); *Chicago, Chicago: Cinta, Politik, dan Kemanusiaan di Negeri Paman Sam* (2006); *Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963* (2007); *Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno* (2007); *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto* (2007, co-editor); *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia* (2007, editor); *Sejarah yang Memihak: Mengenang Sartono Kartodirdjo* (2008, co-editor); *Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin, 1953-1963* (2008); *Mencari Supriyadi: Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno* (2008); *Berkah Kehidupan: 32 Kisah Inspiratif tentang Orangtua* (2011).

Ia juga menulis untuk media massa, jurnal, dan buku-buku kumpulan tulisan. Email: baskaramu@yahoo.com []